8 Year Plan

Ringkasan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara -- Republik Indonesia

No. I dan II/MPRS/1960

INTERNATIONAL INSTITUTE FOR LABOUR STUDIES
30 AUG 1962
LIBRARY

M. P. R. S. dan DEPARTEMEN PENERANGAN

Indonesia

338.984(92)

INTERNATIONAL INSTITUTE
FOR LABOUR STUDIES
30 AUG 1962
LIBRARY

Ringkasan Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara — Republik Indonesia

No. I dan II/MPRS/1960

Contains text of the eight-year plan (1961-1969)

M. P. R. S. dan DEPARTEMEN PENERANGAN

P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang
PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA.

RINGKASAN
K E T E T A P A N
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA
No. I DAN II/MPRS/1960

I s i n j a :

I. K a t a p e n g a n t a r Pimpinan M.P.R.S. 9
II. Keputusan Presiden R.I. No. 127/1961. 15
III. Amanat Negara Presiden Sukarno : 10 Nopember 1960 21
IV. Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960. 43
V. Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960: 49
1. Lampiran A - B - C. 59
2. Lampiran Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama : 1961-1969:
A. Tata-perentjanaannja. 135
B. Sosialisme Indonesia. 137
C. Sistematik Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana : 160
(1) Pola Projek. 165
(2) Pola Pendjelasan. 255
(3) Pola Pembiajaan. 256
D. Pengesahannja. 259
VI. Amanat-sambutan Presiden Sukarno : 7 Desember 1960. 263
VII. K a t a - p e n u t u p. 273

PANTJA-TUNGGAL PIMPINAN M.P.R.S.

Wakil Ketua,
Mr Ali Sastroamidjojo.

Wakil Ketua,
K. H. Idham Chalid.

Pd. Ketua,
Chairul Saleh

Wakil Ketua,
D. N. Aidit.

Wakil Ketua,
Kol. Wilujo Puspojudo.

I.

KATA PENGANTAR
PIMPINAN
MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
Republik Indonesia

Mengantarkan penerbitan dari KETETAPAN-KETETAPAN M.P.R.S., baiklah kiranja kita mengingatkan kembali kedjadian bersedjarah pada tanggal 10 Nopember 1960, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, ketika digedung MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT di Bandung dilakukan pembukaan Sidang Pertama dari MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA (M.P.R.S.), hingga mendjadi lengkaplah Lembaga-lembaga ketatanegaraan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, jang sedjak Dekrit Presiden Republik Indonesia/Panglima Tertinggi Angkatan Perang tertanggal 5 Djuli 1959 berlaku lagi sebagai dasar-hukum untuk hidup-ketatanegaraan dan kemasjarakatan Bangsa Indonesia.

Untuk melaksanakan Dekrit Presiden tersebut, pada tanggal 22 Djuli 1959 dikeluarkan Penetapan Presiden No 2/1959 tentang pembentukan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang kemudian diikuti oleh Peraturan Presiden No. 12/1959 tertanggal 31 Desember 1959 tentang susunan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

Nama LEMBAGA KETATANEGARAAN TERTINGGI Republik Indonesia itu dalam istilah Undang-Undang Dasar 1945 adalah: MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT, jang merupakan pendjelmaan seluruh Rakjat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan Rakjat untuk melaksanakan hikmat-kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan untuk mewudjudkan Amanat Penderitaan Rakjat.

Amanat Penderitaan Rakjat itu dilukiskan dalam Pembukaan dari Undang-Undang Dasar 1945, jang menundjukkan garis-bimbingan REVOLUSI NASIONAL INDONESIA untuk menudju kepada Negara Republik Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Dalam waktu 27 hari, M.P.R.S. telah menjelesaikan tugas-karyanja seperti dipikulkan diatas pundaknja oleh perundang-undangan Negara, dan pula dalam batas waktu sesuai dengan harapan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang seperti tersimpul dalam Amanat Negara tanggal 10 Nopember 1960. Dengan memandjatkan do'a — pudji terima kasih jang tak-terhingga kehadapan Tuhan Jang Maha Esa, M.P.R.S. bersama-sama dengan seluruh Rakjat Indonesia bersjukur-gembira atas hasil-karya Madjelis Tertinggi Republik Indonesia seperti tertjantum dalam Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960.

Jang dimaksud dengan Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 adalah Ketetapan M.P.R.S. tentang „MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA", sedang jang dimaksud dengan Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 adalah ketetapan tentang „GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENTJANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969", sebagai hasil-penelaahan dan penelitian M.P.R.S. terhadap Garis-garis Besar Pola Pembangunan, termasuk Pola Projek seperti termuat dalam Buku kesatu Djilid I, II dan III dari Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana karya Depernas, jang telah dinjatakan pada umumnja sesuai dengan Amanat Pembangunan Presiden dan Manifesto Politik, dan jang oleh karenanja diterima baik dengan ketentuan untuk disempurnakan dengan ketetapan-ketetapan dari Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 dan Lampiran A.

Atas dasar kedua Ketetapan M.P.R.S. itu tertjapailah penetapan garis-pasti Revolusi Nasional Indonesia jang terang dan tandas untuk mentjapai Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dan mendjadi djelaslah oleh karenanja bagi seluruh RAKJAT INDONESIA dan seluruh DUNIA garis-konsepsion

mengenai IDIOLOGI NASIONAL INDONESIA untuk menudju kepada: „Masjarakat adil-dan-makmur berdasarkan Pantja-Sila" atau: SOSIALISME INDONESIA.

Tertjapainja karya M.P.R.S. jang gemilang dalam waktu jang pendek itu adalah berkat semangat M.P.R.S. jang selalu berpegang teguh pada sembojannja:

„Sepi hing pamrih, rame hing gawe", dengan senantiasa melaksanakan kelima azas musjawarah dalam wudjud:

(1) RASA-merasa guna memperhatikan suasana psikologis lingkungan dan sesama;

(2) TENGGANG-menenggang untuk melaksanakan gairat djiwa bermurah-hati atau toleransi;

(3) TIMBANG-menimbang guna mentjari keadilan;

(4) AKAL-sehat guna mendapatkan kebenaran;

(5) ICHLAS-rela jang meringankan kehendak dan menimbulkan keberanian untuk membatasi diri, bahkan djika perlu, menjampingkan kepentingan-sendiri demi kepentingan-bersama, jakni: Kepentingan Nasional Indonesia.

Revolusi Nasional Indonesia ternjata telah menjegarkan kembali unsur-unsur Demokrasi Indonesia asli! Terpantjang terangiah kini unsur-unsur kodrati Kepribadian Bangsa Indonesia, jang masih tetap hidup-subur sepandjang-masa ditengah-tengah tjipta-rasa dari sekalian bangsa-bangsa dalam tata-hukum pergaulan ummat-manusia!

Azas-azas musjawarah dan mufakat dalam rangka Demokrasi Terpimpin untuk mewudjudkan hikmat-kebidjaksanaan itu telah terbukti njata dalam kalangan kekeluargaan M.P.R.S.! Semoga dengan bukti tersebut tergerak-bangunlah seluruh Rakjat Indonesia untuk menjegarkan kembali pusaka-berharga NALURI INDONESIA sepandjang-masa itu guna bergerak-serentak dibawah bimbingan Pemimpin Besar Revolusi Indonesia melaksanakan Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. sebagai Garis-garis Besar Haluan Revolusi kita.

Hasrat Rakjat Indonesia untuk membangun negara dan masjarakatnja menurut Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960 telah dimulai dengan Ajunan Tjangkul Pertama dari

P.J.M. Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia pada tanggal 1 Djanuari 1961.

Agar seluruh RAKJAT INDONESIA tanpa pengetjualian dapat senantiasa mengikuti dan meneliti dengan seksama Ketetapan No. I dan II/MPRS/1960 sebagai garis konsepsionil dalam Pembangunan Masjarakat dan Negara, dikeluarkanlah oleh Pimpinan M.P.R.S. Ketetapan No. I/MPRS/1960 dan Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 LENGKAP, dimana termasuk didalamnja djuga 17 Djilid Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, untuk mendjadi SUMBER INDUK dan SUMBER RESMI mengenai kedua Ketetapan M.P.R.S. tersebut.

Jakin, bahwa untuk mempeladjari kedua Ketetapan M.P.R.S. dalam bentuk jang selengkap-lengkapnja itu tidak semua orang mempunjai tjukup waktu dan kemampuan, maka disamping edisi jang lengkap itu, oleh Pimpinan M.P.R.S. dikeluarkan „RINGKASAN KETETAPAN M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/ 1960", jang berisi pokok-pokok azasi dari kedua Ketetapan M.P.R.S. tersebut untuk keperluan Rakjat Indonesia dan dunia luar dengan seluas-luasnja.

Untuk penerbitan kedua matjam Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960 ini dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 127/1961. Dalam penjelenggaraannja, Pimpinan M.P.R.S. bekerdja-sama dengan Pemerintah Republik Indonesia dan para Pertjetakan Indonesia. Hendaknja kedua matjam penerbitan ini senantiasa mendjadi SUMBER PENELITIAN dan PEGANGAN PENAFSIRAN tentang garis-konsepsionil IDIOLOGI NASIONAL dan TJITA-TJITA BANGSA INDONESIA!

Bandung, 1 Djuni 1961.

Pimpinan

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA

Republik Indonesia

Pd. Ketua,

(CHAIRUL SALEH).

PENJERAHAN KETETAPAN M.P.R.S.
KEPADA P.J.M. PRESIDEN/MANDATARIS OLEH J.M. Pd. KETUA M.P.R.S.

II.

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA No. 127 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja:

Surat Pd. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tertanggal 22 Maret 1961 No. 0690/0/MPRS/61;

Menimbang:

a. bahwa Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara telah menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusannja seperti termaktub dalam Ketetapan No. I/MPRS/1960 Pasal IV dan Ketetapan No. II/MPRS/1960 Pasal 10;

b. bahwa demi kelantjaran pelaksanaan Ketetapan-ketetapan tersebut diatas diperlukan penerangan jang seluas-luasnja kepada seluruh Rakjat Indonesia dan dunia luar mengenai isi dan maksa Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. tersebut diatas agar Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. tersebut dapat diketahui dan difahami oleh Rakjat seluruhnja;

bahwa untuk keperluan penerangan tersebut diatas diperlukan penjusunan, pentjetakan, penjebaran bahan-bahan penerangan dan dimana perlu djuga penjalinannja kedalam bahasa-bahasa asing;

d. bahwa untuk keperluan usaha tersebut pada c. perlu diadakan ketentuan-ketentuan mengenai usaha dan biajanja;

Mengingat:

1. Pasal 4 ajat 1 Undang-Undang Dasar;
2. Ketetapan No. I/MPRS/1960 pasal IV dan Ketetapan No. II/MPRS/1960 pasal 10;

3. Musjawarah Presiden/Mandataris dengan Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tertanggal 21 Maret 1961.

M e m u t u s k a n :

Menetapkan:

Pertama: Menjetudjui usul Pimpinan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara tentang penjusunan bahan-bahan penerangan tentang Ketetapan-ketetapan M.P.R.S. dengan perperintjian sebagai berikut:

a. Ketetapan No. I dan II/MPRS/1960 dengan **lengkap**, dimana termasuk didalamnja 17 Djilid dari Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 — 1969;

b. **Ringkasan** dari jang tersebut pada a diatas;

Kedua: Untuk mendjaga ketelitian dalam penjusunan bahan-bahan penerangan dan pula untuk mempertahankan keresmian dan keasliannja, maka penjusunan bahan-bahan penerangan tersebut harus dilaksanakan dan diselenggarakan oleh M.P.R.S. sendiri dengan disjahkan oleh Pimpinan M.P.R.S.;

Ketiga: Pentjetakan dan penjebaran bahan-bahan penerangan tersebut dilaksanakan dan diselenggarakan oleh Departemen Penerangan dengan bantuan dari semua Departemen-Departemen Pemerintah Republik Indonesia dan pula Front Nasional dibawah pengawasan M.P.R.S., dengan ketentuan bahwa penjebaran bahan penerangan tersebut sekurang-kurangnja diselenggarakan melalui saluran-saluran sebagai berikut :

a. melalui saluran Pamongpradja sampai dengan Tjamat;

b. melalui saluran Angkatan Bersendjata sampai dengan Kesatuan-Kesatuan didaerah Ketjamatan;

c. melalui saluran pendidikan sampai dengan Sekolah-sekolah Landjutan Pertama;

d. melalui saluran Departemen Luar Negeri untuk Perwakilan perwakilan Republik Indonesia diluar negeri dan masjarakat luar negeri;

e. melalui saluran Front Nasional sampai dengan Rantingnja;
f. saluran-saluran lain dalam lingkungan Pemerintahan dan masjarakat pada umumnja, jang dapat membantu dan melantjarkan penjebaran bahan-bahan penerangan tersebut ketangan rakjat dengan seluas-luasnja;

Keempat: Untuk mentjukupi keperluan tersebut pada pokok ketiga, sebagai langkah permulaan diperkirakan akan diperlukan matjam dan djumlah bahan penerangan sebagai berikut:

a. Ketetapan No. I dan II/MPRS/1960 dengan lengkap, termasuk 17 Djilid dari Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 — 1969 sedjumlah : 1.500 (seribu lima ratus) unit untuk keperluan pusat-pusat Departemen, Pemerintahan Daerah Angkatan Bersendjata, Perwakilan R.I. diluar Negeri, Lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi dan Kebudajaan serta Penelitian, Front Nasional dan lain-lain pusat kegiatan kenegaraan serta kemasjarakatan lainnja menurut ketentuan Presiden/Mandataris dan Pimpinan M.P.R.S.;
b. Ringkasan dari bahan penerangan tersebut pada a diatas sedjumlah 5.000.000 (lima djuta) buah untuk keperluan penerangan seluruh rakjat pada umumnja;
c. Terdjemahan dari Ringkasan tersebut pada b dalam djumlah dan kedalam bahasa-bahasa asing menurut ketentuan Presiden/ Mandataris dan Pimpinan M.P.R.S. dengan bantuan Menteri Luar negeri;

Kelima: Dalam rangka penjusunan Ringkasan dari Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961 — 1969. „Buku — Ringkasan Pembangunan Semesta", jaitu: perasan hasil-karya Depernas jang garis-garis besarnja telah ditetapkan oleh M.P.R.S. dengan kata pimpinan Presiden tertanggal Djakarta, 1 Djanuari 1961, supaja ditindjau dan disusun kembali untuk mendapatkan kelengkapan dalam isinja, terutama berhubungan dengan isi serta makna seperti termaktub dalam lampiran-lampiran dari Ketetapan No. II/MPRS/1960;

Keenam: Menjetudjui usul Pimpinan M.P.R.S. mengenai pengeluaran biaja untuk penjusunan, pentjetakan dan penjebaran

bahan penerangan tersebut diatas sebagai tambahan Anggaran Belandja Negara 1961, jang djumlah serta perperintjiannja lebih landjut akan diatur oleh Menteri Pertama dan Menteri Keuangan Republik Indonesia;

Ketudjuh: Sebagai usaha untuk memperoleh pendapatan negara guna menutup pengeluaran tersebut pada pokok keenam, menjetudjui usul Pimpinan M.P.R.S. untuk memungut pembajaran sebagai harga pembelian bahan-bahan penerangan tersebut diatas dengan ketentuan jang akan diatur lebih landjut oleh Menteri Pertama dan Menteri Keuangan bersama-sama dengan Menteri Penerangan;

Kedelapan: Menugaskan kepada Menteri Penerangan Republik Indonesia untuk menjelenggarakan pentjetakan bahan-bahan penerangan tersebut diatas dan mengkoordinir penjebarannja dibawah pengawasan Pimpinan M.P.R.S.;

Kesembilan: Surat keputusan ini berlaku mulai hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 13 April 1961.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Sesuai dengan jang asli.
Sekertaris M.P.R.S.

(Mr. Munadjat Danusaputro)

PEMANDANGAN PADA SIDANG PERTAMA M.P.R.S. TAHUN-1960.

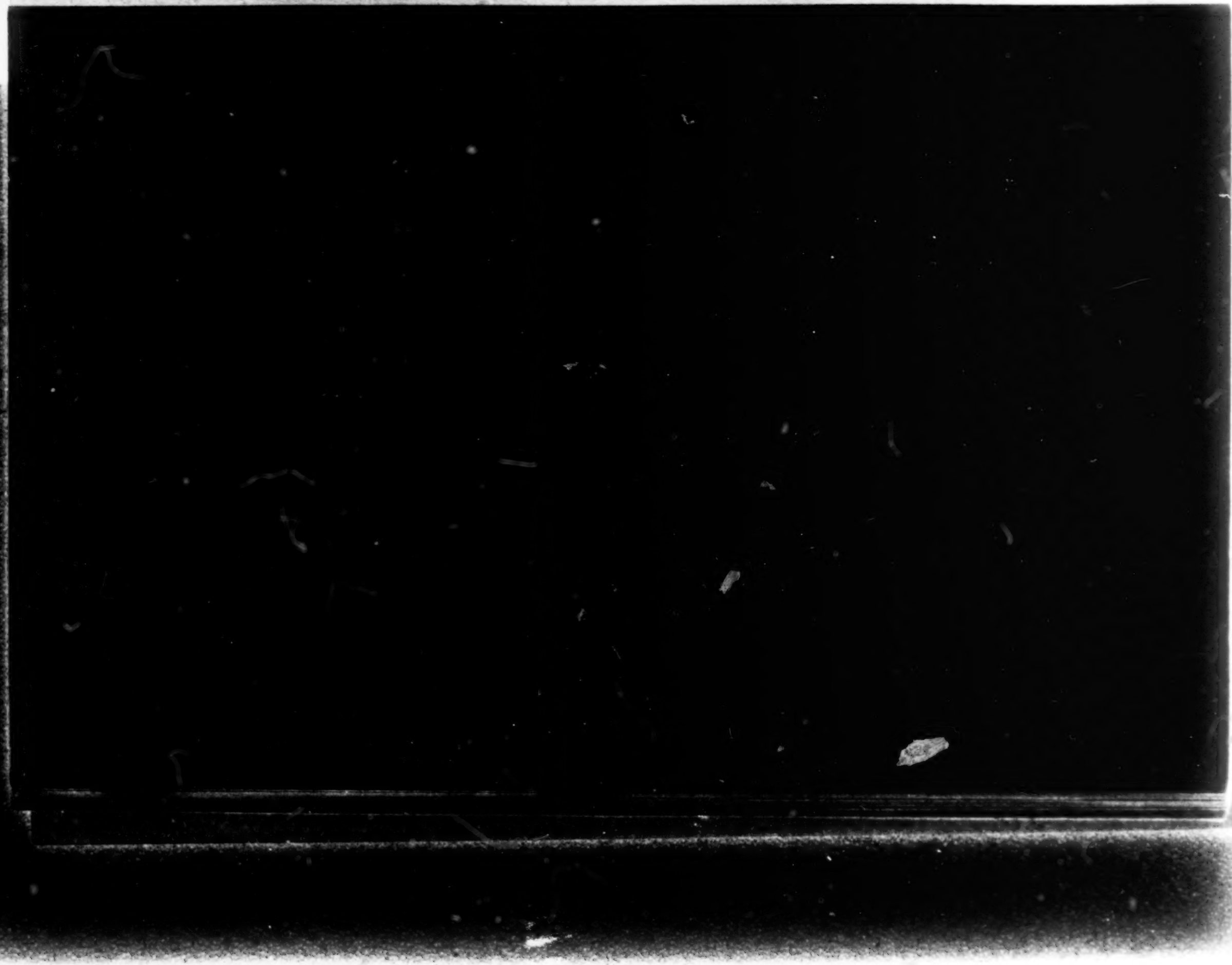

III.

AMANAT NEGARA PRESIDEN SUKARNO

10 Nopember 1960

Saudara-saudara sekalian,

Sebagai dikatakan oleh Pedjabat Ketua, maka pada ini hari akan dibuka *Sidang pertama* daripada M.P.R.S. Dan pada saat itu saja, Insja Allah akan mengutjapkan amanat jang oleh Pedjabat Ketua dinamakan **Amanat Negara.**

Saudara-saudara, hari ini bukan sadja penting oleh karena sidang pertama daripada M.P.R.S. dibuka, Insja Allah, tetapi djuga oleh karena sebagai Saudara-saudara mengetahui hari ini adalah Hari Pahlawan, jang pada hari ini kita menghormati, memperingati djasa-djasa pahlawan-pahlawan kita, pahlawan-pahlawan dalam perdjoangan kita mentjari pelaksanaan daripada segenap tjita-tjita kita.

Dalam memperingati segenap tjita-tjita kita, tidak boleh tidak, kita harus ingat kepada jang diwaktu achir-achir ini selalu saja namakan *Amanat Penderitaan Rakjat*. Rakjat Indonesia, sedjak ia kehilangan kemerdekaannja, jakni sedjak Indonesia didjadjah oleh pendjadjahan asing jang berabad-abad lamanja, mendjadilah satu rakjat jang menderita, menderita *politik*, menderita *ekonomi*, menderita *sosial*, menderita *kulturil*, bahkan djuga menderita dalam *rasa hati kemanusiaannja*. Maka djikalau kita berkumpul pada ini hari, pada hari jang amat penting ini, penting kataku tadi, oleh karena hari ini adalah Hari Pahlawan dan hari pembukaan sidang pertama dari M.P.R.S.,-M.P.R., lembaga jang mutlak dituntut oleh Undang-Undang Dasar '45. Maka tidak-boleh-tidak kita harus mengenangkan akan penderitaan rakjat itu. Dan sebagai tiap-tiap rakjat jang menderita, maka rakjat Indonesia ingin melepaskan diri daripada penderitaan itu. Dan dalam usaha untuk melepaskan diri

daripada penderitaan itu. Dan dalam usaha untuk melepaskan diri daripada penderitaan itu, sekali lagi rakjat Indonesia mendjalankan penderitaan-penderitaan, korbanan-korbanan jang amat pedih. Untuk mengachiri penderitaan, rakjat Indonesia mendjalankan penderitaan.

Ini tampaknja adalah satu paradox, tetapi paradox sedjarah, historical paradox. Penderitaan Rakjat jang dilakukan oleh rakjat untuk melepaskan diri daripada penderitaan, sudah dikenal oleh kita semuanja.

Dikenal oleh kita semuanja dalam bentuk pahlawan-pahlawan jang gugur, jang mereka itu arwahnja pada ini hari kita peringati dan pahlawan-pahlawan jang gugur ini, bukan sadja jang gugur sedjak kita memasuki taraf physical-revolution didalam usaha kita untuk melepaskan diri kita daripada penderitaan, tetapi pahlawan jang gugur djuga sebelum adanja physical-revolution kita itu. Pahlawan-pahlawan jang gugur dalam abad ke-17, pahlawan-pahlawan jang gugur didalam abad ke-18, pahlawan-pahlawan jang gugur didalam abad ke-19, pahlawan-pahlawan jang gugur dalam apa kita namakan *Gerakan Nasional*. Dan bukan sadja pahlawan-pahlawan jang gugur, tetapi kita pada ini hari djuga memperingati semua pahlawan-pahlawan jang telah menundjukkan kepahlawanannja diatas padang pelaksanaan dharma-bakti terhadap Ibu Pertiwi.

Bukan sadja terbajang dihadapan mata chajal kita pahlawan-pahlawan dari Sultan Agung Hanjokro Kusumo, atau pahlawan-pahlawan dari Trunodjojo, atau pahlawan-pahlawan dari Sultan Hasanuddin, atau pahlawan-pahlawan dari Pangeran Diponegoro, atau pahlawan-pahlawan dari Tengku Tjik Ditiro, atau Imam Bondjol, bukan hanja pahlawan-pahlawan itu jang gugur dimedan pertempuran atau tidak gugur dimedan pertempuran, tetapi djuga pahlawan-pahlawan kita didalam Gerakan Nasional, jang mereka itu bernama dan kita beri nama pahlawan, oleh karena mereka telah mempersembahkan dharma-baktinja serta korbannja jang pahit-pedih diatas persada diatas Ibu Pertiwi. Terbajang dimuka mata chajal kita, ratusan-ribuan pemimpin-pemimpin kita daripada Gerakan Nasional itu, jang telah meringkuk didalam pendjara.

Terbajang dihadapan mata chajal kita, pemimpin-pemimpin kita jang menderita pahit-pedih ditempat-tempat pembuangan. Terbajang dimata chajal kita pemimpin-pemimpin kita, jang dengan muka bersenjum menaiki tiang penggantungan. Terbajang dimata chajal kita pemimpin-pemimpin kita, jang menadahi pelor daripada sekuadron-sekuadron pendrelan. Terbajang dimuka chajal mata kita deritaan daripada rakjat kita, jang untuk perdjoangan itu mengorbankan segala-galanja. Ada jang mengorbankan suaminja, ada jang mengorbankan anaknja, ada jang mengorbankan harta-bendanja, ada jang mengorbankan isi hati ketjintaan mereka, jang mendjadi tiang daripada djiwa mereka itu. Pendek kata mengorbankan segala-galanja.

Dan mereka ini pahlawan pula, oleh karena sebagai tadi dikatakan oleh Pedjabat Ketua M.P.R.S., mereka mendjalankan sesuatu itu *sepi ing pamrih*. Pahlawan bukan hanja orang jang gugur dimedan pertempuran.

Pahlawan adalah semua orang jang berkorban, menderita, untuk kepentingan sesama orang, tidak untuk kepentingan diri sendiri.

Dan djikalau kita menanjakan kenapa mereka itu mendjadi pahlawan, kenapa mereka itu berkorban, kenapa mereka itu sukarela menderita, bahkan menderita dengan muka jang bersenjum? Tak-lain tak-bukan ialah oleh karena mereka itu sadar dan insjaf meng-emban Amanat Penderitaan Rakjat. Rakjat Indonesia jang telah mendjadi rakjat jang menderita ingin melepaskan dirinja daripada penderitaan itu. Dan, sebagai tadi saja katakan, untuk melepaskan dirinja daripada penderitaan itu, rakjat Indonesia dan pemimpin-pemimpinnja mendjalankan dengan ichlas penderitaan-penderitaan.

Oleh karena itu maka mereka pantas kita beri nama pahlawan dan mereka pantas kita hormati dan djiwa kita pada saat sekarang ini memandjatkan do'a kehadirat Allah s.w.t. agar supaja penderitaan mereka itu, korbanan mereka itu, diterima oleh Allah s.w.t. dengan pahala jang setinggi-tingginja. Oleh karena itulah mereka bernama pahlawan, pa-ha-la-wan. Orang jang pantas menerima pahala daripada Allah s.w.t.

Dan kita jang duduk disini, anggota-anggota daripada M.P.R.S., kita pantas menanja pada diri kita sendiri, insjafkah kita djuga kepada Amanat Penderitaan Rakjat itu? Insjafkah kita bahwa Amanat Penderitaan Rakjat itu bukan sadja di-emban oleh pahlawan-pahlawan jang telah gugur atau pahlawan-pahlawan jang menderita didjaman jang lampau? Insjafkah kita bahwa Penderitaan Rakjat itu djuga harus di-emban oleh kita semua jang pada ini hari berkumpul didalam gedung jang bersedjarah ini? Jang kita ini menurut Undang-Undang Dasar '45 antara lain diwadjibkan untuk menentukan *garis besar daripada haluan Negara?*

Saja minta kepada semua anggota M.P.R.S. pertama-tama dan lebih dahulu, supaja semua anggota M.P.R.S. menjedari sedalam-dalamnja, menginsjafi sedalam-dalamnja bahwa kita ini masing-masing dan kolektif meng-emban Amanat Penderitaan Rakjat. Terbajanglah Saudara-saudara dalam ingatan saja djalannja perdjoangan rakjat dimasa jang lampau.

Tadi dikatakan oleh Pedjabat Ketua M.P.R.S., bahwa dengan adanja M.P.R.S. ini telah terpenuhi tuntutan daripada Undang-Undang Dasar '45 diatas lapangan perlembagaan ketatanegaraan. Memang Undang-Undang Dasar '45 menentukan harus adanja Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Undang-Undang Dasar '45 adalah Undang-Undang Dasar daripada satu negara. Undang-Undang Dasar '45 bukan sekedar Undang-Undang Dasar daripada sesuatu perkumpulan, tetapi Undang-Undang Dasar daripada satu negara.

Dalam hal ini Saudara-saudara, kenangkanlah djalannja perdjoangan kita sampai kita datang kepada *bernegara.* Ja, dulu sebelum imperialisme datang disini, kita memiliki negara-negara. Dan kemudian, sesudah imperialis datang disini kita memiliki pula negara-negara jang pada hakekatnja tiada mempunjai penuh atribut-atribut lagi sebagai negara, oleh karena atribut-atributnja itu telah ditjabut oleh pihak pendjadjah. Tetapi penderitaan rakjat membuat kita bergerak mendjalankan penderitaan-penderitaan dalam abad ke-17, 18, 19 hingga pada permulaan abad ke-20 kita, sebagai tadi saja katakan, mengindjak diatas padangnja Gerakan Nasional, timbulnja serikat-serikat dan perkumpulan-perkumpulan. Tetapi pada bagian pertama daripada serikat-serikat dan perkumpulan-

perkumpulan kita itu belum kita dengan tegas mengatakan, bahwa perdjoangan kita menudju kepada terbentuknja negara, melainkan hanja kepada ditahun kira-kira 1926. Tegas terpantjang didalam ingatan kita, bahwa kita tidak bisa terhindar melepaskan diri daripada penderitaan-penderitaan ini, penderitaan politik, penderitaan ekonomi, penderitaan sosial, penderitaan kulturil dan lain-lain sebagainja, bahwa kita tidak bisa melepaskan diri kita daripada penderitaan-penderitaan ini, djikalau kita tidak mentjapai lebih dahulu **Indonesia Merdeka**, kemerdekaan politik.

Dulu sebelum tahun 1926, 1927 itu, berdjalanlah fikiran salah didalam kalangan bangsa Indonesia, bahwa kita bisa melepaskan diri kita daripada penderitaan-penderitaan politik, ekonomi, sosial, kulturil itu dengan memperbaiki ketjerdasan kita, memperbaiki taraf ekonomi kita dan lain-lain sebagainja. Hal ini misalnja saja uraikan dengan tegas dalam pidato saja sebelum proklamasi, jaitu pidato jang dikenal orang dengan nama Lahirnja Pantja Sila.

Tetapi sjukur Alhamdulillah, baik sebagai akibat daripada djalannja tjita-tjita dan kejakinan-kejakinan sendiri, maupun setjara empiris, kira-kira pada tahun 1926, 1927 datanglah satu kejakinan baru jaitu, bahwa kita hanja bisa mengachiri penderitaan-penderitaan kita ini kalau kita mentjapai Indonesia Merdeka. Dan dengan terlahirnja kejakinan ini, mulai bulatlah kejakinan kita, bahwa kita lebih dahulu harus mendirikan **Negara Indonesia.** Sebelum tahun 1926, 1927 hal negara ini belum bersemajam didalam ingatan dan fikiran kita, tetapi sedjak tahun 1926, 1927 dengan tegas mendjulanglah kelangit kejakinan ini: lebih dahulu dirikan Negara Indonesia, didalam Negara Indonesia itu kita akan berusaha mengachiri penderitaan-penderitaan kita, mengachiri penderitaan politik, mengachiri penderitaan ekonomi, mengachiri penderitaan kulturil, mengachiri penderitaan sosial, mengachiri penderitaan-penderitaan lain.

Dan kejakinan 1926, 1927 ini, memberi impetus pula kepada usaha kita, kepada penderitaan kita, kepada kesediaan dan keridohan kita untuk menderita, kepada keichlasan kita untuk menderita, sehingga apa jang dinamakan Gerakan Nasional makin lama makin menggema, makin lama makin menggempa dan kita achirnja pada tanggal

17 Agustus 1945 menjatakan, bahwa kita telah mendirikan negara jang kita namakan Republik Indonesia.

Tatkala pemimpin-pemimpin kita telah melihat fadjar dilangit Timur menjingsing, bahwa kejakinan mutlak perlunja negara ini telah mendekat mendjadi realitet, jaitu diwaktu jang kita kenal dengan nama waktu djaman Djepang, djadi sebelum Proklamasi. Didjaman Djepang itu Saudara-saudara, pemimpin-pemimpin kita jang meng-emban Amanat Penderitaan Rakjat itu, diwaktu djaman Djepang itu, telah bukan sadja menjongsong fadjar jang akan menjingsing, akan datangnja negara Indonesia dengan kegembiraan hati, tetapi menjongsongnja pula dengan usaha mempersiapkan datangnja negara jang merdeka itu. Antara lain dipersiapkan dasar-dasar negara jang akan datang, jaitu jang kemudian terkenal dengan Pantja-Sila.

Disini tempatnja saja dengan tegas mengulangi lagi buat seribu kalinja, bahwa kemerdekaan kita bukan hadiah dari Djepang, bahwa kemerdekaan kita adalah hasil daripada perdjoangan rakjat Indonesia jang berpuluh-puluh tahun. Didalam kita mendjalankan usaha dan perdjoangan untuk membuat kejakinan negara itu suatu realitet, dalam kita mendjalankan usaha itu kita telah mempersiapkan sendiri hal-hal jang mutlak perlu untuk negara jang merdeka, antara lain untuk negara Indonesia jang merdeka dianggap perlu adanja dasar, jaitu jang sekarang terkenal dengan Pantja Sila.

Dan pemimpin-pemimpin kita djuga mempersiapkan Undang-Undang Dasarnja, dikatakan orang bahwa kita mempersiapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia itu dibawah todongan bajonet. Memang benar demikian, Saudara-saudara, dibawah todongan bajonet daripada tentara pendudukan. Pemimpin-pemimpin kita jang sedar meng-emban Amanat Penderitaan Rakjat itu mempersiapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Dan Undang-Undang Dasar ini jang kemudian disahkan oleh pemimpin-pemimpin kita satu hari sesudah Proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945 jang sekarang sudah kondang termasjhur dengan nama Undang-Undang Dasar '45, jang sedjurus waktu kita tinggalkan, kemudian, tetapi jang pada tanggal 5 Djuli 1959 didekritkan oleh

Presiden bahwa kita kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar '45 itu.

Djikalau Saudara-saudara membatja Undang-Undang Dasar '45 itu njata djelas bahwa semangat daripada Undang-Undang Dasar '45 ini ialah, apa jang diamanatkan oleh rakjat didalam ia punja penderitaan jang berwindu-windu, berabad-abad. Maka oleh karena itu ada baiknja barangkali saja batjakan lebih dahulu preambule daripada Undang-undang Dasar itu :

Bahwa sesungguhnja Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka pendjadjahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Dan perdjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat jang berbahagia dengan selamat sentausa menghantarkan rakjat Indonesia kedepan pintu gerbang Negara Indonesia jang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rachmat Tuhan Jang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan Luhur, supaja berkehidupan kebangsaan jang bebas, maka Rakjat Indonesia menjatakan dengan ini kemerdekaannja.

Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memadjukan kesedjahteraan umum, mentjerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia jang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasarkan kepada:

Ke-Tuhanan Jang Maha Esa,
Kemanusiaan jang adil dan beradab,
Persatuan Indonesia,
dan Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam Permusjawaratan/Perwakilan serta dengan mewudjudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh Rakjat Indonesia.

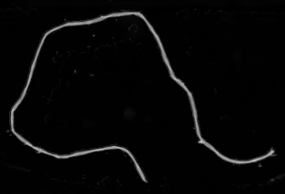

Preambule ini Saudara-saudara, saja ulangi lagi, mentjerminkan dengan djelas dan djelas Amanat Penderitaan Rakjat. Tertjerminkan dengan djelas didalam kata pembukaan ini *tiga kerangka* sebagai jang saja utjapkan didalam pidato saja pada tanggal 17 Agustus 1959, jang kemudian terkenal dengan kata pidato **Manipol.** Tiga kerangka: satu negara kesatuan, didalamnja satu masjarakat jang adil dan makmur didalam rangkaian persahabatan-persahabatan dengan semua bangsa didunia. Preambule ini, dibuat dan dirantjangkan, kemudian disahkan oleh pemimpin-pemimpin kita sebelum kita mengadakan proklamasi 17 Agustus '45.

Apa sebab? Kataku tadi ialah oleh karena pemimpin-pemimpin kita pada waktu itu semuanja merasa meng-emban Amanat Penderitaan Rakjat. Sehingga didalam preambule ini ditjerminkan olehnja apa jang diamanatkan oleh rakjat dengan deritaannja itu kepada kita semua. Tiga kerangka ternjata tertulis didalamnja. Dan bukan sadja tiga kerangka ini, sebagai Saudara-saudarapun mengetahui didalam preambule ini telah tertjermin pula dasar-dasar daripada negara jang akan datang, dan jang kemudian datang, dan jang terkenal dengan nama Pantja Sila.

Tetapi pemimpin-pemimpin kita bukan sekedar mentjerminkan ketiga kerangka oleh karena telah diamanatkan rakjat, telah mentjerminkan Pantja Sila, oleh karena Pantja Sila memang adalah mutiara-mutiara jang sedjak djaman dahulu terpendam didalam kalbunja bumi Indonesia, dan jang kemudian digali kembali mendjadi Pantja Sila, tetapi pemimpin-pemimpin kitapun dalam membuat, merantjangkan dan kemudian mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu sendiri telah memikirkan perlembagaan daripada Negara Indonesia Merdeka itu. Antara lain ditentukan bahwa didalam Negara Republik Indonesia harus akan ada satu **MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT.** Jang sekarang kita ini sebagai Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara berkumpul bersama sebagai pe-realisasi daripada ketentuan Undang-Undang Dasar itu.

Tidakkah kita takdjub, Saudara-saudara, akan pekerdjaan pemimpin-pemimpin kita dimasa jang lampau itu? Sebelum kita memproklamirkan Indonesia merdeka, mereka telah menggambarkan

Amanat Penderitaan Rakjat didalam tiga kerangka: Preambule. *Sebelum kita mengadakan proklamasi 17 Agustus '45,* mereka telah mengetahui bahwa didalam bumi Indonesia adalah *lima mutiara* jang harus digali kembali dan harus dipersembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Sebelum kita mengadakan proklamasi 17 Agustus '45, sebelum kita mempunjai negara, mereka telah mengetahui bahwa djikalau negara ini ingin hidup sebagai satu negara jang memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat, harus antara lain diadakan Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Madjelis Permusjawaratan Rakjat sebagai satu **kekuasaan jang tertinggi** didalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Jang Madjelis Permusjawaratan Rakjat ini terdiri daripada (demikianlah tertulis didalam pasal-pasalnja) Madjelis Permusjawaratan Rakjat terdiri atas anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat, ditambah dengan utusan-utusan dari Daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan jang ditetapkan dengan Undang-undang.

Saudara-saudara, *meskipun Saudara-saudara hanja M.P.R. Sementara, madjelis Saudara terdiri daripada anggauta-anggauta Dewan Perwakilan Rakjat Gotong-Rojong plus utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan.*

Saudara dikumpulkan pada ini hari, dikota Bandung jang bersedjarah ini, digedung jang bersedjarah ini, pada hari jang selalu bersedjarah ini, untuk memenuhi apa jang ditentukan pula didalam pasal 3 dari Undang-Undang Dasar kita, jaitu: Madjelis Permusjawaratan Rakjat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan Negara. Tetapi oleh karena Saudara-saudara adalah M.P.R.S. = Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, jang anggota daripada Dewan Perwakilan Rakjat itu belumlah anggota jang *terpilih oleh Rakjat,* maka bagian pertama daripada tugas pasal 3 ini, jaitu menetapkan Undang-Undang Dasar, tidak saja minta kepada Saudara-saudara untuk ditetapkan. Saja mempersilakan Saudara-saudara hanja menentukan garis-garis besar daripada haluan negara sadja. Saja tidak mempersilakan Saudara-saudara untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, sebab kita sekarang ini telah mempunjai Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Dasar Revolusi, jaitu Undang-Undang Dasar 1945. Diatas dasar Undang-

Undang Dasar 1945 inilah Saudara berada Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara berada oleh karena sedjak 5 Djuli 1959, Undang-Undang Dasar 1945 berdjalan lagi. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara berada oleh karena kita sedjak tanggal 5 Djuli 1959 telah berdiri kembali diatas Undang-Undang Dasar itu, M.P.R.S. — maka oleh karena itu saja tidak mempersilakan Saudara-saudara untuk menetapkan satu Undang-Undang Dasar baru, melainkan hanja menentukan garis-garis besar daripada haluan negara sadja.

Saja ulangi perkataan saja tadi itu: alangkah men-takdjubkan visie dan penglihatan daripada pemimpin-pemimpin kita pada waktu itu, jang bukan sadja menjedari tiga kerangka, jang bukan sadja melihat lima mutiara, tetapi djuga telah mengerti dengan djelas bahwa harus didalam Negara Republik Indonesia itu ada satu Madjelis Tertinggi jang oleh pemimpin-pemimpin itu dinamakan Madjelis Permusjawaratan Rakjat, jang bersidang tidak tiap-tiap hari, tetapi menurut Undang-Undang Dasarpun sedikitnja sekali dalam lima tahun. Dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ini menentukan garis-garis besar *sadja* daripada haluan negara. Dan Madjelis Permusjawaratan Rakjat ini memilih **mandataris**, memilih seorang jang dikuasakan olehnja untuk melaksanakan garis-garis besar daripada haluan negara jang ditentukan olehnja itu. Mandataris jang bernama Presiden. Dan mandataris ini menundjuk pembantu-pembantunja, jang didalam istilah biasa dinamakan para Menteri. Dan disamping itu ada Dewan Perwakilan Rakjat, jang Dewan Perwakilan Rakjat ini terutama sekali, sebagai saja katakan didalam pembukaan Dewan Perwakilan Rakjat tempo hari, membantu mandataris dan pembantu-pembantunja ini didalam pekerdjaan mengurus negara sehari-hari, terutama sekali dilapangan perundang-undangan dan didalam lapangan Anggaran Belandja daripada Negara.

Oleh karena kita ini merasa memikul Amanat Penderitaan Rakjat dan Amanat Penderitaan Rakjat itu bukan sekedar agar supaja kita politis mendjadi lagi satu Negara jang merdeka, satu Negara jang berbentuk Republik, satu Negara jang berwilajah kekuasaan antara Sabang dan Merauke, tetapi djuga ingat kerangka jang nomor dua,

jaitu satu masjarakat adil dan makmur, oleh karena kita mengetahui bahwa masjarakat jang adil dan makmur itu sebagai saja katakan *didalam pidato-pidato saja achir-achir ini*, tidak dapat djatuh dari langit sebagai air embun diwaktu malam, tetapi harus kita selenggarakan, harus kita bina dan harus kita rentjanakan lebih dahulu, maka kita telah membentuk pula satu Dewan Perantjang Nasional jang termasjhur dengan nama singkat Depernas. Depernas itu kita tugaskan untuk membuat pola pembangunan. Pola pembangunan diatas dasar Amanat Penderitaan Rakjat. Pola pembangunan jang mempolakan pembangunan masjarakat adil dan makmur sebagai diamanatkan oleh penderitaan rakjat itu. Pola pembangunan jang dus harus bersifat **SOSIALISME BERDASARKAN PANTJA-SILA.**

Inilah tugas jang kami berikan kepada Depernas pada waktu itu: buatkan didalam waktu singkat satu pola pembangunan, pola pembangunan sosialis berdasarkan Pantja Sila. Inilah sesuai dengan kepribadian Indonesia, inilah jang diamanatkan oleh penderitaan rakjat. Buatkan pola jang demikian itu didalam waktu jang singkat.

Dan Depernas telah bersidang didalam gedung jang sama ini, — gedung jang Saudara-saudara sekarang duduk didalamnja — dan Depernas telah bekerdja dengan gesit dan giat, dan kinilah tempatnja saja buat kedua kalinja menjatakan salut kehormatan saja kepada Depernas umumnja, kepada Ketua Depernas chususnja, jaitu Prof. Mr Muh. Yamin, jang didalam waktu singkat telah dapat menjelesaikan satu pola pembangunan jang sebagai Saudara ketahui, — tetapi belum dalam detailnja, sekedar dari kabar dan warta —, satu pola pembangunan jang amat luas dan lengkap sekali. Dan oleh karena pembangunan adalah satu bagian daripada Amanat Penderitaan Rakjat, oleh karena masjarakat adil dan makmur adalah satu bagian daripada apa jang dideritakan oleh rakjat, maka saja akan mempersilakan Saudara-saudara djuga menindjau hal pembangunan itu.

Tetapi sebagai djuga haluan negara jang didalam Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan bahwa Saudara-saudara menentukan garis-garis besar daripada haluan negara, saja disinipun akan mempersilakan Saudara-saudara nanti menentukan *garis-garis besar daripada pembangunan* sebagai bagian daripada *garis-garis besar haluan*

negara, jang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar adalah tugas daripada Madjelis Permusjawaratan Rakjat.

Dua kali saja menekankan kata saja pada perkataan *garis besar*. Saja mempersilakan Saudara-saudara menentukan garis besar daripada haluan negara dan sebagai bagian daripada itu garis besar daripada pembangunan.

Apa arti garis besar? Garis besar berarti tidak memasuki kepada detail, tidak memasuki kepada hal-hal jang didalam pidato „Lahirnja Pantja Sila" saja namakan ndjelimet. Saja minta Saudara bekerdja dengan gesit, menentukan sekedar garis-garis besar daripada haluan negara, garis-garis besar daripada pembangunan masjarakat adil dan makmur.

Dan garis-garis besar daripada haluan negara itu sebenarnja pun sudah ada. Tinggal nanti saja sekedar mempersilakan Saudara-saudara menindjau garis-garis besar daripada haluan negara jang sudah ada itu dan djikalau Saudara-saudara setudjui, memperkuatkan garis besar daripada haluan negara jang sudah ada itu.

Apa jang saja maksudkan dengan garis besar haluan negara jang sudah ada? Saudara-saudara mengetahui bahwa baik saja sendiri maupun kemudian Dewan Menteri jang dinamakan Pemerintah bersama saja, maupun Dewan Pertimbangan Agung, maupun Dewan Perantjang Nasional, telah menentukan bahwa apa jang dinamakan **Manifesto Politik** adalah garis besar daripada haluan negara. Tinggal sekarang saja berkata: sebenarnja, sebenarnja garis besar daripada haluan negara sudah ada, jaitu Manifesto Politik dan Usdek.

Disini tempatnja saja mau terangkan, bahwa Usdek itu bukan suatu hal disamping Manifesto Politik, tetapi Usdek itu adalah perasan daripada Manifesto Politik, sehingga pada hakekatnja Manifesto Politik adalah Usdek, Usdek adalah Manifesto Politik, bukan dua hal jang terpisah satu sama lain.

Djikalau saja berkata: sebenarnja kita telah mempunjai haluan negara, maka saja berkata demikian itu berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar '45 jang berbunji: Sebelum Madjelis Permusjawaratan Rakjat, Dewan Perwakilan Rakjat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang

Dasar ini, — djadi sebelum Saudara-saudara ada sebagai Madjelis —, segala *kekuasaannja* didjalankan oleh Presiden, dengan bantuan — bantuan — sebuah Komite Nasional.

Djadi sebelum Saudara-saudara ada sebagai Madjelis — dan pada waktu saja mengutjapkan pidato 17 Agustus '59 Saudara-saudara sebagai Madjelis belum ada — pada waktu itu menurut pasal IV Aturan Peralihan segala kekuasaan didjalankan oleh Presiden. Pada waktu itu saja mendjalankan kekuasaan itu dengan sah. Pada waktu itu saja sebagai Presiden pemegang kekuasaan penuh menentukan haluan negara ialah sebagai saja gambarkan dalam pidato 17 Agustus '59, jang kemudian oleh sidang Dewan Menteri diamini, jang kemudian oleh Depernas diamini, jang kemudian oleh Dewan Pertimbangan Agung diamini. Maka ditindjau daripada sudut pasal IV Aturan Peralihan daripada Undang-Undang Dasar '45 ini, sebetulnja kita telah mempunjai garis besar daripada haluan Negara jang dinamakan Manifesto Politik dan Usdek. Oleh karena itu maka saja berkata kepada Saudara-saudara, saja mengusulkan Saudara-saudara *memperkuat* garis-garis besar haluan Negara jang bernama Manifesto Politik dan Usdek ini. Dan djikalau saja berkata demikian, pun saja tidak berdiri sendiri. Dewan Pertimbangan Agung didalam sidangnja kemarin dulu, — Saudara-saudara mengetahui bahwa Lembaga Negara jang lain bernama Dewan Pertimbangan Agung dan Dewan Pertimbangan Agung ini memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada saja —, mengambil satu resolusi, — resolusi jang diarahkan kepada saja oleh karena Dewan Pertimbangan Agung adalah Dewan jang memberi pertimbangan kepada saja sebagai Presiden, tentang Manipol sebagai garis besar haluan negara dan pola pembangunan semesta kepada Presiden, sebagai berikut:

Dewan Pertimbangan Agung dalam sidangnja jang ke-5 tahun 1960,

Mengingat : 1. Amanat Penderitaan Rakjat jang haus pada perbaikan Nasib;

2. Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 jang menentukan salah satu tugas M.P.R. ialah menentukan garis-garis besar haluan Negara;

3. Amanat Presiden pada sidang pleno pertama Depernas mengenai pembangunan semesta berentjana pada tanggal 28 Agustus 1959;
4. Hasil Depernas tentang pola pembangunan semesta berdasarkan:
   a. Undang-undang No. 80 tahun 1958.
   b. Penetapan Presiden No. 4 tahun 1959.
5. Perlu segera dilantjarkan pembangunan disegala bidang;

Menimbang :

1. bahwa Dewan Pertimbangan Agung dan Kabinet telah memutuskan Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959 jang dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia adalah garis-garis besar haluan Negara;
2. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960 tanggal 29 Djanuari 1960;
3. bahwa bagian terbesar Rakjat Indonesia telah menerima dan memperlakukan Manipol sebagai garis-garis besar haluan Negara;

Memutuskan :

1. supaja Presiden mempertimbangkan kepada M.P.R.S., supaja segera memutuskan memperkuat penerimaan rakjat terbanjak pada Manipol dan perperintjiannja sebagai garis-garis besar haluan Negara jang wadjib dilaksanakan oleh setiap orang warga-negara Indonesia;
2. supaja Presiden mengusulkan kepada M.P.R.S. agar M.P.R.S. menerima amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana jang diutjapkan dan jang tertulis jang disampaikan kepada Depernas pada tanggal 28 Agustus 1959 sebagai garis-garis besar haluan pola pembangunan semesta;
3. supaja Presiden mengusulkan kepada M.P.R.S. agar M.P.R.S. menerima garis-garis besar Pembangunan hasil karya Depernas, manakala ia

sesuai dengan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana pada tanggal 28 Agustus 1959 itu;

4. supaja Presiden mengusulkan kepada M.P.R.S. memberikan mandat penuh kepada Presiden untuk dimana perlu membawa persoalan pelaksanaan pola pembangunan kepada D.P.R.-G.R.

Djakarta, 8 Nopember 1960.

Saudara-saudara maka itulah, saja dengan dukungan penuh dari pada Dewan Pertimbangan Agung, sekarang mengusulkan kepada Saudara-saudara agar supaja menerima atau mengambil keputusan mengenai garis besar haluan Negara, memperkuat penerimaan rakjat terbanjak mengenai Manipol dan perperintjiannja. Dan dibidang pembangunan, garis-garis besar pembangunan — jang saja persilakan Saudara-saudara tentukan sebagai bagian daripada garis-garis haluan Negara —, supaja Saudara-saudara menerima amanat saja tentang Pembangunan Semesta Berentjana jang saja utjapkan dan ditulis dan jang disampaikan kepada Depernas pada tanggal 28 Agustus 1959 sebagai garis-garis besar haluan pola pembangunan semesta. Saja minta Saudara Ketua nanti berikan kepada semua anggota pidato ini — pidato 28 Agustus 1959 —.

Dan djikalau Saudara-saudara sudah menerima amanat saja kepada Depernas tanggal 28 Agustus 1959, bahwa inti amanat itu adalah garis besar daripada pembangunan jang benar-benar berdasarkan atas Amanat Penderitaan Rakjat, garis besar daripada pembangunan jang benar-benar Saudara terima dan setudjui, djikalau Saudara telah demikian, Saudara lantas saja persilakan mengadji pola Depernas jang telah disusun oleh Depernas didalam sidang-sidangnja jang tjepat-kilat dalam gedung ini.

Dan saja hanja meminta kepada Saudara-saudara menindjau garis-garis besar daripada pola pembangunan sadja. Sekali lagi saja minta djanganlah Saudara-saudara terdjun kedalam persoalan detail, jang akan meminta waktu lama sekali, oleh karena M.P.R.S. menurut Undang-Undang Dasar '45 atau M.P.R. menurut Undang-Undang

Dasar '45 memang sekedar diminta menentukan garis-garis besar sadja. Tidak ada Undang-Undang Dasar '45 kita mengatakan bahwa M.P.R. harus menentukan garis-garis ketjil atau garis-garis ndjelimet, tetapi sekedar garis-garis besar. Ketjuali itu mengenai pembangunan, Saudara-saudara, Amanat Penderitaan Rakjat minta — menuntut kepada kita sekalian, agar supaja lekaslah kita ini bisa membangun, agar supaja sebagian daripada Amanat Penderitaan Rakjat, jaitu masjarakat adil dan makmur, lekas terlaksana.

Saudara-saudara barangkali mengetahui bahwa utjapan saja didalam sidang Depernas tempo hari ialah: Insja Allah s.w.t. saja ingin sekali pada tanggal 1 Djanuari 1961, 50 hari lagi, telah mengajunkan tjangkul pertama bagi pembangunan semesta ini di Pegangsaan Timur 56, tempat kita mengadakan Proklamasi 17 Agustus 1945.

Djadi tindjaulah pola pembangunan bikinan Depernas ini, apakah pola pembangunan bikinan Depernas ini sesuai apa tidak dengan amanat jang Presiden berikan pada tanggal 28 Agustus 1959. Djikalau Saudara berkata, „Jah sesuai", maka sebagai diharapkan oleh Dewan Pertimbangan Agung didalam putusannja jang ketiga, jaitu supaja Presiden mengusulkan kepada M.P.R.S., agar M.P.R.S. menerima garis-garis besar pembangunan hasil karya Depernas, manakala ia sesuai dengan Amanat Presiden tentang pembangunan semesta berentjana tertanggal 28 Agustus 1959.

Saudara-saudara, dus, sebetulnja Saudara-saudara punja pekerdjaan itu ja berat, tetapi gampang djuga, sekadar garis-garis besar sadja jang Saudara harus tindjau. Malahan, pada waktu Saudara menindjau garis-garis besar daripada pembangunan ini, jaitu garis-garis besar pembangunan pada tanggal 28 Agustus 1959, mungkin sekali, mungkin sekali saja malah beri tambahan bahan kepada Saudara-saudara. Bukan sadja bahan jang akan saja berikan kepada Saudara-saudara berupa pola bikinan Depernas jang „sebegini" pandjangnja, tetapi saja djuga, Insja Allah S.w.t., kemungkinan besar sekali, akan memberikan kepada Saudara-saudara bahan daripada sidang-sidang Dewan Menteri mengenai pembangunan. Sebab Dewan Menteri didalam sidang-sidangnja, para Menteri itu djuga sudah menindjau pola Depernas ini. Sebab Depernas adalah *pembantu*

daripada Presiden dan Menteri-menteri, maka pola pembangunan bikinan Depernas ini ditindjau oleh para Menteri dan para Menteri berhubungan dengan itu membuat satu tjatatan, jang tjatatan itu Insja Allah S.w.t., kemungkinan besar nanti pada waktu Saudara-saudara nanti delibereer mengenai garis-garis besar pembangunan, pola pembangunan bikinan Depernas akan saja berikan kepada Saudara-saudara pula sebagai tambahan bahan-bahan pertimbangan.

Saudara-saudara, maka dengan demikianlah Saudara-saudara sudah djelas, sebagai tadi saja katakan, pekerdjaan Saudara-saudara adalah berat dan mulia, tetapi sebenarnja tidak begitu berat dan mulia, — malahan saja minta kepada Saudara-saudara Jang Mulia, tetapi tidak terlalu berat, — saja minta kepada Saudara-saudara djanganlah bertélé-télé. Saudara-saudara tahu bahwa Konstituante jang bersidang didalam gedung ini, bertélé-télé sehingga achirnja terpaksa saja bubarkan Konstituante itu. Tetapi kemudian didalam gedung ini pula, Depernas bersidang, dan Depernas menebus, menebus noda, jah, noda jang djatuh kedalam tubuh rakjat Indonesia. Noda, oleh karena bangsa Indonesia didalam revolusi tidak boleh bertélé-télé, padahal Konstituante bertélé-télé. Noda ini ditebus oleh Depernas. Didalam tempo jang singkat Depernas telah menjusun ia punja pola. Oleh karena itu sebagai saja tadi katakan, saja menjatakan saluut kehormatan kepada Depernas umumnja, chususnja kepada Ketuanja, jaitu Prof Mr Muh. Yamin.

Ingat Saudara-saudara, sebagai tadi saja katakan, pembangunan semesta harus lekas berdjalan, garis besar haluan Negara harus lekas disahkan atau diperkuat oleh Saudara-saudara. Kita sudah memiliki Negara 15 tahun lamanja, Negara memerlukan tegas haluannja, pembangunan memerlukan tegas garis-garis besarnja.

Segala alat perlembagaan jang tadi disebutkan oleh Saudara Ketua, baik M.P.R., maupun D.P.A., maupun Mandataris daripada M.P.R. jang bernama Presiden dengan ia punja pembantu-pembantu pelaksanaan mandat daripada M.P.R. itu, maupun lembaga jang telah saja adakan jang bernama Depernas, semua lembaga-lembaga ini tak lain tak bukan hanjalah alat, alat revolusi.

Meskipun lembaga-lembaga ini ditjantumkan didalam Undang-Undang Dasar '45, toh saja berkata lembaga-lembaga ini sekedar

alat revolusi, bahkan Undang-Undang Dasar '45 adalah alat revolusi Bahkan Negara adalah alat revolusi. Negara adalah sekedar satu bagian sadja daripada Amanat Penderitaan Rakjat. Negara itu adalah satu alat untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat itu, jaitu satu masjarakat adil dan makmur, satu hidup merdeka, satu hidup internasional jang bersahabat dan damai dengan semua bangsa. Saudara-saudara adalah alat revolusi dan djanganlah Saudara-saudara bertélé-télé, sebab sebagai tempo hari telah saja katakan kepada Konstituante: Met of zonder Konstituante — dengan atau tanpa Konstituante — revolusi berdjalan terus. Perkataan itu saja ulangi sekarang kepada Saudara-saudara: Met of zonder M.P.R.S. — dengan atau tanpa M.P.R.S. — revolusi berdjalan terus. Revolusi berdjalan tanpa Presiden Sukarno. Revolusi berdjalan terus tanpa Kabinet Kerdja. Revolusi berdjalan terus met of zonder D.P.A. Revolusi berdjalan terus met of zonder D.P.R.-G.R. Revolusi berdjalan terus met of zonder M.P.R.S. Oleh karena itu saja minta kesedaran tentang hal ini kepada Saudara-saudara sekalian.

Garis besar sadja Saudara-saudara tentukan. Dan pekerdjaan Saudara-saudara dipermudah dengan sudah adanja Manipol dan Usdek. Garis-garis besar pembangunan Saudara tentukan, sudah ada pola Depernas, mungkin sekali malahan saja beri tambahan bahan pertimbangan. Tentukan sekedar garis-garis besar sadja.

Didalam hal garis-garis besar ini ada memang *soal-soal prinsipieel*, misalnja didalam hal pembangunan itu bagaimanakah sikap kita terhadap kepada persoalan investment dan loan dari luar negeri?

Ini satu hal jang prinsipieel. Apakah kita membenarkan investment luar negeri dibumi Indonesia? Atau kita, sebagai sudah saja katakan, prefereer loan diatas investment? Apakah pendirian M.P.R.S. tentang joint-enterprise? Apakah M.P.R.S. setudju dengan joint-enterprise, ataukah tidak? Apakah M.P.R.S. akan mengatakan, bahwa garis besar pembangunan harus dilaksanakan tanpa atau djikalau perlu met joint-enterprise dengan modal asing? Bagaimana pendirian M.P.R.S. terhadap kepada persoalan production-sharing? Bolehkah kita didalam usaha pembangunan kita mendjalankan

politik production-sharing? Ini adalah hal garis besar dan pokok. Konsentrir Saudara punja pikiran sekedar atas hal-hal jang demikian itu dan tidak memasuki soal-soal jang ndjlimet. Apalagi soal angka-angka, Saudara-saudara, ja perlu Saudara menarik besar angka-angka, tetapi djangan sampai ndjlimet-ndjlimet, sebab angka-angka itu datang dari siapa? Dari manusia-manusia pula. Daripada orang-orang jang bekerdja dari sesuatu biro, ia berkata bahwa angkanja buat itu sekian, angkanja buat itu sekian. Saja minta Saudara-saudara djangan ndjlimet. Tetapi seperti saja katakan kepada D.P.R. tempo hari dan djuga kepada Konstituante, tiap-tiap Dewan harus menginsjafi bahwa dia adalah alat revolusi.

Tiap-tiap Dewan djanganlah mendjadi tempat berdebat sadja. Tiap-tiap Dewan djanganlah mendjadi tempat sekedar mengutjapkan pidato-pidato sadja. Tetapi saja mengharap daripada Dewan Perwakilan Rakjat, daripada Dewan Perantjang Nasional, daripada Konstituante tempo hari, supaja Dewan-dewan ini adalah Dewan-dewan jang menelorkan *konsepsi-konsepsi.*

Konsepsi-konsepsi bagaimana kita bisa memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat. Jang diminta daripada Saudara-saudara, dus diminta djuga daripada M.P.R.S., adalah *konsepsi*. Saja tidak minta kepada Saudara-saudara dan demikian pula Undang-Undang Dasar '45 tidak minta kepada Saudara-saudara ke-ndjlimetan. Saja minta sekedar konsepsi, Undang-Undang Dasar '45 minta sekedar garis besar. Saja minta dus kepada Saudara-saudara individueel, supaja Saudara-saudara itu konseptor-konseptor, orang-orang jang mengeluarkan tjipta, orang-orang jang mengeluarkan rentjana baik politik maupun dilapangan pembangunan. Konseptor-konseptor jang dikumpulkan didalam sidang besar jang bernama M.P.R.S.

Ini Saudara-saudara, pekerdjaan jang mulia, oleh karena memang tidak ada satu bangsa bisa menjelesaikan revolusi tanpa konsepsi. Revolusi adalah realisasi daripada konsepsi. Dan tidakkah kita telah berulang-ulang berkata bahwa revolusi kita belum selesai. Konsepsi-konsepsi masih diperlukan. Adakah diantara Saudara-saudara seseorang jang berkata bahwa revolusi kita sudah selesai? Djikalau ada diantara Saudara-saudara jang mengatakan bahwa revolusi kita

sudah selesai, tanja, tanja kepada rakjat, sudahkah revolusi kita selesai? Tiap-tiap orang dikalangan rakjat akan berkata: revolusi kita belum selesai. Sebab apa jang diamanatkan oleh rakjat didalam penderitaannja jang sepedih-pedihnja, ber-abad-abad, berpuluh-puluh tahun, ialah belum terpenuhi. Dan oleh karena Amanat Penderitaan Rakjat ini belum terpenuhi, maka oleh karena itulah rakjat berkata: revolusi belum selesai. Kita masih didalam revolusi dan kita harus melandjutkan revolusi ini. Dan revolusi ini adalah, sebagai tadi saja katakan, satu paradox: untuk melepaskan diri kita daripada penderitaan, kita mendjalankan penderitaan-penderitaan. Untuk melepaskan kita daripada perbudakan, kita mendjalankan perdjoangan melawan perbudakan-perbudakan itu meskipun perdjoangan itu meminta penderitaan.

Barangkali ada orang jang berkata: kenapa ini Presiden selalu mengadjak pemimpin-pemimpin berevolusi, berevolusi? Tidakkah sudah tjukup penderitaan dalam revolusi itu? Tidakkah tjukup pendemitaan? Kenapa Presiden selalu mengandjurkan: teruskan revolusi, teruskan revolusi, padahal tiap-tiap manusia mengetahui bahwa revolusi adalah penderitaan, adalah korbanan dimana perlu, adalah pemerasan tenaga dengan belum tentu pada saat itu telah tertebusnja djandji daripada revolusi itu?

Djikalau ada orang jang berkata demikian kepadaku, aku akan mendjawab: selama belum ada seorang ibu datang kepada saja, bahwa ia menjalahkan kepada saja, bahwa puteranja mendjalankan revolusi; selama belum ada seorang ibu menuduh kepada saja bahwa saja membuat puteranja itu berdjoang-berdjoang, berdjoang, bahkan menderita, menderita, bahkan berkorban, berkorban; selama belum ada seorang ibu jang berkata demikian kepada saja, saja akan tetap berkata: revolusi Indonesia belum selesai.

Dan hal itu saja ulangi lagi kepada Saudara-saudara: Revolusi kita belum selesai. Saudara-saudara adalah alat revolusi. Bekerdjalah sebagai alat revolusi! Tjekatan, gesit, tegas, oleh karena rakjat menunggu-nunggu. Rakjat menunggu-nunggu akan satu hasil daripada perlembagaan Negara ini, jaitu M.P.R.S.

Dengan demikian Saudara-saudara, maka amanat jang saja berikan ini saja anggap sebagai *peresmian* pembukaan sidang pertama daripada M.P.R.S. ini. Moga-moga Tuhan selalu memberkati kita.

Terima kasih.

Sesuai dengan tjatatan stenografis.

Sekertaris M.P.R.S.,

(Mr. Munadjat Danusaputro).

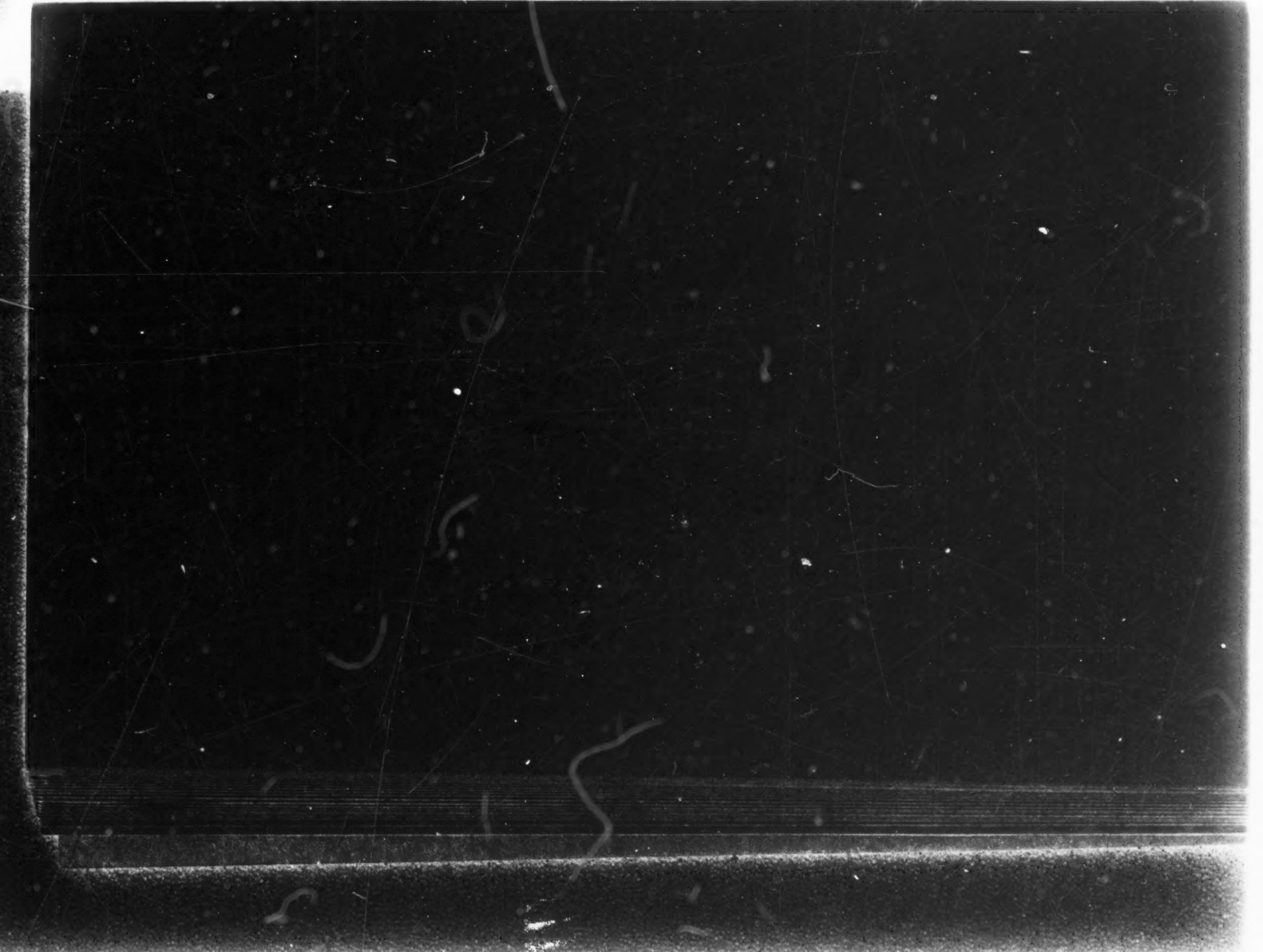

IV.

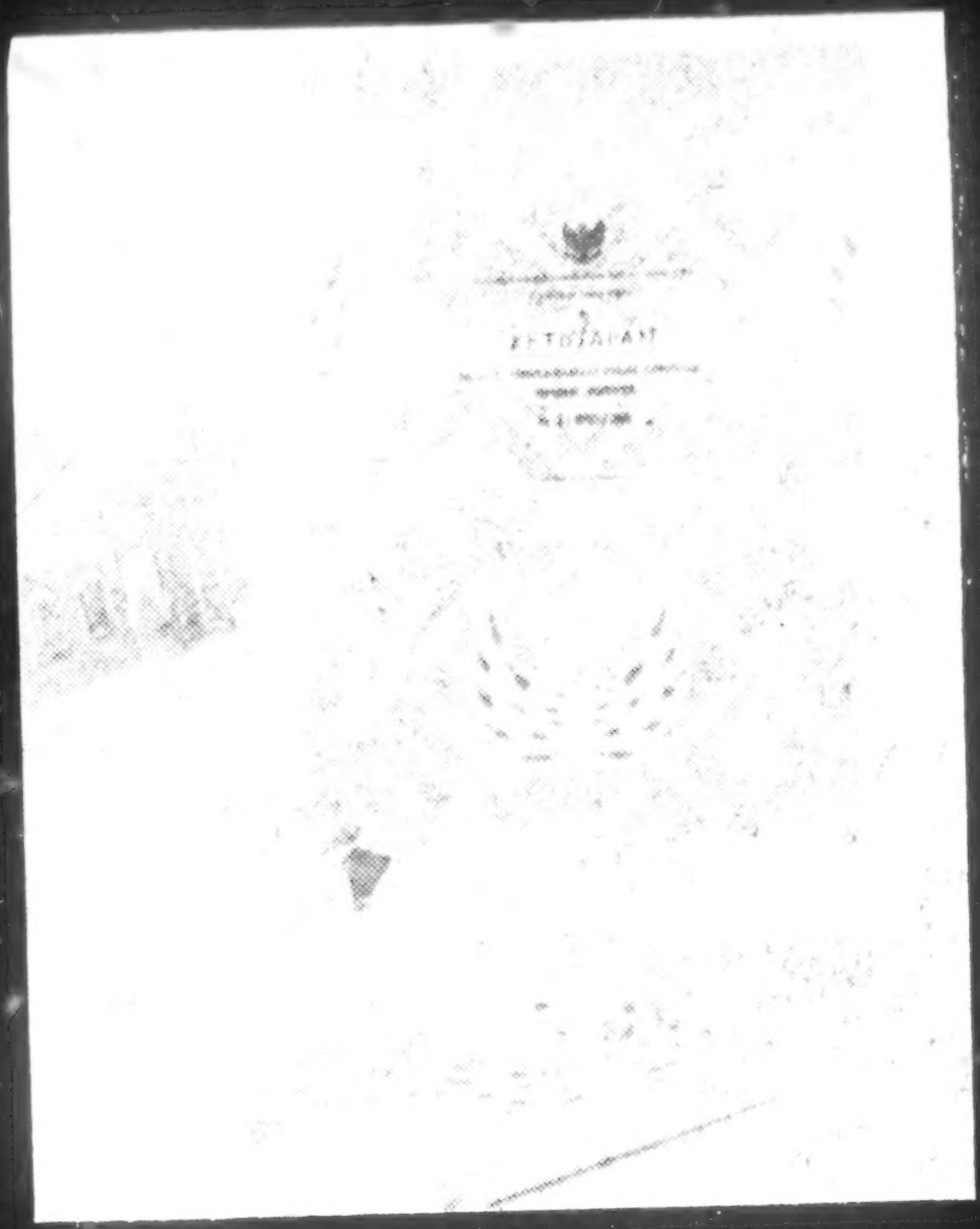

NASKAH ASLI

KETETAPAN

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

No. I/MPRS/1960

tentang

MANIFESTO POLITIK REPUBLIK INDONESIA

sebagai

GARIS-GARIS BESAR DARIPADA HALUAN NEGARA

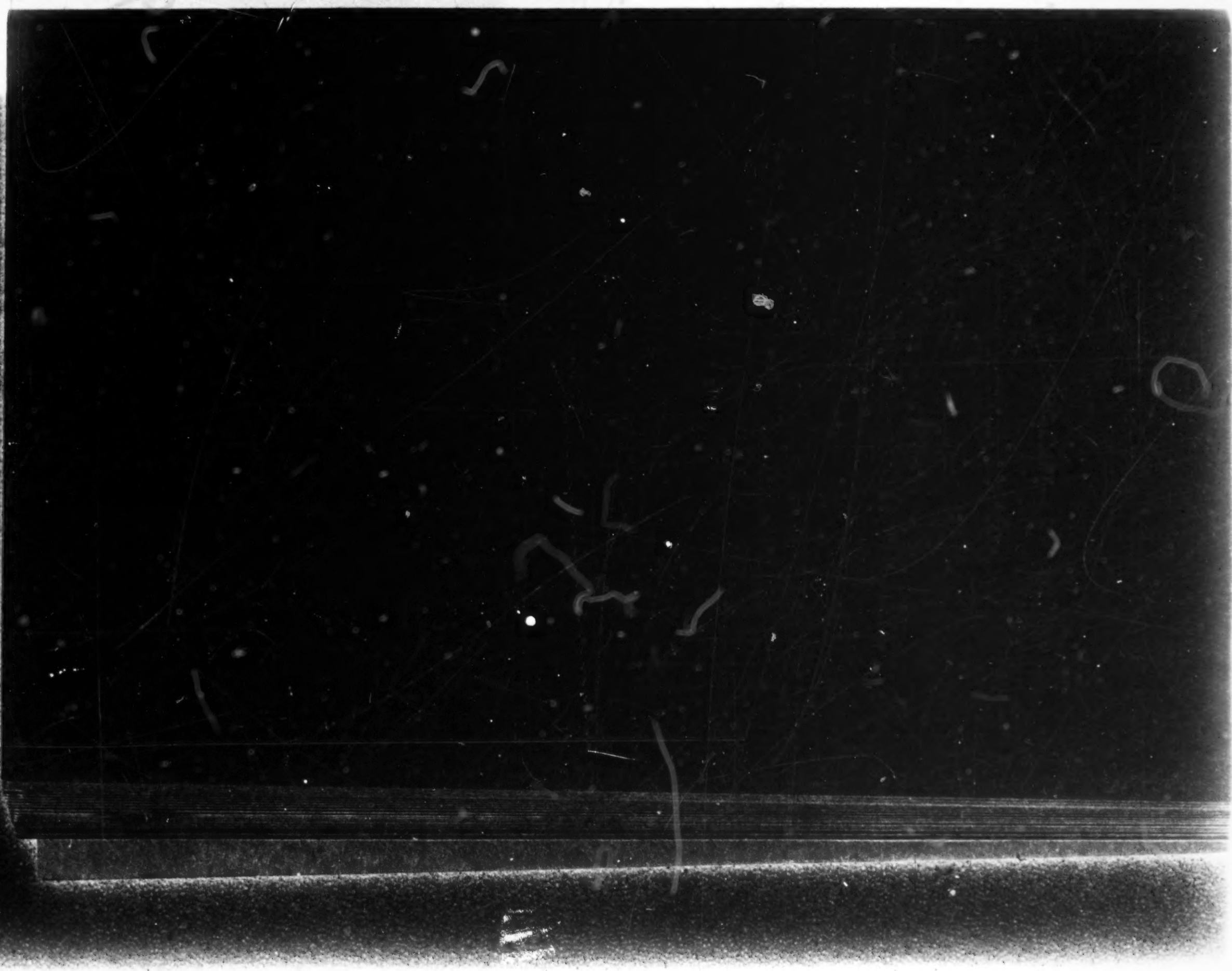

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA,

Dalam rapat pleno ke-4 Sidang Pertama pada tanggal 19 Nopember 1960 di Bandung.

Setelah membahas:

1. Amanat Negara jang diutjapkan oleh Presiden pada Pembukaan Sidang Pertama Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pada hari Pahlawan 10 Nopember 1960;
2. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1959, jang berdjudul „Penemuan kembali Revolusi kita" dan jang terkenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia;
3. Keputusan Dewan Pertimbangan Agung tentang „Perintjian Manifesto Politik Republik Indonesia 17 Agustus 1959" tertanggal 25 September 1959 No. 3/Kpts/Sd/II/59, jang telah disetudjui oleh Presiden dalam „Kata Pengantar" Manifesto Politik Republik Indonesia pada hari Pahlawan 10 Nopember 1959;
4. Amanat Presiden pada Sidang Pleno pertama Dépernas mengenai Pembangunan Semesta Berentjana pada tanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan dan jang tertulis, jang mendjadi bagian daripada haluan Negara;
5. Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 jang terkenal dengan nama „Djalannja Revolusi Kita" jang mendjadi pedoman pertama daripada pelaksana Manifesto Politik Republik Indonesia;
6. Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 jang diutjapkan dimuka Sidang Umum P.B.B. jang berdjudul "To build the world anew" (Membangun dunia kembali);

Menimbang: bahwa perlu segera ditetapkan garis-garis besar daripada haluan Negara dengan bagian-bagiannja serta pedoman-pedoman pelaksanaannja;

Mengingat:

1. Amanat Penderitaan Rakjat jang tergambar dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
2. Dekrit Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia tanggal 5 Djuli 1959;
3. Undang-undang Dasar 1945:
   a. Pasal 1 ajat 2 jang menentukan bahwa „Kedaulatan adalah di tangan Rakjat dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat";
   b. Pasal 3 jo pasal IV Aturan Peralihan;
   c. Pasal 2 ajat 3;
4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959;
5. Penetapan Presiden No. 1 tahun 1960;
6. Bahwa Rakjat Indonesia diseluruh kepulauan Nusantara Indonesia telah menerima dan mempertahankan Manifesto Politik Republik Indonesia serta perperintjiannja;

Mendengar: Permusjawaratan dalam rapat-rapat M.P.R.S. pada tanggal 17 s/d 19 Nopember 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Ketetapan tentang garis-garis besar daripada haluan Negara sebagai berikut:

Pasal I.

Memperkuat Manifesto Politik Republik Indonesia serta perperintjiannja sebagai garis-garis besar daripada haluan Negara.

Pasal II.

Amanat Presiden pada Sidang Pleno Dépernas mengenai Pembangunan Semesta Berentjana pada tanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan dan jang tertulis adalah garis-garis besar daripada haluan pembangunan.

Pasal III.

Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 jang terkenal dengan nama „Djalannja Revolusi Kita" dan pidato Presiden tangga

30 September 1960 dimuka Sidang Umum P.B.B. jang berdjudul "To build the world anew" (Membangun dunia kembali) adalah pedoman-pedoman pelaksanaan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Pasal IV.

Menugaskan dengan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Ditetapkan dikota Bandung pada
tanggal 19 Nopember 1960.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
Republik Indonesia

Pd. Ketua,

(CHAIRUL SALEH.)

Wakil Ketua,

(Mr Ali Sastroamidjojo.)

Wakil Ketua,

(K. H. Idham Chalid.)

Wakil Ketua,

(D. N. Aidit.)

Wakil Ketua,

(Kol. Wilujo Puspojudo.)

V.

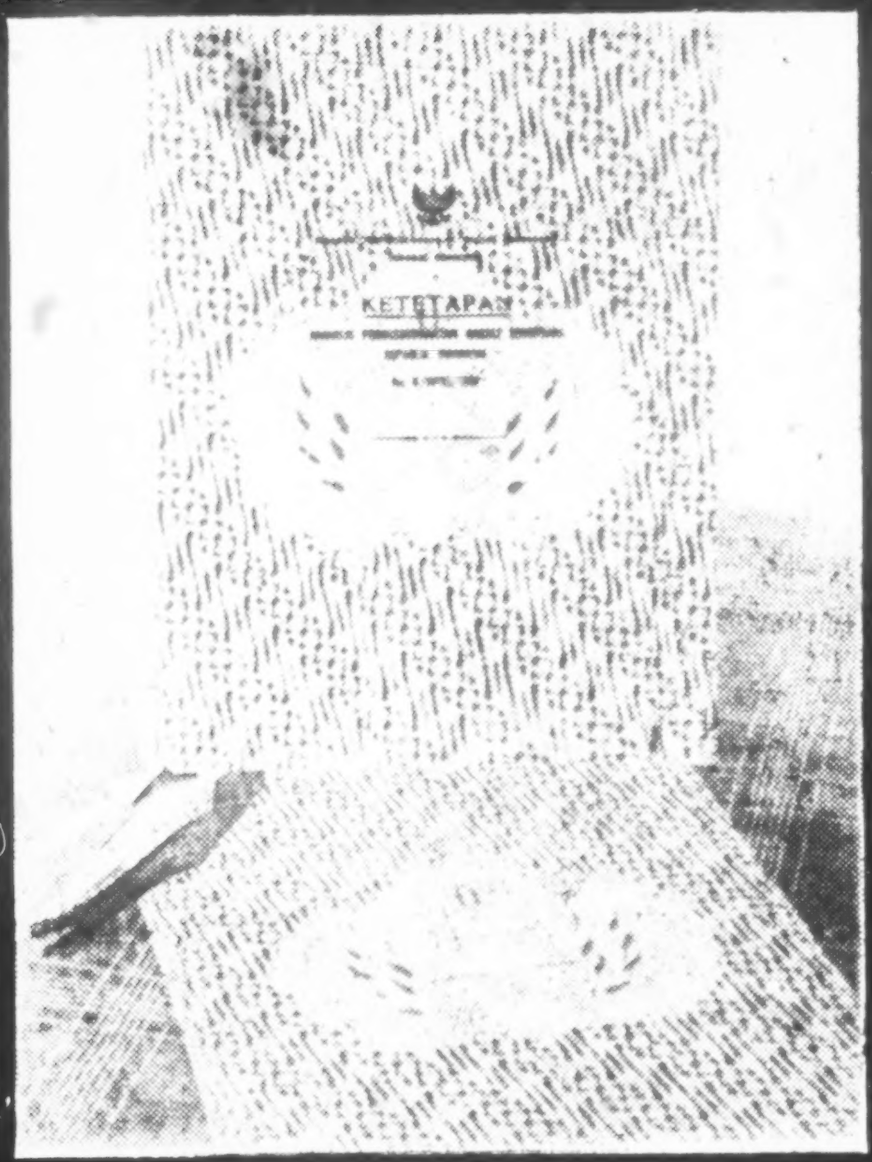

NASKAH ASLI

KETETAPAN

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA

REPUBLIK INDONESIA

No. II/MPRS/1960

tentang

GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENTJANA TAHAPAN PERTAMA 1961-1969

443/B (4)

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA REPUBLIK INDONESIA

Dalam Rapat Pleno ke-5 tanggal 3 Desember 1960 Sidang Pertama di Bandung.

Setelah membahas:

„Rantjangan Dasar Undang-undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun 1961—1969" hasil karya Depernas, dan menelitinja atas dasar Amanat Pembangunan Presiden pada tanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan dan jang tertulis sebagai garis-garis besar daripada haluan pembangunan:

Menimbang:

1. bahwa perlu segera ditetapkan Garis-garis Besar Pola Pembangunan serta ketentuan-ketentuan pokok pelaksanaannja;
2. bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berentjana adalah suatu pembangunan dalam masa peralihan, jang bersifat menjeluruh untuk menudju tertjapainja masjarakat-adil-dan-makmur-berdasarkan-Pantjasila atau Masjarakat Sosialis Indonesia dimana tidak terdapat penindasan atau penghisapan atas manusia oleh manusia, guna memenuhi Amanat Penderitaan Rakjat;
3. bahwa Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun: 1961—1969 adalah pembangunan tahap pertama, jang nasional, semesta, berentjana dan berisikan tripola untuk meletakkan dasar-dasar pembangunan rochaniah dan djasmaniah jang sehat dan kuat serta pembangunan tata-perekonomian nasional jang sanggup berdiri sendiri dan tidak tergantung kepada pasang-surutnja pasaran dunia;
4. bahwa sjarat pokok untuk pembangunan rochaniah jang sehat dan kuat adalah antara lain menegakkan kembali kepribadian dan kebudajaan Indonesia jang berdasarkan semangat demo-

krasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan gotong-rojong seperti didjelaskan dalam dasar negara Pantjasila, dan mengutamakan kesadaran hidup bersahadja dan kedjudjuran sesuai dengan adjaran ke-Tuhanan Jang Maha Esa;

5. bahwa sjarat pokok untuk pembangunan tata-perekonomian nasional adalah antara lain pembebasan berdjuta-djuta kaum tani dan rakjat pada umumnja dari pengaruh kolonialisme, imperialisme, feodalisme dan kapitalisme dengan melaksanakan „landreform" menurut ketentuan-ketentuan Hukum Nasional Indonesia, seraja meletakkan dasar-dasar bagi industrialisasi, terutama industri dasar dan industri berat jang harus diusahakan dan dikuasai oleh negara;

Mengingat:

1. Amanat Penderitaan Rakjat jang terkandung dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
2. Pasal-pasal 27 ajat 2, 28, 29, 30, 31, 32, 33 dan 34 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
3. Pasal 1 ajat 2 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 jang menentukan bahwa „Kedaulatan adalah ditangan Rakjat, dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat";
4. Pasal 3 jo pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
5. Pasal 2 ajat 3 Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945;
6. Amanat Negara jang diutjapkan oleh Presiden pada pembukaan Sidang Pertama M.P.R.S. tanggal 10 Nopember 1960;
7. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. I/MPRS/1960 tanggal 19 Nopember 1960 tentang „Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Garis-garis Besar daripada haluan Negara";
8. Permusjawaratan dalam rapat-rapat Komisi-komisi, musjawarah dan mufakat Pimpinan M.P.R.S. dengan Badan Pembantu Musjawarah (BAPEMUS) dan rapat-rapat Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara pada tanggal 17 Nopember 1960 sampai dengan 3 Desember 1960;

M e m u t u s k a n :

Menetapkan Ketetapan tentang Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Tahapan Pertama 1961—1969 sebagai berikut:

B A B I.
GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN

Pasal 1

(1) Menjatakan bahwa Garis-garis Besar Pola Pembangunan termasuk Pola Projek jang dimuat dalam RANTJANGAN DASAR UNDANG-UNDANG PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENTJANA DELAPAN TAHUN 1961 — 1969 hasil karya Depernas jang termuat dalam Buku kesatu Djilid I, II dan III pada umumnja sesuai dengan Amanat Pembangunan Presiden tertanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan maupun jang tertulis dan pada umumnja sesuai pula dengan Manifesto Politik Republik Indonesia jang telah diperkuat oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara dengan Ketetapan No. I/MPRS/1960.

(2) Menerima Garis-garis Besar Pola Pembangunan hasil karya Depernas seperti termuat dalam Buku kesatu Djilid I, II, III sebagai Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dengan ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam pasal-pasal dibawah ini.

B A B II.
KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Bidang Mental/Agama/Kerochanian/Penelitian

(1) Melaksanakan Manifesto Politik dilapangan pembinaan Mental/Agama/Kerochanian dan Kebudajaan dengan mendjamin sjarat-sjarat spirituil dan materiil agar setiap warga-negara dapat mengembangkan kepribadiannja dan kebudajaan Nasional Indonesia serta menolak pengaruh-pengaruh buruk kebudajaan asing.

(2) Menetapkan Pantjasila dan Manipol sebagai mata peladjaran diperguruan rendah sampai dengan perguruan tinggi.

(3) Menetapkan pendidikan agama mendjadi mata peladjaran disekolah-sekolah mulai dari sekolah rakjat sampai dengan Universitas-universitas Negeri dengan pengertian bahwa murid-murid berhak tidak ikut-serta, apabila wali murid/murid dewasa menjatakan keberatannja.

(4) Membina sebaik-baiknja pembangunan rumah-rumah ibadah dan lembaga-lembaga keagamaan.

(5) Menjelenggarakan kebidjaksanaan dan sistim pendidikan nasional jang tertudju kearah pembentukan tenaga-tenaga ahli dalam pembangunan sesuai dengan sjarat-sjarat manusia Sosialis Indonesia, jang berwatak luhur.

(6) Mengusahakan agar segalá bentuk dan perwudjudan kesenian mendjadi milik seluruh rakjat dan menjinarkan sifat-sifat nasional.

(7) Memperkuat usaha penerangan sebagai media penggerak rakjat dan massa revolusioner.

(8) Kebidjaksanaan penelitian disesuaikan dengan politik luarnegeri bebas dan aktif serta mengikut-sertakan rakjat tanpa meninggalkan sjarat-sjarat ilmiah.

Pasal 3

Bidang Kesedjahteraan

(1) Kebidjaksanaan pembangunan dibidang kesedjahteraan ditudjukan untuk mewudjudkan kesedjahteraan rakjat jang merata dalam keseluruhannja.

(2) Mendjamin setiap warga-negara akan pekerdjaan dan penghasilan jang lajak guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari bagi dirinja sendiri beserta keluarganja, seperti antara lain keperluan sandang-pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan, kebudajaan dan keagamaan serta djaminan untuk hari tua.

(3) Membangunkan usaha-usaha chusus untuk meninggikan tingkat hidup kaum buruh, tani, nelajan dan kaum pekerdja pada umumnja dengan menghapuskan beban-beban sebagai peninggalan dari hubungan kerdja kolonial dan feodal serta memberantas pengangguran.

Pasal 4

Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan

(1) Untuk mendjamin berhasilnja pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun: 1961—1969, diperlukan penjesuaian seluruh aparatur negara dengan tugasnja dalam rangka pelaksanaan Manifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana serta Ketetapan-ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara.

(2) Mengikut-sertakan rakjat dan seluruh alat-kelengkapan serta seluruh semangat dan daja-kerdja bangsa dalam suatu gerakan massa (massa-aksi) jang berbentuk satu organisasi Front Nasional.

(3) Landreform sebagai bagian mutlak daripada revolusi Indonesia adalah basis pembangunan semesta jang berdasarkan prinsip, bahwa tanah sebagai alat produksi tidak boleh didjadikan alat penghisapan.

(4) Politik keamanan/pertahanan Republik Indonesia berlandaskan Manifesto Politik Republik Indonesia beserta perperintjiannja dan berpangkal kepada kekuatan rakjat dengan bertudjuan mendjamin keamanan/pertahanan nasional serta turut mengusahakan terselenggaranja perdamaian dunia.

(5) Pertahanan Negara Republik Indonesia bersifat defensif-aktif dan bersikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme dan berdasarkan pertahanan rakjat semesta jang berintikan tentara sukarela dan milisi.

(6) Mengingat bahwa djalannja Pembangunan Nasional Semesta Berentjana adalah berhubungan erat dengan pelaksanaan keamanan maka perlu dilaksanakan pembangunan tata-perdesaan jang demokratis (democratic rural development) jang merata dan berentjana sebagai salah satu landasan dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta.

Pasal 5

Bidang Produksi

(1) Pembangunan Nasional Semesta Berentjana 1961-1969 supaja ditudjukan kearah pengutamaan produksi bahan keperluan

hidup rakjat jang pokok untuk mentjapai taraf mentjukupi keperluan serta menudju kearah pembagian pendapatan nasional jang adil dan merata.

(2) Tjabang-tjabang produksi jang vital untuk perkembangan perekonomian nasional dan menguasai hadjat hidup rakjat banjak, dikuasai oleh Negara, djika perlu dimiliki oleh Negara.

(3) Untuk mengembangkan daja produksi guna kepentingan masjarakat dalam rangka ekonomi terpimpin, perlu diikut-sertakan rakjat dalam pengerahan semua modal dan potensi (funds and forces) dalam negeri, dimana kaum buruh dan tani memegang peranan jang penting.

Pasal 6

Bidang Distribusi dan Perhubungan

(1) Pemerintah menjelenggarakan tata-distribusi barang-barang keperluan hidup sehari-hari agar dapat sampai ditangan rakjat dengan tjepat, tjukup, merata, murah dan baik.

(2) Pemerintah mengatur dan menjalurkan distribusi bahan-bahan penting bagi penghidupan rakjat banjak dengan mengutamakan ikut-sertanja koperasi-koperasi, Rukun-rukun Kampung, Rukun-rukun Tetangga serta sedjenisnja dan swasta Nasional sebagai pembantu.

(3) Pemerintah menjelenggarakan impor barang-barang kebutuhan pokok untuk rakjat dan bahan-bahan baku serta bahan-bahan penolong untuk industri vital, dan menguasai ekspor bahan-bahan baku.

(4) Negara menguasai dan menjelenggarakan perhubungan dan angkutan didarat dan laut jang vital, serta angkutan udara dan perhubungan telekomunikasi seluruhnja.

Pasal 7

Bidang Keuangan dan Pembiajaan

(1) Sumber pembiajaan bagi Pembangunan Nasional Semesta Berentjana itu pertama-tama harus diusahakan atas dasar kekuatan dalam negeri sendiri dengan mengerahkan semua modal dan potensi

(funds and forces) jang progresip, dengan sedjauh mungkin tidak menambah beban rakjat.

(2) Djika modal nasional guna pembiajaan pembangunan belum mentjukupi, dapat diadakan kerdja-sama ekonomi dan teknik dalam arti luas dengan luar negeri, dengan ketentuan bahwa hal tersebut:

a. tidak bertentangan dengan Manifesto Politik dan Amanat Presiden tentang Pembangunan;
b. disusun dalam perundang-undangan bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakjat.

(3) Dalam rangka pembangunan tata-perekonomian nasional jang kuat dan bebas, diperlukan adanja suatu sistim moneter jang sehat dan stabil guna melantjarkan produksi, distribusi dan perdagangan, serta peredaran uang jang berentjana.

Pasal 8

Ketentuan Pelaksanaan

(1) Dalam pelaksanaan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun: 1961-1969, maka hasil karya Depernas Djilid IV sampai dengan XVII perlu diperhatikan oleh Pemerintah sebagai pedoman pelaksanaan manakala tidak bertentangan dengan ketetapan ini.

(2) Untuk mendjamin berlangsungnja Pembangunan Nasional Semesta Berentjana Delapan Tahun: 1961-1969, pelaksanaan pembangunan ditetapkan dengan ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

B A B III.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 9

(1) Pada Ketetapan ini diikut-sertakan tiga lampiran jang dinamakan Lampiran A, Lampiran B dan Lampiran C.

(2) Lampiran A tersebut pada ajat (1) diatas merupakan penjempurnaan daripada Garis-garis Besar Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana karya Depernas, sedangkan Lampiran B dan Lampiran C merupakan pedoman bagi pelaksanaannja.

(3) Isi Lampiran A mempunjai kekuatan sebagai amandemen-amandemen daripada Buku kesatu Djilid I, II dan III.

B A B IV.
KEKUASAAN PENUH

Pasal 10

Memberikan kekuasaan penuh kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/Pemimpin Besar Revolusi Indonesia untuk melaksanakan putusan-putusan ini.

Ditetapkan dikota Bandung
pada tanggal 3 Desember 1960.

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA
Republik Indonesia

Pd. Ketua,

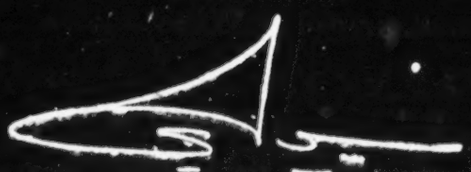

(CHAIRUL SALEH.)

Wakil Ketua,

Mr Ali Sastroamidjojo.)

Wakil Ketua,

(K. H. Idham Chalid.)

Wakil Ketua,

(D. N. Aidit.)

Wakil Ketua,

(Kol. Wilujo Puspojudo.)

7. *LAMPIRAN*

KETETAPAN No. II/MPRS/1960 : A — B — C.

LAMPIRAN: A (PENJEMPURNAAN)

I. BIDANG MENTAL/AGAMA/KEROCHANIAN/PENELITIAN

Mentalita (§ 317)

1. Mentalita dari pada manusia Indonesia ialah jang mendorong realisasi pembangunan semesta kearah Sosialisme Indonesia.
2. Pembangunan Mental harus meliputi :
   a. Agama
   b. kebudajaan
   c. pendidikan/ilmu pengetahuan
   d. penerangan massa
   e. filsafat.
3. a. Jang penting bagaimana aparatur disesuaikannja untuk mampu melaksanakan.
   b. Pentingnja perhatian jang mendalam terhadap pentjiptaan kader pembangunan.
   c. Untuk intensitet jang lebih mendalam terhadap soal ini perlu ada perbaikan organisasi/aparatur.

Agama/Kerochanian

4. Ditambahkan perkataan „Kitab-kitab Sutji" kepada kalimat : 12. Biro Penterdjemahan/Penerbitan (Sastra Daerah dan Sastra Luar Negeri serta buku-buku Keilmuan ..... kedalam bahasa Indonesia)".
   (Schema I Kebudajaan, Buku kesatu Djilid I halaman 156).
5. Ditambah perkataan „Buku-buku Bahasa Arab" kedalam angka 6 projek ke IV § 877 halaman 974 Buku ketiga Djilid V.
6. Ditambah : „Lembaga Penjelidikan Agama, Gerakan/Aliran Kerochanian" jang bertugas sebagai berikut :

a. menjalurkan Kepertjajaan/Agama kearah pandangan jang sehat.
b. menjalurkan perkembangan Kepertjajaan/Agama itu kearah ke-Tuhanan Jang Maha Esa.
c. mendjaga keamanan dan kesedjahteraan rochani bangsa Indonesia. (Daftar Lembaga Buku Ketiga).

7. Ditambah ajat c (baru) „Perguruan Tinggi/Fakultas Agama" (semua agama) jang sifatnja merupakan pendidikan chusus agama dan ajat c lama mendjadi ajat d baru (Buku kesatu Djilid I-III § 353 halaman 443).
8. Disisipkan perkataan : „serta kepertjajaan" pada kalimat : Sifat aseli tjara hidup berfikir .....
rakjat Indonesia (Buku kesatu Djilid III § 318).
9. Ditambah alinea e (baru) „Spirituil/Kepertjajaan : Pertjaja adanja Zat Mutlak sebagai pangkal segala apa jang ada dan terdjadi didunia ini".

Kebudajaan

10. § 307 sesudah angka 6 ditambah angka 7 (baru) : „Biro Penterdjemahan Buku-buku ilmu pengetahuan harus berdasarkan politik luar negeri jang bebas dan aktif".
11. Diusulkan supaja perkataan „mempertahankan" ditukar dengan perkataan „memperkembangkan" (§ 305 halaman 425 baris c).
12. Tudjuan pembangunan kebudajaan, mental, agama dan kerochanian, dalam tahap pertama ini adalah untuk menggerakkan massa-rakjat guna melantjarkan realisasi Sosialisme Indonesia.
13. Kebudajaan jang meliputi kerochanian dan kedjasmanian harus berdasarkan Pantjasila menudju masjarakat Sosialis Indonesia.
14. § 305 sebagai a (baru) supaja ditambah perkataan : „Membentuk manusia Sosialis Indonesia".
15. Diusulkan penambahan kalimat baru : „Persatuan/Sublimasi unsur kebudajaan daerah mendjadi kebudajaan Indonesia"

sebagai a (1) pada § 306 tentang usaha-usaha untuk mentjapai tudjuan .....

16. Pembangunan semesta dibidang kebudajaan dititik-beratkan pada:
    a. Projek-projek jang dapat menggerakkan kegiatan-kegiatan kebudajaan setjara massal diseluruh Indonesia,
    b. melindungi kebudajaan nasional terhadap pengaruh kebudajaan asing jang merusak kepribadian Indonesia,
    c. pusat konsentrasi kekuatan kebudajaan nasional, ialah : desa, sekolah, pabrik, angkatan bersendjata dan lain sebagainja,
    d. pembangunan kebudajaan harus diselenggarakan dalam rangka nation building,
    e. projek-projek urgen meliputi :
        (I) seni suara/musik,
        (II) senitari,
        (III) sandiwara/senidrama,
        (IV) perpustakaan/kesusasteraan,
        (V) film,
        (VI) taman kebudajaan (museum/national art gallery)-rakjat sedikit-dikitnja sebuah ditiap ibukota Daswati I,
        (VII) perundang-undangan musik, sastra, dan sebagainja,
        (VIII) film : Film bukan semata-mata barang dagangan, melainkan alat pendidikan dan penerangan. Dalam impor film perlu ditentukan keseimbangan, sesuai dengan politik luar negeri jang bebas dan aktif Film Indonesia perlu dilindungi dari persaingan dengan luar negeri.
        Hanja dengan demikian ia terdjamin dalam kemadjuan dan perkembangannja.

Penerangan Massa

17. Penjempurnaan dan pembinaan pers menudju kepada pers Sosialis Indonesia, dengan djalan :

a. Pembangunan, Kantor Berita Nasional (National Press Agency) jang kuat dan lengkap.
b. Pemberian bantuan dan fasilitas kepada perusahaan-perusahaan persurat-kabaran nasional untuk menjelenggarakan seminar-seminar pers.
c. Latihan/kursus kepemimpinan.
d. Pendidikan wartawan.
e. Press-house.
f. Pemberian bantuan kertas.
g. Penindjauan kedaerah-daerah pembangunan diseluruh Indonesia.
h. Undang-undang Pers jang antara lain berisi :
   (I) penegasan fungsi pers dalam pelaksanaan Manipol (dalam revolusi dan pembangunan semesta),
   (II) penegasan hak-hak dan kewadjiban pers,
   (III) penegasan hak-azasi, sesuai dengan U.U.D. pasal 28.
i. Menindjau kembali peraturan-peraturan jang sudah berlaku sekarang ini, disesuaikan dengan fungsi dan hak/kewadjiban pers.
j. Mendorong penerbitan persurat-kabaran chusus untuk golongan-golongan karya.
k. Membangun pabrik-pabrik kertas koran (newsprint) sehingga keperluan kertas koran dapat ditjukupi dan tidak tergantung pada impor.
l. Mendorong dan membentuk usaha-usaha untuk kesedjahteraan para pekerdja pers.

18. Pembangunan siaran televisi untuk keperluan pendidikan, jang dalam tahapan I dibatasi pada tempat-tempat universitas di Indonesia.

19. Pada Buku kesatu Djilid I § 75 No. 3 supaja ditambah dengan kalimat : „Penerangan merupakan faktor jang amat penting sekali untuk berhasilnja pelaksanaan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana".

20A. Pers sebagai salah satu media public communication jang sangat penting dalam kehidupan bangsa mempunjai fungsi :

a. politik,
b. sosial,
c. ekonomi,
d. pendidikan dan kebudajaan,
e. sebagai alat pelaksana untuk tertjapainja pembangunan semesta,
f. untuk menjelesaikan revolusi nasional,
g. kritik dan koreksi,
h. mendjadi alat kolektif berdasarkan tjita-tjita Sosialisme Indonesia,
i. sebagai barometer,
j. sebagai petundjuk,
k. sebagai pengontrol,
l. ikut melaksanakan Manipol dan terutama haluan Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

20B. Usaha-usaha pers dalam melakukan rentjana pembangunan integral meliputi:

a. Ditudjukan kepada usaha-usaha untuk dapat menggerakkan aksi-aksi massa setjara revolusioner diseluruh Indonesia didalam pembangunan mental, agar supaja seluruh rakjat dengan berkesadaran Sosialisme Indonesia jang mendalam melandjutkan revolusi, chususnja dibidang pembangunan semesta.

b. Segala alat komunikasi massa (mass communication) seperti pers, radio, film dan lain-lain sebagainja harus dapat digerakkan sebagai "one coordinated unit" dan setjara bergelombang jang terpimpin dan terentjana dan terus-menerus didalam penanaman kesadaran Sosialisme Indonesia dan Pantjasila.

c. Projek-projek jang urgen dibangun ialah:
   (I) indoktrinasi massa tentang Manipol/Usdek dan Pantjasila dengan melalui penerangan-penerangan keliling, publikasi, pers, radio dan film sampai dipelosok-pelosok desa,

(II) penjempurnaan dan perluasan produksi film nasional oleh P.F.N. dan pemberian bantuan dan fasilitas kepada pengusaha-pengusaha film nasional, serta penetapan U.U. perfilman termasuk perbioskopan dan sensor film,

(III) penjempurnaan dan modernisasi alat-alat penjiaran radio, seperti pemantjar, studio, radio umum dan lain-lain sebagainja, sehingga dapat mentjapai seluruh masjarakat sampai dipelosok-pelosok jang terpentjil, mentjapai dunia luar chususnja Asia-Afrika dan penjelenggaraan penjiaran chusus ditudjukan ke Irian Barat,

(IV) perluasan dan modernisasi pabrik piringan hitam sehingga dapat menghasilkan produksi jang besar untuk mentjukupi keperluan penjebaran kebudajaan Indonesia setjara luas, kedalam maupun keluar negeri,

(V) pembangunan grafika nasional untuk memperkuat potensi perusahaan-perusahaan pertjetakan sehingga dapat mendjadi alat publikasi jang sebaik-baiknja,

(VI) pendidikan kader Manipol dan Pantjasila dengan penjempurnaan Akademi Penerangan, dan pembangunan training centre Pusat dan Regional,

(VII) pengabadian sumber idee dan inspirasi revolusi, jaitu idee jang ditjetuskan oleh Presiden Soekarno dalam tulisan/karangan maupun pidato, baik masa pendjadjahan ataupun sesudah proklamasi 17 Agustus 1945, sehingga idee tersebut tetap mendjadi sumber kekuatan dan api bagi bangsa Indonesia didalam kelandjutan revolusi mentjapai masjarakat Sosialis Indonesia, serta dapat mendjadi „Pusaka Revolusi" jang mendjiwai perdjoangan seluruh rakjat Indonesia.

Pendidikan (§ 338)

21. Politik dan sistim pendidikan nasional kita baik jang diselenggarakan oleh pihak Pemerintah maupun oleh pihak swasta,

dari pendidikan pra-sekolah sampai pendidikan tinggi, supaja melahirkan warga-negara-warga-negara Indonesia jang berdjiwa Pantjasila jalah:

(a) ke-Tuhanan Jang Maha Esa
(b) Perikemanusiaan jang adil dan beradab
(c) Kebangsaan
(d) Kerakjatan
(e) Keadilan Sosial

jang berdjiwa patriot komplit, supaja melahirkan tenaga-tenaga kedjuruan jang ahli dan berdjiwa Revolusi Agustus 1945, suatu politik dan sistim pendidikan jang menitik-beratkan pada pendidikan kedjuruan.

Perguruan Tinggi (§ 344)

22. Soal-soal mengenai perguruan tinggi :
    (a) affiliasi antara perguruantinggi-perguruantinggi di Indonesia dengan perguruantinggi-perguruantinggi diluar negeri supaja diatur begitu rupa hingga tidak merugikan kepentingan nasional, tidak merugikan politik luar negeri jang bebas dan aktif dan harus sesuai dengan kebutuhan pembangunan Indonesia,
    (b) perlunja peremadjaan dan penjegaran tenaga-tenaga dosen,
    (c) menjetudjui perluasan perguruantinggi dengan fakultas-fakultasnja dengan menitik-beratkan kepada fakultas-fakultas jang meliputi ilmu alam-pasti dan biologi, termasuk perguruan-perguruan Swasta,
    (d) menjetudjui adanja stadium generale dengan isi jang tidak boleh bertentangan dengan Manifesto Politik Republik Indonesia dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana.
23. Lembaga-lembaga pendidikan tinggi, baik militer maupun sipil, dari pemerintah dibenarkan memberikan gelar jang sama dan sederadjat dengan :
    (a) Sardjana Muda/Bakaloreat, apabila mahasiswanja diambilkan dari lulusan S.M.A. (atau jang sederadjat

dengan itu), melalui screening tertentu, serta diberi didikan setjara chusus selama 3 tahun,

(b) Sardjana, apabila mahasiswanja diambilkan dari tingkat bakaloreat, dengan pendidikan landjutan-chusus selama 2 tahun.

24. Dalam rangka pembangunan Negara Sosialis Indonesia tidak dibenarkan adanja Otonomi 100% untuk perguruantinggi-perguruantinggi.

25. Sjarat-sjarat berdirinja perguruan tinggi : (vide pola pendjelasan).

Mengingat Pembangunan Semesta memerlukan sardjana/tenaga-tenaga ahli dari fakultas-fakultas exakta, dan mengingat tidak seimbangnja fakultas budaja/sosial dengan alam/pasti, maka disamping menjetudjui pola projek jang sudah memberi tempat pada fakultas ilmu alam/pasti, supaja setiap pendirian perguruantinggi/universitas baru, baik negeri maupun swasta, supaja sedikitnja terdiri dari 3 fakultas, dimana 2 fakultas harus dari ilmu alam/pasti/biologi, sedangkan jang satu boleh dari fakultas sosial/humanity.

Dengan begini arus ketjenderungan usaha-usaha Swasta untuk asal mendirikan perguruan tinggi tanpa memperhatikan sjarat-sjaratnja dapat ditjegah.

26. (a) Sjarat-sjarat studi terpimpin supaja dilengkapi sebagai berikut :

„Studi terpimpin dilaksanakan setingkat demi setingkat seiring dengan semakin diperbaiki dan ditjukupi sjarat-sjarat perbanjakan tenaga pengadjar, alat-alat perlengkapan beladjar dan sjarat-sjarat kesedjahteraan (kehidupan) mahasiswa,

(b) Setudju Universitas mengadakan "Extention Course".

27. Chusus dalam hubungannja dengan perdjoangan pembebasan Irian Barat, maka Pemerintah supaja lebih banjak memperhatikan tentang pendidikan tenaga kedjurtuan jang berasal dari putra-putra Irian dan lebih banjak memperhatikan pendirian projek-projek pendidikan didaerah perbatasan dengan Irian Barat.

Perluasan Sekolah Kedjuruan (§ 349)

28. Sekolah taman kanak-kanak supaja dimasukkan dalam projek.

29. Berpendapat penting segera dikeluarkannja Undang-undang Pokok Pendidikan jang baru jang dapat menampung tugas-tugas pendidikan nasional sebagaimana sudah digariskan oleh Manifesto Politik Republik Indonesia dan Amanat Presiden tentang Pembangunan Semesta Berentjana.

30. Pendidikan kepanduan supaja lebih diintensifkan dan menjetudjui rentjana Pemerintah untuk mendirikan Pramuka (organisasi kanak-kanak).

31. Sekolah Guru Taman Kanak-kanak dalam Pola Pembangunan masuk projek tjadangan. Diusulkan agar Taman Kanak-kanak ini dimasukkan dalam projek pokok.

Penelitian

32. Supaja MIPI segera diretool mendjadi Badan Penelitian Nasional. Sebaiknja memang hanja ada satu lembaga ilmu pengetahuan jang tertinggi di Indonesia.

Dalam pada itu perlu mendapat perhatian bahwa selama lembaga-lembaga penelitian jang tersebar luas dipemerintahan tidak diretool maka bukan sadja pemborosan tetapi djuga efisiensinja masih diragukan. MIPI, jang diharapkan mendjadi satu-satunja lembaga ilmu pengetahuan tertinggi ternjata tidak atau belum berhasil menempatkan dirinja. Karena itu sejogianja apabila MIPI segera diretool dan dibentuk suatu Badan Penelitian Nasional.

Dalam hubungan ini perlu kiranja ditindjau kemungkinan pembentukan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia seperti jang terdapat dinegara-negara lain.

33. Usaha-usaha konkrit jang termuat dalam Buku kesatu Djilid III § 380 halaman 460 supaja segera dilaksanakan sebagai hal jang harus mendapat prioritet pertama.

II. BIDANG KESEDJAHTERAAN

Pengertian Adil dan Makmur (§ 381)

1. Isi § 381 supaja disesuaikan dengan § 47 (Masjarakat Sosialis Indonesia) dengan menambah satu ajat pada § 381 (ajat c) jang berbunji:

   c. „Djaminan hari tua, sehingga tidak hidup dalam ketakutan dan kemelaratan, djika tak berdaja lagi untuk mentjari nafkahnja".

Keperluan Minimal (§ 382)

2. Isi § 382 supaja disesuaikan dengan § 47 (Masjarakat Sosialis Indonesia) dengan tambahan dalam § 382 ajat c, sehingga ajat tersebut berbunji:

   c. „Pendidikan dan kesehatan terdjamin".

Kesehatan Rakjat (§ 384)

3. Dalam pendidikan tenaga kesehatan supaja disamping pendidikan para dokter, dalam waktu jang singkat diutamakan pendidikan para-medisch jang selekasnja dapat dipekerdjakan dipelosok-pelosok.
4. Usaha-usaha lain dalam bidang kesehatan jang disebut dalam Djilid XI dan jang belum masuk dalam pola projek (Djilid II § 279), misalnja pembangunan laboratoria dll. supaja dimasukkan didalamnja.

Perumahan (§ 385)

5. Dalam bidang perumahan hendaknja diusahakan pembangunan rumah-rumah jang sehat, nikmat (comportable), tahan lama, murah harga dan sewanja dan memenuhi norma-norma kesusilaan.

   Bantuan-bantuan untuk pembangunan perumahan hendaknja disalurkan melalui berbagai djalan dengan tjara-tjara jang mudah, misalnja koperasi pembangunan perumahan, djawatan perumahan rakjat, bank perumahan, usaha swasta nasional dan lain-lain sebagainja.

6. Dalam soal perumahan, keaktipan Pemerintah hendaknja djangan hanja berupa pemberian fasilitet dan sebagainja, melainkan hendaknja Pemerintah djuga membangun rumah-rumah, baik untuk disewakan maupun untuk didjual, terutama ditempat-tempat industri Negara.
7. Disamping usaha elektrifikasi oleh negara, supaja distribusi minjak tanah diusahakan setjara merata, tjepat dan murah.

Kesedjahteraan Sosial (§ 388)

8. Supaja Rehabilitasi Penderita Tjatjat, Lembaga Sosial Desa dan Pemasjarakatan Suku-suku Terasing ditjantumkan dalam Garis Besar Rentjana Pembangunan (§ 239, Djilid II), dan ketiga-tiganja ditjantumkan dalam Pola Projek Bidang Kesedjahteraan Rakjat (§ 279). Djilid II).
9. Sesuai dengan maksud dan tudjuan negara jang dibangun berdasarkan Pantjasila dan Sosialisme Indonesia, maka untuk mentjegah timbulnja dan mendjalarnja penjakit masjarakat, supaja Pemerintah:
   (a) melarang dengan perundangan:
      (I) pengemisan,
      (II) pelatjuran,
      (III) perdjudian,
      (IV) permadatan,
      (V) perdagangan manusia,
      (VI) penghisapan (woeker),
      (VII) pergelandangan.
   (b) mengatur dengan perundangan:
      (I) perlindungan anak,
      (II) pemeliharaan anak terlantar, baik segi preventif maupun kuratifnja,
      (III) pemeliharaan fakir miskin,
      (IV) pemeliharaan orang tua/djompo.
   (c) mendirikan kamp pendidikan dan latihan kerdja untuk:
      (I) mendidik dan melatih bekerdja anak nakal,

(II) mendidik dan melatih pemuda-pemuda/pemuda-pemudi jang menganggur, sesuai dengan bakatnja untuk kemudian disalurkan sebagai tenaga pembangunan kepelbagai sektor.

(d) memperbanjak rumah perawatan/pendidikan (pendidikan luar biasa) untuk anak-anak buta/lembek ingatan dan sebagainja.

(e) memasjarakatkan kembali suku-suku jang hidup terasing.

Kesedjahteraan Buruh dan Pegawai (§ 389)

10. Hendaknja ada Undang-undang pokok kepegawaian/perburuhan jang memuat antara lain:

(a) penghapusan Undang-undang kolonial jang masih berlaku antara lain ontslagrecht No. 396/1941 dan diganti dengan Undang-undang pemutusan hubungan kerdja jang lebih madju;

(b) adanja hanja satu status pegawai negeri jang tidak membedakan antara pegawai tetap dengan pegawai sementara, pekerdja harian lepas/tetap/pekerdja harian organik,

(c) djaminan sosial bagi buruh jang seperti termaktub dalam Buku kesatu Djilid ke-III garis besar pembangunan § 389 sub c dan d.

(d) penghapusan perbedaan (discriminatie) dilapangan perupahan, sjarat-sjarat kerdja dan djaminan sosial serta adanja perlindungan chusus bagi buruh muda dan wanita.

(e) kaum buruh dan tani sebagai faktor-faktor produksi supaja diikut-sertakan dalam susunan dewan-dewan perusahaan.

11. Perlu adanja Undang-undang Penempatan Tenaga sebagai perlindungan kepada para penganggur.

Kesedjahteraan Tani dan Nelajan (§ 390)

12. Supaja ada perbaikan tjara kerdja dari padi centra dengan tjara rente kredit supaja diturunkan dan harga padi disesuaikan dengan harga waktu itu.

13. Supaja diadakan pelarangan/pengawasan sekeras-kerasnja terhadap woeker, sesuai dengan Amanat Presiden dalam Buku kesatu Djilid ke-I § 32 bab A Pola Projek Pembangunan.

14. Mengenai djaminan terhadap harga hasil produksi tani dan nelajan disesuaikan dengan c. 4 (g) Buku kesatu Djilid ke-II § 390 ditambah untuk nelajan, sehingga berbunji sebagai berikut:

    (a) Politik harga dari Pemerintah jang memungkinkan imbangan jang lajak dan adil antara harga hasil bumi (hasil nelajan) dengan harga barang jang diperlukannja dengan mendapat fasilitet jang sebesar-besarnja.

    (b) Penjaluran hasil produksi hasil bumi jang diperlukan untuk kepentingan sehari-hari (pangan) seperti buah buahan, sajur-majur dan lain-lain diadakan pengawasan oleh Pemerintah untuk menghindarkan spekulasi harga.

15. Perlu adanja Undang-undang sematjam Undang-undang bagi-hasil (Undang-undang No. 2 tahun 1960) untuk nelajan.

16. Beban (sistim rodi) dihapuskan dengan tjatatan, bilamana dengan penghapusan beban ini pamongdesa disesuatu tempat akan kehilangan mata pentjaharian karena tidak mempunjai bengkok, maka mereka diberi ganti kerugian.

17. 4. d (lama) ditambah: alat-alat pertanian/alat-alat perikanan (nelajan).

18. 4. f (lama) ditambah: jang mudah dan murah.

19. Kredit supervise ataupun kredit dengan borg, antara lain dalam rangka pelaksanaan landreform, supaja disesuaikan dengan Amanat Presiden (Buku kesatu Djilid I § 39 halaman 52, 53)

20. Masalah lumbung dan koperasi desa supaja disesuaikan dengan Amanat Presiden (Buku kesatu Djilid I § 34 a) dengan tjatatan supaja mendapat bantuan dan fasilitet jang sebesar-besarnja dari Pemerintah.

21. Sjarat untuk kesedjahteraan tani/nelajan supaja diperbaiki dengan pembagian hasil panen berdasarkan Undang-undang bagi-hasil (Undang-undang No. 2 tahun 1960), dilaksanakan

III. BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/PERTAHANAN

§ 391. Organisasi Negara Kesatuan

1. Agar terdjamin sifat-sifat dan sjarat-sjarat Pemerintahan jang stabil, wibawa, mentjerminkan kehendak Rakjat dan revolusioner, perlu diadakan retooling badan-badan eksekutif, judikatif dan legislatif dari atas sampai kebawah sesuai dengan djiwa dan semangat „Djalannja Revolusi Kita".
2. Ajat c sub (1), perkataan „stabil" supaja disempurnakan, dengan ditambah kata „dan berkewibawaan", sehingga ajat c sub (1) itu mendjadi berbunji:
   1. stabil dan berkewibawaan.
3. Ajat c, supaja ditambah sifat dan sjarat ke-4, jalah:
   4. Gotong-rojong.

§ 393. Desentralisasi

4. Ajat: d.
   Isi Otonomi harus riil dan luas. Mengenai otonomi Daerah hendaknja diberi otonomi jang seluas-luasnja seperti Undang-undang No. 1/1957, menurut kemampuan tiap-tiap Daerah.
5. Ajat a s/d h, supaja didjadikan bagian I.
6. Bagian ke-II, hendaknja dirumuskan sebagai berikut:
   Perlu diperhatikan untuk dimuat dalam Undang-undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah itu adalah:
   a. Undang-undang No. 22/1948,
   b. Undang-undang No. 1/1957,
   c. Penetapan Presiden No. 6/1959,
   d. Penetapan Presiden No. 5/1960,
   e. Berbagai pikiran lainnja jang telah dirumuskan dalam bagian kesatu (1) diatas.

§ 394. Pemerintahan Pusat

7. Dapat menjetudjui ketentuan bahwa Presiden merangkap Ketua DPA tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945

8. Mengenai *kedudukan Presiden*, hendaknja dirumuskan lebih lengkap dan lebih djelas sebagai berikut:
   a. Sebagai Kepala Negara (menurut pendjelasan tentang „U.U.D. Negara Indonesia" Umum Angka III mengenai pendjelasan tentang „Sistim Pemerintah Negara");
   b. Sebagai Kepala kekuasaan EXEKUTIF (menurut „Pendjelasan dan seterusnja tersebut diatas, angka IV");
   c. Tidak BERTANGGUNG DJAWAB KEPADA D.P.R. (menurut pendjelasan dan seterusnja tersebut diatas, angka V);
   Kemudian *ditambah* dengan:
   d. Tunduk dan bertanggung djawab kepada M.P.R. (menurut „Pendjelasan dan seterusnja" tersebut diatas tentang Sistim Pemerintah Negara", angka III).
9. *Mengenai Tugas dan Wewenang Presiden:*
   Hendaknja djuga dirumuskan lebih lengkap dan djelas sebagai berikut:
   (berubah dari perintjian DEPERNAS):
   a. Memegang Kekuasaan Pemerintahan, (menurut pasal 4 ajat 1 U.U.D.);
   b. Membentuk Undang-undang bersama-sama dengan D.P.R. (sekarang D.P.R.-G.R.) (menurut pasal 5 ajat 1 U.U.D.);
   c. Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk mendjalankan Undang-undang (menurut pasal 5 ajat 2 U.U.D.);
   d. Memegang Kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara (menurut pasal 10 U.U.D.);
   e. Menjatakan Perang, membuat perdamaian dan perdjandjian dengan Negara lain, dengan persetudjuan D.P.R. (sekarang D.P.R.-G.R. menurut pasal 11 U.U.D.);
   f. Menjatakan keadaan bahaja menurut sjarat-sjarat dan ketentuan-ketentuan jang ditetapkan Undang-undang (menurut pasal 12 U.U.D.);
   g. Mengangkat dan menerima Duta/Konsul (menurut pasal 13 U.U.D.);
   h. Memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi (menurut pasal 14 U.U.D.);

i. Memberi gelar, tanda djasa, dan lain-lain (menurut pasal 15 U.U.D.);

j. Dalam keadaan sangat memaksa, sehingga D.P.R. dan M.P.R. tidak mungkin mengadakan sidang, dapat menjampingkan U.U.D. djika ternjata perlu, jang kemudian harus dipertanggung djawabkan kepada M.P.R.

10. Mengenai KEDUDUKAN, TUGAS dan WEWENANG M.P.R., hendaknja disempurnakan sebagai berikut:

a. Melakukan sepenuhnja Kedaulatan Rakjat (menurut pasal 1 ajat 2 U.U.D.);

b. Menetapkan/merobah Undang-undang Dasar (menurut pasal 3 U.U.D.);

c. Menetapkan garis-garis besar haluan Negara (menurut pasal 3 U.U.D.);

d. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden (menurut pasal 6 U.U.D. ajat 2 dan „pendjelasan tentang Undang-undang Dasar Negara Indonesia" tentang „Sistim Pemerintahan Negara" ajat 3);

11. Mengenai KEDUDUKAN, TUGAS dan WEWENANG DEWAN PERTIMBANGAN AGUNG, diganti sebagai berikut:

a. Memberi nasehat kepada dan mendjawab pertanjaan jang dimadjukan oleh Presiden (menurut pasal 16 ajat 2 U.U.D.);

b. Memadjukan usul-usul kepada Pemerintah (menurut pasal 16 ajat 2 U.U.D.);

Ditambah dengan:

Tjatatan: Sebelum D.P.A. terbentuk berdasarkan Undang-undang menurut pasal 16 ajat 1 U.U.D., maka wewenang D.P.A. didjalankan oleh D.P.A. Sementara.

12. Mengenai KEDUDUKAN, TUGAS dan WEWENANG D.P.R., dirumuskan sebagai berikut:

a. D.P.R. tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (menurut „Pendjelasan Tentang Undang-undang Dasar Negara Indonesia", angka VII);

b. D.P.R. mengawasi tindakan-tindakan Pemerintah (Presiden dan Menteri-menteri), (menurut „Pendjelasan Tentang Undang-undang Negara Indonesia" tersebut diatas);

c. D.P.R. bersama-sama Presiden membuat Undang-undang (menurut pasal 20, 21 dan 22 U.U.D.);

d. D.P.R. menetapkan Anggaran Belandja dan Pendapatan, Padjak-padjak Negara, mata uang dan meminta pertanggungan djawab Keuangan (menurut pasal 23 U.U.D.);

13. Mengenai KEDUDUKAN, TUGAS dan WEWENANG BADAN PEMERIKSA KEUANGAN disempurnakan sebagai berikut:

Memeriksa tanggung djawab Pemerintah tentang Keuangan Negara dan melaporkannja kepada D.P.R. (menurut pasal 23 U.U.D. dan „Pendjelasan Tentang Undang-undang Dasar Negara Indonesia" Bab VIII);

14. Mengenai DJUMLAH DEPARTEMEN-DEPARTEMEN, seperti tersebut dalam halaman 478 dibawah d, sub (3) supaja didjadikan sebagai berikut:

Untuk efisiensi perlu ditetapkan dengan Undang-undang djumlah maksimal dari Departemen-departemen menurut kebutuhan pelaksanaan Pembangunan Semesta Nasional Berentjana.

Mengenai „HUBUNGAN SATU DENGAN LAINNJA" (halaman 479, sub e) supaja DIHAPUSKAN sadja, sebab sudah akan diatur dengan Undang-undang.

15. Mengenai „HAL-HAL LAIN" (halaman 479 sub f), maka rumusan-rumusan jang tersebut dari No. 1 s/d No. 12 pada umumnja dapat diterima dengan *tjatatan:*

No. 11 diganti mendjadi „Sensus harus diadakan untuk berbagai hal jang diperlukan menurut ketentuan Undang-undang, dan kemudian *ditambahkan:*

16. „No. 13 retooling jang dikehendaki MANIPOL serta PEDOMAN PELAKSANAANNJA dan AMANAT PENEGASAN P.J.M. PRESIDEN tgl. 9 Djanuari 1960, harus dilaksanakan mulai dari bawah sampai keatas".

17. Undang-undang Perimbangan Keuangan supaja segera ditindjau kembali dan dibikin lebih praktis.
18. Undang-undang No. 6/1959 tentang penjerahan kekuasaan Pemerintahan Umum kepada Daerah-daerah Swatantra harus didjalankan (dilaksanakan) dengan seksama.
19. Pada huruf a, hendaknja ditambah dengan satu ajat, jalah ajat 9, jang berbunji sebagai berikut:
    9. Tidak stabilnja politik Otonomi dan Desentralisasi Pemerintah Pusat, disamping kekurangan kepertjajaan kepada Daerah-daerah.
20. Mengenai huruf b tentang Perimbangan Keuangan, pada angka 3 tentang saran-saran, diusulkan perobahan sebagai berikut:
    a. Sumber penghasilan keuangan Pusat harus diperkaja terutama dari keuntungan-keuntungan perusahaan-perusahaan jang telah diambil-alih, dan penghasilan Pusat jang diperkaja itulah didjadikan dasar untuk perimbangan keuangan.
    b. Pusat supaja membantu berdirinja perusahaan-perusahaan Daerah Swatantra, jang chusus dimaksudkan untuk menambah penghasilan Daerah.
    c. Daerah-daerah Swatantra djuga harus mendapatkan bahagian tertentu dari keuntungan perusahaan-perusahaan Negara jang ada didaerahnja.
    d. Dasar untuk perhitungan perimbangan keuangan lebih dipraktiskan, berdasarkan pengalaman-pengalaman dimasa jang lampau.
    e. Pusat menjediakan devisen jang diperlukan Daerah (dan seterusnja menurut rumusan (b) Perimbangan keuangan dari Depernas).
21. Mengenai Organisasi Pemerintah Daerah:
    Angka 1: Dapat disetudjui dengan usul-usul tambahan sebagaimana diusulkan dalam rumusan usul-usul pokok pada § 391.
    Angka 2: Dapat disetudjui seluruhnja, dengan ditambah:

Dengan tjatatan: Pemerintah Daerah harus Concordant dengan Pemerintah Pusat baik mengenai hubungan antara Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan anggota-anggota DPRD maupun mengenai tugas-tugas jang harus diberikan kepada masing-masing anggota BPH.

Mengenai huruf d, tentang: *Tjara Pengawasan atas Pemerintah Daerah.*

Supaja ditambah dengan angka 3, jang berbunji sebagai berikut:

3. Pimpinan dan pengawasan Pusat kepada Daerah-daerah Swatantra dilakukan oleh Biro-biro dari Departemen DANOD.

Mengenai huruf e, *„Hal-hal lain"* hendaknja disempurnakan sehingga mendjadi dua ajat, sebagai berikut:

1. Pemilihan Umum untuk anggota DPRD supaja bersamaan dengan pemilihan umum untuk DPR dan MPR.
2. Harus segera dibuat Undang-undang Pemilihan Umum jang baru untuk maksud tersebut ajat (1) jang mengandung prinsip umum, langsung, bebas dan rahasia.

22. Mengenai huruf f, tentang: *„Daerah Swapradja"*, diusulkan perubahan-perubahan sebagai berikut:

Angka 2, supaja seluruhnja dihapus.

Angka 3, didjadikan angka 2, dan kemudian ditambah dengan angka 3 jang berbunji sebagai berikut:

3. Semua Swapradja jang masih ada akan dihapuskan dan diganti dengan Daerah-daerah Swatantra berdasarkan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah jang baru, dengan memperhatikan keadaan Daerah setempat.

Landreform (§ 398)

23. Program Landreform harus selesai dilaksanakan dalam tahun-tahun pertama (antara 3-5 tahun) tahap pertama Pola Pembangunan. Landreform adalah basis pembangunan semesta.
24. UU Pokok Agraria supaja didjadikan pegangan seterusnja karena sudah mengandung pengolahan jang lebih matang dan

lebih madju, serta djuga lebih mentjakup dasar-dasar fikiran pokok termuat dalam APP mengenai bidang Agraria.

25. Dengan memperhatikan taraf hidup, kemadjuan produktipitet dan tebal-tipisnja penduduk dalam suatu Daerah, perlu segera ditentukan dengan peraturan perundangan tentang batas maximum pemilikan tanah pertanian jang ditentukan setjara rata-rata.

26. Batas minimum pemilikan tanah pertanian kaum tani pemilik/penggarap ditentukan sesetempat berdasarkan research untuk mendjamin penghidupan jang lajak, dengan pengertian bahwa pembatasan itu tidak akan merugikan kaum tani pemilik/penggarap tanah jang dibawah batas minimum.

Koperasi (§ 400)

27. *Kedudukan dan peranan Koperasi dalam Pembangunan Semesta:*

(a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas azas kekeluargaan sebagai dirumuskan dalam ajat (1) pasal 33 UUD '45 beserta pendjelasannja, adalah haluan Pembangunan dalam bidang Swasta.

(b) Peranan Koperasi dalam pembangunan merupakan:

(I) alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin;

(II) sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia;

(III) dasar untuk mengatur perekonomian rakjat;

28. *Tugas dan susunan Djawatan Koperasi:*

(a) Tugas pokok Djawatan Koperasi adalah:

(I) Melaksanakan tjita-tjita serta ketentuan-ketentuan jang terkandung dalam pasal 33 ajat (1) U.U.D. '45, Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 dengan perintjiannja, chususnja dibidang sosial-ekonomi:

(II) Melaksanakan Program Pemerintah dalam bidang Kekoperasian.

(b) Djawatan koperasi dibagi dua:

(I) Djawatan Koperasi Pusat:

(II) Djawatan Koperasi Daerah;
— Djawatan Koperasi Daerah Tingkat I;
— Djawatan Koperasi Daerah Tingkat II;

29. *Pendidikan Koperasi*

(a) Pendidikan Koperasi berdasar atas:
(I) Pantjasila;
(II) Manifesto Politik Republik Indonesia;
(III) Ekonomi terpimpin.

(b) Djenis Pendidikan Koperasi ialah:
(I) Pendidikan Koperasi dalam rangka persekolahan;
(II) Pendidikan Koperasi dalam rangka pendidikan masjarakat;
(III) Pendidikan Koperasi dalam kalangan aparatur Pemerintah;
(IV) Pendidikan chusus untuk memperoleh tenaga pengadjar Koperasi dan Kader Koperasi.

30. *Organisasi Koperasi*

(a) Koperasi primer;
(b) Pusat Koperasi;
(c) Gabungan Koperasi;
(d) Induk-induk Koperasi;

31. **Landasan Idiil Koperasi**

Koperasi didjiwai dan mendapat semangat jang bersumber dan berlandasan pada:
(a) Pantjasila;
(b) U.U.D. 1945 pasal 33 ajat (1);
(c) Manifesto Politik Republik Indonesia dan Amanat Pembangunan Presiden;

32. **Pengertian (Azas dan Dasar-dasar Bekerdja) Koperasi Indonesia**

Koperasi Indonesia adalah perkumpulan orang-orang atau Badan Hukum Koperasi jang:
(a) berazas kekeluargaan (gotong-rojong);
(b) bertudjuan memperkembangkan kesedjahteraan masjarakat dan daerah bekerdja pada umumnja;

(c) berusaha menjelenggarakan salah satu atau beberapa usaha dalam lapangan perekonomian;

(d) keanggotaannja bersifat sukarela atau atas dasar kekeluargaan;

(e) Kekuasaan tertinggi dalam kehidupan Koperasi berada ditangan rapat anggota (demokrasi);

(f) Pembangunan sisa hasil usaha didasarkan atas keseimbangan djasa;

(g) Modal Koperasi mempunjai fungsi sosial.

33. **Biaja**

(a) Pembiajaan koperasi oleh Pemerintah atau Badan Kredit baik bersifat Pemerintah atau tjampuran ataupun swasta harus didasarkan pada azas membantu untuk menolong diri-sendiri (to help the people to help himself);

(b) Pada taraf permulaan untuk memperkembangkan Koperasi sebagai alat melaksanakan ekonomi terpimpin chusus dalam bidang distribusi dan produksi disediakan biaja Rp. 500 djuta;

(c) Alat-alat Perlengkapan Djawatan Koperasi dan djumlah serta mutu pegawainja harus disesuaikan dengan perkembangan gerakan koperasi.

Perundang-undangan, Kependjaraan dan Kepolisian (§ 402)

34. Mengenai a-2 didalam usaha-usaha kearah homoginitet supaja diperhatikan kenjataan-kenjataan jang hidup di Indonesia.

35. Idem huruf a-3, supaja azas-azas pembinaan hukum nasional itu sesuai dengan haluan negara dan berlandaskan pada hukum adat jang tidak menghambat perkembangan masjarakat adil dan makmur.

36. Idem a-3 (2), supaja susunan pengadilan merupakan suatu college dan peradilan berprinsip tjepat, tepat dan murah.

37. Idem huruf h, ditambah dengan angka 5 jang berbunji:
Diadakan peradilan administratip.

38. Mengenai huruf c 2 dan 4, dalam penjempurnaan undang-undang hukum perkawinan dan hukum waris supaja diperhatikan adanja faktor-faktor agama, adat dan lain-lainnja.

39. Mengenai huruf c, supaja ditambahkan : Perundang-undangan mengenai kependjaraan, djaminan sosial dan lain-lain perundang-undangan jang menurut djiwa Amanat Pembangunan Presiden perlu diadakan.

40. Mengenai huruf d, supaja disamping membangun rumah pendjara modern :
    (a) Dilaksanakan pembangunan rumah-rumah pendjara baru sebagai pengganti rumah-rumah pendjara jang tidak sesuai lagi dengan tempat dan keadaan.
    (b) Lebih diintensipkan pula perusahaan-perusahaan jang sekarang telah ada dirumah-rumah pendjara.
    (c) Lebih mengintensipkan pendidikan kader kependjaraan dan para nara pidana sesuai dengan haluan negara.

Politik Keamanan/Pertahanan

41. Sebagai konsekwensi daripada bentuk dan sifat Keamanan/Pertahanan R.I. itu, maka Angkatan Perang Republik Indonesia turut serta menjelesaikan tuntutan-tuntutan revolusi Nasional, dalam bidangnja masing-masing.

42. Melaksanakan pemulihan keamanan dalam waktu jang sesingkat-singkatnja.

Organisasi Keamanan/Pertahanan

43. Penjusunan organisasi Keamanan/Pertahanan Negara diseluruh pelosok tanah-air diatur dalam Undang-undang Pokok Keamanan/Pertahanan.

44. Presiden dalam kedudukannja sebagai Panglima Tertinggi memegang kekuasaan penuh atas Angkatan Perang Republik Indonesia.

45. Susunan Angkatan Perang Republik Indonesia sebagai inti pertahanan rakjat semesta diatur dengan Undang-undang.

46. Polisi Negara adalah alat revolusi untuk pengamanan dalam negeri Kedudukan serta tugas Polisi Negara diatur dalam Undang-undang Pokok Kepolisian.

47. Mahkamah Agung/Mahkamah Agung Tentara termasuk Kedjaksaan Agung/Kedjaksaan Agung Tentara adalah alat revolusi jang berkedudukan sebagai pembantu Presiden. Kedudukan dan tugas Mahkamah Agung/Mahkamah Agung Tentara termasuk Kedjaksaan Agung/Kedjaksaan Agung Tentara diatur dengan Undang-undang.

Pembangunan Angkatan Perang dan Kepolisian Negara

48. Pembangunan Angkatan Perang Republik Indonesia dan Kepolisian Negara haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip haluan Negara, dasar politik pertahanan Negara dan bentuk pertahanan Negara.

49. (a) Dibidang mental supaja dilaksanakan indoktrinasi setjara mendalam tentang Pantjasila, Manifesto Politik Republik Indonesia beserta perperintjiannja sebagai garis-garis besar haluan Negara, Amanat Pembangunan Presiden, „Djalannja Revolusi Kita", dan „Membangun Dunia Kembali" sebagai garis-garis besar haluan pembangunan dan pedoman pelaksanaannja kepada anggauta-anggauta Angkatan Perang dan Kepolisian Negara.

(b) Diadakan usaha penjempurnaan pemeliharaan rochani ditiap-tiap Angkatan menurut agamanja masing-masing.

50. Mendasarkan kebidjaksanaan pembiajaan pola pembangunan Angkatan Perang dan Kepolisian Negara pada prinsip keseimbangan antara Angkatan, antara bidang Keamanan/Pertahanan dengan bidang-bidang lainnja, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Negara.

Angkatan Perang dan Kepolisian Negara dalam proses produksi

51. Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara diikutsertakan didalam proses produksi dengan tidak mengurangi tugas utamanja masing-masing.

Masalah Perundang-undangan

52. Dengan berlakunja kembali Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 dan ditetapkannja Manifesto Politik Republik Indonesia serta perperintjiannja sebagai garis-garis besar haluan Negara, maka segala Perudang-undangan tentang Keamanan/ Pertahanan harus ditindjau kembali keseluruhannja.

53. Ajat a) § 404 supaja dirobah sehingga berbunji:

„Berbagai Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta peraturan hukum lainnja dibidang Keamanan dan pertahanan, didasarkan atas Undang-undang Dasar Sementara. Dengan berlakunja kembali Undang-undang Dasar 1945, dan ditetapkannja Manifesto Politik beserta perperintjiannja, Amanat Pembangunan Presiden, „Djalannja Revolusi Kita" dan „Membangun Dunia Kembali" sebagai garis-garis besar daripada haluan Negara, garis-garis besar haluan pembangunan dan pedoman-pedoman pelaksanaannja, maka Undang-undang serta Peraturan-peraturan itu perlu disesuaikan dengan memperhatikan urutan persoalan jang harus diatur sehingga selandjutnja akan merupakan serangkaian perundang-undangan jang selaras dan menurut sistim dan perentjanaan tertentu".

54. Ajat c) sub 1 § 404 baru, jang berbunji:

„Tudjuan Nasional jang diambil dari UUD 1945 dan Manifesto Politik Republik Indonesia. Tudjuan Nasional kita ialah Negara Indonesia jang Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur.

Golongan-golongan dalam masjarakat kita berkewadjiban untuk berusaha atau turut berichtiar untuk mentjapai tudjuan Nasional kita itu.

Tetapi mereka itu tidak mungkin bertindak semaumaunja sendiri. Mereka harus diorganisasi, baik resmi, semi resmi, maupun tak resmi.

Maksud dari pada ini adalah supaja segala sesuatu

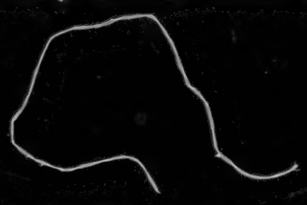

untuk mentjapai Tudjuan Nasional kita itu didjalankan setjara teratur, terkoordinasi, efisien, dan atas dasar tugas dan tanggung djawab jang djelas dan tegas. Demikianlah, maka wakil-wakil dari berbagai golongan rakjat dimasukkan dalam berbagai organisasi. Ada jang dimasukkan dalam MPRS. Ada jang dimasukkan dalam DPR-GR. Ada jang dimasukkan dalam Pemerintahan. Ada jang dimasukkan dalam DPA. Ada jang dimasukkan dalam Front Nasional. Tugas dan tanggung-djawab dari Lembaga-lembaga/ Alat-alat Perlengkapan Negara ini sudah djelas dan tegas. Angkatan Bersendjata adalah suatu Golongan Karja. Sedjumlah anggauta Angkatan Bersendjata di Lembaga-lembaga tersebut sebagai wakil-wakil golongan Karja Angkatan Bersendjata, dengan sendirinja anggauta-anggauta Angkatan Bersendjata jang bersangkutan turut memikul tanggung-djawab terhadap Lembaga dimana mereka duduk atau mendjadi anggauta, dan dalam kedudukan itu mereka mendjalankan tugasnja dalam rangka tanggung-djawab lembaga tersebut. Tetapi Angkatan Bersendjata sebagai suatu organisasi, lebih tepat lagi sebagai suatu alat kekuasaan Negara, tidak sebagai suatu golongan karja, berkedudukan dalam bidang Pemerintahan. Peranan utama daripada Angkatan Bersendjata dibidang Pemerintahan adalah Pengamanan usaha perwudjudan Tudjuan Nasional dan usaha pemeliharaan kelangsungan selandjutnja.

Peranan pengamanan itu dilakukan oleh Angkatan Bersendjata terhadap segala matjam bahaja jang mengantjam usaha-usaha pentjapaian Tudjuan Nasional kita, baik jang datang dari luar, dalam hal mana pengamanan itu berwudjud tugas Pertahanan Nasional, maupun jang datang dari dalam, hal mana pengamanan itu berwudjud tugas keamanan Dalam

Negeri. Angkatan Bersendjata kita terdiri atas Angkatan Perang Republik Indonesia dan Polisi Negara.

Sudah mendjadi suatu kelaziman bahwa Pertahanan Nasional adalah tugas pokok APRI, dan keamanan dalam Negeri adalah tugas pokok Polisi Negara".

55. Ajat e) § 404:

Anak kalimat mulai dari „berupa undang-undang ... dst" supaja dihapus.

56. Ajat g) § 404: baru, jang berbunji:

„Karena Politik Pertahanan adalah integrasi daripada politik dalam Negeri, politik luar Negeri dan politik militer, maka Presiden memegang tanggung-djawab tertinggi mengenai pertahanan. Oleh karena itu dalam Organisasi untuk merumuskan Politik Pertahanan kita, jang dapat disebut Dewan Keamanan Nasional/ Dewan Pertahanan Nasional, harus duduk Presiden sebagai Ketua/Anggauta, dan Anggauta-anggauta lainnja adalah pedjabat-pedjabat Negara jang tugas dan tanggung-djawabnja mempunjai sangkut-paut dengan perumusan dan pelaksanaan politik pertahanan.

Perlu ditekankan, bahwa dalam menjusun keanggautaan suatu organisasi, apalagi suatu organisasi jang amat vital, adalah esensiil untuk memperhatikan sifat „gotong-rojong".

Adalah sistim jang kardinal bahwa orang-orang jang dikumpulkan bersama untuk merumuskan suatu policy, achirnja dipertanggung-djawabkan pula atas pelaksanaan daripada policy itu. Sipelaksana akan loyal mendjalankan segala instruksi atasan oleh karena instruksi-instruksi itu bersumber pada suatu keputusan policy, jang mana sipelaksana itu telah turut serta merumuskannja".

57. Ajat g) lama mendjadi ajat h) baru.

58. Sub 20) baru berbunji:
„Undang-undang Kesedjahteraan anggauta-anggauta Angkatan Perang Republik Indonesia".

Fakta-fakta jang mempengaruhi persoalan (§ 405)

59. Ajat a) Berlangsungnja dua proses „stabilisasi" didunia, jang sangat berpengaruh dalam kehidupan politik internasional.

b) Kepentingan Indonesia dengan politik bebas-aktif membela kemerdekaan nasional dan mulai melaksanakan pembangunan ekonomi berentjana.

c) Sifat bangsa Indonesia jang tjinta-damai jang tersimpul dalam Pantjasila dan letak geografis Indonesia jang sangat strategis.

d) Berlangsungnja proses isolasi kekuatan-kekuatan poltik jang anti Manipol didalam negeri.

Ajat d) lama hapus dengan penggantian diatas.

e) Kegiatan-kegiatan destruktif dan labilitet ekonomis karena pemberontakan-pemberontakan kontra revolusioner dan subversip.

Ajat f) lama tetap.

g) lama tetap.

h) Faktor-faktor tersebut memaksa Indonesia mendjalankan politik pertahanan jang defensif-aktif, disamping politik luar negeri jang bebas-aktif.

i) lama tetap.

60. Ajat a) § 406: Ditambah dan berbunji:
„Kita mempunjai politik jang defensif-aktif, artinja tidak agresif.
Faham Perang sebagai pentjerminan daripada Pantjasila, jalah bahwa bangsa Indonesia jang tjinta-damai dan ingin bersahabat dengan semua bangsa itu, tidak menghendaki adanja peperangan. Bangsa Indonesia hanja akan berperang djika setelah diusahakan sedjauh mungkin untuk mentjegahnja. tidak ada lagi djalan lain untuk menjelesaikan suatu

pertikaian dengan Negara lain, dan Indonesia oleh karenanja dipaksa untuk mengadakan perlawanan demi kepentingan Nasional.

Mengingat djiwa Revolusi Indonesia dan faham bangsa Indonesia tentang perang, maka mau tak mau Politik Pertahanan kita harus pula berdjiwa anti-imperialisme dan anti-kolonialisme, dan bersifat defensif-aktif serta menolak adanja atau ikut sertanja kita dalam persekutuan-persekutuan militer.

Kalau kita dipaksa berperang, maka kita akan pasti menghadapi suatu perang modern.

Perang modern adalah suatu pertjobaan terhadap seluruh kekuatan bangsa. Ia memerlukan mobilisasi daripada seluruh sumber-sumber kekuatan bangsa, ia memerlukan pengerahan semua unsur-unsur potensi perang bangsa itu.

Dari ini djelaslah bahwa penghantjuran pasukan-pasukan Angkatan Bersendjata musuh dimedan pertempuran, pasukan-pasukan Angkatan Bersendjata mana hanja merupakan suatu unsur sadja daripada potensi perang musuh, belumlah merupakan djaminan kemenangan dalam perang.

Seluruh usaha perang musuh harus dapat dihantjurkan. Oleh karena itu, dalam tjita-tjita membangun Angkatan Bersendjata kita, maka arah pembangunan harus pertama-tama ditudjukan kepada pembangunan suatu Angkatan Bersendjata jang modern jang memiliki suatu "strategic offensive element" jang dapat dilantjarkan terhadap unsur-unsur pendukung perang musuh diwilajah musuh itu sendiri. Pemilikan suatu "strategic offensive element" itu akan merupakan dukungan penting bagi diplomasi kita, dan pula merupakan suatu "deterrent" bagi musuh untuk memulai peperangan.

Selandjutnja konsepsi pertahanan kita harus sekali-kali tidak boleh merugikan usaha pelaksanaan tugas

Angkatan Bersendjata jang kini sedang didjalankan, jaitu pemulihan keamanan dalam Negeri dan perdjuangan merebut Irian Barat, tetapi malahan harus dapat mempertjepat penjelesaian daripada usaha-usaha itu. Achirnja konsepsi pertahanan kita itu, harus dirumuskan dengan memperhatikan pula sifat-sifat bangsa kita, jang bilamana dipaksa perang akan mengadakan perlawanan dengan tak mengenal menjerah hingga kemenangan achir tertjapai dengan segala alat dan tenaga apapun jang dapat dikerahkan".

61. Ajat b) baru berbunji:

„Potensi perang suatu bangsa terdiri atas unsur-unsur *semangat nasional, kekuatan industri dan ekonomi, Angkatan Bersendjata, kapasitet untuk penjelidikan* dan *perkembangan ilmiah,* dan *tenaga manusia.* Dari unsur-unsur ini, maka djelaslah bahwa Angkatan Bersendjata merupakan hanja suatu unsur sadja daripada potensi perang suatu bangsa. Tetapi unsur tersebut adalah instrumen jang paling aktif ditangan Pemerintah untuk melakukan tekanan physik setjara langsung terhadap musuh.

Dan aksi-aksi daripada Angkatan Bersendjata ini adalah aksi-aksi jang paling menondjol dibandingkan dengan aksi-aksi oleh alat-alat lainnja dalam mentjapai tudjuan Nasional.

Oleh karena itu mau tak mau Angkatan Bersendjata mendesak memadjukan kebutuhannja akan tenaga manusia dan materiil.

Sudah diterangkan bahwa Angkatan Bersendjata adalah instrumen jang paling aktif. Namun semangat Nasional adalah unsur jang paling utama daripada potensi perang suatu bangsa, oleh karena sekali semangat Nasional untuk melandjutkan perlawanan terhadap musuh mendjadi patah oleh sebab apapun

djuga, maka musuh berada dalam posisi untuk mudah memaksakan kehendaknja. Semangat Nasional bersumber kepada ideologi Negara. Oleh karena itu maka untuk pembangunan Angkatan Bersendjata indoktrinasi ideologi Negara, jaitu Pantjasila, Manifesto Politik Republik Indonesia, Amanat Pembangunan Presiden, „Djalannja Revolusi Kita" dan „Membangun Dunia Kembali" bagi Rakjat Indonesia pada umumnja, disamping indoktrinasi Sapta-Marga kepada warga Angkatan Bersendjata pada chususnja merupakan suatu usaha jang amat esensiil, usaha mana ditudjukan supaja Rakjat dan Angkatan Bersendjata, bilamana bangsa Indonesia dipaksa untuk berperang, mereka itu tidak kenal menjerah dalam keadaan jang bagaimanapun djuga dan berusaha dengan tenaga dan alat jang ada padanja untuk keluar sebagai pemenang.

Kelima unsur daripada potensi perang suatu bangsa merupakan suatu kesatuan tunggal jang harmonis. Hal ini berarti, bahwa pembangunan Angkatan Bersendjata harus disertai dengan pembangunan unsur-unsur lainnja daripada potensi perang suatu bangsa setjara selaras. Oleh karena itu sedjalan dengan pembangunan Angkatan Bersendjata dan semangat Nasional maka harus diusahakan:

Pembangunan kekuatan Industri dan Ekonomi, untuk setjara selfsupporting memenuhi berbagai kebutuhan materiil untuk Angkatan Bersendjata dan Rakjat. Dalam hubungan ini, dalam tahap pertama Pembangunan Semesta perlu mulai diletakkan dasar-dasar untuk pembangunan industri guna keperluan Angkatan Bersendjata.

Pembangunan dibidang penjelidikan dan Perkembangan Ilmiah jang penting baik untuk Angkatan Bersendjata maupun untuk industri.

Dalam hubungan ini lembaga-lembaga Scientific Research dan Development jang penting untuk Angkatan Bersendjata perlu dibentuk dalam tahap pertama Pembangunan Semesta.
Pembangunan tenaga manusia, dalam arti kata pendidikan dan latihan untuk mendapatkan tenaga-tenaga terlatih bagi berbagai kebutuhan Angkatan Bersendjata chususnja dan Negara umumnja. Dalam hubungan faktor tenaga manusia, perlu dikemukakan keharusan adanja alokasi jang seimbang daripada tenaga manusia untuk segala usaha Negara, baik diwaktu damai maupun diwaktu perang'.

62. Ajat b), c), d) dan e) lama mendjadi c), d), e dan f baru § 407:

63. Ajat a): Kekuatan Militer Negara Indonesia harus disusun sesuai dengan kebutuhan untuk menghadapi setiap kemungkinan agresi dan menghantjurkannja.

Ajat b):

Sub 2) Politik Pertahanan jang defensif-aktif.

Sub 4) Indonesia jang sedang menjelesaikan tuntutan-tuntutan Revolusi Nasionalnja.

Sub 6) hapus.

Ajat c): Karena faktor tersebut diatas Indonesia memerlukan Angkatan Perang jang dalam rangka politik pertahanan jang defensif-aktif harus diperhitungkan benar-benar oleh tiap agresor, bukan karena kekuatan menangkisnja sadja akan tetapi djuga kekuatan mengikat untuk achirnja menghantjurkannja.

64. § 408:

Ajat a).

Sub 2) Usaha kearah selfsufficiency sedjauh mungkin diantaranja melaksanakan landreform.

Ajat b).

Sub 4) Pemberian prioritet untuk pengolahan bahan-bahan mentah vital untuk industri sematjam timah, bauxit dan bensin milik Negara.

Sub 5) Penindjauan kedudukan dan nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing jang mengexploitasi sumber mineral dan mengusahakan perkebunan jang menghasilkan bahan vital, agar untuk kepentingan pertahanan nasional tidak dihadapkan pada kesulitan.

Sub 6) Penjempurnaan sistim distribusi dan penguasaan (nasionalisasi) transpor vital seperti transpor minjak jang kini sebagian besar masih ditangan pengusaha asing (tankervloot), oleh negara.

Ajat f).

Sub 1) Diadakan usaha untuk mempertinggi kemakmuran dan kesedjahteraan sebagai dimaksud oleh program „Sandang-Pangan" dengan melaksanakan landreform.

Sub 6) merupakan sub baru jang berbunji:
„Diadakan usaha penjempurnaan pemeliharaan rochani ditiap-tiap Angkatan menurut agamanja masing-masing, misalnja dengan mendirikan tempat-tempat peribadatan, bagi para pemeluk agama jang bersangkutan. Dalam mengikut-sertakan rakjat dibidang keamanan/pertahanan djuga diperhatikan unsur-unsur alim-ulama".

Sub 7) djuga merupakan sub tambahan, jang berbunji:
„Demobilisasi sebelum dibuat Undang-undang atau Peraturan haruslah diatur terlebih dahulu persiapan-persiapan dan rentjananja, dan dipakai prinsip mengalihkan mereka dari lapangan bersendjata kelapangan pembangunan".

65. § 409:

Ajat a) Pokok susunan:

Sub 2) Tugas: menghadapi segala kemungkinan agresi.

Sub 3) Komando jang kuat dan kemampuan mengontrol jang besar.

Ajat b)

Sub 1) Menghadapi segala kemungkinan agresi, tugas strategis Angkatan Darat adalah:
a) Menghadapi kegiatan subversi asing ..... dan seterusnja.

Ajat c)

Sub 2) (e) Pengerahan tenaga untuk melawan subversi asing.

Sub 3) (a) Organisasi Komando: Komando jang kuat dan kemampuan kontrol jang besar berdasarkan keadaan geografis negara didalam mana laut merupakan faktor utama.

66. § 410:

Ajat e) Mengadakan pimpinan dan pembinaan jang doktriner dari semua djawatan dan dinas negara jang bersifat maritim (doktrin maritim), dan indoktrinasi Manifesto Politik Republik Indonesia, Amanat Pembangunan Presiden, „Djalannja Revolusi Kita" dan „Membangun Dunia Kembali".

67. § 411:

Ajat c).

Sub 4) Industri pertambangan (minjak, aluminium, pipa wadja dan sebagainja),
jang dikuasai negara (nasionalisasi).

Ajat e).

Sub 8) ditambah (c): Indoktrinasi Manifesto Politik Republik Indonesia, Amanat Pembangunan Presiden, „Djalannja Revolusi Kita" dan „Membangun Dunia Kembali".

68. § 412:

Ajat b). Peralatan:

2. Chusus:

(c) Menjesuaikan ketentuan kepegawaian selaras dengan kebutuhan revolusi, berdasarkan Manifesto Politik Republik Indonesia.

(d) Usaha penjaluran tenaga jang tidak mampu menjesuaikan diri dengan wadjah baru Kepolisian Negara berdasarkan Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden dengan tjara jang sesuai dengan azas perikemanusiaan.

Ajat d). Pendidikan:

2. Chusus:

(c) ditambah anak kalimat: dan Indoktrinasi Manipol, Amanat Pembangunan Presiden, „Djalannja Revolusi Kita" dan „Membangun Dunia Kembali".

69. § 415:

Alinea kedua diubah:

Peranan dan kegiatan Angkatan Perang dan Kepolisian Negara dibidang produksi, mendekatkannja dengan rakjat setjara lebih intensif, dalam proses pembangunan negeri terutama dalam hal industrialisasi dan pelaksanaan landreform.

70. § 415:

Ajat a).

Sub 1) Tertjiptanja ideologi Pantjasila diseluruh pelosok kepulauan, dan indoktrinasi Manipol. Amanat Pembangunan Presiden, „Djalannja Revolusi Kita" dan „Membangun Dunia Kembali".

IV BIDANG PRODUKSI

Industri Berat (§ 489)

1. Untuk lebih memberikan kebebasan dalam pelaksanaan mendatangkan tenaga ahli luar negeri guna keperluan survey, maka

hendaknja dalam rumusan Garis Besar Pembangunan seperti tertjantum dalam § 489 halaman 572 (Buku kesatu Djilid III) djangan disebut nama sesuatu negara, tjukup disebut *ahli luar negeri.*

Industri Ringan

2. Hendaknja § 480 b (Buku kesatu Djilid III) diubah mendjadi: „Industri ringan (sedang dan besar) dimiliki oleh Negara, oleh swasta jang modal dan keuntungannja menetap di Indonesia (domestic-capital).
3. Supaja § 492 (Buku kesatu Djilid III punt 6) ditambah dengan ajat baru (6 b), jang berbunji:
„Pabrik-pabrik pengawetan buah-buahan, sajur-majur dan lauk-pauk".

V. BIDANG DISTRIBUSI DAN PERHUBUNGAN

Gerakan Koperasi

1. Dalam Buku kesatu Djilid III § 507, alinea terachir jang berbunji: „Selain itu perlu diadakan wadjib Koperasi, dimana setiap anggota masjarakat diharuskan mendjadi anggota Koperasi", sejogianja diganti sebagai berikut: „Menjempurnakan bimbingan dan mengawasi perkoperasian Rakjat dibidang produksi, distribusi dan industri" (Sesuai dengan Amanat Presiden. Lihat Buku kesatu § 20 D. sub 2).
2. Dalam menggerakkan koperasi setjara frontaal perlu melalui pendidikan, penerangan, bantuan dan fasilitet jang luas dan berentjana, sehingga kesadaran berkoperasi dimiliki oleh setiap warga-negara Indonesia.

Perhubungan Darat

3. Buku kesatu Djilid III, § 523, halaman 590:
Rumusan jang berbunji: „Semua bus atau truck Djawatan diserahkan kepada perseroan terbatas"
hendaknja berbunji sebagai berikut: „Semua bus atau truck Djawatan diserahkan kepada Perusahaan Pengangkutan Negara".

Tourisme

4. Buku kesatu Djilid III § 538 sub b.l.a. hendaknja berbunji: „Mengingat bahwa Negara kita baru sadja mengindjak dunia Tourisme, hendaknja peringanan Frontier Formalities, djika dikehendaki, diselenggarakan setjara berangsur-angsur demi keamanan dan kewaspadaan Nasional".

VI. BIDANG KEUANGAN DAN PEMBIAJAAN

1. Pola projek menurut daftar projek A dalam Rantjangan Pola Pembangunan Semesta, dapat disetudjui sebagai dasar dengan ketentuan bahwa penjebarannja merata diseluruh daerah.
2. Pola projek menurut daftar projek B menurut Rantjangan Pola Pembangunan Semesta, perlu direvisi sedemikian rupa, sehingga semua kemungkinan untuk menggali kekajaan alam dikerdjakan, karena projek B meskipun dasar pikirannja dapat diterima, masih mengandung kelemahan-kelemahan disebabkan karena terlalu menggantungkan pelaksanaan dari exploitasi oleh modal asing dan hanja mengenai beberapa sumber alam sadja.
3. Mempergunakan bantuan-bantuan luar negeri jang telah ada, sedang kemungkinan memakai bantuan luar negeri jang baru berupa kredit harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
   (a) sesuai dengan Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden;
   (b) tiap-tiap kredit harus melalui peraturan perundangan, tjaranja dan projeknja;
   (c) djumlah kredit luar negeri untuk pembangunan harus dibatasi.
4. Penentuan Anggaran Belandja routine dan pembangunan dan pengawasan penggunaan uang Negara supaja didjalankan sesuai dengan ketentuan UUD-1945.

LAMPIRAN: B (SARAN)

I. BIDANG MENTAL/AGAMA/KEROHANIAN/PENELITIAN

Mentalita (§ 317)

1. Mentalita (mentalitet) ialah segala tjara berfikir jang bersifat abstrak, mengenai segi kehidupan rochani, agama, kebatinan dan kepertjajaan.
2. Diusulkan bahwa pembangunan physik dan psychis (mentalitet) atau rochani dan djasmani harus ada keseimbangan.

Agama/Kerochanian

3. Madrasah hendaknja berdiri sendiri sebagai badan otonom dibawah pengawasan Departemen Agama dan bukan dibawah pengawasan Departemen P.P. & K.
4. Diminta perhatian terhadap penterdjemahan kitab Indjil (Bible) jang diselenggarakan oleh pihak Protestan, karena jang dirantjangkan oleh Depernas hanjalah jang diselenggarakan oleh Geredja Rooms Katholik (Buku ketiga Djilid V § 888 Projek Pembangunan Mental 2, Penterdjemahan kitab Indjil (Bible).
5. Alat-alat pengangkutan (kapal laut/udara) bagi rombongan djemaah hadji harus diperbanjak.

Pendidikan

6. Didalam mengadakan pendidikan kedjuruan perlu adanja koordinasi jang sebaik-baiknja antara Departemen P.P. & K. dengan Departemen-departemen lainnja.
7. Didalam mengadakan perluasan S.R. selain tiap-tiap desa sebagai antjer-antjer supaja masalah rapat-tidaknja penduduk djuga dipertimbangkan.
8. Dalam pelaksanaannja supaja persentase anggaran belandja untuk bidang P.P. & K. dapat ditindjau begitu rupa hingga

mendapatkan kemungkinan kenaikan sesuai dengan besarnja tanggung-djawab bidang tersebut didalam membangun tenaga-tenaga pembangunan.

9. Mengenai usul Depernas tentang pemetjahan Departemen P.P. & K. mendjadi beberapa Departemen (lihat § 347 dan § 394, a, 2) supaja dipertimbangkan berdasarkan pengalaman praktek selandjutnja.
10. Pendidikan Masjarakat supaja tetap mendjadi Djawatan tersendiri.
11. Bahasa Kesatuan Indonesia supaja diusahakan dapat meresap dengan pesat diseluruh tanah air sampai dipelosok-pelosok.
12. Pemberian subsidi kepada perguruan-perguruan swasta supaja diberikan setjara seadil-adilnja.
13. Sesuai dengan seruan Presiden jang tertera didalam amanat beliau tentang pembangunan semesta (Amanat Presiden tentang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, Buku kesatu Djilid I halaman 49) mengenai pentingnja kader-kader koperasi maka pendidikan kedjuruan kita supaja lebih banjak memperhatikan pembangunan kader-kader koperasi.
14. Didalam menjelenggarakan Pemberantasan Buta Huruf (P.B.H.), pendidikan masjarakat baik jang mengenai pendidikan kedjuruan maupun pendidikan umum perlu diikut-sertakan rakjat setjara aktif dengan menarik organisasi guru, pemuda, peladjar, dan sebagainja, universitas rakjat, lembaga-lembaga pendidikan, dan sebagainja. Djuga djawatan-djawatan perlu diikut-sertakan didalam pembangunan tenaga-tenaga kedjuruan.
15. Pentingnja pendidikan disekolah disatu-ragakan dengan pendidikan dirumah dan didalam masjarakat dan dalam hubungan ini maka perlu digiatkan Persatuan Orang-tua Murid dan Guru (POMG), organisasi-organisasi guru, peladjar, kebudajaan, dan sebagainja dan organisasi-organisasi masjarakat lainnja.
16. Mengenai Anggaran Belandja berpendapat :
    — menjetudjui usul perbandingan anggaran belandja untuk pendidikan kedjuruan dengan pendidikan umum mendjadi 7 : 3.

17. Civics hendaknja diberikan mulai dari Sekolah Rakjat setjara sistimatis, sehingga achirnja dapat terbentuk warganegara jang berpribadi patriot, sosialis dan demokrat sedjati.
18. Perpustakaan Desa harus dirumuskan dengan tegas dan harus dimasukkan dalam pola projek pokok.
19. Pemerintah hendaknja membantu pedjabat-pedjabat pemerintah dalam melakukan latihan djabatan, dengan mengudjinja tersendiri dan jang mempunjai civil effect.
20. Badan-badan dan lembaga-lembaga pendidikan keagamaan (Islam, Nasrani Kristen (dan lain-lain) seharusnja Pemerintah (Departemen Sosial, Departemen Agama dan Departemen P.P. & K.) dalam memberikan subsidi/bantuannja kepada mereka dalam suasana Usdek dan Manipol ini, didjalankan setjara perimbangan menurut bilangan penganut-penganutnja, dan disamping itu hendaknja dalam mereka menerima bantuan dari Pemerintah atau lainnja itu ditjegah mengadakan propaganda jang tidak wadjar.

II. BIDANG KESEDJAHTERAAN

Kesedjahteraan Rakjat (§ 384)

1. Supaja selekasnja dilaksanakan Undang-undang Pokok Kesehatan jang telah disetudjui oleh Pemerintah dan DPR-GR pada tanggal 30-9-1960, jang memuat diantaranja:
   a. Djaminan Kesehatan chusus untuk Pegawai/Buruh dan karya lain-lain, dimana harus diperhatikan pula perlindungan terhadap hal-hal jang mengganggu dan atau membahajakan kesehatan.
   b. Penggunaan dan penjebaran tenaga kesehatan Pemerintah maupun Swasta setjara adil dan merata.
   c. Usaha pengobatan dan perawatan untuk masjarakat diseluruh Indonesia setjara merata dan supaja obat-obatan mudah didapat dengan harga murah.
2. Dalam pembangunan semesta supaja dititik-beratkan terlebih dahulu usaha-usaha dilapangan preventif maupun kuratif pada desa-desa dan pelosok-pelosok dengan mempertimbangkan soal luas dan djarak daerah-daerah.

3. Hasil-hasil research dalam bidang kesehatan hendaknja effektif, lekas bermanfaat dan terasa.

Perumahan (§ 385)

4. Dalam bidang penerangan dan air minum hendaknja diusahakan pembesaran kapasitet, perluasan djaringan, pendirian projek-projek baru, penambahan tenaga ahli dan perbaikan sistim distribusi.
5. Pemberian bantuan finansiil, jang diberikan kepada pegawai-pegawai dikota, hendaknja djanganlah hanja ditudjukan kepada pegawai-pegawai jang berdiam dihotel-hotel melainkan kepada semua jang masih membutuhkan tempat kediaman jang lajak.
6. Untuk menghindarkan penjalahgunaan usaha swasta dalam bidang elektrifikasi perlu Pemerintah mengadakan pengawasan
7. Soal-soal jang bersangkutan dengan bank hendaknja dimasukkan dalam persoalan Per-bank-an.

Kesedjahteraan Sosial (§ 388)

8. Mengenai pembiajaan jang dianggarkan dalam daftar Pola Projek § 279 Djilid II, menjerahkan kepada Pemerintah kebidjaksanaan menetapkan sendiri alokasi uang jang akan diperuntukkan bagi tiap-tiap projek tersebut.
9. Supaja pembangunan bidang-bidang kesedjahteraan Sosial lainnja (§ 388 sub b No. 1 s/d 5) segera diperluas, diintensifkan dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana. Disamping itu perlu ditambah satu bidang lagi mengenai korban-korban akibat gangguan keamanan.
10. Dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana supaja diadakan rekreasi sehat terpimpin dengan djalan mengadakan kerdja-sama antara Departemen P.P dan K., Departemen Agama, Departemen Penerangan, Departemen Sosial dan lain-lain. Departemen jang berusaha setjara masal untuk mempertinggi achlak dan membimbing rakjat kearah sifat-sifat mental, seperti jang lajak dimiliki oleh warga-negara kita (§ 192, Djilid II) dengan menggunakan radio (ditiap-tiap desa satu transistor, ditiap-tiap asistenan satu projektor jang ber-

keliling ke-desa-desa), buku-buku batjaan untuk anak sekolah dan rakjat, dengan tjeritera-tjerita jang menarik dan mendjurus kearah perbaikan watak seperti kedjuruan, hemat, sederhana, hubungan dalam keluarga jang mesra, tjinta tanah air dan kasih kepada sesama manusia dan lain-lain.

11. Dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tidak boleh tidak akan timbul masalah-masalah sosial baru, lebih akibat peralihan (transisi) dari masjarakat agraris ke masjarakat industri. Oleh karena itu disarankan, hendaknja pagi-pagi sudah dipikirkan oleh Pemerintah dan diambil langkah-langkah persiapan untuk menghadapi masalah-masalah sosial baru seperti tersebut diatas, supaja Pembangunan Semesta Berentjana jang kita usahakan itu sungguh-sungguh membawa kesedjahteraan kepada rakjat dan tidak sebaliknja.
12. Disamping usaha-usaha kesedjahteraan sosial Pemerintah, hendaknja Pemerintah membantu pembangunan usaha-usaha swasta nasional, baik jang sudah ada, maupun jang akan didirikan dalam bidang kesedjahteraan sosial.

Kesedjahteraan Tani dan Nelajan (§ 390)

13. Jang termaktub dalam Buku kesatu Djilid III tentang Garis Besar Pembangunan § 620 tentang waktu kerdja harus dinaikkan dari 7 djam mendjadi 8 atau 9 djam, tidak boleh bertentangan dengan Buku kesatu Djilid I tentang pendahuluan § 20 sub d ajat 1 a.
14. Supaja ada koordinasi jang sebaik-baiknja antara Departemen-departemen jang menggunakan tenaga kerdja untuk pembangunan.
15. Untuk lebih mendjelaskan kedudukan buruh dalam rangka Sosialisme Indonesia diadjukan difinisi sebagai dibawah ini : Buruh dalam pengertian Sosialisme Indonesia adalah „Manusia sebagai sumber tenaga kerdja jang *menentukan* dan *bertanggungdjawab* terlaksananja masjarakat adil dan makmur berdasarkan Manipol" (lihat halaman Manipol 14).
16. Tanah kosong supaja dikerdjakan oleh petani miskin berdasarkan peraturan Pemerintah atau Undang-undang.

17. (1) lama ditambah research.
18. 4. 1. supaja diperhatikan soal perumahan untuk tani dan nelajan dengan djalan kredit.
19. Perluasan penghargaan dari penemu-penemu sesuai dengan Amanat Presiden (Buku kesatu Djilid I § 33 ajat d).
20. Supaja dilaksanakan Undang-undang Pokok Agraria, termasuk pembiajaan-pembiajaannja dalam bidang landreform dan land use.
21. Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah partikelir.
22. Distribusi sandang-pangan untuk petani dan nelajan dengan melalui koperasi-koperasi tani diadakan dengan merata.

III. BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/PERTAHANAN

Pembagian Daerah dan djumlah tingkatan (§ 392)

1. Ajat b, sub (1) s/d sub (5) diadjukan perubahan sehingga seluruhnja berbunji sebagai berikut :

„1. Seluruh wilajah Indonesia *dibagi habis* dalam Daerah-daerah Swatantra".

„2. Daerah Administratif harus diartikan sebagai suatu bentuk pengawasan Pusat atas Daerah-daerah swatantra jang dilakukan oleh Departemen DNOD, dengan mengadakan Biro-biro, seperti Biro Djawa, Kalimantan, Sulawesi dan sebagainja. Biro-biro tersebut termasuk dalam bagian Otonomi dan Desentralisasi/Departemen DNOD".

„3. Daerah swatantra terdiri dari 3 tingkatan, tingkat I dan II sebagaimana jang telah ada dan jang masih akan diadakan berdasarkan perundang-undangan jang telah ada. Tingkat III diadakan pada daerah ketjamatan atau daerah kesatuan masjarakat hukum jang tjukup besar, atau dari gabungan beberapa desa".

„4. Daerah Swatantra Tingkat III pada achirnja harus menggantikan kesatuan-kesatuan masjarakat hukum terendah".

„5. Tidak setudju adanja Propinsi administratif.
Pulau Sulawesi supaja dibagi mendjadi 4 Daerah Swatantra Tingkat I".

„6. Tidak setudju Pola jang hendak menempatkan swatantra tingkat I didaerah keresidenan dan tingkat II didaerah ketjamatan".

„7. Keresidenan supaja dihapuskan dan pegawai-pegawainja ditampung didalam daerah swatantra I dan II".

2. Harus segera adanja ketentuan dalam Undang-undang Organik jang membagi habis seluruh wilajah R.I. dalam tiga tingkatan Daerah Swatantra, sebagai pelaksanaan U.U.D. fasal 18.

Desentralisasi (§ 393)

3. Mengharap kepada Presiden untuk membikin Undang-undang Pokok tentang Pemerintahan Daerah tersebut setjepat mungkin dengan bekerdja sama dengan DPR-GR. Dan dalam penjusunan Undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah ini hendaklah dihindarkan doublures terutama mengenai tugas dan wewenang.

4. Ajat : h no. 7 dirobah sebagai berikut :
„adanja pengawasan jang preventif dan repressif".

Pemerintahan Daerah (§ 393)

5. (a) Harus segera diadakan satu sadja Undang-undang Pokok Tentang Pemerintahan Daerah jang mentjakup segala pokok-pokok (usul-usul) jang progresif dari U.U. No. 22/1948, U.U. No. 1/1957, Pen. Pres. No. 6/1959 dan Pen. Pres. No. 5/1960, sesuai dengan idee demokrasi terpimpin.

(b) Untuk mentjapai efisiensi, setiap penjerahan tugas dan wewenang hendaknja diatur sedemikian, sehingga tidak mengakibatkan terdjadinja doublures dalam bidang-bidang tugas dan wewenang tersebut.

Pemerintahan Desa (§ 396)

6. (a) Aparatur Pemerintahan Desa.

(I) Untuk penjempurnaan aparatur Pemerintahan Desa dalam rangka penjelenggaraan Pola Pembangunan Semesta, perlu memperlengkapi Undang-undang

Pokok Pemerintahan Daerah No. 1/1959 dengan pelaksanaan pembentukan Pemerintah Daerah tingkat III.

(II) Semua warga penduduk desa baik pria maupun wanita berhak memilih dan dipilih.

(b) Perumah-tanggaan desa.
Hak desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganja sendiri diatur dengan Undang-undang.

(c) Rukun Kampung/Rukun Tetangga.
Dasar pembentukan disesuaikan dengan andjuran Presiden tanggal 17 Agustus 1960.

(d) Dalam pembentukan Pemerintah Daswati III harus memperhatikan faktor psychologis.

(e) Adanja djaminan Undang-undang hak sama bagi pria dan wanita untuk memilih dan dipilih sebagai Kepala Desa.

(f) Perlu adanja Undang-undang Nasional jang tidak menghambat perkembangan desa dan diantaranja mengatur:
(I) aparatur pemerintah desa,
(II) tugas dan wewenang desa,
(III) penggabungan desa-desa dengan ditjabutnja I.G.O. I.G.O.B. dan lain-lain peraturan kedesaan jang berbau kolonial dan feodal.

(g) Harus segera diadakan retooling tentang Desa dengan mengganti segala peraturan perundangan Desa kolonial dengan Undang-undang Nasional jang mengatur:
(I) aparatur Pemerintah Desa,
(II) tugas dan wewenang Desa,
(III) jang memungkinkan penggabungan-penggabungan Desa.

Pembangunan Masjarakat Desa (P.M.D.) (§ 397)

7. Untuk mentjapai pembangunan masjarakat desa harus dilaksanakan:
(a) Landreform dalam tahap I pelaksanaan Semesta Berentjana, melaksanakan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang tentang Perdjandjian Bagi Hasil.

(b) Pembentukan Daswati III setingkat daerah Ketjamatan.

8. Pelaksanaan, bimbingan dan bantuan pembiajaan dan teknik dari Pemerintah diserahkan kepada Daswati III.
9. Projek pembangunan dimulai dan dititik-beratkan kepada bidang-bidang jang langsung dengan usaha mempertinggi produksi sandang-pangan (pertanian, pengairan, perikanan, peternakan dan industri keradjinan) serta dilapangan pendidikan dan kebudajaan rakjat.
10. Untuk effisiensi Pembangunan Semesta perlu dilaksanakan prinsip rural development, didalam arti pembangunan projek-projek jang memenuhi kebutuhan lebih dari satu desa.

Landreform (§ 398).

11. a. Untuk bisa memenuhi setjara tepat bisa dibandingkan kenjataan bahwa pola dari Depernas masih menerima dan mempergunakan istilah „menjesuaikan U.U. Agraria 1870 dengan haluan Negara", sedangkan U.U. pokok Agraria September 1960 sudah tegas-tegas mentjabutnja dan akan menggantinja dengan U.U. lain.

    b. „Landreform berarti ..... bagian mutlak revolusi Indonesia".

    „Revolusi Indonesia tanpa landreform adalah sama sadja dengan gedung tanpa alas". (Lihat Djarek halaman 34).

    c. Dengan pertimbangan-pertimbangan jang dikemukakan didalam diktum, maka diusulkan plafond, maximum setjara rata-rata sebagai berikut:

    (a) Daerah jang berpenduduk sampai 100/km², maksimum 15 ha.
    (b) s.d.a. 101 sampai 250/km², 10 ha.
    (c) s.d.a. 251 sampai 450/km², 7½ ha.
    (d) s.d.a. 451/km² keatas, 5 ha.

    Itu semuanja mengenai tanah sawah, sedangkan mengenai tanah kering djumlah tanah ditambah dengan 20% dari djumlah itu.

    d. Kepada pemilik-pemilik tanah jang diambil tanahnja oleh Negara diberi ganti kerugian jang ditentukan oleh Peme-

rintah; tanah-tanah jang dikuasai oleh kaum imperialis dan jang mendjadi kepunjaan kaum kontra revolusi disita oleh Pemerintah tanpa ganti kerugian.

e. Batas minimum hanja ditentukan untuk memudahkan antjer-antjer pembagian tanah kepada mereka jang kekurangan tanah garapan dan mengingat kesanggupan mengerdjakan dari seseorang dan sama sekali tidak ditudjukan untuk melikwidasi tanah garapan kaum tani dibawah minimum. Batas minimum diperkirakan 1 — 2 ha.

g. Padjak bumi jang sedjak revolusi sudah dihapus tapi jang kini dihidupkan kembali sebagai Padjak Hasil Bumi dengan kl. 30 kali lipat, hendaknja ditindjau kembali.

f. Untuk mendjamin bahwa tidak akan terdjadi akumulasi tanah disatu tangan kembali dan dilain fihak disintregasinja kaum tani jang hanja memiliki tanah garapan dalam djumlah jang minim itu, maka hendaknja dipersiapkan oleh Pemerintah „djalan koperasi produksi pertanian" (gotong-rojong) bagi kaum tani dengan sukarela dengan tanah garapan dan tenaga kerdja sebagai saham Pemerintah memberi kredit, bantuan alat dan teknik dan lain-lain.

12. Kelebihan tanah Pertanian dari batas maximum itu dikuasai oleh Negara dan dibagikan kepada buruh-tani dan tani-miskin jang tidak mempunjai/kurang tanah garapan.
Kepada mereka jang setjara defacto menggarap suatu tanah akan mendapat prioriteit didalam pembagian tanah itu, ketjuali kalau kepentingan negara/masjarakat menghendaki lain.
Pemerintah dapat mengambil tindakan lain dengan mengganti setjara lajak.

13. Melaksanakan setjara konsekwen Undang-undang Penghapusan Tanah Partikelir, Undang-undang Bagi Hasil dan djuga supaja diadakan Undang-undang tersendiri jang mengatur daerah kehutanan.

14. Perlu pembentukan Panitia di Pusat maupun daerah dengan mengikut-sertakan wakil-wakil organisasi massa tani revolusio-

ner jang akan mendampingi pemerintah dalam melaksanakan Landreform.

15. Penanaman modal asing dilapangan Agraria tidak dapat dibenarkan, akan diutamakan bantuan dan pindjaman luar Negeri dalam bentuk kredit jang tidak mengikat.

Penjebaran Tenaga Pembangunan (Transmigrasi) (§ 399)

16. a. Harus diadakan persiapan jang pantas dan teliti didaerah jang bakal ditudju. Djuga diatur transmigrasi kolektif jang rombongannja meliputi berbagai lapangan keahlian dan diperhatikan perspektif koordinasi dengan potensi masjarakat daerah jang ditudju.
    b. Perlu perhatian jang tjukup untuk pembangunan desa disekitar daerah transmigrasi. Pembangunan didaerah desa-desa itu supaja seimbang dengan keadaan daerah transmigrasi untuk mentjegah timbulnja perasaan dianak-tirikan dari penduduk daerah tersebut.
    c. Transmigrasi lokal djuga merupakan usaha jang sedjalan dengan prinsip mentjegah perasaan dianak-tirikan itu. Disamping itu perlu koordinasi antar Departemen dan Djawatan serta Pemerintah Daerah. Perlu pula diikut-sertakan wakil-wakil dari organisasi massa tani dalam penjelenggaraan transmigrasi.
    d. Untuk menampung demobilisasi angkatan bersendjata dan kaum veteran perlu dibuka tanah baru diluar Djawa, Madura dan Bali dalam rangka potensi pertahanan nasional setjara keseluruhan.
    e. Djatah transmigrasi dari Rentjana Pola dinaikkan dan disesuaikan dari 250.000 orang mendjadi 1.500.000 untuk tahap I Pola Pembangunan.
17. Penjebaran tenaga pembangunan (Transmigrasi) harus setjara meluas dan merata, keseluruh wilajah Republik Indonesia.
18. Mendorong dan memberikan bantuan kepada transmigrasi spontan setjara intensif berupa fasilitet untuk pengangkutan dan pemondokan didalam perdjalanan. Pemerintah Pusat dan

Daerah melaksanakan transmigrasi lokal dengan memberikan bantuan dan pimpinan seperlunja.

19. Pembukaan tanah tidak diserahkan kepada modal asing, tetapi dilakukan oleh Pemerintah sendiri (Pusat dan/atau Daerah) dan Perusahaan-perusahaan Nasional.
Disamping itu dapat diterima kredit jang tidak mengikat dari luar Negeri untuk pembukaan tanah dan bantuan tenaga-tenaga ahli.

Koperasi (§ 400)

20. Dalam tahap pertama Pembangunan Nasional Semesta Berentjana hendaknja diusahakan setjepat-tjepatnja berdirinja Koperasi disemua desa diseluruh wilajah Republik Indonesia:
(a) Koperasi Penggarapan tanah;
(b) Koperasi Pembelian alat-alat Pertanian;
(c) Koperasi Pembelian Rabuk;
(d) Koperasi Transport;
(e) Koperasi Kebutuhan sehari-hari;
(f) Koperasi Kredit dan Lumbung;
(g) Koperasi-koperasi Nelajan;
dengan disertai pendidikan kader Koperasi jang mentjukupi keperluan diatas dan perlindungan atas usaha-usaha Koperasi tersebut oleh Instansi Pemerintah.

Pengerahan Tenaga Rakjat (§ 401)

21. Dalam bidang pengerahan tenaga rakjat hendaknja diadakan kerdjasama dengan Front Nasional untuk mendjamin kelantjaran pelaksanaan Program Kabinet dan pelaksanaan usaha-usaha Pola Pembangunan Nasional Semesta Berentjana, dengan sistim perlombaan kerdja jang gairah, bebas dari sifat-sifat paksaan tekanan.

Perundang-undangan dan Kependjaraan (§ 402)

22. Pembinaan hukum Nasional agar berlandaskan pada hukum adat jang sesuai dengan perkembangan kesedaran rakjat Indo-

nesia dan tidak menghambat tertjiptanja masjarakat adil dan makmur.

23. Perlu adanja rumah-rumah Pendidikan Negara chusus untuk anak-anak nakal dan disamping pembangunan rumah-rumah pendjara modern, dibangun rumah-rumah pendjara baru sebagai pengganti rumah-rumah pendjara jang lama.

Fakta-fakta jang mempengaruhi (§ 405)

24. Ajat j) sebagai tambahan baru, berbunji:
„Pembangunan Angkatan Bersendjata meliputi dua matjam pembangunan, jaitu pembangunan jang bersifat produktif. Dan Pembangunan Semesta jang akan dilantjarkan adalah pembangunan produktif. Oleh karena itu, biaja Rp. 30 miljar jang disediakan untuk pembangunan projek-projek chusus dibidang keamanan/pertahanan tak lain dan tak bukan adalah diperuntukkan untuk pembangunan projek-projek chusus jang bersifat produktif. Oleh karena itu pula biaja pembangunan konsumptif dari Angkatan Bersendjata, harus dibebankan kepada anggaran Negara dari tahun ke-tahun. Hal ini berarti bahwa rentjana-rentjana pembangunan konsumptif Angkatan Bersendjata akan banjak tergantung dari kemampuan keuangan negara dari tahun ke-tahun. Anggaran Rp. 30 miljar untuk pembangunan produktif itu kiranja tidak akan tjukup menampung semua keinginan-keinginan pembangunan projek-projek produksi. Oleh karena itu anggaran Rp. 30 miljar itu berupa modal untuk sekedar memulai mempersiapkan setjara prioritet dasar-dasar bagi projek-projek produksi. Angkatan Bersendjata, jang dalam tahap pertama Pembangunan Semesta selandjutnja berbentuk „Research", jang lambat laun dalam tahap Pembangunan Semesta selandjutnja akan dikembangkan mendjadi lembaga-lembaga produksi didalam arti jang sebenar-benarnja.

Selandjutnja perlu diperhatikan, bahwa:

(1) Pembangunan Angkatan Bersendjata dalam tahap pertama dari pada Rentjana Pembangunan Semesta harus merupakan landasan bagi pembangunan Angkatan Bersendjata

djangka waktu pandjang, dan tiap langkah madju dalam pada itu harus merupakan hasil jang diharapkan keamanan dalam Negeri dan menambah kesiapan dalam menghadapi soal Irian Barat.

(2) Dengan sendirinja kebidjaksanaan pembangunan Angkatan Bersendjata nanti harus merupakan integral daripada kebidjaksanaan Pembangunan Semesta, dan pembangunan daripada masing-masing Angkatan disynchronisasikan dengan pembangunan lain-lain Angkatan.

(3) Pemakaian tenaga asing dalam pembangunan Angkatan Bersendjata harus diatur dengan suatu peraturan chusus. Tenaga-tenaga asing itu sebaiknja merupakan perorangan-perorangan sivil jang bekerdja pada kita atas dasar kontrak untuk waktu 1 á 2 tahun, dan dimana perlu sesudah itu kontrak dapat diperpandjang. Tidak tepat kiranja bila kontrak-kontrak itu mempunjai status diplomatik dan militer, status mana bisa mempunjai konsekwensi-konsekwensi jang berat bagi kita".

IV. BIDANG PRODUKSI

Pangan

Menerima dan menjetudjui garis-garis besar pembangunan bidang produksi pangan seperti terbentang didalam Buku kesatu djilid III, § 416 s/d § 449, jang menudju pada selfsupporting.

Mengutamakan produksi bahan pangan pada perluasan produksi padi dan djagung, kehewanan dan peternakan, perikanan darat dan laut.

Mengandjurkan tjara-tjara untuk meningkatkan produksi pangan (intensifikasi-ekstensifikasi) sebagai berikut:

(a) Padi dan Djagung:

„11. Mengandjurkan agar Pemerintah segera melaksanakan landreform dan land-use sebagai pelaksanaan Undang-undang Pokok Agraria".

„22. Menggerakkan setjara massal pemberantasan hama dengan mengikut sertakan aktivitet penerbangan".

„33. Mengadakan gerakan massal tentang pembuatan pupuk kompos dalam rangka pembersihan kota".
„44. Memperluas areal tanah garapan".
„55. Intensifikasi penanaman, perbaikan tjara bekerdja, pemupukan, perbaikan bibit, terassering dll."
„66. Supaja Badan Perusahaan untuk menambah Bahan-bahan Makanan dan Pembukaan Tanah (B.M.P.T.) jang ada sekarang benar-benar dapat memberi bantuan kepada rakjat tani dalam menambah produksi beras, terutama ditanah-tanah kering".
„77. Supaja didaerah-daerah penghasil djagung diadakan djagung-centra".

(b) Kehewanan dan Peternakan:

„11. Mengandjurkan supaja, dalam intensifikasi peternakan, lebih diutamakan penjempurnaan bibit-bibit dalam negeri dan bila perlu baru diimport dari luar negeri".
„22. Mengandjurkan supaja, dalam hal memberantas penjakit ajam, Pemerintah menaruh perhatian terhadap pembikinan obat "Inoly", hasil penemuan bangsa Indonesia sendiri, disamping obat-obat lainnja serta memasukannja kedalam rentjana industri perobahan".
„33. Mengandjurkan perhatian terhadap makanan hewan, antara lain jang berasal dari afval pertanian, dan sebaliknja afval hewan didjadikan pupuk".

(c) Perikanan Darat & Laut.

„11. Mengandjurkan agar didaerah-daerah penghasil ikan diadakan gerakan penambahan perahu-perahu nelajan guna menudju terbentuknja armada nelajan.
„22 Agar para nelajan dilengkapi dengan alat-alat jang dibutuhkan sesuai dengan kemadjuan teknik, antara lain motorisasi, bantuan penerbangan dalam segala kebutuhannja, termasuk pembuatan galangan-galangan kapal nelajan.

(d) Perkebunan dan Kehutanan.

„11. Agar supaja diadakan peremadjaan segala tanaman perdagangan dan menambah areal untuk mempertinggi produksi. Peremadjaan itu meliputi perusahaan perkebunan dan perkebunan rakjat".

„22. Agar diadakan gerakan penghidjauan tanah-tanah jang gundul untuk mentjegah erosi jang mendjadi penghambat besar bagi para petani".

„33. Mengandjurkan bantuan penerbangan dalam hal pemberantasan kebakaran hutan".

Menjetudjui rentjana Depernas dalam target usaha tiap tahun dalam produksi beras dan bahan pangan lainnja, seperti terlukis didalam § 421 s/d § 428, Buku kesatu, Djilid III, bab 31, sub 1.

Menjarankan sebagai kebidjaksanaan penjelenggaraan usaha-usaha pokok-pokok penting sebagai berikut:

(a) Koperasi:

„11. Agar dalam produksi pangan dipergunakan Koperasi-koperasi Produksi dilapangan Pertanian, Perikanan dan Kehewanan".

„22. Supaja fungsi Koperasi dimasukkan kedalam § 430, § 433 dan § 436 Buku kesatu, Djilid III bab 31, sub 1".

(b) Perindustrian:

Hendaknja pembangunan perindustrian disesuaikan dengan hasil produksi pertanian, perikanan, peternakan, serta memprodusir alat-alat pertanian.

(c) Supaja diadakan BRIGADE PEMBANGUNAN jang mobil untuk mendjamin lantjarnja pekerdjaan transmigrasi jang telah direntjanakan dan sebelum diadakan pemindahan transmigran.

(b) Perkreditan:

Perkreditan untuk rakjat tani/nelajan, baik berupa natura maupun uang, supaja diberikan tepat pada waktunja, mudah dan rendah bunganja, serta setjara kontinu.

443/B (8)

(c) Tenaga:

„11. Pengerahan tenaga massa setjara effisien dibidang produksi tanpa penambahan beban dan pengorbanan jang berlebihan".

„22. Ikut sertanja rakjat harus bertudjuan perubahan susunan masjarakat jang lebih baik, dimana sandang pangan dan perumahan dapat dipenuhi setjara minimal".

„33. Pendidikan tenaga-tenaga ahli supaja diarahkan untuk memprodusir tenaga-tenaga spesialisasi disegala bidang pembangunan. Dalam hal pendidikan ahli-ahli pertanian supaja diusahakan praktek membimbing rakjat petani".

Sandang

Menjetudjui Garis-garis Besar Pembangunan bidang produksi sandang seperti terbentang didalam Buku kesatu Djilid III, § 450 s/d § 476, jang bertudjuan produksi guna mentjapai selfsupporting dibidang sandang dalam arti:

(a) Pengolahan bahan baku sampai mendjadi hasil terachir.

(b) Penjediaan bahan baku dengan djalan menghasilkan sendiri.

2. Menjetudjui rentjana persediaan sandang jang akan dilaksanakan taraf demi taraf, sesuai § 452 Buku kesatu tersebut.

3. Menjetudjui penjediaan bahan baku jang berupa kapas, rayon dan rami, untuk mentjukupi rentjana penjerahan sandang.

4. Menjetudjui usaha mentjapai self-supporting dalam bahan baku dengan djalan perusahaan penanaman kapas sampai kepada pengolahannja mendjadi hasil jang terachir, dilaksanakannja rentjana produksi rami serta rentjana peradjutan.

Mengandjurkan sebagai djaminan kelantjaran Industri sandang sebagai berikut:

(a) Mengembangkan kreasi rakjat didalam bidang sandang;

(b) Mempertinggi produktivitet tenaga dan enthousiasme bekerdja dengan berpedoman pada Amanat Presiden jang

tertulis, tanggal 28-8-1959, Buku kesatu halaman 44. Untuk ini fungsi penerangan adalah urgen!

(c) Mengadakan retooling terhadap aparat-aparat jang ternjata tidak mampu melaksanakan pola Pembangunan Semesta Berentjana ini;

(d) Penempatan projek-projek/pabrik-pabrik sandang hendaknja sedemikian rupa, sehingga dapat mendjamin kelantjaran dan meratanja distribusi-sandang, sehingga dapat sampai pada seluruh masjarakat Indonesia, mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan.

Industri Berat

1. Menjetudjui garis-garis besar pembangunan bidang produksi industri berat sebagaimana termaktub dalam Buku kesatu, Djilid III, Bab 31, Sub 3, § 477 s/d § 491, jang dilengkapi dengan pikiran-pikiran jang terdapat dalam Buku kelima, Djilid XIV Pola Pendjelasan.
2. Mengutamakan pembangunan, perluasan dan perbaikan industri berat jang menghasilkan bahan-bahan dan tenaga listrik untuk pelaksanaan industrialisasi terutama dalam bidang pemenuhan kebutuhan sandang-pangan dan pengangkutan.
3. Menjesuaikan pembiajaan dengan pengutamaan dan volumenja.
4. Manpower-management dan manpower-building diorganisasikan dan dikoordinasikan setjara efektif.
5. Menjerahkan agar:
   (a) daerah-daerah jang sekarang mempunjai kekajaan alam, jang segera dapat diusahakan, mendapat perhatian lebih besar dalam alokasi pendirian industri berat.
   (b) diadakan djaminan pelaksanaan landreform dan land-use guna keperluan tempat-tempat (tanah) jang tepat menurut perhitungan ekonomi perusahaan.
   (c) mendjadikan pembuatan galangan-galangan kapal, sedang dan besar, industri perkapalan, projek pembangunan industri berat.

(d) dilakukan eksploitasi (setidak-tidaknja survey) atas penambangan nikkel dan emas jang tidak terdapat dalam Pola Projek.

(e) supaja pembiajaan survey itu dibebankan pada Anggaran Belandja Pembangunan Semesta.

Industri Ringan

1. Menjetudjui garis besar pembangunan industri ringan seperti termaktub didalam Buku kesatu, djilid III, Bab 31, Sub 3, § 477, § 492 s/d § 495.
2. Mengandjurkan agar:
   (a) Industri ringan dan industri konsumsi barang vital milik modal Negara setjepat dan sebanjak mungkin mendjalankan ekspansi dan mendjadi inti dari perusahaan-perusahaan golongan sedjenis.
   (b) Tidak men-swastakan perusahaan Negara vital jang sudah ada.
3. Mengintensifkan kenaikan produksi bahan ekspor.
4. Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian untuk menaikkan produksi dalam negeri berupa hasil-hasil bahan makanan dan pakaian supaja dalam waktu jang singkat produksi sandang pangan mentjapai taraf self-supporting.
5. Mengadakan research dibidang pembangunan dengan dasar "development project".
6. Mengharuskan keselarasan antara industri berat dan ringan disatu pihak dengan industri Angkatan Bersendjata dilain pihak.
7. Mengutamakan pendirian industri-industri pengolahan bahan-bahan mentah hasil dalam negeri mendjadi barang-barang jang siap untuk dipakai.
8. Menjesuaikan penertiban dan penjempurnaan pelajaran dan penjebaran galangan-galangan kapal dengan "Nation-building" dan kebutuhan ekonomi jang merata, mengingat sifat dan bentuk kepulauan Negara kita.

Perobatan

1. Menjetudjui maksud pembangunan bidang produksi Perobatan seperti termaktub dalam Buku kesatu djilid III, Bab 31.
2. Mengandjurkan agar:
   (a) segera dikeluarkan Undang-undang Pharmasi beserta peraturan-peraturan jang mengatur soal-soal dunia pharmasi.
   (b) segera menerbitkan buku pharmacopea Indonesia, begitu djuga buku-buku jang memberi petundjuk tentang tjara-tjara pemeriksaan dan alat-alat jang berhubungan dengan atau jang dipakai untuk kesehatan rakjat.
3. Mengandjurkan dibentuknja suatu Dewan Pharmasi jang berkedudukan di Departemen Kesehatan, jang anggota-anggotanja terdiri atas Pemerintah dan Swasta jang mempunjai reputasi baik serta mempunjai keahlian jang tinggi mutunja.
4. Pemerintah mendirikan dan memperluas Lembaga-lembaga, Laboratoria Hortus-Medicus dan Lembaga-lembaga jang langsung berhubungan dengan soal-soal pharmasi, pembuatan vaccin dan sera untuk manusia dan hewan.
5. Sedjalan dengan tarap kemadjuan dunia kesehatan di Indonesia, Pemerintah mendirikan Lembaga-lembaga Kimia jang berhubungan dengan pertahanan negara.
6. Semua obat-obat dan bahan-bahan baku jang berasal baik dari import maupun dari dalam negeri harus mendapat pengesahan sertifikat hasil pemeriksaan Lembaga Pemeriksaan Obat-obatan Departemen Kesehatan Republik Indonesia.
7. Perlu diusahakan tambahan ahli akademisi dan menengah, jang merupakan suatu team dalam perindustrian perobatan.
8. (a) Untuk memberantas penjakit rakjat, penjakit ternak, hama tanam-tanaman dan lain-lain penjakit perlu dibangun Industri Kimia Dasar, Industri Pharmasi/Pabrik Obat, Pabrik Assembling dan pabrik kosmetika, vaccin, sera.
   (b) Menganalisa obat-obat djamu setjara ilmiah dengan menggunakannja dalam pengobatan.

9. Perdagangan Obat.

(a) Menggunakan untuk mengekspor kelebihan hasil obat/ bahan kimia keluar negeri, terutama kenegara-negara Asia dan Afrika.

(b) Hendaknja Pemerintah mengatur dan mengawasi obat-obat patent buatan luar dan dalam negeri begitu pula pabrik-pabrik obat.

(c) Bahan-bahan obat dalam negeri jang diekspor keluar harus diperiksa lebih dahulu oleh Pemerintah tentang nilai, mutu dan kadarnja.

(d) Pabrik-pabrik obat Pemerintah dan swasta jang bonafide harus mendapat bimbingan dan bantuan berupa nasehat-nasehat dan materi untuk menudju ke kesempurnaan pelaksanaan dan Pembangunan Semesta sebelum proses self generating berlaku penuh.

10. Perawatan dan Distribusi.
Untuk dapat meratakan pembagian obat-obatan harus ditempuh sistim distribusi obat-obat jang baik seperti penjebaran apotik-apotik (dan dokter-dokter) sedikit-dikitnja sebuah ditempat Daswati II, Drogisterij (Rumah-rumah Obat) dan Toko-toko obat.

11. Agar Pemerintah segera melaksanakan Undang-undang Pokok Kesehatan.

12. Agar Pemerintah melaksanakan inventarisasi, penertiban dan pengendalian segala alat-alat produksi jang sudah ada untuk mentjapai efficiency.

V. BIDANG DISTRIBUSI DAN PERHUBUNGAN

Distribusi dan Komunikasi

1. Pemerintah mengatur dan memimpin setjara aktif bidang distribusi dan menguasai serta mengawasi pelaksanaannja.
Persediaan/penjaluran bahan-bahan penting untuk kehidupan rakjat, bahan-bahan baku/penolong bagi industri vital, impor dan ekspor berangsur-angsur dikuasai dan diselenggarakan oleh Negara.

2. Segala kegiatan distribusi diarahkan supaja barang-barang tiba dengan tjepat, merata dan murah ketangan rakjat.
3. Mengikut-sertakan koperasi, R.T.-R.K. dan sedjenisnja dan swasta nasional untuk membantu kelantjaran dalam penjaluran barang-barang sandang-pangan rakjat.
4. Pembangunan komunikasi antara berbagai djenis angkutan baik didarat, laut maupun udara, merupakan satu sistim jang seimbang. Untuk mentjapai maksud ini perlu adanja koordinasi jang baik diantara ketiga djenis perhubungan tersebut.
5. Politik harga.
   Politik harga barang-barang konsumsi dalam negeri didasarkan kepada azas serendah mungkin sesuai dengan daja beli rakjat dengan ketentuan-ketentuan:
   persediaan jang tjukup,
   persediaan penimbunan,
   pengendalian harga,
   kelantjaran distribusi dan pengawasan jang tjermat.
6. Politik harga barang ekspor didasarkan kepada pendapatan jang lajak bagi penghasil dengan memilih pasaran jang menguntungkan.

Perhubungan Darat

7. Buku kesatu Djilid III, § 526, halaman 592.
   Supaja diadakan normalisasi dan standardisasi sedjauh mungkin mengenai lebar ril kereta api dan alat-alat pengangkutan serta alat-alat/perlengkapan lainnja dan supaja diperhatikan pengangkutan berat (baru) untuk keperluan Keamanan/Pertahanan.
8. Buku kesatu Djilid III, § 526, halaman 592.
   Kata-kata dalam punt b. 7 supaja berbunji sebagai berikut: Mempermudah procedure dan menjediakan tjukup devisen untuk pembelian barang-barang atau alat-alat vital.
9. Pengangkutan melalui sungai (inland water transport) sangat perlu mendapat perhatian, karena dibeberapa daerah (Kalimantan, Sumatera) merupakan djenis angkutan jang sangat vital.

Dalam bidang ini tjampur tangan Pemerintah Daerah diperlukan.

10. Dalam mengadakan perbaikan dan atau pembuatan djalan-djalan raja baru maka prioritet pelaksanaannja adalah sebagai berikut:
    (a) djalan jang mempunjai nilai strategis.
    (b) djalan jang langsung berkepentingan/berhubungan dengan objek-objek Pembangunan Semesta ini dalam Bidang Produksi.
    (c) perbaikan dan/atau pembuatan djalan-djalan baru antara Ibukota Daswati I dengan Ibukota Kabupaten (Daswati II).
    (d) perbaikan dan/atau pembuatan djalan-djalan baru antara Ibukota Kabupaten dengan Ibukota Ketjamatan.
11. Pembuatan djalan baru agar diutamakan djalan-djalan „Trans-Sumatera", termasuk projek djalan Takengon-Blangkedjeren-Kotatjane (Atjeh) supaja dimasukkan tahap I, dan „Trans-Sulawesi", jang mempunjai nilai strategie sangat besar.
12. Industri jang menjangkut alat-alat kendaraan bermotor supaja produksinja diperbesar.
13. D.A.M.R.I. sebagai Perusahaan Negara untuk angkutan djalan raya, baik mengenai djumlah kendaraannja (terutama pengangkutan dengan truck), maupun mengenai wilajah kegiatannja, supaja diperluas.
    Dengan demikian D.A.M.R.I. dapat didjadikan satu „taman kendaraan tjadangan strategis" bagi keperluan „Keamanan/Pertahanan dan dapat mengatur penjaluran barang-barang penting bagi masjarakat".

Pos, Telegrap dan Telepon

14. **Monopoli oleh Negara :**
    Sedjiwa dengan apa jang termaktub dalam Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 33, maka perhubungan Pos dan Telekommikasi selekasnja mendjadi monopoli Negara.

15. Sifat sosial dan bedrijfsekonomis dari Pos dan Telekomunikasi
Perhubungan Pos dan Telekomunikasi jang merupakan satu kesatuan Perusahaan Negara itu diselenggarakan berdasarkan haluan sosial dan bedrijfsekonomis.

16. Standardisasi peralatan Pos dan Telekomunikasi.
Perlu didjalankan usaha-usaha kearah standardisasi dari peralatan Telekomunikasi jang ada di P.T.T., dengan djalan mengurangi matjam-matjam merk sampai batas-batas tertentu.

Perhubungan Laut

17. Pada prinsipnja dapat disetudjui menitik-beratkan pada:
Keamanan Pelajaran dan
Kepelabuhan (termasuk dok-dok/perbengkelan).
Dalam hubungan kedua bidang pokok itu pendidikan tenaga-tenaga ahli/kader dan penertiban management harus mendapat perhatian sebesar-besarnja dan harus dilaksanakan. Demikian pula fasilitet-fasilitet kepelabuhan port-equipment (haven-materiaal) harus mendapat perhatian sepenuhnja.

18. Pelajaran Niaga:
Tambahan djumlah tonnage armada pelajaran, baik armada pelajaran dalam negeri, maupun armada pelajaran samudera (untuk melajani pelajaran perdagangan luar negeri/foreign trade) supaja disesuaikan dengan kebutuhan konkrit dengan mengingat/memperhatikan kemampuan dan persediaan tenaga-tenaga ahli/kader serta management, dengan ketentuan komando posisi ada ditangan Pemerintah, antara lain mengkoordinasi alat-alat perhubungan laut jang ada dan mengawasi penggunaannja.

19. Pembiajaan:
Dalam hubungan Pelajaran Niaga, Keamanan Pelajaran dan Kepelabuhan berpendapat, agar untuk djangka waktu tertentu dapat dipertimbangkan penerimaan bantuan luar negeri dari manapun djuga datangnja jang tidak mengikat dan tidak merugikan perdjuangan rakjat Indonesia dibidang Pembangunan Maritim tertentu, antara lain dok-dok, perbengkelan-

pelajaran niaga, termasuk pendidikan tenaga-tenaga ahli/kader, sebagaimana disinggung dalam Amanat Presiden pada Pembukaan Sidang Pertama M.P.R.S. tanggal 10 Nopember 1960.

Perhubungan Udara

20. Perbandingan prioritas antara Usaha-usaha Pembangunan Penerbangan Feederlines, Inter-island Communication dan International Network.
Prioritas pembangunan diberikan kepada bidang Feederlines, menjusul intensifikasi dari Inter-island Communication dan achirnja usaha-usaha kearah turut-sertanja Indonesia kedalam International Network.
21. Standardisasi alat-alat Penerbangan.
Usaha-usaha kearah standardisasi harus diatur sedemikian rupa, atau diberi pembatasan-pembatasan seperlunja, sehingga Politik Bebas dan Aktif dari negara dapat tetap dipertahankan.
22. Penjaluran bahan bakar untuk Perhubungan Udara.
Persoalan penjaluran bahan bakar untuk perhubungan udara hendaknja mendapat tempat jang penting didalam rentjana Pembangunan Nasional Semesta Berentjana tahap pertama ini.

Tourisme

23. Pembangunan Gedung-gedung Kebudajaan untuk membantu mengembangkan dan mempertinggi mutu kebudajaan/kesenian didaerah pusat tourisme perlu mendapat perhatian.
24. Perihal kebudajaan sebagai objek tourisme, hendaknja dipelihara kepribadian dan keaslian Indonesia.

IV. BIDANG KEUANGAN DAN PEMBIAJAAN

1. Sumber-sumber pembiajaan bagi pembangunan semesta bisa djuga didapat dalam sektor rupiah dari uang sanering jang telah dilakukan, keuntungan perusahaan-perusahaan, simpanan-simpanan masjarakat dengan memperhitungkan guided saving, hasil landreform dan sebagainja. Dalam sektor devisen sumber pembiajaan bisa didapat dari memperbanjak produksi dan

ekspor hasil-hasil pertambangan dan pertanian dan kredit dari luar negeri (ekspor minjak bumi, kaju, kopra, timah, aluminium, nikkel, mangaan, mas dan tambahan kredit lainnja).

2. Seiring dengan kenaikan produksi dibidang barang-barang konsumsi didalam negeri harus dapat diatasi peningkatan ekspor dengan memperluas pasar dunia dan mendjamin peredaran barang-barang untuk keperluan pasar dalam negeri. Untuk mentjapai maksud ini politik perdagangan luar negeri jang bebas dan aktif harus dilaksanakan setjara lebih intensif dengan menempuh orientasi baru dalam pasar dunia sesuai dengan Manipol dan Amanat Pembangunan Presiden.
Perdagangan luar negeri harus disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan jang urgen dalam pembangunan ekonomi dan tidak didasarkan kepada maksud mengedjar pendapatan devisen semata-mata, tetapi lebih dititik-beratkan kepada maksud mendapatkan barang-barang modal untuk pembangunan dan ketjakapan teknik dari luar negeri.

LAMPIRAN : C (HARAPAN)

I. BIDANG MENTAL/AGAMA/KEROCHANIAN/PENELITIAN.

Pendidikan

1. Untuk mengintensifkan usaha Pendidikan dan Pengadjaran serta Kebudajaan pada umumnja sebaiknja supaja Anggaran Belandja P.P. & K. dinaikkan sadja hingga mendjadi 25% dari seluruh Anggaran Belandja Negara.

2. Pendidikan Dasar :
   Depernas tidak menjebut type sekolah daripada pendidikan dasarnja. Sesuai dengan tuntutan Sosialisme Indonesia anak-didik hendaknja dididik tjinta akan kerdja.
   Untuk ini perlu ditetapkan type sekolah karya. Prinsip-prinsip psychologis (Dewey) dan sosial-ekonomi (Kerschenteiner) hendaknja disesuaikan dengan iklim dan kondisi-kondisi serta kepribadian bangsa kita.
   Usaha penelitian dapat diadakan didalam rangka type sekolah tersebut.

3. Buku kesatu Djilid III § 322 — halaman 432.
   Tjara baru untuk menambah dan meninggikan ketjerdasan rakjat agar supaja tetap didjalankan oleh Djawatan Pendidikan Masjarakat.

   Adapun alasannja karena :
   (a) Djawatan Pendidikan Masjarakat telah mempunjai tradisi
   (b) dibeberapa daerah telah habis Buta-Hurufnja
   (c) lulusan Kursus Masjarakat ada ± 180.000
   (d) tenaga pelaksana telah ada :
      (I) petugas beladjar dari Gama Fak. Paedagogiek
      (II) petugas beladjar dari F.K.I.P.

(III) lulusan Kursus Peneliti Pendidikan Masjarakat
(IV) lulusan Kursus Pendjenang Pendidikan Masjarakat.

(e) swasta telah terorganisasi dalam membantu pelaksanaan pendidikan masjarakat.

4. Supaja dalam rangka pendirian Universitas-universitas/fakultas-fakultas diusahakan pendirian Perguruan Tinggi Home Economics.

Adapun alasannja:

(1) mentjegah adanja „confectie" dalam bimbingan kaum wanita kearah „kesedjahteraan keluarga", kalau terlampau banjak pengiriman keluar negeri untuk penjempurnaan Home Economics.

(2) mempertahankan „Kepribadian bangsa Indonesia" dalam lingkungan kaum wanita sebagai pemegang peranan utama dalam keluarga.

5. Plan tenaga pembangunan Buku ketiga Djilid VII.
Plan tenaga pembangunan supaja disatu-ragamkan dengan pembangunan, artinja plan penamatan sardjana-sardjana masing-masing Universitas disesuaikan dengan target pokok pembangunan, sehingga dengan demikian pemberian „Anggaran Belandjanja dapat diperhitungkan dengan kepentingan ini".

6. Formulasi pengertian pendidikan nasional supaja disesuaikan dengan:

(a) Buku kesatu Djilid I halaman 26, 37, 38, 49.

(b) Kuliah Umum Presiden pada tgl. 11 Oktober 1959 dimuka gabungan Mahasiswa Bandung jang berdjudul: Setialah kepada Amanat Penderitaan Rakjat.

(c) Buku Manipol halaman 62.

7. Pendidikan kesenian/kebudajaan djuga harus dimasukkan dalam pendidikan umum ini, untuk dapat membawa rasa kesatuan antara suku bangsa, menanamkan rasa patriotisme dan tjinta pada keindahan (estetika).

8. Kepanduan supaja dibebaskan dari sisa-sisa Lord Baden Powellisme.

II. BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/PERTAHANAN.

Pembangunan Masjarakat Desa

P.M.D. harus ikut serta dalam usaha-usaha melandjutkan pelaksanaan landreform, Undang-undang Pokok Agraria, Undang-undang Bagi Hasil dan pembentukan Daerah Swatantra Tingkat III.

III. BIDANG PRODUKSI.

Pangan (§ 416)

1. Agar supaja diadakan peremadjaan segala tanaman perkebunan rakjat, jang menghasilkan terutama untuk konsumsi didalam negeri dan menambah areal untuk menambah produksi.
2. Diandjurkan supaja pelaksana mengadakan penjelidikan untuk penanaman dan pemakaian plankton sebagai bahan makanan, karena tanaman tersebut banjak mengandung zat putih telur dan mineral. Lautan diantara kepulauan-kepulauan Indonesia luas sekali, tenang dan iklimnja baik, maka penanaman plankton tersebut akan subur.
3. Mengandjurkan agar keputusan-keputusan rapat kerdja BKS-Tani-Militer Seluruh Indonesia pada tgl. 6-2-1960 di Tjipajung mendapat perhatian sepenuhnja dari pelaksana.
4. Mengandjurkan supaja, dalam hal memberantas penjakit ajam, pelaksana menaruh perhatian terhadap pembikinan obat "Inoly", hasil penemuan bangsa Indonesia sendiri, disamping obat-obat lainnja serta memasukkannja kedalam rentjana industri perobatan.
5. Mengandjurkan perhatian terhadap makanan, hewan, antara lain jang berasal dari afval pertanian, dan sebaliknja afval hewan didjadikan pupuk.
6. Diandjurkan supaja pelaksana menanami rawa-rawa jang banjak tersebar dikepulauan Indonesia dengan batang kaju Eucalyptus, dengan maksud:
   a. pengeringan rawa,
   b. pemberantasan malaria,

c. mendapatkan hasil kaju dan minjak Eucalyptus sebagai bahan export (bahan kesehatan).

7. Supaja diadakan **BRIGADE PEMBANGUNAN** jang mobil untuk mendjamin lantjarnja pekerdjaan transmigrasi jang telah direntjanakan dan *sebelum* diadakan pemindahan transmigran.

8. Mengandjurkan supaja Menteri Keuangan ikut duduk didalam Badan Pengawas Bank Pembangunan Indonesia (B.P.I.).

9. Supaja dilapangan pertanian, peternakan dan perikanan dimasukkan kegiatan penerbangan sebagai alat pembantu.

10. Mengandjurkan agar keputusan Musjawarah Koperasi Seluruh Indonesia tgl. 28-5-1960 di Djakarta mendapat perhatian pelaksana sepenuhnja.

Industri Berat (§ 481)

1. Adalah tepat sekali bilamana baik dalam Pola Pendjelasan maupun dalam Pola projek, industri semen dianggap sebagai industri berat jang harus diutamakan. Oleh karena dalam Garis Besar Pembangunan chususnja dalam daftar C § 481 halaman 563 tidak termuat, hendaknja industri semen dimasukkan sebagai nomor 8 dalam daftar projek-projek itu.

2. Pupuk s.k. merupakan pupuk jang sangat diperlukan untuk penaikan produksi perkebunan chususnja kebun-kebun tebu. Oleh karena itu pada § 478 huruf g No. 21 halaman 561, diantara pupuk-pupuk itu hendaknja dimasukkan s.k.

3. Dalam Amanat Pembangunan P.J.M. diterangkan, bahwa modal buat pembangunan hendaknja dibangun darj kekuatan dalam negeri dan djika diperlukan modal luar negeri hendaknja berupa kredit jang tidak disertai ikatan politik dan militer, tidak disertai sjarat-sjarat jang memberatkan negara, berbunga rendah dan berdjangka pandjang:

   a. Memperkuat apa jang dirumuskan didalam § 478, f. halaman 560 itu dan

   b. Hendaknja pada daftar tersebut ditambahkan sebagai salah satu sumber pembiajaan lainnja, ialah sebagian dari keun-

tungan bersih perusahaan-perusahaan asing jang telah ada di Indonesia, sesuai dengan pikiran-pikiran jang termuat dalam § 1480 dan § 1482 halaman 3097.

Industri Ringan (§ 494)

1. a. Mewadjibkan kepada suplier-suplier (pemborong-pemborong) Luar Negeri untuk mengadakan pendidikan keahlian dan kedjuruan tehnik.
   b. Mewadjibkan perusahaan-perusahaan mengadakan pendidikan kedjuruan diperusahaannja bagi para pekerdjanja setjara bergilir diwaktu djam kerdja, dan menaikkan upah setelah lulus.
   c. Memperbanjak pengiriman Siswa dan tenaga kedjuruan untuk beladjar di Luar Negeri.
2. Membentuk Dewan Normalisasi untuk industrialisasi.
3. a. Mempersiapkan dan melengkapi aparatur Negara dalam pelaksanaan pembangunan.
   b. Mengikut-sertakan potensi dan tenaga rakjat dalam pelaksanaan pembangunan.
   c. Menempatkan industri ringan setjara merata untuk seluruh kepulauan Indonesia sesuai dengan kebutuhan dan persediaan bahan-bahan mentah (menurut prioriteit sesuai dengan rentjana Depernas).
4. a. Diperluas dan dipergiat dalam bidang Industri ringan peranan badan-badan koperasi didalam pelaksanaan Pembangunan sesuai dengan Undang-undang Koperasi.
   b. Mengembangkan dan mengorganisasi Industri alat-alat pertanian rakjat.
5. a. Mengikut-sertakan gerakan koperasi dalam mendapat sumber-sumber pembiajaan.
   b. Sekali-kali djangan mempergunakan deficit spending, djika memang diperlukan djuga, maka hendaknja hal itu dipergunakan untuk industri jang dalam djangka pendek dapat menghasilkan.
   c. Mengurangi keuntungan jang didapat oleh modal asing dan mengendalikan keuntungan modal Nasional.

Perobatan

1. Industri Pharmasi/Pabrik Obat sedapat mungkin mengutamakan pembikinan obat-obat bahan kimia guna memberantas hama, penjakit hewan, penjakit menular dan penjakit rakjat.
2. Pembangunan Industri Kimia Dasar jang sangat perlu bagi pertumbuhan Industri Pharmasi Indonesia diselenggarakan oleh Pemerintah.
3. Pabrik obat assembling dalam Pembangunan Semesta Berentjana pada tahap pertama harus diberi prioritas.
4. Bahan obat-obatan jang berasal dari dalam negeri harus mendapat prioritas untuk diolah.
5. Distributor-distributor/importir-importir obat-obatan harus mendjamin tersedianja obat-obat jang dibutuhkan oleh apotik-apotik/rumah-rumah obat baik patent luar negeri maupun obat-obat resep lain.
6. Setjara berangsur-angsur diselenggarakan pengobatan dengan obat-modern seperti obat-obat synthetis, antibiotika, vitamin dan hormon diseluruh wilajah Indonesia.
7. Sedapat mungkin ditiap-tiap ketjamatan harus ada poliklinik jang persediaan obat-obat/alat-alat kedokteran diselenggarakan oleh Bagian Distribusi obat-obatan baik dari Pemerintah maupun Swasta.
8. Pemerintah menerima djuga sumbangan jang tidak mengikat berupa obat-obat/resep-resep obat luar negeri.
9. Tiap-tiap daerah hendaknja dapat menguasai sendiri peredaran obat-obatan dan alat-alat kedokteran jang ada didaerah tersebut.
10. Mengikut-sertakan rakjat dalam memperbanjak produksi obat-obatan.
11. Mengusahakan pengerahan semua tenaga dibidang produksi dibawah satu komando guna memperbanjak hasil produksi.
12. Industri pharmasi serta hasil-hasilnja, baik kepunjaan Pemerintah maupun Swasta, harus mendapat perlindungan Pemerintah. Demikian pula obat-obat pendapatan baru dan obat-obat patent.

443/B (9)

13. Pada tahap pertama Pemerintah disarankan sudah siap dengan hasil penelitian-penelitian jang berguna untuk menghasilkan beberapa bahan baku pada Pembangunan Semesta tahap ke-II.

IV. BIDANG DISTRIBUSI DAN PERHUBUNGAN

Distribusi dan Perdagangan

1. Politik umum distribusi:

(a) Kekuasaan Negara dalam kehidupan ekonomi: Berdasarkan Sosialisme Indonesia jang memandang negara sebagai alat perdjuangan dan sebagai perumahan bangsa, maka ekonomi terpimpin mengakui kekuasaan negara atas segala bidang ekonomi sebagai alat perdjuangan rakjat untuk mentjapai keadilan dan kemakmuran jang merata, serta untuk menjediakan tempat bekerdja bagi bangsa Indonesia dalam usahanja memperoleh keperluan hidup jang lajak. Ini berarti bahwa kekuasaan negara tidak merupakan sesuatu diktatur jang mengekang segala kegiatan ekonomi rakjat jang wadjar.

Kekuasaan ekonomi harus digunakan sehingga terdjamin kenaikan pendapatan serta pembagian kemakmuran jang merata.

Untuk itu perlu adanja tindakan-tindakan kearah Indonesianisasi, nasionalisasi, sosialisasi dan pengkoperasian dalam bidang distribusi.

(b) Politik perdagangan dalam negeri didasarkan kepada: Mendekatkan produsen kepada konsumen dengan menghilangkan segala rantai perdagangan jang tidak perlu.

(c) Politik perdagangan luar negeri:
Untuk impor, didasarkan atas:

(I) Menjesuaikan dengan pembangunan ekonomi nasional jang seimbang.

(II) Mengekspor sedapat mungkin barang-barang djadi, bahan penolong jang tidak dapat diselesaikan di Indonesia dan kalau perlu baru bahan mentah.

(d) Organisasi Distribusi:

(I) perusahaan negara.

(II) koperasi.

2. Politik persediaan, perdagangan/penjaluran.

Pemerintah berkewadjiban mengatur adanja persediaan barang jang tjukup. Pemerintah perlu menguasai dalam arti menjelenggarakan stock sendiri dalam hal barang-barang vital dan tidak hanja mengatur atau mengawasi sadja. Pemerintah berkewadjiban menetapkan tempat persediaan barang jang tepat dan waktu jang sesuai dengan kebutuhan rakjat.

Djenis dan kwaliteit barang sesuai dengan keperluan dan daja beli rakjat.

Dalam tempo selambat-lambatnja 8 tahun sedapat mungkin tertjapai ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

a. Impor dilaksanakan oleh Perusahaan Negara.

b. Ekspor dilakukan oleh Perusahaan Negara.

c. Penjaluran barang-barang impor dan hasil industri/perkebunan/pertanian dalam negeri dilakukan oleh Perusahaan Negara dan Koperasi.

d. Pembelian barang ekspor dilakukan oleh badan-badan pusat pembelian jang merupakan usaha Perusahaan Negara dan Koperasi.

e. Pemerintah mengatur/mengawasi produksi barang ekspor.

f. Menghapuskan rantai-rantai penjaluran/perdagangan jang bukan Perusahaan Negara/Koperasi.

g. Perdagangan dan penjaluran hanja untuk warganegara Indonesia dan tertutup bagi perusahaan swasta asing.

Menambah 16 matjam barang kebutuhan rakjat jang vital dengan bensin dan bahan-bahan baku industri.

3. Lain-lain.

(a) Dalam masa peralihan, kepada swasta nasional dapat diberi kesempatan dalam lapangan impor dengan pengawasan Pemerintah jang tjermat.

Mengenai ekspor hendaknja berangsur-angsur dikuasai oleh negara.

(b) Untuk kelantjaran ekspor dan impor, perwakilan dagang diluar negeri perlu diintensipkan/disempurnakan. Untuk kelantjaran penjaluran barang-barang impor, alokasi-alokasi untuk daerah supaja dapat langsung dibongkar dipelabuhan-pelabuhan setempat atau jang terdekat.

(c) Dalam perusahaan-perusahaan negara perlu adanja Badan Pengawas.

(d) Pemerintah berkewadjiban menjelenggarakan pendidikan-pendidikan kader dalam bidang distribusi dan perdagangan.

(e) Mempergunakan modal dan tenaga ahli swasta, terutama swasta nasional untuk kepentingan perusahaan-perusahaan negara dan koperasi guna kelantjaran distribusi.

Perhubungan Darat (§ 509)

4. Baik dalam rehabilitasi, reklassifikasi maupun pembuatan, djalan-djalan baru, wadjib diperhatikan modernisasi dari alat-alat/perlengkapan Angkatan Perang, jang telah mulai menggunakan kendaraan-kendaraan jang beratnja lebih dari 10 ton. Klas djalan dan djembatan, teristimewa pembuatan jang baru, perlu disesuaikan.

Perhubungan Laut (§ 530)

5. Fungsi Perhubungan Laut:

(a) Mewudjudkan tjita-tjita persatuan rakjat di Tanah Air. Apabila kundjungan dari suku satu kesuku jang lain dapat dilaksanakan dengan lantjar, maka tertanamlah saling pengertian jang mendalam jang mentjiptakan rasa persaudaraan lebih erat.

(b) Perhubungan laut dapat dianggap sebagai djembatan-djembatan dari pulau kepulau jang tersebar diseluruh Nusantara dan dengan demikian merupakan simbol njata dari persatuan seluruh rakjat Nusantara.

(c) Mendjamin garis logistik jang sangat vital bagi negara kepulauan kita ini. Kevitalan perhubungan laut untuk logistik ini sangat tampak dengan djelas pada waktu pergolakan/pemberontakan, seluruh armada perang dan niaga dikerah-

kan untuk mendjamin lantjarnja logistik dan lantjarnja operasi militer.

6. Keamanan — Pelabuhan-pelabuhan dan Kapal-kapal:
   Faktor kesatu : Keamanan Navigasi harus terdjamin;
   Faktor kedua : Pelabuhan-pelabuhan dan alat-alat tjukup memenuhi sjarat-sjarat jang minimaal; dan
   Faktor ketiga : kapal-kapal tersedia setjukupnja tonnage untuk tugasnja.
7. Human Faktor — Management :
   Tetapi sekalipun dalam ajat 2 dipenuhi, fungsi perhubungan laut tidak akan berdjalan lantjar djika faktor-faktor personalia, sekali lagi faktor personalia, kurang memenuhi dalam tugasnja. Fungsi perhubungan laut dapat berdjalan, berdjalan baik dan berguna (effisien) djika tersedia terlebih dahulu keahlian personalia, sebagai faktor utama dalam pembangunan sewindu.

Perhubungan Udara (§ 532)

8. Dalam membangun lapangan terbang supaja diteliti pula faktor-faktor kemungkinan perpandjangan lapangan terbang itu dikemudian hari, agar dengan demikian terdjaminlah kemungkinan daja-guna jang selalu dapat disesuaikan dengan perkembangan dunia penerbangan.

Tourisme

9. Perlu diperhatikan mengenai pendidikan bagi guides tentang haluan politik dan dasar-dasar Negara, patriotisme, kepribadian nasional, kebudajaan dan adat-istiadat Indonesia.

V. BIDANG KEUANGAN DAN PEMBIAJAAN

1. Dalam mengusahakan sumber pembiajaan, pola Pembangunan Semesta supaja berhasil, hendaknja dipegang teguh prinsip Pengerahan Tenaga Rakjat, jaitu pengerahan „funds and forces" (kekuatan dan modal) dengan sembojan „Dari Rakjat untuk Rakjat" dengan djalan mendjamin hak-hak dan kebebasan demokratis bagi rakjat, mengikis habis birokrasi dan korupsi.

Prinsip ini hendaknja dilaksanakan setjara konsekwen dalam bentuk gotong-rojong dalam bidang kerdja pemerintah dan usaha-usaha rakjat.

2. Apabila terpaksa karena kurangnja pembiajaan devisen, dapat diusahakan bantuan luar negeri berupa pindjaman atau kredit dengan sjarat-sjarat jang sesuai dengan Amanat Pembangunan Presiden dan tidak melebihi 20% dari pada volume pembiajaan Pola Pembangunan Semesta, agar dana jang didapat dari luar negeri tidak melebihi tingkat perkembangan (rate of growth) dari pada produksi jang direntjanakan dan dengan sjarat-sjarat:
   a. tidak memberatkan beban rakjat,
   b. tidak mengalihkan/membelokkan politik bebas-aktif R.I.,
   c. tidak merugikan kepentingan nasional.
   d. tidak bertentangan dengan Manipol.
3. Pembangunan sandang-pangan dalam waktu jang pendek kearah selfsupporting perlu mendapat tempat jang kongkrit dalam Rentjana Pembangunan Semesta untuk mempersiapkan rakjat dalam menghadapi pembangunan disektor industri chususnja dan untuk melantjarkan pembangunan pada umumnja. Oleh karena itu maka potensi rakjat harus dihidupkan untuk mendjamin pelaksanaan Pembangunan Semesta Berentjana dengan hasil jang baik.
4. Rentjana Pembangunan Semesta 8 tahun hendaknja dibagi atas dua fase, ialah fase pembangunan sandang-pangan dan fase pembangunan industrialisasi. Fase Pembangunan sandang-pangan dapat diteruskan 3 tahun, sedang projek-projek industri jang sudah dimulai dapat diteruskan, disamping perundingan-perundingan luar negeri dan persiapan-persiapan industrialisasi dapat didjalankan.

2. *LAMPIRAN*

POLA PEMBANGUNAN NASIONAL SEMESTA BERENTJANA.

A. *TATA-PERENTJANAANNJA.*

Penjesalan masjarakat akan kelambatan djalannja pembangunan dihampir semua sektor, segera terdengar dipusat dan didaerah sesudah beberapa tahun pengakuan kemerdekaan Indonesia.

Perasaan tidak puas atas hasil jang ditjapai dan ketjemasan atas menurunnja keadaan politik dan ekonomi negara, menimbulkan rangkaian usaha-usaha Presiden Sukarno untuk mengatasinja, dan mulailah dilantjarkannja „*Konsepsi Presiden*", jang kemudian diikuti oleh „*Gagasan Demokrasi Terpimpin*" dengan pembentukan Kabinet Karya, Dewan Nasional (Denas) serta penjelenggaraan Musjawarah Nasional dan Musjawarah Nasional Pembangunan.

Dalam rangka pelaksanaan sistema **Demokrasi terpimpin** itu dibangunkanlah suatu *lembaga negara untuk perentjanaan*, jang disebut *Dewan Perantjang Nasional* (= Depernas) dengan Undang-undang No. 80/1958, jang sesudah Dekrit Presiden 5 Djuli 1959 disempurnakan dengan Penpres No. 4/1959.

Seperti ditegaskan pula dalam Amanat Presiden: 17 Agustus 1959, jang terkenal sebagai „**Manifesto Politik**", tugas Depernas adalah untuk merantjang „Pola pembangunan masjarakat adil dan makmur atau masjarakat SOSIALISME (à la) INDONESIA".

Tjara untuk mentjapai tudjuan tersebut ditegaskan sebagai berikut:

„Tudjuan harus ditjapai dengan Pembangunan *NASIONAL, SEMESTA* dan *BERENTJANA*, jang terdiri atas *TRI-POLA*", jaitu

NASIONAL : karena pola tersebut harus menggambarkan keinginan seluruh daerah dan seluruh lapisan dan golongan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Penebaran projek pembangunan mendjamin sifat nasional Indonesia, sehingga ekonomi tidak perlu dibentuk diatas tuntutan-tuntutan jang tak bermanfaat.

SEMESTA : karena pola tersebut harus meliputi seluruh lapangan hidup bangsa dan negara.

BERENTJANA : karena tidak mungkin tertjapai pelaksanaan masjarakat adil dan makmur sekaligus, akan tetapi dilaksanakan setapak demi setapak, tahap demi tahap, tingkat demi tingkat, daerah demi daerah, lapangan demi lapangan, dengan lain perkataan : tidak sekaligus, tetapi setjara berentjana, namun dengan tjepat dan deras sesuai dengan irama gelombang Revolusi Indonesia.

TRI-POLA : karena pola tersebut harus terdiri atas 3 pola, jaitu :

(1) pola projek,
(2) pola pendjelasan dan
(3) pola pembiajaan.

Dalam pekerdjaannja selama sebelas bulan jang lampau, Depernas selalu berpedoman pada beberapa *naskah nasional*, jang kita kenal bersama jaitu:

(1) Undang-undang Dasar 1945,
(2) Manifesto Politik: 17-8-1959,
(3) Amanat Pembangunan Presiden: 28-8-1959 (tertulis dan diutjapkan),
(4) Penegasan Amanat Pembangunan Presiden: 9-1-1960.

Dalam ke-empat naskah tersebut telah ditentukan, bahwa tudjuan seluruh pembangunan adalah untuk mewudjudkan Amanat Penderitaan Rakjat, jaitu: „mentjiptakan masjarakat Indonesia jang adil dan makmur menurut adjaran Pantjasila".

Kemudian telah ditentukan pula bahwa rantjangan pembangunan itu akan dinamai : *Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana*, jang mendjadi haluan pembangunan bagi negara sesuai dengan istilah dalam Konstitusi Proklamasi Pasal 3.

Achirnja telah ditentukan, bahwa rantjangan tersebut akan disahkan oleh **MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA** dan sesudah disahkan, maka *tidak ada satu instansi-pun jang boleh merubah naskah itu.*

B. *SOSIALISME INDONESIA.*

Tudjuan dari Pembangunan Nasional Semesta Berentjana adalah **SOSIALISME INDONESIA,** jaitu: tata-masjarakat adil-dan-makmur berdasarkan Pantjasila.

Sosialisme Indonesia bukanlah Sosialisme seperti diartikan oleh negara-negara Barat atau seperti diartikan oleh Negara-negara Sosialis asing, tetapi Sosialisme Indonesia berisi perpaduan jang laras dari unsur-unsur Sosialisme, jaitu: „K e a d i l a n s o s i a l dan K e s e d j a h t e r a a n", dan unsur-unsur Indonesia, seperti tergambar dalam azas: „G o t o n g - r o j o n g dan K e k e l u a r g a a n", jang merupakan tjiri-tjiri pokok dari Kepribadian Indonesia.

Dalam melaksanakan Keadilan Sosial dan Kesedjahteraan dengan berlandaskan Gotong-rojong dan Kekeluargaan, tudjuan jang dikedjar dan akan dilaksanakan adalah: K e s e d j a h t e r a a n b e r s a m a, dimana terdapat kemakmuran materiil dan spirituil dalam bentuk kekajaan umum bendaniah dan rochaniah jang melimpah-limpah serta pembagiannja jang rata dan merata sesuai dengan sifat perbedaan masing-masing warga dalam keluarga bangsa.

Sosialisme Indonesia mengedjar dalam bidang p o l i t i k untuk tertjapainja Negara Indonesia jang pandjang-luas kemashurannja dan tinggi — unggul martabat dan kewibawaannja, dimana rakjat dan tinggi — unggul martabat dan kewibawaannja, dimana rakjat dan pemerintahnja bersatu-padu dan seia-sekata mewudjudkan kesedjahteraan bersama.

Dalam bidang e k o n o m i, Sosialisme Indonesia mengedjar terwudjudnja suatu tata-perekonomian, jang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan kekeluargaan, dimana Pemerintah dan Rakjat atau Negara dan Swasta bekerdja bersama saling isi-mengisi untuk mendjalankan produksi dan distribusi guna mewudjudkan kekajaan umum jang berlimpah-limpah serta pembagiannja jang adil-merata.

Dengan berpedoman, bahwa kemakmuran masjarakatlah jang harus senantiasa diutamakan dan bukan kemakmuran orang-seseorang, dalam tata-perekonomian kekeluargaan Sosialisme Indonesia, *hak milik perseorangan tetap diakui*, tetapi ditundukkan kepada batas-batas jang ditentukan oleh fungsi sosialnja dalam usaha bersama dibawah pimpinan Pemerintah Nasional. Tata-perekonomian Sosialisme Indonesia berpedoman-dasar, bahwa tudjuan dari segala usaha dalam lapangan ekonomi dan keuangan adalah untuk mewudjudkan keadilan dan melenjapkan pendjadjahan dalam bentuk apapun, serta pemberantasan perbudakan jang memandang manusia hanja sebagai a l a t untuk kepentingan sendiri atau golongan sendiri.

Dalam bidang k e m a s j a r a k a t a n, Sosialisme Indonesia mengedjar tertjapainja suatu masjarakat jang aman-tentram dan sedjahtera, dimana para warganja dapat senantiasa bekerdja dengan aman dan atas dasar Kekeluargaan dan Gotong-rojong, dan terdjamin adanja tjukup makanan, pakaian dan perumahan, pemeliharaan kesehatan dan pendidikan serta djaminan hari tua bagi setiap warganja. Pula, masjarakat Sosialisme Indonesia harus dapat memberikan djaminan, bahwa setiap warganja dapat menikmati dan memperkembangkan kebudajaannja serta menjempurnakan hidup kerochaniannja, hingga sungguh-sungguh terlaksanalah kesedjahteraan lahir-bathin.

Sosialisme Indonesia sebagai rumusan dari Amanat Penderitaan Rakjat dimulai pembangunannja sedjak s a a t Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, jang merupakan sumber inspirasi dan hikmat-kebidjaksanaan dalam mendjalankan Revolusi Indonesia sebagai tjetusan dari Amanat Penderitaan Rakjat.

Adapun adjaran Sosialisme Indonesia itu dirumuskan dengan padat dan djelas dalam bentuk pokok-pokok pikiran dalam Buku

kesatu Djilid II bab 12 dari § 101 sampai dengan § 170 sebagai berikut:

POKOK-POKOK PIKIRAN MENGENAI SOSIALISME INDONESIA.

SISTIMATIK DAN INTI-TJIPTANJA:

(1) Bahan-bahan dalam keseluruhannja dibagi atas tiga bagian, jaitu:
   a. Pengertian dan Dasar Sosialisme Indonesia.
   b. Tudjuan Sosialisme Indonesia.
   c. Alat untuk mentjapai Sosialisme Indonesia.

(2) Inti-tjipta jang tersimpul dalam pokok-pokok pikiran tersebut adalah:
   a. MYTHOS — nja = Amanat Penderitaan Rakjat.
   b. LOGOS — nja = Pengertian-pengertian dan Sistimatik.
   c. ETHOS — nja = Keadilan, Kerakjatan dan Kesedjahteraan dalam Pantja-Sila.

(3) Pokok-pokok pikiran tersebut terdiri atas 70 paragrap, jang dirumuskan sebagai berikut:

A. PENGERTIAN DAN DASAR SOSIALISME INDONESIA.

Dasa-tjipta Sosialisme Indonesia.

Amanat Penderitaan Rakjat dasar Sosialisme Indonesia.

B. T U D J U A N SOSIALISME INDONESIA.

Nikmat, tudjuan dan tjiri-tjiri Sosialisme Indonesia.

Unsur-unsur pokok Sosialisme Indonesia.

Sendi-pokok Sosialisme Indonesia.

Azas-azas Gotong-rojong dan Kekeluargaan dalam Sosialisme Indonesia.

Proklamasi Kemerdekaan dan Sosialisme Indonesia.

C. ALAT UNTUK MENTJAPAI SOSIALISME INDONESIA.

Usaha pembangunan dan modalnja.
Tugas Dewan Perantjang Nasional.
Rantjangan Pola Nasional.
Aturan pelaksana.

RUMUSAN

SOSIALISME INDONESIA

A. *PENGERTIAN DAN DASAR SOSIALISME INDONESIA.*

RASA-TJIPTA SOSIALISME INDONESIA.

1. Sosialisme Indonesia adalah suatu adjaran dan gerakan tentang tata-masjarakat-adil-dan-makmur berdasarkan Pantja-Sila.
2. Tata-masjarakat-adil-dan-makmur berdasarkan Pantja-Sila adalah tuntutan Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia.
3. Masjarakat-adil-dan-makmur berdasarkan Pantja-Sila sebagai perwudjudan Sosialisme Indonesia bersendi pokok pada Keadilan, Kerakjatan dan Kesedjahteraan.
4. Unsur-unsur Keadilan, Kerakjatan dan Kesedjahteraan terkandung dalam azas-azas Kekeluargaan dan Gotong-rojong, jang merupakan tjiri-tjiri pokok dari Kepribadian Indonesia seperti dirumuskan dalam adjaran Pantja-Sila.
5. Niat dan tekad rakjat Indonesia untuk melaksanakan Amanat Penderitaan Rakjat dinjalakan pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, jang mengobarkan Revolusi Indonesia.
6. Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia adalah djiwa dan daja-penggerak Revolusi Indonesia, oleh sebab itu sifat dan hakekat Revolusi Indonesia tidak lepas daripada Kepribadian Indonesia sendiri.
7. Dasar dan tudjuan Revolusi Indonesia untuk mewudjudkan Sosialisme Indonesia adalah Keadilan Sosial, Kemerdekaan Individu, Kemerdekaan Bangsa dan lain-lain perwudjudan dari

Budi dan Hati-Nurani, jang menundjukkan deradjat dan mutu Kemanusiaan.

8. Jakin akan kebenaran, bahwa Keadilan Sosial dan Kemerdekaan adalah tuntutan budi-murni jang universil, maka s e l u r u h rakjat Indonesia tanpa perketjualian bergerak melaksanakan revolusi Indonesia dengan berlandaskan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

9. Atas landasan U.U.D.-1945 jang berisikan unsur idiil, jaitu: Pantja-Sila, dan unsur strukturil jaitu: Pemerintahan jang stabil, Revolusi Indonesia berkewadjiban membebaskan Indonesia dari semua imperialisme dan menegakkan wudjud tritunggal daripada tjita-tjita dan usaha Bangsa Indonesia, jaitu:

   Kesatu : Pembentukan satu Negara Republik Indonesia jang berbentuk Negara-Kesatuan dan Negara-Kebangsaan jang demokratis, dengan wilajah kekuasaan dari Sabang sampai Merauke.

   Kedua : Pembentukan satu masjarakat jang adil dan makmur materiil dan spirituil dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

   Ketiga : Pembentukan satu persahabatan jang baik antara Republik Indonesia dan semua negara didunia, terutama sekali dengan negara-negara Asia-Afrika atas dasar hormat-menghormati satu sama lain, dan atas dasar bekerdja-sama membentuk satu Dunia Baru jang bersih dari imperialisme dan kolonialisme, menudju kepada Perdamaian-Dunia jang sempurna.

10. Tjita-tjita dan usaha Bangsa Indonesia untuk „membentuk satu Republik Kesatuan jang demokratis, dimana Kedaulatan ada ditangan Rakjat dan dilakukan sepenuhnja oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat, dan dimana hak-hak azasi dan hak-hak warganegara didjundjung tinggi, serta membentuk masjarakat adil dan makmur, tjinta damai dan bersahabat dengan semua negara didunia guna membentuk satu Dunia Baru",

adalah isi-murni dan inti-sari dari Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia.

AMANAT PENDERITAAN RAKJAT ADALAH DASAR SOSIALISME INDONESIA.

11. Amanat penderitaan rakjat Indonesia adalah suatu Amanat tentang penderitaan dari s e g e n a p Rakjat Indonesia seperti diakibatkan oleh keganasan dan kezaliman imperialisme, kolonialisme dan feodalisme beratus-ratus tahun lamanja dalam bentuk penghisapan, pendjadjahan, perbudakan, penindasan dan pengekangan, jang menimbulkan kebodohan dan ketjurangan, kemiskinan dan kenistaan, kelaparan dan kesengsaraan serta aneka duka dan derita lahir-bathin lainnja, jang hampir-hampir melenjapkan Kepribadian Indonesia.

12. Dengan menghadapkan hati dan djiwanja kepada Tuhan-Jang-Maha-Kuasa untuk memohon kedjernihan tjipta serta kekuatan lahir-bathin, Rakjat Indonesia berusaha untuk membebaskan dirinja dari penderitaan itu.

13. Hikmah Tuhan memberikan djalan-terang kearah gambaran suatu tata-keadilan dan kesedjahteraan jang meliputi seluruh Hidup dan Hati-Nurani Kemanusiaan, hingga akan tertjapailah kepribadian bangsa-bangsa dalam keselarasan tata-pergaulan umat-manusia.

4. Hati-Nurani Rakjat Indonesia tergerak untuk memohon, mengharap dan menanti-nantikan tertjiptanja tata-kehidupan dan penghidupan jang diliputi oleh Keadilan dan Kesedjahteraan.

Amanat untuk mentjiptakan dan mewudjudkan tata-kehidupan dan penghidupan jang diliputi oleh Keadilan dan Kesedjahteraan atau „Masjarakat-adil-dan-makmur lahir-bathin, jang berdasarkan sifat-sifat Kepribadian Indonesia sendiri seperti terlukis dalam rumusan Pantja-Sila" itulah jang disebut Amanat Penderitaan Rakjat Indonesia, jang dikorbani sedjak beratus-ratus tahun lamanja!

16. Tjipta, rasa, karsa dan usaha Bangsa Indonesia untuk mewudjudkan suatu tata-masjarakat-Indonesia jang adil dan makmur berdasarkan Pantja-Sila seperti diamanatkan oleh Penderitaan rakjat Indonesia, atau „Tjita-tjita Sosialisme Indonesia" itu sudah terkandung dalam hati-djiwa Rakjat Indonesia sendiri sedjak dahulu-kala seperti ternjata dari berbagai uraian dan utjapan, jang bertaburan memenuhi bahasa, adat-istiadat dan kepustakaan Indonesia sepandjang masa.

B. *TUDJUAN SOSIALISME INDONESIA.*

NIKMAT, TUDJUAN DAN TJIRI POKOK SOSIALISME INDONESIA.

17. Sosialisme Indonesia bertudjuan untuk mengachiri dan melenjapkan segala penderitaan rakjat lahir-bathin, dan memberikan nikmat rochaniah dan badaniah kepadanja dengan mentjiptakan tata-masjarakat Indonesia dalam wadah Negara Indonesia, jang bertjiri delapan:

a. jang merdeka, bersatu dan berdaulat;

b. jang adil dan makmur;

c. jang rakjatnja berkehidupan kebangsaan jang bebas;

d. jang membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia jang meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia;

e. jang memadjukan kesedjahteraan umum dan mentjerdaskan kehidupan bangsa;

f. jang ikut melaksanakan ketertiban dunia jang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;

g. jang kemerdekaan Kebangsaannja disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia;

h. jang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia jang berkedaulatan rakjat dengan berdasar: Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan jang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/

perwakilan, serta dengan mewudjudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakjat Indonesia.

18. Tjiri pokok Sosialisme Indonesia adalah p e r p a d u a n antara unsur Sosialisme, jaitu: Keadilan Sosial dan Kesedjahteraan, dan unsur Kepribadian Indonesia, jaitu: Kekeluargaan dan Gotong-rojong.

UNSUR-UNSUR POKOK SOSIALISME INDONESIA.

19. Unsur-unsur Pokok Sosialisme Indonesia meliputi tjita-tjita tentang kemanusiaan, politik, perekonomian dan kemasjarakatan Indonesia.

20. Gambaran Manusia-Sosialis-Indonesia:

Tjita-tjita tentang Manusia-Sosialis-Indonesia berisi gambaran tentang seorang manusia, jang mendasarkan tjipta, rasa, karsa dan karya-nja atas landasan-landasan sebagai berikut:

a. Kepribadian dan Kebudajaan Indonesia;
b. Semangat patriot komplit;
c. Azas Pantja-Sila;
d. Semangat Gotong-rojong;
e. Djiwa pelopor (swadaja dan daja-tjipta);
f. Susila dan budi-luhur;
g. Kesadaran bersahadja dan mengutamakan kedjudjuran;
h. Kesadaran mendahulukan kewadjiban daripada hak;
i. Kesadaran mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;
j. Kerelaan berkorban dan hidup Hemat;
k. Azas Demokrasi Terpimpin;
l. Azas Ekonomi Terpimpin:
m. D i s i p l i n;
n. Kepandaian untuk menghargai waktu;
o. Tjara berpikir rasionil dan ekonomis:
p. Kesadaran bekerdja untuk membangun dengan kerdja keras.

21. Gambaran Politik-Sosialis-Indonesia:

Tjita-tjita tentang Politik-Sosialis-Indonesia berisi gambaran tentang Negara jang bersatu-padu dan seia-sekata Rakjat dan Pemerintahnja, karena Pemerintahnja adalah Pemerintah Nasional, dan jang pandjang-luas kemashurannja dan tinggi-unggul martabat-serta kewibawaannja.

22. Tjita-tjita tentang Pemerintah nasional sebagai alat-pelaksanaan Politik-Sosialis-Indonesia menggambarkan suatu Pemerintah, jang stabil, kuat dan berwibawa sebagai pemimpin segala karya dan daja-tjipta seluruh rakjat Indonesia, dan jang mendjalankan kebidjaksanaan politik dengan berpokok pada pikiran-pikiran sebagai berikut:

a. Berpedoman pada pengabdian kepada kepentingan rakjat banjak.

b. Mengandjurkan dan memberi tempat jang luas pada inisiatip rakjat jang sanggup dan mau menjumbang pada perbaikan masjarakat dan negara.

c. Bertindak tjepat, karena insjaf akan ketinggalan zaman jang harus dikedjar.

d. Menanam sebanjak mungkin uang dalam kegiatan-kegiatan pembangunan dan tidak dalam administrasi.

e. Berani bertindak terhadap kekuasaan imperialisme dan feodalisme.

f. Berdjalan djudjur dan hemat, karena didorong oleh perasaan tanggung-djawab guna dapat segera memperbaiki tingkatan hidup rakjat banjak.

g Memelihara hubungan baik dengan semua bangsa didunia ini.

h. Ikut berusaha setjara positip mengachiri penindasan dan penghisapan diseluruh dunia.

i. Ikut menjumbang kearah kebahagiaan seluruh manusia.

23. Gambaran Ekonomi-Sosialis-Indonesia:

Tjita-tjita tentang Ekonomi-Sosialis-Indonesia menggambarkan suatu tata-perekonomian, jang disusun sebagai usaha bersama berdasar azas kekeluargaan, dimana tjabang-tjabang produksi jang penting bagi negara dan jang menguasai hadjat hidup orang banjak dikuasai oleh negara, serta bumi dan air dan kekajaan alam jang terkandung didalamnja dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakjat.

24. Ekonomi-Sosialis-Indonesia berpedoman pada pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

a. Segala kegiatan produksi baik jang diusahakan oleh Negara maupun Swasta, harus ditudjukan pada pengabdian pada kepentingan rakjat, terutama pada kebutuhan hidup pokok, agar setiap warga negara dapat hidup lajak sebagai manusia jang merdeka. Usaha untuk memenuhi keperluan sendiri dilapangan bahan-bahan penting untuk hidup sehari-hari, harus mendjadi tudjuan dari kebidjaksanaan dan seluruh kegiatan produksi.

b. Seluruh kegiatan distribusi diatur sedemikian rupa, sehingga barang-barang keperluan hidup sehari-hari dapat sampai dengan tjepat, merata dan murah ditangan rakjat. Hal ini dapat ditjapai dengan tjampur tangan Pemerintah dan usaha Kooperasi rakjat.

c. Segala kegiatan pertanian dan perindustrian dibawa pada tingkatan, dimana ekspor Indonesia meningkat mendjadi ekspor barang-barang djadi, jang berarti menambah kesempatan bekerdja bagi rakjat Indonesia dan menambah keuntungan bagi negara.

d. Segala kegiatan impor ditudjukan pada barang-barang jang dapat menambah produksi dalam negeri, sehingga kesempatan kerdja dapat bertambah dan impor mendjadi berkurang serta tertjapai penghematan alat-alat pembajaran-luar-negeri (devisen).

e. Kegiatan-kegiatan ekonomi seperti tersebut pada (c) dan (d), djika dipersatukan dan diselaraskan (sinchronisasi) dengan baik dan bidjaksana, akan pasti mempersingkat waktu jang diperlukan untuk menaikkan tingkatan hidup rakjat.

f. Negara harus segera memulai dengan pembangunan industri chusus industri dasar, karena dengan tidak adanja industri dasar, sembojan untuk mentjukupi keperluan sendiri merupakan sembojan jang tidak mungkin dilaksanakan, karena achirnja persoalan pokok mengenai produksi dan pengangkutan akan tergantung pada sumber-sumber diluar negeri.

g. Dengan tata-produksi seperti terurai diatas akan terdapat kekajaan umum jang melimpah-limpah, dan dengan tata-distribusi seperti tergambar diatas akan terdapat pembagian jang merata dan adil, hingga tertjapailah tjita-tjita tata-masjarakat sama-rasa sama-rata.

25. Tempat usaha Negara dan Swasta :

Dalam tata-perekonomian-Sosialis-Indonesia diakui, bahwa seluruh usaha dan karya ekonomi tidak mungkin dipikul dan dilaksanakan oleh Negara sendiri, oleh sebab itu kepada Swasta diberikan kedudukan jang lajak sesuai dengan undang-undang jang bersangkutan.

Dalam pelaksanaannja, berlaku pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

a. Negara menguasai lapangan-lapangan perekonomian jang menguasai hidup rakjat banjak.

b. Produksi, pengangkutan dan distribusi bahan penting diselenggarakan oleh Negara, atau sekurang-kurangnja dikuasai oleh Negara.

c. Pemerintah Daerah diandjurkan bergerak dalam ketiga lapangan produksi, pengangkutan dan distribusi.

d. Kooperasi diandjurkan bergerak disegala lapangan, terutama disektor distribusi.

e. Pihak Swasta diberi tempat jang lajak dalam sektor produksi dan pengangkutan.

26. Gambaran Masjarakat-Sosialis-Indonesia:

Tjita-tjita tentang Masjarakat-Sosialis-Indonesia menggambarkan suatu masjarakat, jang tertib, aman-tenteram dan sedjahtera, dimana orang-orangnja ramah-tamah, berdjiwa Kekeluargaan dan bersemangat Gotong-rojong serta berkesadaran bekerdja.

27. Tata-Masjarakat-Sosialis-Indonesia mengandung unsur-unsur pokok sebagai berikut:

a. Mendjamin tjukup makanan, pakaian dan perumahan jang lajak bagi warga-negaranja, sehingga tidak senantiasa hidup dalam ketjemasan menghadapi hari besok.

b. Mendjamin pemeliharaan kesehatan dan pendidikan setiap warga-negaranja, supaja tidak perlu menderita; dan dapat mendjadi warga jang tjerdas untuk dapat menunaikan tugas dan haknja terhadap negara dengan sebaik-baiknja.

c. Mendjamin hari tua setiap warganja, sehingga tidak hidup dalam ketakutan dan kemelaratan, djika tidak berdaja lagi untuk mentjari nafkahnja.

d. Mendjamin agar setiap warga-negaranja dapat menikmati dan memperkembangkan kebudajaan dan menjempurnakan hidup kerochaniannja, sehingga tidak sadja kehidupan lahir terpelihara, tetapi djuga kehidupan bathinnja.

SENDI POKOK SOSIALISME INDONESIA.

28. Pengertian tentang keadilan :

Jang dimaksud dengan Keadilan ialah : Kebadjikan, jang menggerakkan dan meringankan tjita, rasa, karsa dan karya manusia untuk senantiasa memberikan kepada fihak lain segala sesuatu jang mendjadi hak pihak lain, atau jang semestinja harus diterima oleh pihak lain itu, hingga masing-masing pihak mendapat kesempatan untuk melaksanakan hak dan kewadjibannja tanpa rintangan.

29. Didalam kenjataan tata-kehidupan dan penghidupan manusia, keadilan itu menampakkan diri sekurang-kurangnja dalam tiga matjam perwudjudan, jaitu :

a. Didalam hubungan antar-manusia sebagai orang-seseorang terhadap sesamanja, dimana Keadilan menampakkan diri sebagai tjipta, rasa, karsa dan karya manusia untuk senantiasa memberikan kepada sesamanja segala sesuatu jang mendjadi hak pihak lain atau jang semestinja harus diterima oleh pihak lain itu, hingga lahirlah karya saling-memberi dan saling-menerima, jang disebut : **Keadilan tukar-menukar.**

b. Didalam hubungan antara manusia dengan masjarakatnja, dimana Keadilan menampakkan diri sebagai tjipta, rasa, karsa dan karya manusia untuk senantiasa memberikan dan melaksanakan segala sesuatu, jang memadjukan kemakmuran serta kesedjahteraan bersama sebagai tudjuan-mutlak dari masjarakat, hingga lahirlah keadilan jang disebut : **Keadilan Sosial.**

c. Didalam hubungan antara masjarakat dengan para warganja, dimana Keadilan menampakkan diri sebagai tjipta, rasa, karsa dan karya masjarakat serta alat-penguasaannja untuk membagikan segala kenikmatan dan beban-bersama dengan setjara rata dan merata, menurut keselarasan sifat dan tingkat perbedaan rochaniah serta badaniah para warganja, baik sebagai perseorangan maupun golongan, hingga terlaksanalah azas sama-rasa sama-rata, dimana keadilan disebut: **Keadilan dalam membagi.**

30. Didalam melaksanakan Keadilan dalam membagi, tidak djarang Keadilan menghendaki diadakannja tindakan-tindakan chusus untuk menguntungkan pihak jang lemah, karena Keadilan menghendaki dibantu- dan dilindunginja pihak jang lemah itu, mengingat adanja perbedaan sifat dan tingkat rochaniah serta badaniah pada kodrati manusia, sekalipun hakekatnja adalah sama.

(djuliaan)

31. Keadilan dengan ketiga bentuk perwudjudannja itu dapat dilaksanakan baik dengan daja-usaha dari luar manusia sendiri dalam bentuk peraturan-peraturan masjarakat dan undang-undang Negara berikut paksaannja, maupun atas daja-karya Budi dan Hati-Nurani manusia sendiri dalam wudjud keinsjafan dan kesadaran akan keadilan.

32. Tjatur-upaya :

Karena keinsjafan dan kesadaran akan keadilan jang mengisi dan memenuhi tjipta, rasa dan karsa manusia terhadap sesama atau pihak lain, lahirlah daja serta karya Budi dan Hati-Nurani manusia, jang disebut : **Tjinta kasih**, jang menurut hakekat serta sifat-kodratnja sudah dengan sendirinja senantiasa melaksanakan keadilan, bahkan Tjinta-kasih senantiasa menggerakkan dan meringankan kehendak manusia untuk memadjukan kesedjahteraan pihak lain.

33. Keadilan dan Tjinta-kasih merupakan suatu dwi-tunggal jang saling isi-mengisi, karena tanpa Tjinta-kasih, pelaksanaan Keadilan melulu atas dasar hak dan hukum sahadja, mendjadi keras dan kedjam !

34. Diantara Keadilan dan Tjinta-kasih terdapat sendi-pokok kelakuan manusia, jang didalam perwudjudannja menampakkan diri sebagai daja serta karya Budi dan Hati-Nurani manusia untuk mempertimbangkan, dan dimana perlu memberanikan diri guna mengurangi hak-haknja sendiri, untuk melaksanakan Keadilan dan Tjinta-kasih, jaitu jang disebut sendi : **Kepantasan.**

35. Sebagai kelengkapan dari sendi Kepantasan nampak daja serta karya Budi dan Hati-Nurani manusia untuk mengurangi dan mengorbankan hak-haknja sendiri demi kepentingan umum, dan sendi-pokok ini dinamakan : **Keberanian berkorban.**

36. Keadilan, Tjinta-kasih, Kepantasan dan Keberanian-berkorban itu merupakan **Tjatur-upaya** (empat laku) Manusia-Sosialis Indonesia, jang mendjadi wudjud dari Empat-sifat sendi-pokok Keadilan dalam Pantja-Sila.

37. **Kerakjatan :**

Jang dimaksud dengan sendi-pokok **Kerakjatan** ialah :

a. daja serta karya Budi dan Hati-Nurani Manusia untuk saling menerima dan saling menghormati sesamanja sebagai Pribadi atau Kepribadian dengan-dan-dalam-masjarakat;

b. m a s j a r a k a t atau „persatuan manusia dibawah sesuatu pimpinan untuk mengedjar suatu tudjuan tertentu" dianggap dan diterima djuga sebagai k e p r i b a d i a n.

38. **Tata-kerakjatan** dalam Sosialisme Indonesia adalah : Kerakjatan jang dipimpin oleh hikmat kebidjaksanaan dalam permusjawaratan/perwakilan, seperti jang hidup subur dalam tata-kehidupan bangsa Indonesia sedjak dahulu kala, dan jang kini dinamakan : **Demokrasi Terpimpin.**

39. Demokrasi Terpimpin meliputi seluruh lapangan hidup manusia dalam bidang kenegaraan, kemasjarakatan dan kerochanian, baik jang meliputi bidang-bidang politik, ekonomi, sosial maupun bidang hukum serta kebudajaan. Dalam pelaksanaannja, Demokrasi Terpimpin bersandar pada pengakuan akan kepribadian manusia sebagai perwudjudan akan persamaan antara semua manusia menurut hakekatnja.

40. Dalam sendi persamaan antara semua manusia menurut hakekatnja, tersimpul sendi kemerdekaan, jang dimiliki baik oleh orang-seseorang maupun oleh golongan-golongan. Namun demikian, kemerdekaan tersebut senantiasa harus diselaraskan dengan tata-kehidupan bersama, baik didalam lingkungan keluarga bangsa maupun dalam lingkungan tata-kehidupan umat manusia seperti diadjarkan oleh Pantja-Sila.

41. **Kesedjahteraan :**

Jang dimaksud dengan sendi-pokok **Kesedjahteraan** adalah : Keselamatan, ketenteraman dan kemakmuran lahir dan bathin dalam tata-kehidupan dan penghidupan manusia, baik dalam kehidupan orang-seseorang maupun dalam kehidupan bersama.

42. Didalam mengusahakan Kesedjahteraan, Sosialisme Indonesia mengedjar tertjapainja kesedjahteraan umum maupun kese-

djahteraan individu dalam keselarasan tata-kehidupan manusia berdasarkan Pantja-Sila.

43. **Kebangsaan :**

Apabila persatuan manusia didalam hidup-bersamanja itu membangun dan membentuk suatu kesatuan tertentu dengan kesadaran, pandangan, tata-tjara hidup dan kebudajaan jang dimiliki bersama, hingga dalam kesatuan itu persatuan manusia tersebut merasa dalam satu rumah sebagai tempat-tinggalnja, maka lahirlah unsur **Kebangsaan** dalam daja serta karya Budi dan Hati-Nurani manusia.

44. Daja serta karya Budi dan Hati-Nurani manusia untuk membangun dan membentuk kesatuan diantara manusia sesamanja itu tidak terbatas pada manusia-sesamanja jang terdekat sadja, melainkan meliputi djuga seluruh-umat-manusia, dan disinilah nampak unsur **Kemanusiaan** dalam daja serta karya Budi dan Hati-Nurani manusia.

45. **Ketuhanan :**

Didalam tjahaja Kerakjatan, Kebangsaan dan Kemanusiaan serta Keadilan untuk mewudjudkan Kesedjahteraan, manusia mengamat-amati dirinja sendiri dan mengalami dirinja sendiri dalam keadaan jang serba terbatas dan terus-menerus mendjadi. Dengan sinar dan karena adjaran wahju, manusia mengetahui dan mengerti tentang *Ada jang mutlak*, jang disebut Tuhan, dan demikianlah lahir unsur **Ketuhanan** dalam daja serta karya Budi dan Hati-Nurani manusia.

46. **Pantja-Sila :**

Keadilan, Kerakjatan, Kebangsaan, Kemanusiaan dan Ketuhanan adalah lima dasar tata-hidup dan penghidupan Bangsa Indonesia sepandjang masa, jang setelah digali kembali sedalam-dalamnja dari djiwa dan kehidupan Bangsa Indonesia dan dirumuskan sebagai suatu kesatuan jang bulat, jang disebut **Pantja-Sila**, terdiri atas Ketuhanan Jang Maha Esa, Kemanusiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan Sosial.

47. Atas dasar Pantja-Sila dilaksanakan persatuan bangsa Indonesia dan didirikan Negara Republik Indonesia, seperti diamanatkan oleh Penderitaan Rakjat Indonesia. Pantja-Sila bukanlah suatu agama, tetapi adalah *kepertjajaan* Rakjat Indonesia didalam perdjuangan dan usaha bersama sebagai bangsa.

AZAS-AZAS GOTONG-ROJONG DAN KEKELUARGAAN DALAM SOSIALISME INDONESIA.

48. Jang dimaksud dengan azas **Gotong-rojong** adalah : Keinsjafan, kesadaran dan semangat untuk mengerdjakan serta menanggung akibat dari sesuatu karya, terutama jang besar-besar, setjara bersama-sama, serentak dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan bagi dirinja sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama, seperti terkandung dalam istilah : **Gotong.**

Didalam membagi hasil karyanja, masing-masing anggota mendapat dan menerima bahagian-bahagiannja sendiri-sendiri sesuai dengan tempat dan sifat sumbangan karyanja masing-masing, seperti tersimpul dalam istilah : **Rojong.**

Dengan Gotong-rojong dilaksanakan azas **sama-rasa sama-rata.**

49. Gotong-rojong adalah suatu faham jang dinamis, jang menggambarkan suatu usaha, suatu amal, suatu pekerdjaan atau suatu karya bersama, suatu perdjuangan bantu-membantu. Gotong-rojong adalah amal dari semua untuk kepentingan semua atau djerih-pajah dari semua untuk kebahagiaan bersama !

50. Dalam azas Gotong-rojong sudah tersimpul kesedaran bekerdja rochaniah maupun kerdja djasmaniah dalam usaha atau karya bersama, jang mengandung didalamnja keinsjafan, kesedaran dan sikap-djiwa untuk menempatkan serta menghormati kerdja sebagai kelengkapan dan perhiasan kehidupan manusia.

51. Dengan berkembangnja tata-kehidupan dan penghidupan Indonesia menurut zaman, Gotong-rojong jang pada dasarnja adalah suatu azas dari tata-kehidupan dan penghidupan Indonesia asli

didalam lingkungan masjarakat jang serba sederhana, mekar mendjadi Pantja-Sila.

52. Kekeluargaan :
Jang dimaksud dengan azas **Kekeluargaan** ialah : keinsjafan serta kesedaran Budi dan Hati-Nurani manusia untuk mengerdjakan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua, dibawah pimpinan seorang ketua atau *sesepuh* dan dibawah penilikan para anggota dari masjarakat atas dasar Pantja-Sila dan Tjatur-upaja Sosialisme Indonesia,

53. Azas kekeluargaan mengadjarkan bahwa :
a. Kepentingan dan kesedjahteraan bersamalah jang harus diutamakan, dan bukan kepentingan atau kesedjahteraan orang-seorang.
b. Antara Ketua atau sesepuh sebagai pemimpinnja dan para anggota masjarakat sebagai jang dipimpin, tetapi djuga jang menilik, ada persatuan dan kesatuan didalam tjipta, rasa, karsa dan karya untuk melakukan segala sesuatu oleh semua dan untuk semua.
c. Didalam segala usaha dan karya, Tjinta-kasih dan kewadjibanlah jang mendjadi pendorong dan penggeraknja, dan bukan hak serta nafsu tuntutan jang berkuasa.

54. Hak-Milik Perseorangan :
Dalam tata-masjarakat dan perekonomian jang berazaskan Kekeluargaan, hak-milik perseorangan tetap diakui, namun dalam penggunaannja dibatasi oleh kepentingan bersama. Demikianlah dinjatakan, bahwa *Hak-milik perseorangan berfungsi sosial.*

PROKLAMASI KEMERDEKAAN DAN SOSIALISME INDONESIA.

55. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, adalah saat permulaan pembangunan Sosialisme Indonesia dan merupakan tjetusan berkobarnja Revolusi Indonesia sebagai perwudjudan dari niat dan tekad Rakjat Indonesia untuk mengachiri penderitaannja.

56. Sifat Revolusi Indonesia adalah „multi-kompleks" atau Pantja-Muka, jaitu suatu revolusi politik, ekonomi, sosial, kebudajaan, bahkan djuga revolusi mengenai tjipta dan tjipta-tjipta manusia. Revolusi Indonesia adalah Revolusi Nasional menentang imperialisme-kolonialisme, oleh sebab itu walaupun bersifat multi-kompleks, tetapi sifat nasionalnja adalah sangat menondjol. Revolusi Indonesia adalah Revolusi Demokratis, seperti dinjatakan oleh tugasnja untuk menentang keterbelakangan feodal dan menentang otokrasi atau kediktatoran, baik militer maupun perseorangan.

Djadi djelaslah, bahwa Revolusi Indonesia bukanlah Revolusi bordjuis model tahun 1789 di Perantjis, dan bukan pula Revolusi proletar model tahun 1917 di Rusia. Kewadjiban Revolusi Indonesia bukan mendirikan kekuasaan kaum kapitalis untuk menindas Rakjat pekerdja, dan bukan pula mendirikan kediktatoran kaum proletar.

57. Untuk memenangkan Revolusi Indonesia, harus dapat dibangkitkan kekuatan-kekuatan revolusioner dalam masjarakat Indonesia, karena modal pokok tiap-tiap revolusi nasional untuk menentang imperialisme-kolonialisme ialah : Konsentrasi kekuatan nasional.

Bahwasanja Revolusi Indonesia adalah suatu Revolusi nasional, maka djelaslah bahwa kekuatan sosial jang mendukung Revolusi adalah kekuatan seluruh Rakjat Indonesia.

58. **Undang-Undang Dasar 1945:**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terkandung :

a. *Sosialisme Indonesia,* jang hendak kita tjiptakan sebagai isi-murni dari Amanat penderitaan rakjat Indonesia.
b. *Demokrasi-Terpimpin,* jaitu suatu tata-kerakjatan jang sesuai dengan Keperibadian Indonesia seperti terlukis dalam seluruh U.U.D.-1945.
c. *Ekonomi-Terpimpin,* jaitu tata-perekonomian jang azas-azasnja terletak dalam Pasal 33 — U.U.D. — 1945.
d. *Keperibadian-Indonesia,* jang harus selalu mendjadi ukuran dalam segala tindakan dan karya kita.

59. **Keperibadian Indonesia :**

Jang dimaksud dengan Keperibadian Indonesia ialah: keseluruhan tjiri-tjiri chas bangsa Indonesia, jang membedakan bangsa Indonesia dengan lain-lain bangsa.

Keseluruhan tjiri chas bangsa Indonesia, jang membedakan bangsa Indonesia dengan lain-lain bangsa itu adalah pentjerminan daripada garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepandjang masa.

Garis pertumbuhan dan perkembangan bangsa Indonesia sepandjang masa itu ditentukan oleh kehidupan-budi bangsa Indonesia dan dipengaruhi oleh keadaan tempat-lingkungan Indonesia serta suasana-waktu sepandjang perdjalanan masa.

Tjiri-tjiri chas budi dan kehidupan Indonesia adalah antara lain semangat Gotong-rojong, Kekeluargaan, Ke-Tuhanan, Kerakjatan, Kemanusiaan, Keadilan, Ramah-tamah dan sifat Bhinneka Tunggal Ika.

60. Tudjuan dan kewadjiban Revolusi Indonesia:

Tudjuan dan kewadjiban Revolusi Indonesia adalah melaksanakan Amanat penderitaan rakjat Indonesia, oleh sebab itu maka tudjuan dan kewadjiban Revolusi Indonesia bukanlah untuk mendirikan Negara-Federal, kekuasaan diktator atau Republik Kapitalis, melainkan mewudjudkan tjita-tjita bangsa Indonesia seperti termuat dalam inti-sari dari Amanat penderitaan rakjat Indonesia.

C. *ALAT UNTUK MENTJAPAI SOSIALISME INDONESIA.*

USAHA PEMBANGUNAN DAN MODALNJA.

61. Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana:

Alat untuk mentjapai Sosialisme Indonesia adalah Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana, jaitu suatu pembangunan :

a. jang *Nasional*, jaitu : diseluruh tanah-air Indonesia untuk mengembangkan bangsa Indonesia;
b. jang *Semesta*, jaitu: disegala lapangan kehidupan dan penghidupan masjarakat Indonesia;
c. jang *Berentjana*, jaitu: menurut suatu rentjana tertentu.

62. Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana tidak mungkin dikerdjakan dalam waktu singkat karena terbentur pada soal kekurangan tenaga dan modal, serta kekurangan pengalaman dan latihan; oleh sebab itu harus dikerdjakan berangsur-angsur setahap-demi-setahap, tetapi dengan tjepat dan menurut rentjana-rentjana tertentu, jang disebut suatu RANTJANGAN POLA (Blueprint) untuk waktu jang lamanja lebih dari dua tahun dan meliputi seluruh bidang dan lapangan kehidupan dan penghidupan.

Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana adalah Pembangunan revolusioner, karena mewudjudkan perobahan-perobahan tjepat dalam masjarakat menudju masjarakat adil dan makmur berdasarkan Pantja-Sila dengan melalui tingkat-tingkat kemadjuan dengan tjepat dan tegas.

63. Modal Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana:

Sebagai modal untuk melantjarkan Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana itu ditundjukkan beberapa sumber, jaitu:

a. Undang-undang Dasar 1945 dan djiwa Revolusi;
b. Kepertjajaan, kemampuan, keuletan bangsa Indonesia;
c. Tenaga kader baru;
d. Angkatan Perang;
e. Perusahaan-perusahaan nasional, jaitu negara, daerah dan swasta;
f. Kekajaan alam.

64. Modal jang terbesar didalam setiap pembangunan ialah tenaga dan pikiran manusia dan bangsa Indonesia didalam djaman pertjobaan jang seberat-beratnja telah membuktikan kesanggupannja mengatasi segala kesulitan, sehingga tjukup besar kepertjajaan kita bahwa bangsa Indonesia akan sanggup menghadapi persoalan Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana, terlebih-lebih karena Indonesia memiliki faktor-faktor alam jang sangat menguntungkan.

Kelemahan Indonesia terletak dalam soal kekurangan tenaga-ahli, sehingga faktor ini harus mendapat perhatian sepenuhnja

dengan sungguh-sungguh, terlebih-lebih dalam tahap-tahap pertama dari pembangunan.

TUGAS DEWAN PERANTJANG NASIONAL.

65. Untuk merantjang pola masjarakat jang adil dan makmur berdasarkan Pantja-Sila atau pola masjarakat Sosialis Indonesia, dibentuklah Dewan Perantjang Nasional, disingkat: Depernas, jang anggotanja berasal dari tanah-air Indonesia antara Sabang dan Merauke, dan bertugas:
    a. mempersiapkan rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana;
    b. menilai penjelenggaraan pembangunan;
    c. menjusun rentjana pembangunan nasional dengan memperhitungkan penggunaan segala kekajaan alam dan pengerahan tenaga rakjat serta meliputi segala segi penghidupan Bangsa Indonesia dalam bentuk rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan.

RANTJANGAN POLA NASIONAL.

66. Pokok daripada segala pokok daripada Dewan Perantjang Nasional ialah, bahwa Depernas harus membuat Rantjangan Pola (blueprint) daripada suatu masjarakat Indonesia jang berkeadilan sosial, suatu masjarakat Indonesia sebagai jang dimaksudkan oleh mukaddimah Undang-Undang Dasar dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, suatu masjarakat Indonesia jang betul-betul adil dan makmur, betul-betul makmur dan adil pula. Depernas tidak ditugaskan untuk membuat pola masjarakat Indonesia jang makmur tetapi tidak adil, atau jang adil tetapi tidak makmur!

67. Karya Dewan Perantjang Nasional berupa *usul* Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana, jang dimadjukan kepada Dewan Menteri untuk dipertimbangkan.

Sesudah dipertimbangkan oleh Dewan Menteri dan diolah mendjadi *Rantjangan* Dasar Undang-Undang Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana, maka rantjangan tersebut dimadjukan kepada Madjelis Permusjawaratan Rakjat (M.P.R.) untuk disahkan, dimana M.P.R. djuga memutuskan tjara melaksanakan Dasar Undang-undang Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana.

68. Sesudah diterima oleh M.P.R. mendjadi Putusan M.P.R., maka *Dasar Undang-Undang Pembangunan-Nasional-Semesta-Berentjana* itu mendjadi „POLA NASIONAL, jang tidak boleh satu orangpun merobahnja, karena telah diterima oleh Madjelis Tertinggi daripada seluruh bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke!"

ATURAN PELAKSANAAN.

69. Pengerahan tenaga dan benda:
Berlandasan azas-azas Gotong-rojong dan Kekeluargaan dilakukan pembangunan masjarakat-Sosialis-Indonesia dengan djalan melaksanakan Pola Nasional atau PEMBANGUNAN-NASIONAL-SEMESTA-BERENTJANA, jang harus dilaksanakan dengan meng-„ho-lopis-kuntul-baris"-kan seluruh tenaga rakjat, seluruh alat-kelengkapan bangsa dan seluruh semangat serta daja-kerdja jang berada diantara Sabang dan Merauke.

70. Untuk mentjapai pengerahan tenaga, benda dan alat-alat setjara efektip dan produktip, diperlukan pimpinan jang tepat dan kuat serta organisasi dan koordinasi jang tepat-guna. Oleh sebab itu perlu diketahui dengan pasti tenaga, benda dan alat-alat jang telah tersedia diseluruh tanah air Indonesia, selagi memikirkan kekurangan-kekurangannja jang perlu diusahakan.

C. *SISTEMATIK POLA PEMBANGUNAN NASIONAL-SEMESTA-BERENTJANA TAHAPAN PERTAMA: 1961 — 1969.*

Segera setelah menerima Amanat Pembangunan Presiden jang tertulis maupun jang diutjapkan, mulailah Depernas menjelami dan mempeladjari kedua amanat tersebut dan berhasillah Depernas menarik inti-sarinja jang dituangkan dalam: DASAR-DASAR ASASI PEMBANGUNAN SEMESTA-BERENTJANA terdiri atas: **50 (LIMA PULUH)** POKOK PIKIRAN sebagai berikut:

Paragraf I. Tudjuan dan sifat Pembangunan Semesta Berentjana berdasarkan Pantja-Sila.

Paragraf II. Atjara menjusun Dasar-Undang-Undang Pembangunan Semesta Berentjana.

Paragraf III. Menjusun Pola Pembangunan Semesta-Berentjana.

A. Pola Pembangunan bagian Projek,

B. Pola Pembangunan bagian Pendjelasan,

C. Pola Pembangunan bagian Pembiajaan.

Paragraf IV. Pembangunan industri dalam zaman peralihan tingkat agraris.

Paragraf V. Hubungan perkembangan industri dengan konsentrasi modal dan tenaga.

Paragraf VI. Industri Sandang-Pangan.

Paragraf VII. Hubungan dan sangkut-pautnja industri Sandang-Pangan dengan bidang komunikasi, produksi dan distribusi.

Paragraf VIII. Pembangunan industri berat dan penjelidikan (research).

Paragraf IX. Pelaksanaan Pembangunan Semesta-Berentjana dan sjarat lantjarnja pelaksanaan.

Berdasarkan atas 50 pokok-pokok pikiran itu, dimulailah mendekati pembangunan jang dihadapi dari tiga segi jaitu:

a. segi Kemasjarakatan,
b. segi Kenegaraan,
c. segi Ekonomi dan Keuangan.

Hal ini dikerdjakan agar para anggota mendapat gambaran jang overall tentang banjaknja persoalan jang dihadapi oleh Bangsa Indonesia dalam lapangan pembangunan ini. Karena pentingnja soal sandang-pangan, maka pada waktu itu djuga dibentuk *Seksi Sandang-Pangan.*

Didalam pemikiran, seluruh lapangan pembangunan dibagi mendjadi **delapan bidang.**

Tiap-tiap bidang dibagi lagi mendjadi *Bidang Terperintji*, dan 8 **(delapan)** Bidang tersebut diatas diperintji mendjadi 19 **(sembilan belas) Bidang Terperintji.**

Bidang terperintji dibagi lagi kedalam *sektor-sektor* pembangunan, jang seluruhnja berdjumlah: **delapan puluh sektor.**

Tiap-tiap sektor-pembangunan dibagi lagi kedalam *usaha/pabrik/kegiatan/objek*, jang sebagai tjontoh dikemukakan djumlah 250 **(dua ratus lima puluh).**

SISTEMATIK ini disusun hanja sekedar untuk memudahkan pemikiran, pembahasan serta pengolahan bahan-bahan sahadja dan sudah barang tentu harus selalu disesuaikan dengan perkembangan pemikiran dan hasil penelitian/penjelidikan selandjutnja.

Sesudah Seksi jang empat tadi melaporkan kepada Pleno, Depernas telah memberikan pelaporan sementara kepada Paduka Jang Mulia Presiden pada sidang Pleno Istimewa pada 9 Djanuari 1960, jang djuga dihadiri oleh seluruh anggota Kabinet dan Kepala-kepala perwakilan asing. Pada ketika itu, Paduka Jang Mulia Presiden telah menjatakan persetudjuan beliau atas **k o n s e p** Depernas mengenai beberapa persoalan pokok, antara lain gambaran masjarakat adil dan makmur, macro-ekonomi dan lain-lainnja.

Beliau memesankan untuk memperhatikan "*nation — dan state building*" dalam perentjanaan.

(djutaan)

Kemudian Depernas meneruskan pekerdjaannja dengan membentuk 6 (enam) seksi baru untuk memerintji dan mengolah bahan-bahan lebih landjut.

Kemudian hasil pleno terachir dalam bulan Djuli 1960 dituangkan dalam naskah Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana.

Naskah Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional Semesta Berentjana **delapan tahun**: 1961 — 1969, jang semula terdiri atas 5.100 halaman setelah ditjetak mendjadi suatu rangkaian buku dari 4.647 halaman.

Seluruh bahan diatur dalam sistematik angka-angka Proklamasi jang sakti, jaitu "17 (Djilid) — 8 (Buku) — 1945 (Paragraf)".

KESELURUHAN BAHAN dibagi dalam 8 buku, jaitu:

Buku pertama	:	berisi Pokok-pokok Pembangunan Nasional Semesta-Berentjana.
Buku kedua	:	berisi Rantjangan bidang pokok Pembangunan Nasional-Semesta-Berentjana.
Buku ketiga	:	Bidang Mental/Ruhani dan Penelitian.
Buku keempat	:	Bidang Kesedjahteraan, Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan.
Buku kelima	:	Bidang Produksi.
Buku keenam	:	Bidang Distribusi.
Buku ketudjuh	:	Bidang Keuangan.
Buku kedelapan	:	Uraian Menteri-Menteri.
		Lampiran-lampiran.

KE-DELAPAN BUKU tersebut dibagi lagi dalam 17 djilid:

Djilid I	Pendahuluan
Djilid II	Sosialisme Indonesia
	Tripola Pembangunan
	Pola Projek.

Djilid III	Garis Besar Pembangunan:
	Pola Pembangunan
	Pelaksanaan dan Penutup.
Djilid IV	Pola Pendjelasan bidang:
	Kemasjarakatan
	Ekonomi/Keuangan
	Sandang/Pangan
	Bidang pokok projek Pembangunan.
Djilid V	Kebudajaan dan Pendidikan.
Djilid VI	P e n d i d i k a n.
Djilid VII	Pendidikan tenaga pembangunan.
Djilid VIII	P e n e l i t i a n.
Djilid IX	P e n e l i t i a n.
Djilid X	P e n e l i t i a n.
Djilid XI	Kesedjahteraan Rakjat.
Djilid XII	Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan.
Djilid XIII	Pangan dan Sandang.
Djilid XIV	Industri, termasuk Obat-obatan.
Djilid XV	Distribusi, Komunikasi dan Turisme.
Djilid XVI	K e u a n g a n.
Djilid XVII	Uraian Menteri-Menteri.
	Lampiran.

Seluruh bahan dibagi pula dalam 1945 (SERIBU SEMBILAN RATUS EMPAT PULUH LIMA) PARAGRAF.

T J A T A T A N :

a. Pokok-pokok pikiran mengenai tudjuan pembangunan, kebidjaksanaan pembangunan, tjara membangun, garis besar bidang-bidang pembangunan, biaja pembangunan, pelaksanaan pembangunan diuraikan dalam buku pertama jang terdiri dari 3 djilid, (Djilid I — II — III) jang memberi gambaran kebulatan seluruh persoalan pembangunan setjara ringkas.

b. Buku kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketudjuh adalah bahan jang mendjelaskan pokok-pokok pembangunan setjara terurai jang ditjantumkan dalam buku pertama.

c. Buku kedelapan adalah sumbangan para Menteri pada rapat-rapat Depernas tentang bidang-bidang pembangunan jang masuk tugas dan wewenang setiap Menteri.

d. Dalam lampiran dimasukkan pikiran-pikiran mengenai persoalan-persoalan penting sedjumlah 45 (EMPATPULUH LIMA) pokok-pokok.

(1) *POLA PROJEK.*

Tjatjah djiwa Indonesia

Dalam mendjalankan pekerdjaannja Depernas sering terbentur pada angka-angka jang berlainan mengenai penduduk jang dipergunakan sebagai dasar perhitungan oleh berbagai instansi dalam negara kita. Berhubung tidak dapat bekerdja atas angka-angka jang berlainan itu, sedang diinsjafi bahwa soal penduduk adalah soal pokok dalam perentjanaan, karena penduduklah jang mendjadi tudjuan pembangunan dan penduduk pulalah jang mendjadi pelaksana pembangunan, maka keterangan-keterangan jang tepat mengenai djumlah penduduk adalah satu keharusan dalam setiap rentjana dan dalam pelaksanaan dan penilaian pembangunan.

Didorong oleh keperluan itu, maka telah dibentuk suatu Panitia Djumlah Penduduk Indonesia jang setjara populer disebut Panitia Johannes.

Menurut penjelidikan Panitia tersebut jang mempergunakan segala bahan jang ada didalam dan diluar negeri, maka djumlah penduduk pada tahun 1960 adalah 92,7 djuta dan pada tahun 1970 akan mendjadi 116,4 djuta.

Prosentasi kenaikan penduduk jang dipergunakan untuk masa 1960 hingga 1970 adalah 2,3.

Adapun formula jang dipergunakan Prof. Johannes untuk menetapkan djumlah tjatjah djiwa Indonesia, berbunji :

$P_x = P1957(1+r)t$

P_x = angka penduduk jang ditanjakan

P1957 = angka penduduk achir tahun 1957, jaitu : 86.659 djuta

t. = djumlah tahun, terhitung dari tahun 1957 sampai tahun jang ditanjakan.

r. = presentase kenaikan tahunan penduduk achir tahun 1957 diextrapoleer sampai 1970.

Demikianlah maka grafik penduduk Indonesia dari tahun 1960. 1970 adalah sebagai berikut :

Tahun	Djumlah
1960	92,777
1961	94,911
1962	97,094
1963	99,327
1964	101,611
1965	103,949
1966	106,340
1967	108,785
1968	111,287
1969	113,847
1970	116,465

Pendapatan Nasional

Adalah sungguh kurang bertanggung-djawab untuk mempergunakan angka pendapatan nasional bangsa kita pada ketika ini. Angka-angka jang dipakai oleh beberapa kalangan ialah Rp. 206 miljar untuk tahun 1960. Depernas telah meneliti angka-angka ini dan dengan menghitungnja berdasarkan sektor Produksi, terutama disektor pertanian jang memberikan keterangan jang agak lengkap. Berdasarkan keterangan jang lampau jang merupakan angka taksiran, maka djumlah pendapatan nasional Indonesia pada tahun 1960 tidaklah Rp. 206 miljar atau Rp. 2.200 per kapita, tetapi Rp. 236 miljar atau Rp. 2.500 per kapita setahun dengan djumlah penduduk sebanjak 92,7 djuta.

Sekali lagi perlu ditandaskan disini bahwa tidak pada tempatnja mempergunakan angka-angka jang berdasarkan taksiran. Angka-

angka ini dipergunakan hanja sekedar mengarahkan pikiran. Kita tidak dapat mempertjajai satu angka mengenai pendapatan nasional, sedangkan djumlah penduduk tidak kita ketahui dengan pasti.

Oleh sebab itu adalah lebih tepat untuk sementara waktu memakai fakta-fakta sebagai pengukur kemakmuran bangsa Indonesia, sampai terpenuhi pentjatatan penduduk jang baik dan terpenuhi pula pentjatatan kegiatan ekonomi jang sempurna.

Projek-projek

Tentang penggolongan projek telah dibedakan projek A dan projek B. Kedua-dua projek pembangunan itu adalah alat untuk menaikkan kesedjahteraan rakjat supaja setelah beberapa waktu dilaksanakan Pembangunan Semesta, masjarakat Indonesia dapat berkembang memasuki Masjarakat Sosialis Indonesia. Tetapi projek B istimewa dilaksanakan untuk mendapat hasil keuangan jang akan dipergunakan untuk membajar biaja Pembangunan Semesta.

Projek B ikut menjumbang membajar perongkosan sebagian daripada biaja bagi segala projek A.

Projek B itu umumnja didirikan untuk mengolah kekajaan alam Indonesia, baik jang tersimpan dalam bumi maupun jang didapat didaratan dan dilautan. Pengolahan kekajaan alam itu seboleh-bolehnja dilaksanakan oleh Negara sendiri. Pengolahan oleh Negara dapat djuga berbentuk suatu perusahaan negara dengan kerdja sama teknis dan moneter, baik dengan orang Indonesia maupun asing, tetapi seboleh-bolehnja dibawah pimpinan dan pengawasan orang Indonesia. Dengan demikian maka setjara teoritis terbuka djalan, supaja Pembangunan Semesta ikut dibajar untuk sebagian dengan hasil kekajaan alam Indonesia sendiri. Projek itu akan meliputi misalnja pengolahan kehutanan, perikanan, minjak, logam, kopra, karet dan lain-lainnja.

Beberapa pendjelasan diperlukan mengenai pola projek ini.

Projek-projek dibagi dua golongan jaitu golongan A dan golongan B. Golongan A adalah Projek Pembangunan jang diberi huruf pengenal dan nomor :

AA, AB dan sebagainja dan disusun menurut 8 (delapan) bidang pembangunan, jaitu pembangunan:

(1) Mental dan rochani.
(2) P e n e l i t i a n.
(3) Kesedjahteraan.
(4) Pemerintahan.
(5) Keamanan/Pertahanan.
(6) P r o d u k s i.
(7) Distribusi.
(8) Keuangan.

Golongan B adalah Projek Pembangunan untuk membiajai pembangunan. Projek-projek ini diberi huruf pengenal: B1, B2, B3 dan sebagainja.

Mengenai tempat projek djika disebut kota, maka projek itu adalah sengadja untuk kota itu. Seperti air minum kota A, rentjana untuk kota A itu adalah tidak untuk kota lain. Rentjana tersebut telah disesuaikan dengan besar djumlah penduduk dan situasi kota itu.

Dalam hal-hal lain ditjantumkan Daswati I. Hal ini berarti bahwa lokasi jang tepat harus ditjantumkan lagi, djadi masih memerlukan survey dan penelitian. Hal ini berlaku pula djika disebut Kabupaten, Kawedanaan dan Katjamatan.

Mengenai biaja perlu diadakan tjatatan:

a. Nilai biaja jang disebutkan dibelakang projek adalah nilai jang kita ketahui melalui segala matjam sumber di Indonesia. Umumnja nilai itu adalah nilai dalam tahun 1959 jang tentu tidak sesuai lagi dengan nilai waktu projek nanti sungguh-sungguh dikerdjakan. Terlebih-lebih djika projek itu akan selesai sesudah tiga atau empat tahun sesudah permulaan.
b. Dalam nilai tersebut kadang-kadang termasuk pembelian djasa atau bahan dari luar negeri. Ada kemungkinan bahwa harga-harga untuk itu telah menaik.

c. Untuk pendirian pabrik dari luar negeri, diperlukan rupiah untuk mendirikannja didalam negeri, misalnja pembelian tanah, pendirian gedung dan biaja pemasangan serta biaja mendjalankan (modal bekerdja).

Kita belum mempunjai pengalaman jang banjak dalam menentukan perbandingan ini. Ini masih berupa taksiran didasarkan atas satu-dua pengalaman di Indonesia.

Ketiga faktor diatas akan mempengaruhi biaja sebenarnja nanti, sehingga perlu diadakan penjesuaian.

Jang diinginkan ialah, bahwa semua harga sedapat-dapatnja ditekan serendah mungkin untuk menghemat biaja disatu pihak, agar dapat menambah kemungkinan pendirian lebih banjak projek dilain pihak.

Mengingat hal diatas, maka perlu diadakan satu tjara penjesuaian harga dikemudian hari.

Dalam semua harga tidak diperhitungkan Puim dan Puex sehingga US $ dinilai Rp. 45,—.

Hal lain didalam penjaluran biaja jang perlu diperhatikan : *bila* dimulai mengeluarkan biaja jang ditentukan dan *bila* projek itu telah dianggap selesai dan menghasilkan untuk dipindahkan keroutine.

Behubung dengan sangkut-pautnja satu bidang pembangunan dengan bidang lain, maka dalam penjusunannja dimulai dengan projek A dahulu, kemudian baru projek B, karena projek B adalah pengchususan projek A. Sinchronisasi ini perlu diadakan untuk mendapat effek sebesar-besarnja dari pembangunan kita. Djangan hendaknja kita mendapatkan keadaan : poliklinik didirikan, sedangkan obat-obat tidak ada sama sekali.

Permulaan dan *achir* satu-satu projek dinjatakan dengan tahun-tahun.

Semua pendidikan tenaga harus dimulai pada permulaan rentjana I (tahun 1961).

Pada beberapa pola projek diikutkan satu daftar projek tjadangan dalam bidang itu.

Projek tjadangan dapat dikerdjakan djika djumlah uang untuk projek-projek tersebut terlalu banjak atau uang tidak dipergunakan, karena salah satu projek tidak dapat dikerdjakan berhubung sesuatu hal.

Pada pola projek ditjantumkan daftar kegiatan-kegiatan jang merupakan tindakan organisatoris atau administratip dan tidak memerlukan investasi luar biasa, karena dapat dibiajai dengan biaja routine. Tindakan-tindakan jang ditjantumkan mendjadi inti djuga dari pembangunan semesta ini, karena mempengaruhi perdjalanan projek.

Dalam kolom berikut sedapat mungkin ditjantumkan hasil dan hasil-ikutan jang diharapkan ditjapai. Tidak mungkin ditjantumkan semua hasil, karena akibat setiap tindakan ekonomis dan organisatoris tidak mungkin ditjantumkan seluruhnja, karena suatu tindakan ekonomi disatu bidang mengakibatkan akibat berantai pada bidang lain.

Jang ditjantumkan hanja akibat jang pokok sadja.

Dalam kolom keterangan ditjantumkan keterangan-keterangan jang diperlukan untuk memahami dan menilai projek itu sebaik-baiknja.

Perlu diperhatikan bahwa banjak diantara projek-projek ini memberikan hasil segera dan berulang-ulang.

Pada Pola Projek ini ditjantumkan satu daftar pembagian administrasi Republik Indonesia.

Huruf pengenal dan nomor:

Dalam menjusun projek-projek, semua projek A diberi sebuah huruf lagi untuk menundjukkan bidangnja, misalnja AB untuk bidang Pendidikan.

Pada kedua huruf ditambahkan lagi nomor urut projek dalam keseluruhan Naskah, dan untuk bidang tersebut projek-projek itu diberi nomor urut pula menurut bidangnja.

Sistim seluruhnja adalah sebagai berikut:

AA — Kebudajaan
AB — Pendidikan

AC — Penelitian
AD — Kesedjahteraan Rakjat
AE — Pemerintahan
AF — Pembangunan Chusus
AG — P a n g a n
AH — S a n d a n g
AI — Industri
AJ — Perobatan
AK — Distribusi
AL — Keuangan
B_1 — Minjak Bumi
B_2 — Perikanan Laut
B_7 — Alumina
B_8 — Tourisme

Tjontoh:

AE 60/4 berarti dalam keseluruhan projek tersebut adalah No. 60 dan dalam bidang Pembangunan jang bersangkutan No. 4.

Demikianlah dibelakang ini disertakan daftar projek-projek selengkapnja sebagai berikut:

I. POLA PROJEK BIDANG MENTAL/AGAMA/KEROCHANIAN/PENELITIAN

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AA. 1	1	Penggalian Kekajaan Kebudajaan	Nias Kalimantan Tengah Toradja Flores Maluku	50	—	50	1. Penambahan kader 2. Piringan² hitam 3. Film² dan tjatatan artistik 4. Maquette² 5. Teknik pembuatan alat kesenian 6. Peninggalan Islam dan Hindu 7. Bahan untuk museum Nasional 8. Film² kebudajaan untuk sekolah rakjat dan sekolah menengah 9. Bahan untuk Perguruan Tinggi 10. Tjara kerdja modern.	Dimulai berangsur-angsur mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai pada achir Rentjana I.
AA. 2	2	Museum Nasional	Kotapradja Djakarta Raya (Djakarta)	313	—	313	Museum Nasional untuk: a. Terpeliharanja kebudajaan b. Memperkuat kepribadian bangsa c. Memadjukan tourisme.	1. Pendidikan ahli museum. 2. Taman rekreasi. 3. Taman Bhinneka Tunggal Ika. 4. Museum Perdjuangan. Diselenggarakan mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai achir Rentjana I.
AA. 3	3	Gallery Kesenian Nasional	Kotapradja Djakarta Raya (Djakarta)	469	—	469	Gallery Kesenian Nasional untuk: a. Pameran hasil kesenian nasional b. Memelihara kepribadian kebudajaan c. Perkembangan daja kreatip d. Memadjukan tourisme.	Gallery Kesenian Nasional memuat: 1. 4.000 lukisan dalam satu baris 8.000 lukisan dalam dua baris dan dapat diperbesar dengan 2.000 lukisan. 2. Dimulai tahun pertama Rentjana I dan selesai achir Rentjana I.
AA. 4	4	Perpustakaan Nasional	Kotapradja Djakarta Raya (Djakarta)	453	—	453	1. Terpenuhinja kebutuhan rakjat akan batjaan 2. Himpunan karja intelek bangsa Indonesia 3. Pendidikan ahli Perpustakaan.	1. Kapasitet 4 djuta buku. 2. Dimulai tahun pertama Rentjana I dan selesai achir Rentjana I.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AA. 5	5	Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan	Kotapradja Djakarta Raya (Djakarta)	44	—	44	1. Penterdjemahan buku² untuk Universitas. 2. Kamus besar bahasa Indonesia. 3. Ensiklopedia Indonesia. 4. Penemuan-penemuan istilah. 5. Pendidikan ahli penterdjemah. 6. Ahli-ahli bahasa.	
AA. 6	6	Taman Kebudajaan	Ditiap Daswati I	110	—	110	Taman Kebudajaan sebagai pusat penghidupan kebudajaan daerah dan nasional.	Dibangun 22 buah. Dimulai tahun kedua Rentjana I dan selesai achir tahun ketiga Rentjana I.
AA. 7	7	Terdjemahan Kitab Sutji Al Qur'an	Djakarta	62	—	62	Kitab sutji dalam bahasa Indonesia, hasil karya Nasional.	Dimulai tahun pertama Rentjana I dan selesai dalam 10 bulan.
AA. 8	8	Terdjemahan Kitab Sutji Bybel	Flores/Djakarta	33	—	33	idem	Dimulai tahun pertama Rentjana I dan selesai dalam 10 bulan.
AA. 9	9	Terdjemahan Kitab Sutji Weda dan Dhamma Padda	Bali	20	—	20	idem	Dimulai tahun pertama Rentjana I dan selesai pada achir Rentjana I.
			Djumlah:	1.554	—	1.554		

TJADANGAN:

(1)	Theater Nasional	Djakarta
(2)	Konservatorium Nasional	Djakarta
(3)	Sirkus Nasional	Djakarta
(4)	Tjagar Alam dan taman Margasatwa	
(5)	Perpustakaan Desa (dikerdjakan pada Bidang Pendidikan)	

I. POLA PROJEK BIDANG MENTAL/AGAMA/KEROCHANIAN/PENELITIAN

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AB. 10	1	Universitas Gadjah Mada	Daerah Istimewa Jogjakarta (Jogjakarta)	1.650	—	1.650	Melipatgandakan Sardjana/ Bakaloraet dalam lapangan: a. Teknik b. Pasti/Alam c. Biologi d. Pertanian/Kehutanan e. Dokter	Dimluai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana I. Termasuk perluasan gedung untuk kuliah, laboratorium, rumah sakit dan sebagainja.
AB. 11	2	Universitas Indonesia	Kotapradja Djakarta Raya (Djakarta)	1.400	—	1.400	Melipatgandakan Sardjana dilapangan: Pertanian/Kehutanan Menambah Fakultas baru: a. Teknik b. Pasti/Alam c. Biologi d. Ahlipenggunaan tanah	s.d.a.
AB. 12	3	Universitas Airlangga (termasuk Bali)	Djawa Timur (Surabaja)	950	—	950	Melipatgandakan Sardjana dilapangan: a. Dokter b. Guru Menambah Fakultas baru: a. Teknik b. Pasti/Alam c. Pertanian/Kehutanan.	s.d.a.
AB. 13	4	Universitas Hasanuddin	Sulawesi (Makasar)	700	—	700	Memperlengkapi Fakultas: a. Kedokteran b. F.K.I.P. Menambah Fakultas: a. Teknik b. Ilmu Pasti/Alam c. Pertanian/Kehutanan	s.d.a.
AB. 14	5	Universitas Sumatra Utara	Sumatra Utara (Medan)	700	—	700	Memperlengkapi Fakultas: a. Kedokteran b. Dokter Hewan c. Pertanian/Kehutanan d. F.K.I.P.	s.d.a.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Menambah Fakultas: a. Teknik b. F.I.P.I.A.	
AB. 15	6	Universitas Andalas	Sumatra Barat (Padang)	700	—	700	Menjempurnakan Fakultas: a. Kedokteran b. F.K.I.P. Menambah Fakultas: a. Teknik b. F.I.P.I.A.	Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana I.
AB. 16	7	Universitas Padjadjaran (termasuk Fakultas Guru Pengadjaran Kedjuruan)	Djawa Barat (Bandung)	1.050	—	1.050	Melipatgandakan Sardjana: a. Pasti/Alam b. Pertanian c. Kedokteran d. F.K.I.P. Menambah Fakultas: Guru Pengadjaran Kedjuruan.	s.d.a.
AB. 17	8	Institut Teknologi	Djawa Barat (Bandung)	1.082	—	1.082	Melipatgandakan Sardjana: a. Teknik, terutama Geologi b. Kimia/Biologi c. Pasti/Alam	s.d.a.
AB. 18	9	Universitas Sriwidjaja	Sumatra Selatan (Palembang)	250	—	250	Dimulai dengan Fakultas: a. Teknik b. F.I.P.I.A. c. Kedokteran	s.d.a.
AB. 19	10	Universitas Kalimantan	(Kalimantan)	250	—	250	s.d.a.	s.d.a.
AB. 20	11	Universitas Maluku	(Maluku)	250	—	250	Dimulai dengan Fakultas: a. Teknik b. Perkapalan c. Marine Sciencea.	s.d.a.
AB. 21	12	Universitas Swasta (termasuk Universitas Diponegoro Semarang)		250	—	250	—	Merupakan bantuan dalam memperlengkap alat-alat dan guru-guru.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AB. 22	13	Sekolah Teknik Menengah	Atjeh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan Djawa Barat Djakarta Raya Djawa Timur Sulawesi	156	—	156	Menjempurnakan dan melipatgandakan tamatan.	Sudah ada, tetapi belum mempunjai gedung. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana L
AB. 23	14	Sekolah Teknik Menengah	Riau Sumatera Utara Djakarta Raya Djawa Barat Djawa Tengah Djawa Timur Kalimantan Barat Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Bali Sulawesi	132	—	132	Menambah tenaga teknik.	Mendirikan jang baru: Dimulai pada tahun kedua Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana L
AB. 24	15	Sekolah Guru Pengadjaran Teknik	Sumatera Utara Djawa Barat Djakarta Raya Djawa Tengah Jogjakarta Djawa Timur	84	—	84	Menjempurnakan dan melipatgandakan tamatan.	Sudah ada. tetapi belum mempunjai gedung. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana L
AB. 25	16	Sekolah Guru Pengadjaran Teknik	Djakarta Raya	12	—	12	Menambah djumlah guru pengadjaran teknik.	Mendirikan baru; Dimulai pada tahun pertama dan dilaksanakan berangsur-angsur sampai selesai achir tahun ketiga Rentjana L
AB. 26	17	Kursus Ahli Teknik	Sumatera Utara Djakarta Raya Djawa Tengah Djawa Timur	48	—	48	Menjempurnakan dan memperlipatgandakan tamatan.	Sudah ada, tetapi belum mempunjai gedung. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana L
AB. 27	18	Sekolah Teknik	Atjeh Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Djambi Sumatera Selatan	1.081	—	1.081	s.d.a.	Djumlah 108 buah. Sudah ada, tetapi belum mempunjai gedung. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana L

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Djawa Barat Djakarta Raya Djawa Tengah Jogjakarta Djawa Timur Kalimantan Timur Sulawesi Nusa Teng. Barat Maluku					
AB. 28	19	Sekolah Teknik	Sumatera Utara Djakarta Raya Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Nusa Tenggara Timur Sulawesi	56	—	56	Menambah tenaga Teknik	Didirikan baru 6 buah. Dimulai pada tahun ketiga Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana I.
AB 29	20	Akademi Pekerdjaan Umum	Djawa Barat (Bandung)	4	—	4	Tahun 1961-1968, Tamatan sebanjak 1080 orang.	Untuk perluasan gedung, selesai pada achir tahun pertama Rentjana I.
AB	21	Pendidikan Teknik Swasta	—	279	—	279	Menjempurnakan.	Bantuan alat dan tenaga pengadjar. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana I.
AB. 31	22	Akademi Pertanian	Djawa Barat (Bogor)	30	—	30	Tahun 1961-1968, Tamatan sebanjak 426 orang.	Memperluas dan menjempurnakan gedung dan alat. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana I.
AB. 32	23	Akademi Pembangunan Veteran	Daerah Istimewa Jogjakarta (Jogjakarta)	13	—	13	Tahun 1961-1968, Tamatan sebanjak 480 orang untuk djurusan Teknologi dan Geologi.	Perluasan gedung dan alat. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir tahun kedua Rentjana I.
AB. 33	24	Sekolah Tekstil Tinggi	Djawa Barat (Bandung)	4	—	4	Tahun 1961-1963, Tamatan sebanjak 84 orang.	Perluasan gedung dan alat. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir tahun kedua Rentjana I.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	biaja rupiah rupiah (djutaan)	Djumlah Biaja devisen (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AB. 34	25	Akademi Pelajaran	Djakarta	8	—	8	Melipat-gandakan djumlah tamatan.	Perluasan gedung dan alat. Dimulai tahun pertama Rentjana I dan selesai achir tahun ketiga Rentjana I.
AB. 35	26	Sekolah Pelajaran dan Perkapalan Menengah	Kalimantan Makasar Ambon Medan	60	—	60	Menambah tenaga pelajaran dan perkapalan menengah.	Didirikan baru. Dimulai tahun pertama Rentjana I dan selesai achir tahun ketiga Rentjana I.
AB. 36	27	Pendidikan Tenaga P.T.T.	Djawa Barat (Bandung)	596	—	596	Menambah dan menjempurnakan tamatan.	Perluasan gedung dan alat, tenaga. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan selesai achir Rentjana I.
AB. 37	28	Akademi Cinematografi		10	—	10		Didirikan baru. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan selesai achir tahun pertama Rentjana I.
AB. 38	29	Akademi Gula Negara	Daerah Istimewa Jogjakarta (Jogjakarta)	2	—	2	Tahun 1961 — 1968 lamatan sebanjak 160 orang.	Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan selesai achir tahun pertama Rentjana I.
AB. 39	30	Sekolah Analis/Sekolah Analis Tinggi	Djakarta Djawa Barat (Bandung) Jogjakarta Djawa Timur (Surabaja) Sumatra Utara (Medan) Sulawesi (Makasar) Sumatra Selatan (Palembang) Djawa Barat (Bogor)	88	—	88	Menjempurnakan dan menambah djumlah tamatan.	Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai pada achir Rentjana I.
AB. 40	31	Sekolah Kedjuruan Perhotelan	Djawa Barat (Bandung)	4	—	4	Menambah tenaga untuk perhotelan.	Perlengkapan sekolan. Selesai pada achir tahun pertama Rentjana I.

Golongan dan No urut	Nomor urut	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	biaja rupiah rupiah (djutaan)	Djumlah Biaja devisen (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AB. 41	32	Sekolah Menengah Atas Pertanian	Djawa Barat (Bogor) Daerah Istimewa Jogjakarta (Jogjakarta) Djawa Timur (Malang) Maluku (Ambon) Sulawesi (Makasar) Sumatra Selatan (Palembang) Sumatra Barat (Padang) Sumatra Utara (Medan) Kalimantan Selatan (Bandjarmasin)	20	—	20	Tahun 1961 — 1968. Sebanjak 2.400 orang.	Untuk perluasan gedung dan alat-alat. Dimulai pada tahun pertama dan dilaksanakan selesai achir tahun kedua Rentjana I.
AB. 42	33	Kursus Karantina	Djawa Barat (Bogor)	2	—	2	Menambah djumlah tamatan.	Perluasan gedung dan alat. Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan selesai pada achir tahun kedua Rentjana I.
AB. 43	34	Sekolah Kehutanan Menengah Atas	Djawa Barat (Bogor)	4	—	4	s.d.a.	s.d.a.
AB 44	35	Sekolah Perikanan Menengah Atas	Djawa Barat (Bogor)	4	—	4	s.d.a	s.d.a.
AB. 45	36	Sekolah Kehewanan Menengah Atas	Djawa Timur (Malang)	4	—	4	Menambah djumlah tamatan.	Perluasan gedung dan alat. Dimulai pula tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan selesai pada achir tahun kedua Rentjana I.
AB. 46	37	Sekolah Guru Atas	Daswati II	900	—	900	Menambah djumlah Guru S.R.	Mendirikan baru 150 buah. Dimulai tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai achir Rentjana I.
AB. 47	38	Sekolah Guru Kepandaian Puteri	Daswati I	60	—	60	Menambah djumlah Guru Kepandaian Puteri.	Mendirikan baru 10 buah. Dimulai tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur achir Rentjana I.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AB. 48	39	Sekolah Menengah Atas bagian B	Daswati II	268	—	268	Menambah djumlah tamatan.	Untuk laboratorium. alat-alat laboratorium pendidikan guru S.M.A ruangan laboratorium dan tambahan ruangan bagi S.M.A. B jang telah ada. Mendirikan baru 19 buah. Dimulai pada achir tahun Pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai achir Rentjana I.
AB. 49	40	Sekolah Rakjat	Tiap Desa	2.625	—	2.625		Untuk melaksanakan kewadjiban beladjar. Dimulai tahun I Rentjana I dan dilaksanakan setjara barangsur-angsur sampai achir Rentjana I.
AB. 50	41	Pemberantasan Buta Huruf, Kursus Kemasjarakatan dan Perpustakaan	Tiap Desa	423	—	423	Mengachiri buta-huruf diseluruh negara.	Subsidi untuk P.B.H., Kursus Kemasjarakatan dan perpustakaan. Dimulai tahun pertama dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai achir tahun keempat Rentjana I.
AB. 51	42	Pendidikan Keahlian djurusan Ekonomi Pelajaran		12	—	12		Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan selesai tahun ketiga Rentjana I.
AB. 52	43	Pendidikan perwira dek, mesin, markonis		40	—	40	200 perwira dek 200 perwira mesin 300 perwira markonis.	Dimulai pada tahun pertama Rentjana I dan dilaksanakan setjara berangsur-angsur sampai selesai achir Rentjana I.
			DJUMLAH:	16.261	—	16.261		

TJADANGAN:

(1) Kursus Dagang Pertama

(2) Kursus Dagang Atas

(3) Kursus Pegawai Administrasi

(4) Kursus Pegawai Administrasi Atas

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	(5)	Sekolah Keradjinan						
	(6)	Sekolah Guru Pendidikan						
	(7)	Sekolah Menengah Pertama						
	(8)	Sekolah Guru Taman Kanak-kanak						
	(9)	Pendidikan Pendahuluan Pertahanan Rakjat						
	(10)	Sekolah Menengah Ekonomi Pertama						
	(11)	Sekolah Menengah Ekonomi Atas						
	(12)	Sekolah Kepandaian Puteri 2 tahun						
	(13)	Sekolah Kepandaian Puteri 4 tahun						
	(14)	Sekolah Luar Biasa.						

II. POLA PROJEK BIDANG PENELITIAN

Golongan dan No urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AC. 53	1	Lembaga Kimia		60	202,5	262,5	Hasil penelitian masalah-masalah kimia untuk kepentingan pembangunan industri kimia dasar pembuatan rayon, kimia arang batu pembuatan pupuk. pembuatan obat-obatan dan lain-lain.	Status: Dibawah M.I.P.I. Perintjian biaja: Gedung Rp. 60 djuta. Alat-alat Rp. 202,5 djuta. (devisen). Pelaksanaan: Mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai tahun 1963.
AC. 54	2	Lembaga Fisika		60	202,5	262,5	Hasil penelitian masalah-masalah fisika untuk kepentingan pembangunan. Pendidikan ahli-ahli peniup gelas dan pembuat instrumen.	s.d.a.
AC. 55	3	Lembaga Geologi/Pertambangan		160	540	700	Hasil penelitian: a. Inventarisasi kekajaan mineral Indonesia. b. Penemuan dan penilaian deposit-deposit mineral. c. mempertinggi produksi mineral (kwalitatip dan kwantitatip) d. memperbaiki proses pengolahan bahan-bahan mineral. e. mempertinggi kegunaan bahan-bahan mineral.	Status: Dibawah M.I.P.I. Perintjian biaja: Gedung Rp. 160 djuta. Alat-alat Rp. 540 djuta. (devisen). Pelaksanaan: Mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai tahun 1963.
AC. 56	4	Lembaga Metalurgi		40	135	175	Hasil penelitian pengolahan bidjih-bidjih logam mendjadi logam dan logam mendjadi alat-alat.	Status: Dibawah M.I.P.I. Perintjian biaja: Gedung Rp. 40 djuta. Alat-alat Rp. 135 djuta (devisen). Pelaksanaan: Mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai tahun 1963.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AC. 57	5	Lembaga Elektronika		40	135	175	Hasil penelitian tentang otomatisasi sistim servo dan mesin hitung.	Status: Dibawah M.I.P.I. Perintjian biaja: Gedung Rp. 40 djuta. Alat-alat Rp. 135 djuta (devisen). Pelaksanaan: Mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai tahun 1963.
AC. 58	6	Lembaga Biologi		60	202	262	Hasil penelitian antara lain perluasan pengetahuan tentang kekajaan fauna dan flora Indonesia. Lembaga ini akan meliputi pelbagai djenis lembaga biologi termasuk jang kini berada dibawah Departemen Pertanian, Lembaga Herbarium Bogoriense, Lembaga Mortus Botanicus dan Balai Penjelidikan Laut.	Status: Dibawah M.I.P.I. Perintjian biaja: Gedung Rp. 60 djuta. Alat-alat Rp. 202 djuta (devisen). Pelaksanaan: Mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai tahun 1963.
AC. 59	7	Lembaga Ekonomi dan Masjarakat		20	5	25	Memenuhi keperluan akan penelitian dilapangan ekonomi dan kemasjarakatan untuk kepentingan ilmiah dan untuk pelaksanaan dan penilaian pembangunan.	Status: Dibawah M.I.P.I. Perintjian biaja: Gedung dan alat-alat Rp. 20 djuta. Perpustakaan dan pendidikan Rp. 5 djuta (devisen). Pelaksanaan: Mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai tahun 1962.
AC. 60	8	Penelitian dibidang geologi/pertambangan		65	135	200	Memperbesar dan memperluas hasil penelitian dibidang geologi/pertambangan jang sampai kini dilakukan oleh: a. Pusat Djawatan Geologi, Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan, dan	Diperuntukkan bagi pembiajaan perluasan laboratoria dan alat-alat perlengkapan serta bagi pembiajaan kegiatan-kegiatan penelitian dibidang geologi/pertambangan selama Rentjana I.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							b. Bagian Survey dan Penjelidikan serta Balai Pengolahan Bahan Galian. Pusat Djawatan Pertambangan Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan.	
AC. 61	9	Aerial Survey	Wilajah Indonesia	40	56	96	Diperolehnja keterangan-keterangan dasar jang bersifat geografis, archaeologis, dan geologis untuk kepentingan pembangunan pada umumnja dan pertambangan pada chususnja.	Djumlah biaja diperuntukkan bagi Lembaga Aerial Survey. Untuk: belandja modal, pendidikan tenaga ahli diluar negeri dan keperluan-keperluan lain jang urgen, titik berusaha diletakkan pada airborne geophysic survey. Projek ini perlu dilaksanakan dalam tahun pertama Rentjana L
AC. 62	10	Penelitian dibidang Industri		60	40	100	Hasil penelitian untuk memperbesar kemadjuan pembangunan bidang industri.	Pembagian djatah biaja untuk pelbagai tjabang industri dalam rupiah dan devisen untuk setiap tahunnja disesuaikan dengan keperluan pembangunan dibidang industri dalam Rentjana L.
AC. 63	11	Penelitian dibidang produksi Pangan		40	10	50	Mempertinggi produksi pangan (kwalitatip dan kwantitatip).	Djumlah biaja diperuntukkan bagi penggiatan dan perluasan usaha-usaha penelitian jang kini dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian dalam lingkungan Departemen Pertanian dalam rangka usaha menaikkan produksi pangan.
AC. 64	12	Penelitian dibidang Perkebunan dan Kehutanan		50	25	75	Mempertinggi produksi perkebunan dan hutan (kwalitatip dan kwantitatip).	Djumlah biaja diperuntukkan bagi penggiatan dan perluasan usaha-usaha penelitian jang kini dilakukan oleh lembaga-lembaga penelitian dalam lingkungan Departemen Pertanian dan badan-badan lain dibidang Perkebunan dan Kehutanan.
AC. 65	13	Laboratorium Research P.T.T. Djawa Barat (Bandung)		54	46	100	Kemadjuan dalam bidang: a. teknik/peralatan, b. effisiensi pelajaran.	Diselenggarakan mulai tahun pertama Rentjana I dan seterusnja selama Rentjana L

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (diutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AC. 66	14	Penelitian dalam lingkungan D.K.A.			190	100	Pelajanan pengangkutan jang lebih tjepat. aman. muran dan nikmat kepada para penumpang.	Biaja untuk mesin-mesin dan alat-alat jang harus diimpor dan keperluan-keperluan urgen lainnja jang pembiajaannja diluar pembiajaan rutine diselenggarakan mulai tahun I Rentjana I dan seterusnja selama Rentjana I oleh: a. Dinas Djalan dan Bangunan D.K.A b. Dinas Traksi D.K.A.
AC. 67	15	Penelitian jang berhubungan dengan penerbangan dan produksi. pesawat udara	Djawa Barat (Bandung)		30	30	a. Memperbesar keamanan penerbangan. b. Kemadjuan dalam teknik penerbangan, c. Perluasan penerbangan. d. Persiapan industri pesawat udara dan permulaan produksi pesawat terbang.	Diselenggarakan selama Rentjana I oleh Depot Penjelidikan dan Pertjobaan A.U.R.I. jang harus dirubah mendjadi Lembaga Persiapan Industri Pesawat Udara dalam waktu tiga tahun (1961 — 1963). Biaja disediakan terutama untuk pembelian perlengkapan (production machines. assembling tools dan raw materials) untuk memungkinkan penelitian setjara teratur mulai tahun pertama Rentjana I dan permulaan produksi pesawat udara pada tahun kelima Rentjana I.
AC. 68	16	Memadjukan penelitian dilembaga lain jang penting untuk pembangunan			40	40		Biaja dalam bentuk devisen untuk mendorong penelitian dibidang-bidang lain jang penting untuk pembangunan. (Untuk mentjukupi keperluan akan bahan literatur luar negeri, alat-alat perlengkapan. chemicalien dan sebagainja dari pelbagai lembaga-lembaga jang bersangkutan).
				749	1.904	2.653		

III. POLA PROJEK BIDANG KESEDJAHTERAAN

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AD. 69	1	Rumah Sakit Umum Ketjil dan pemberantasan penjakit Rakjat	Tiap Kewedanaan	1.245	—	1.245	Rumah Sakit Umum Ketjil.	Berangsur-angsur dilaksanakan tiap tahun mulai dari tahun pertama, selesai tahun terachir Rentjana I.
AD. 70	2	Poliklinik jang berfungsi pusat Kesehatan	2-5 poliklinik setiap Ketjamatan	730	—	730	Poliklinik: 7.300 buah	s.d.a.
AD. 71	3	R.S.U. Pusat	Lombok (Mataram) Nusa Tenggara (Kupang) Sulawesi Selatan (Makasar) Ternate (Soa-Siu) Maluku (Ambon) Kalimantan Timur (Samarinda) Kalimantan Tengah (Palangkaraja) Kalimantan Selatan (Bandjarmasin) Kalimantan Barat (Pontianak) Sumatra Utara (Medan) Riau (Tandjungpinang) (Pakanbaru) Djambi (Djambi)	330	—	330	Rumah Sakit Umum 16 buah.	Mulai dari tahun ke 5 s/d tahun terachir Rentjana I.
AD. 72	4	Bank Perumahan		2.000	—	2.000	Tambahan perumahan; dimulai dengan menjediakan rumah untuk pegawai-pegawai pemerintah jang tinggal dihotel dan losmen.	Anak Bank Indonesia berangsur-angsur dilaksanakan mulai dari tahun pertama dan pada achir tahun ke-5 Rentjana I, seluruh modal sudah berputar.
AD. 73	5	Usaha perentjanaan Kota. termasuk ibu-kota, kota Satelit		40	90	130	Rentjana kota (cityplanning), termasuk ibu-kota.	Berangsur-angsur dilaksanakan mulai dari tahun pertama Rentjana I dan selesai achir tahun terachir Rentjana I.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AD. 74	6	Usaha perentjanaan kota		31	45	76		Berangsur-angsur dilaksanakan mulai dari tahun pertama Rentjana I dan Selesai achir tahun terachir Rentjana I.
AD. 75	7	Usaha perentjanaan kota		200	90	290		s.d.a.
AD. 76	8	Air minum Perbaikan dan perluasan air minum	Djawa Timur (Surabaja)	93	—	93	Tambahan air minum untuk kota.	Dalam tahun ke-2, ke-3 dan ke-4 dilaksanakan pada empat tempat dan dalam tahun ke-5, ke-6, ke-7 dan ke-8 pada lima tempat lainnja.
			Djawa Tengah (Semarang)	147	—	147	s.d.a.	
			Sumatra Barat (Padang)	18	—	18	s.d.a.	
			Kalimantan Selatan (Bandjarmasin)	150	—	150	s.d.a.	
			Kalimantan Barat (Pontianak)	143	—	143	s.d.a.	
			Kalimantan Tengah (Palangkaraja)	16	—	16	s.d.a.	
			Sumatra Tengah (Pakanbaru)	40	—	40	s.d.a.	
			Sulawesi Selatan (Makasar)	140	—	140	s.d.a.	
			Djambi (Djambi)	40	—	40	s.d.a.	
		Kesedjahteraan Sosial:						
AD. 77	9	Rehabilitasi Penderita Tjatjat		198	—	198	Menambah kader pelaksana, menambah sentra dan mentjari lapangan pekerdjaan untuk tamatan.	Berangsur-angsur diselenggarakan mulai tahun pertama sampai dengan tahun terachir Rentjana I.
AD. 78	10	Lembaga Sosial Desa (termasuk penerangan dan lain-lain)		202	—	202	Memperluas dan memperkuat kedudukan Lembaga Desa.	s.d.a.
AD. 79	11	Kesedjahteraan Tani dan Nelajan:		200	—	200		s.d.a.
			DJUMLAH:	5.963	225	6.188		

IV. POLA PROJEK BIDANG PEMERINTAHAN DAN KEAMANAN/PERTAHANAN

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AE. 80	1	Transmigrasi	Seluruh Indonesia	1.000	—	1.000	Memindahkan sekurang-kurangnja 250.000 transmigran untuk sektor pertanian keluar Djawa.	Dikerdjakan mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai achir Rentjana I.
AE. 81	2	Depernas	Djakarta Bandung	100	—	100	Gedung Depernas dan Lembaga-lembaganja.	Dikerdjakan mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai achir Rentjana I.
AE. 82	3	Koperasi	Seluruh Indonesia	500	—	500	Memperkembangkan koperasi sebagai alat untuk melaksanakan ekonomi terpimpin, chusus dalam bidang distribusi dan kemudian dalam bidang produksi.	Dikerdjakan mulai tahun pertama Rentjana I dan selesai achir tahun ketiga Rentjana I.
AE. 83	4	Pendjara modern	1. Djawa Barat 2. Djawa Tengah 3. Sumatra 4. Kalimantan 5. Sulawesi 6. Nusa Tenggara 7. Maluku	26	—	26	7 buah pendjara modern diperlengkapi dengan tempat-tempat pertanian, pertenunan, perkajuan, perkulitan dan lain-lain.	Dikerdjakan mulai tahun kedua Rentjana I dan selesai achir tahun ketiga Rentjana I.
AE. 84	5	Polisi	Seluruh Indonesia	2.000	—	2.000	Perbaikan perlengkapan dan mempertinggi mutu kepolisian negara.	Dikerdjakan mulai tahun pertama Rentjana I sampai achir Rentjana I.
AE. 85	6	Lembaga Pembina Hukum Nasional		6	—	6	Perundang-undangan Nasional.	Dimulai tahun pertama Rentjana I, selesai achir tahun ketiga Untuk honorarium tenaga-tenaga ahli Lembaga, disediakan biaja setjukupnja.
			DJUMLAH:	3.632	—	3.632		
		Pembangunan Masjarakat Desa						Termasuk bidang Keuangan.

TJADANGAN:

1 Lembaga Administrasi Negara
2 Peradilan Kanak-kanak
3 Arsip Nasional

V POLA PROJEK BIDANG CHUSUS

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AF. 86		Projek Bidang Chusus				30.000		

VI. POLA PROJEK BIDANG PRODUKSI PANGAN

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AG. 87	1	**Menambah Padi Sentra**	Djawa dan seluruh Indonesia	7.255	10.880	18.135	**Tahun 1962 ekspor beras dihentikan.** **Surplus: 150.928** **1962 = + 150.928 ton.** **1963 = — 142.782 ton.** **ditutup dengan surplus 1962** **1964 = + 127.366 ton.** **1965 = + 88.70 ton.** **1966 = + 440.996 ton.** **1967 = + 1.585.458 ton.** **1968 = + 2.394.914 ton.** **Hasil ikutan seperti dedak untuk makanan ternak.**	1 **Padi Sentra ialah organisasi intensipikasi menaikkan produksi beras, jang dipelopori oleh gerakan Intensipikasi Masal.** **Pada tahun permulaan pelaksanaan (tahun 1961), seluruhnja diikuti rentjana dasar dari Departemen Pertanian. Demikian djuga pada tahun berikutnja (tahun 1962) ketjuali ditambahkan dengan intensipikasi padi ladang dan padi gogo.** 3. **Biaja dalam rupiah devisen ialah untuk:** **a. obat pemberantasan hama,** **b. pupuk,** **c. alat-alat pertanian.** 4. **Biaja jang tertera disebelah ialah biaja intensipikasi sampai tahun 1964.** **Pada tahun 1965 dan seterusnja diperhitungkan projek ini sudah dapat membiajai sendiri usahanja.**
AG. 88	2	**Pengairan:** **(1) Rehabilitasi**	**Djawa Timur**	50	—	50	**1.600 ha.**	**selesai dalam 8 (delapan) tahun.**
			Djawa Tengah	17		17		Idem
			D.I. Jogjakarta	6		6		Idem
			Djawa Barat	17		17	—	Idem
			Atjeh	2		2	**800 ha.**	**dalam 2 (dua) tahun.**
			Sumatra Utara	4		4	**16.000 ha.**	**dalam 8 (delapan) tahun.**
			Sumatra Barat	43		43		Idem
			Sumatra Selatan	114		114	**24.832 ha.**	Idem
			Sulawesi Selatan	21		21	**8.500 ha.**	Idem
			Nusa Tenggara	7		7	**2.450 ha.**	**dalam 3 (tiga) tahun.**
				281		281	**54.182 ha.**	

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		(2) Pelandjutan penjempurnaan	Djawa Timur	10		10	12.000 ha.	Selesai dalam 3 (tiga) tahun.
			Djawa Tengah	12		12	7.000 ha.	Idem
			Daerah Istimewa Jogjakarta	20		20	7.000 ha.	dalam 4 (empat) tahun.
			Djawa Barat	210		210	80.000 ha.	dalam 5 (lima) tahun.
			Atjeh	50		50	20.000 ha.	dalam 3 (tiga) tahun.
			Sumatra Utara	40		40	14.000 ha.	dalam 5 (lima) tahun.
			Sumatra Selatan	60		60	26.000 ha.	dalam 5 (lima) tahun.
			Sulawesi Utara	60		60	10.000 ha.	dalam 4 (empat) tahun.
			Sulawesi Selatan	90		90	40.000 ha.	dalam 6 (enam) tahun.
			Nusa Tenggara	15		15	10.000 ha.	dalam 3 (tiga) tahun.
				567		567	226.000 ha.	
		(3) Perluasan	Djawa Tengah	38		38	20.000 ha.	Selesai dalam 4 (empat) tahun.
			Daerah Istimewa Jogjakarta	9		9	4.000 ha.	Selesai dalam 3 (tiga) tahun.
			Sumatra Utara	210		210	40.000 ha.	Selesai dalam 8 (delapan) tahun.
			Sumatra Selatan	160		160	35.000 ha.	Selesai dalam 6 (enam) tahun.
			Sulawesi Selatan	40		40	10.000 ha.	Selesai dalam 6 (enam) tahun.
			Sulawesi	20		20	8.000 ha.	Selesai dalam 6 (enam) tahun.
				477		477	117.000 ha.	
		(4) Projek besar	Djawa Timur	60		60	20.000 ha.	Selesai 5 (lima) tahun.
			Djawa Tengah	190		190	52.000 ha.	Selesai 7 (tudjuh) tahun.
			Daerah Istimewa Jogjakarta	35		35	5.500 ha.	Selesai 7 (tudjuh) tahun.
			Djawa Barat	2.500		2.500	240.000 ha.	Selesai 5 (lima) tahun.
			Atjeh	60		60	21.000 ha.	Selesai 6 (enam) tahun.
			Sumatra Utara	80		80	27.000 ha.	Selesai 7 (tudjuh) tahun.
			Sumatra Tengah	800		800	73.000 ha.	Selesai 8 (delapan) tahun.
			Sumatra Selatan	325		325	75.000 ha	Selesai 5 (lima) tahun.
			Sulawesi Selatan	230		230	99.000 ha.	Selesai 8 (delapan) tahun.
			Kalimantan Tengah	150		150	66.500 ha.	Selesai 5 (lima) tahun.
			Kalimantan Selatan	300		300	124.000 ha.	Selesai 8 (delapan) tahun.
			Kalimantan Barat	300		300	100.000 ha.	Selesai 6 (enam) tahun.
			Nusa Tenggara	15		15	3.000 ha.	Selesai 4 (empat) tahun.
			Maluku	15		15	3.000 ha.	Selesai 5 (lima) tahun.
				5.060		5.060	909.000 ha.	
		Djumlah Semuanja (1) + (2) + (3) + (4)		6.385		6.385	1.306.182 ha.	

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AG. 89	3	Peternakan Ajam	Seluruh wilajah Indonesia	44,8	58	102,8	Tahun ke 1 = 54.462.000 ajam. Setiap tahun ajam meningkat 100%. Mutu ajam bertambah baik. Pada tahun pertama tiap unit terketjil beruntung Rp. 60.500,— atau setiap orang untung 100 butir telur.	a. Organisasi : 1. Mendirikan poultry farms dengan bentuk koperasi didaerah ketjamatan (kumpulan desa/marga) jang dibantu oleh Djawatan Pertanian, terutama memberikan penerangan-penerangan tehnis. 2. Organisasi swasta digiatkan. b. Didalam penjuntikan ajam rakjat setjara masal. c. Penjebaran bibit ajam bermutu tinggi dengan: 1. Mendirikan fokstation peternakan ajam. 2. Mengimpor bibit ajam jang bermutu tinggi. d. Broedcentrales diperkembangkan diketjamatan-ketjamatan menurut petundjuk dari [illegible]i Penjelidikan Peternakan jang berpusat di Bogor. e. Dalam projek ini sudah termasuk usaha intensipikasi penanaman djagung untuk makanan ajam [illegible]n sebagian dari hasil intensipikasi penanaman kedele. f. Biaja jang disediakan ini beru[illegible] kredit investasi jang mempunjai tegenpost. g. Biaja dalam rupiah devisen ialah untuk: 1. Impor bibit ajam luar negeri. 2. Alat-alat penjuntik. 3. Vaccin.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AG. 90	4	Mendirikan gudang dan lumbung padi	Setiap Daswati I dan desa di Indonesia	250	—	250	a. Stabilisasi harga beras. b. Pemberantasan idjon. c. Tertibnja masa (Periode) produksi.	a. Gudang beras di Djakarta dan disetiap Daswati I. b. Lumbung padi disetiap desa atau disetiap beberapa desa. c. Gudang beras pada tahun pertama diisi dengan beras impor. Lumbung padi diisi setelah panen pada tahun 1961. Padinja diambil dari pembelian padi pada rakjat tani (jang bersedia mendjual hasilnja) atau dipindjam dari petani kaja dengan bunga jang lajak dan dibajar kembali setelah pendjualan padi dilakukan. Diwaktu patjeklik, petani miskin dipindjami padi untuk konsumsi djuga untuk modal tahun berikutnja (pembelian bibit, alat pertanian, pupuk dan sebagainja). Didaerah minus dibantu oleh persediaan beras Daswati I. Gudang-gudang beras djuga diperuntukkan sebagai sumber beras distribusi pekerdja-pekerdja negeri dengan harga subsidi. selama gadji mereka tidak seimbang dengan harga barang-barang sandang pangan.
AG. 91	5	Perikanan Darat	Kalimantan Barat, Selatan dan Timur	32	70,2	102,2	1961 = 38.580 ton 1962 = 261.060 „ 1963 = 429.550 „ 1964 = 644.120 „ 1965 = 1.054.660 „ 1966 = 1.270.415 „ 1967 = 1.600.000 „ 1968 = 1.600.000 „ 8 th. = 6.898.385 ton Hasil ikutan waste ikan untuk bahan baku pupuk.	Biaja dalam rupiah devisen dimaksud untuk pembelian kapal-kapal: a. 1 à 1500 to- untuk pengangkutan garam dan ikan dari — dan kepulau Djawa. b. 1 à 1000 ton kapal pantai Kalimantan. c. 2 à 250 ton kapal sungai. d. Pantjing, kawat dan benang.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								Sedang motorboot dan tongkang diusahakan dari pembikinan dalam negeri. Biaja dalam rupiah untuk keperluan garam, paso. lampu dan lain-lain. Projek ini dapat diintensipkan bila cannering-industry .udah siap. Vistand didaerah perairan darat itu tetap dipelihara setjara berentjana. Jang melaksanakan projek ini terutama oleh rakjat dan swasta. Djawatan pertanian (Pemerintah) menjediakan alat-alat keperluan usaha tuk disewa (credit) mendjamin marketin,/penjuluhan teknis dengan antara lain mengadakan pilot projek. pengaturan exploitasi dan sebagainja.
AG. 92	6	Intensipikasi penanaman kedele	Djawa	10	10		Konsumsi djadi 18,3 kg. per kapita setiap tahun. Hasil ikutan berupa ampas, untuk makanan ajam.	Luas panen kedele jang ada sekarang di Djawa sebanjak 533.000 ha. Dengan seleksi bibit hasil per ha. (jang menurut hasil pert: .aan Lajasan Lembaga Penjelidikan keilmiahan Klaten = 60-80 qt/ha.) diharapkan pada tahun 1961 dengan 33 qt/ha. dan pada tahun 1968 dengan 40 qt./ha. Hasil akan lebih meningkat bila disertai dengan pemakaian pupuk. Usaha itu harus disertai dengan pemberantasan hama. Ampas dan surplus, diperlukan untuk makanan ternak ajam.
AG. 93	7	Intensipikasi penanaman djagung	Indonesia	15		15	Produksi naik 100%.	Dengan melakukan seleksi bibit.
AG. 94	8	Peternakan hewan besar (Sapi)	Luar Djawa terutama Nusa Tenggara, Madura	—	120	120	a. Mutu dan djumlah ternak bertambah baik. b. Susu.	Terutama dengan seleksi bibit (mendatangkan bibit dari luar negeri) dan perbaikan makanan hewan.
		Djumlah biaja Industri „Pangan"		13.991,80 + 11.128,20 = 25.120				

VI. POLA PROJEK BIDANG PRODUKSI SANDANG

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AH. 95	1	Pemintalan	a. Djakarta Djawa Barat Djawa Tengah Djawa Timur b. Sumatra Utara Sumatra Barat Sumatra Selatan c. Sulawesi Utara Sulawesi Selatan d. Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan e. Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur (Bali, Timor, Flores, Sumba, Sumbawa, Lombok)	3.910	3.910	7.820	1.240.000 mp. 60.000 mp. *) 400.000 mp. **) 1.700.000 mp.	130.000 mp. sudah ada sebelum Rentjana I. *) tambahan mp. dari rangka pampasan perang Djepang. **) tambahan mp. dari rentjana kredit Rusia II. Diharapkan mentjapai taraf self-generating pada tahun 1964 untuk dapat memperluas usaha.
AH. 96	2	Penjempurnaan Sandang	Tiap Daswati I Seluruh Indonesia	720	720	1.440	60 Unit dengan kapasitet (à) 15.000.000 meter/tahun & 6 Unit (à) 200 looms untuk drill, mori dan lain-lain.	Diharapkan dapat dimulai pada tahun-tahun permulaan dan telah mentjapai taraf self-generating pada tahun 1964.
AH. 97	3	Benang Djahit	Djawa Barat Sumatra Utara Kalimantan Selatan Sulawesi Selatan	110	70	180	4 pabrik (à) 500 ton: a. 2.000 ton benang djahit dengan ukuran rata No. 305/3/tahun. b. bengkel dan penggergadjian untuk kloss buatan dalam negeri.	Diharapkan pada tahun 1962 sudah dapat memprodusir benang djahit dengan 1 regu (1 000 ton/tahun) dan pada pertengahan Rentjana I 2 regu (2.000 ton/tahun).
AH. 98	4	Kapas	COTTON BELT Indonesia: (Djawa Timur, Bali, Lombok, Sumba, Sumbawa, Flores, Timor, dan Sulawesi Selatan)	900	1.500	2.400	Pokok: 100.000 ton kapas. Hutan { 27.000 ton minjak kapas. / 90.000 ton bungkil.	Diharapkan produksi setjara bertahap-tahap dimulai pada tahun ke-3 dari rentjana dan setelah tahun ke 6 supaja sudah mentjapai taraf self-generating dan memperluas areal s/d 750.000 ha untuk mentjapai target 150.000 ton.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AH. 99	5	Rayon	Sumatra Timur, Sumatra Selatan, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Tengah	8.415	8.415	16.830	a. 4 pabrik: 45.000 ton × 1 30.000 ton × 1 15.000 ton × 2 105.000 ton. b. 1 Pabrik kertas 10.000 ton.	Diharapkan telah dapat memprodusir stapel fibre pada pertengahan Rentjana I setjara bertahap-tahap dan pada achir Rentjana I dengan penghematan devisen, dari adanja 4 projek harus ditambah pula 1 pabrik induk (á) 45.000 ton/tahun untuk mentjapai target 150.000 ton/tahun.
AH 100	6	Rami	Tiap Daswati I Seluruh Indonesia	130	—	130	8.000 ton rami.	Areal disediakan 5.000 ha. Diharapkan mulai 1962 sudah dapat menghasilkan rami setjara bertahap-tahap dan mulai intensifikasi.
AH. 101	7	Peradjutan Kain Kelambu (Tule)	Tiap Daswati I	55	90	145	26.400.000 yards tule.	Segera dimulai dan diharapkan mulai produksi pada tahun ke 2 dari Rentjana I.
			Djumlah:	14.240	14.705	28.945		

Golongan dan No urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Industri Kimia Pupuk:						
AI. 102	1	Pabrik Single Superphosphate	Djawa Tengah (Tjilatjap)	300	315	615	100.000 ton/tahun.	Dimulai tahun 1964 dan telah menghasilkan tahun 1968.
AI. 103	2	Permulaan Pembikinan: a. Pabrik Amoniumsulphate b. Pabrik Amoniak c. Pabrik Asam belerang	Djawa Tengah (Tjepu) atau Djambi	500	500	1.000	a. 00.000 ton/tahun. b. 100.000 ton/tahun. c. 300.000 ton/tahun.	Tempat tergantung dari persediaan gas alam. Ditaksir dimulai setelah pertengahan Rentjana I. Pabrik-pabrik Amoniumsulphate, Amoniak dan Asam belerang selengkapnja ditaksir seluruhnja meminta biaja ± 2.300 miljar rupiah.
		Disediakan untuk permulaan industri kimia:						
AI. 104	3	Pabrik Soda abu	Djawa Timur (Gresik)				12.000 ton/tahun.	Ditaksir dimulai setelah pertengahan Rentjana I.
AI. 105	4	Pabrik asam sendawa	Djawa Tengah (Tjepu) atau Djambi				20.000 ton/tahun.	Tempat tergantung dari adanja gas alam. Dimulai pertengahan Rentjana I.
AI 106	5	Pabrik asam semut	Djawa Tengah (Tjilatjap)				6.000 ton asam semut.	Ditaksir dimulai setelah pertengahan Rentjana I.
AI. 107	6	Permulaan industri petrokimia: a. Karbit	Sumatra Utara Sumatra Selatan (Umbilin)	750	1.000	1.750	12.000 ton/tahun. 60.000 ton karbit.	s.d.a. s.d.a.
		b. Sabun Syntetis	Kalimantan Timur				10.000 ton/tahun.	s.d.a.
AI. 108	7	Djelaga	Sumatra Utara				50.000 djelaga.	s.d.a.
AI. 109	8	Insektisid D.D.T. (P.P.D. 96% up)	Djawa Timur				1.000 ton/tahun.	s.d.a.
AI. 110	9	Belerang	Djawa Barat (Telaga Bodas) (Sorek Merapi)	18	32	50		

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Tenaga Listrik:						
AI. 111	10	Pusat tenaga air	Djawa Barat (Tjikalong)	7.075	7.075	14.150	691.700 kw. 19.200 kw.	
AI. 112	11	s.d.a.	Djawa Barat (Djatiluhur)				125.000 kw	
AI. 113	12	s.d.a.	Djawa Tengah (Timo)				12.000 kw.	
AI. 114	13	s.d.a.	Djawa Tengah (Ngebel)				2.250 kw.	
AI. 115	14	s.d.a.	Djawa Barat (Plengan/Tambahan)				2.000 kw.	
AI. 116	15	s.d.a.	Sulawesi Selatan (Sawitto)				550 kw.	
AI. 117	16	Pusat tenaga Uap	Djawa Timur (Surabaja)				50.000 kw.	Telah dimulai tahun 1961 atau sebelumnja.
AI. 118	17	s.d.a.	Djawa Tengah (Semarang)				37.500 kw.	Harus selesai tahun 1965.
AI. 119	18	s.d.a.	Djakarta Raya (Tandjung Priok)				50.000 kw.	
AI. 120	19	Pusat tenaga diesel	Djakarta Raya (Kebajoran)				15.000 kw.	
AL. 121	20	Pusat tenaga diesel	41 kota				22.600 kw.	
AI. 122	21	s.d.a.	48 kota				16.100 kw.	
AI. 123	22	Pusat tenaga air	Sumatra Utara (Sigura-gura)				90.000 kw.	
AI. 124	23	s.d.a.	Kalimantan Selatan (Riamkanan)				30.000 kw.	
AI. 125	24	s.d.a.	Sumatra Barat (Manindjau)				10.000 kw.	
AI. 126	25	s.d.a.	Djawa Timur (Garung)				60.000 kw.	

Golongan dan urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AI 127	26	s.d.a.	Djawa Timur (Kali Brantas)				10.000 kw.	
AI 128	27	s.d.a.	Djawa Timur (Kali Konto)				25.000 kw.	
AI 129	28	s.d.a.	Djawa Barat (Djatiluhur tambahan)					
AI 130	29	Pusat tenaga diesel uap	Djakarta Raya (Djakarta)				25.000 kw.	Dimulai dengan penjelidikan/persiapan/ pendirian pada tahun 1961 Sebagian ketjil akan selesai setelah tahun 1968. sebagian besar pada (sebelum) tahun 1968.
AI 131	30	s.d.a.	Sumatra Selatan (Palembang)				10.000 kw.	
AI 132	31	s.d.a.	Sumatra Barat (Padang)				20.000 kw.	
AI 133	32	Pusat Turbin Gas	Djawa Tengah (Tjepu)				20.000 kw.	
AI 134	33	s.d.a.	Sumatra Barat (Umbilin atau hydro-elektrik Singkarak)				20.000 kw.	
		Minjak Rumi:						
AI 135	34	Kilang minjak	Sumatra Utara	1.500	1.600	3.100	50.000 brl/hari.	Tahun 1961 dimulai survey/pendirian dan pertengahan Rentjana I diharapkan selesai.
AI 136	35	Rehabilitasi P T M.R I.		250	200	50		
AI 137	36	Eksplorasi minjak bumi		500	—	500		
		Batu Bara:						
AI 138	37	Rehabilitasi	Sumatra Barat (Umbilin dll.)					
AI. 139	38	Perluasan	Sumatra Barat (Bukit Assam)	1.728	1.956	3.684	Produksi ditaksir sampai 1,5 djuta ton.	Segera dimulai tahun 1961. Diharapkan selesai tahun 1965.
AI. 140	39	Pembelian kapal-kapal untuk pengangkutan batu bara						

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Batu Bara:						
AI. 141	40	Pembikinan Cokes	Sumatra Barat (Umbilin)	450	450	900	45.000 + 60.000 ton/hari.	Segera dimulai tahun 1961. Diharapkan selesai tahun 1965.
		Aluminium:						
AI. 142	41	Pabrik Logam	Sumatra Utara (Kuala Tandjung)	850	899	1.749	18.000 ton Aluminium/ tahun.	Dimulai pada achir Rentjana I karena demikian penjelesaiannja dalam Rentjana II.
AI. 143	42	Rolling Mill	Djakarta Raya (Klender)				12.000 ton/tahun.	
		Pengetjoran Timah:						
AI. 144	43		Sumatra Selatan (Bangka)	142	108	250	Kapasitet 25.000 longton timah logam setahun.	Dimulai tahun 1961 dan selesai tahun 1963.
		Besi Badja:						
AI. 145	44	Tanur Tinggi	Sumatra Selatan (Lampung)	500	342	842	Produksi 30.000 ton/thn.	Dimulai pertengahan Rentjana I dan selesai sebelum 1968.
AI. 146	45	Pabrik badja	Djawa Barat (Tjilegon)	2.550	1.539	4.089	Produksi 100.000 "	
AI. 147	46	Survey pendirian tanur tinggi	Kalimantan Tenggara/Tengah				Menudju ke produksi badja 1 djuta ton/tahun.	Dibebankan pada Anggaran Belandja Routine.
AI. 148	47	**Aspal:**	Sulawesi Selatan (Buton)	300	180	480	Kapasitet 50.000 ton/th.	Dimulai 1961 dan sesegeranja bendaknja selesai.
		Pengusahaan Tambang Lainnja:						
AI. 149	48	Tembaga	Sumatra, Djawa dan Kalimantan					
AI. 150	49	Belerang	Djawa Barat (Telaga Bodas) Djawa Tengah (Dieng, Merapi) Sulawesi	300	—	300		Titik berat pada phosphate dan belerang.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pengusahaan Tambang Lainnja:						
AI. 151	50	Asbes	Maluku (Halmahera)					
AI. 152	51	Kaoline	Sumatra Selatan (Bangka)					
AI. 153	52	Kwarsa	Nagrek, Karah Djawa Tengah (Tuban) Djawa Timur (Bodjonegoro)	300	—	300		Titik berat pada phosphate dan belerang.
			Sumatra Selatan (Bangka, Biliton, Tulangbawang) Sumatra (pantai Timur)					
AI. 154	53	Phosphate	Djawa Tengah (Purwokerto, Gombong) Djawa Timur (Madura)					Dimulai dengan penjelidikan, persiapan/ pendirian pada tahun 1965 Sebagian ketjil diharapkan selesai achir Rentjana I.
AI. 155	54	**Pabrik Semen:**	Djawa Timur (Gresik)				375.000 ton.	
			Sumatra Barat (Indarung)				275.000 ton.	Perluasan Pabrik dilakukan segera.
			Sulawesi Selatan				375.000 ton.	
			Sulawesi Utara (Siantar)	2.313	1.562	3.875	250.000 ton.	
			Kalimantan Utara				200.000 ton.	Dimulai segera dan menghasilkan sebelum achir Rentjana I.
			Kalimantan Selatan				150.000 ton.	
			Lain-lain				100.000 ton.	
AI. 156	55	**Perbengkelan:**	Daerah² Industri		500	500	Penambahan djumlah dan perluasan.	Diusahakan setjara berangsur-angsur.
AI. 157	56	a. Pabrik kertas	Djawa Timur (Letjes)	66	54	120	3.000 ton setahun.	Persiapan pelaksanaan telah dimulai.
		b. s.d.a.	Djawa Timur (Setail)	357,5	292,5	650	15.000 ton setahun.	Segera dimulai tahun 1961 Survey telah berulang-ulang jang terachir pada bulan Desember 1959, idem Maret 1960.
		c. s.d.a.	Djawa Barat (Sukabumi)	385	315	700	15.000 ton setahun.	
		d. s.d.a.	Djawa Tengah (Notog)	385	315	700	15.000 ton setahun.	s.d.a. Djumlah biaja industri kertas.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AI. 158	57	Shellac	Djawa Timur Djawa Barat (Banten) Nusatenggara	24	1	25	50. ton setahun.	Dimulai tahun 1961 dan diharap menghasilkan pertengahan Rentjana I.
AI. 159	58	Penghutanan	Seluruh Indonesia	300	—	300	21.000 ha/tahun.	Diusahakan setjara berangsur-angsur.
AI. 160	59	Penggilingan Padi	Padi Centrum diluar Djawa	375	—	375	Kapasitet 1 pabrik 5.250.750 ton padi/tahun	Diusahakan untuk tahun pertama tak perlu dibangun pabrik baru. karena belum ada padi-centrum diluar Djawa.
AI. 161	60	Garam Pemerintah	Sumatra (Atjeh) Sulawesi Selatan	411	45	456	Kapasitet tiap pabrik 150.000 ton setahun.	Diusahakan mulai permulaan Rentjana I.
AI. 162	61	Garam Rakjat	Djawa Tengah (Rembang) Sumatra (Atjeh) Sulawesi Selatan Nusa Tenggara	250	—	250	± 150.000 ton setahun.	s.d.a.
AI. 163	62	Pabrik gula	Sumatra (Atjeh) Nusa Tenggara (Lombok) Sulawesi Selatan Kalimantan Timur	2.500	2.500	5.000	Kapasitet tiap pabrik 50.000 ton/tahun.	Dimulai tahun 1963. dan diharapkan menghasilkan pada achir Rentjana I.
AI. 164	63	Pabrik minjak kelapa	Sulawesi Riau Darat. Sumatra Selatan	225	275	500	Minjak bungkil. Kapasitet tiap pabrik 15.000 ton/tahun.	Berangsur-angsur.
AI. 165	64	Pabrik sabun	Sumatra Tengah Sulawesi Selatan	50	50	100	Produksi per pabrik 60.000 ton setahun.	s.d.a.
AI. 166	65	Pabrik karung goni/nipah	Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Maluku Sumatra Tengah Kalimantan Barat Nusa Tenggara Djawa Barat Djawa Timur	543	543	1.086	Kapasitet per pabrik 2½ djuta karung/tahun.	s.d.a.
AI. 167	66	Pabrik Kulit (Penjamak)		25		25	Kulit matang.	Belum perlu pendirian pabrik baru. Jang perlu adalah perluasan dan modernisasi pabrik jang sudah ada. Dimulai tahun 1961 selesai tahun 1963.

Golongan dan No urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AI. 168	67	Pabrik pembuatan sheets dan latex	Daerah² karet	50	50	100	Sheets, crepe, latex.	Produksi karet mentah dinaikkan mutunja dan dilakukan peremadjaan tanaman karet. Dimulai tahun 1961 dan diharapkan menghasilkan pertengahan Rentjana I.
AI. 169	68	Pabrik Band	Sumatra Selatan Sumatra Utara	45	45	90	Band mobil, sepeda dan lain-lain. (luar-dalam). Kapasitet per pabrik 5.000 ton setahun.	
AI 170	69	Pabrik barang dari karet	Djawa, Sumatra, Kalimantan	50	5	55	Barang-barang karet (kebutuhan rumah-tangga, industri dan lain-lain) Pabrik jang dituju 30 buah, kapasitet 1 ton/hari.	Dimulai tahun 1961 dan diharapkan menghasilkan pertengahan Rentjana I.
AI. 171	70	Pabrik Keramik	Djawa Timur (Surabaja) Sumatra Selatan (Palembang) Djakarta Djawa Tengah (Semarang) Djawa Barat (Tjirebon) Sumatra Timur (Medan) Sulawesi Selatan (Makasar) Kalimantan Selatan (Bandjarmasin)	150	150	300	Alat-alat porselen.	Segera dimulai tahun 1961 dan menghasilkan dalam pertengahan Windu.
AI. 172	71	Pemurnian Kaoline	Sumatra Selatan (Beliton)	10	10	20	Kaoline halus untuk industri-industri keramik, kertas, tekstil, sabun, karet dan untuk ekspor. Kapasitet pada achir tahun ke-6 100 ton/hari.	

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AI. 173	72	Bahan tahan api	Sumatra Selatan (Palembang)	20	20	40	Fire-clay fire-bunch. High alumina fire-bunch. Silicus fire-bunch. Kapasitet pada keadaan maksimum 1.500 ton/tahun.	Pengeluaran biaja dimulai tahun I, sebesar Rp. 160.000,— dan diachiri pada tahun II.
AI. 174	73	Pabrik Gelas/botol	Kalimantan Djawa Barat	50	55	105	Gelas minum dan botol. Kapasitet masing-masing pabrik 18.000 ton/tahun.	Dimulai pertengahan Rentjana I dan menghasilkan pada achir Rentjana I.
AI. 175	74	Pabrik bola lampu	Djawa Tengah	46	69	115	Bola lampu, tubing, rods Kapasitet bola lampu 1.000 ton/tahun, tubing dan rods 300 ton/tahun.	Dimulai tahun 1961 dan diharapkan menghasilkan pertengahan Rentjana I.
AI. 176	75	Pabrik Gelas/katja	Sumatra Selatan (Palembang)	20	20	40	Katja, katja djendela dan sebagainja. Kapasitet 18.000 ton/tahun.	s.d.a.
AI. 177	76	Pabrik botol ketjil dan ampul	sebagai perluasan P.T.I. Gelas	8	8	16	Botol ketjil dan ampul-ampul untuk keperluan pharmasi.	Dimulai permulaan Rentjana I dan menghasilkan pertengahan Rentjana I.
AI. 178	77	Landjutan projek L.P. 3 I jang belum direalisir	sebanjak 50 buah	200	175	375		
AI. 179	78	Reaktor atom	Djakarta	150	225	375	Kapasitet 1.000 + 2.000 I.R.T.	Dimulai pertengahan Rentjana I dan selesai tahun 1968.
AI. 180	79	Industri alat-alat pendidikan dan pengadjaran		250	250	500	Alat-alat pendidikan dan pengadjaran.	Ditaksir dimulai sesudah pertengahan Rentjana I. Tempat disesuaikan dengan keperluan.
AI. 181	80	Industri Telekomunikasi (permulaan)		100	100	200		Pabrik kabel dan kawat Rp. 80 djuta. Pabrik radio Rp. 60 djuta. Pabrik telepon Rp. 60 djuta.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Perindustrian Perkapalan:						
AI. 182	81	Rehabilitasi dan pembangunan dok	a. Djakarta 1. Tdj. Priok				1. 1 flooting dock dengan 15.000 ton lifty capacity.	
			b. Djawa Timur 2. Surabaja				2. 1 flooting dock dengan 15.000 ton lifty capacity.	
			c. Sulawesi 3. Makasar	1.320	—	1.320	3. 1 graving — dock 3.000 ton lifty capacity. 1 slipway — 1.500 ton lifty capacity. 1 slipway — 700 ton lifty capacity.	
			d. Sumatra Utara 4. Belawan				4. 1 dwarsbelling 700 ton lifty capacity. 1 graving — dock 3.700 ton lifty capacity.	
			e. Sumatra Selatan 5. Palembang				5. 1 graving dock 3.000 ton lifty capacity.	
			f. Sumatra Barat 6. Padang				6. 1 slipway 15.000 ton lifty capacity.	
			g. Kalimantan Barat 7. Pontianak				7. 1 slipway 15.000 ton lifty capacity.	
			h. Kalimantan Timur 8 Bandjarmasin				8. 1 slipway 1.500 ton lifty capacity.	
DJUMLAH BIAJA PROJEK BIDANG PRODUKSI INDUSTRI:				28.191.50	23.830.50	52.022		

Golongan dan No urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		TJADANGAN:						
	1	Soda Kostik	Djawa Timur (Gresik dll.)	162	162	324	18.000 ton soda/tahun.	
	2	Asam Tjuka	Djawa Tengah	22,5	22,5	45	300 ton asam tjuka/tahun.	Tergantung dari gas alam.
	3	Katja air	Djawa Timur	1	1,08	2,08	3.000 ton katja air/tahun.	
	4	Al Sulfat dan tawas	Djawa Tengah (Tjilatjap)	13,5	13,5	27	20.000 ton al sulfat/tahun.	
	5	Terusi	Sumatra Barat	1,2	1,2	2,4		
	6	Bahan Peledak	Djawa Barat (Bandung)	225	225	450		
	7	Nylon	Kalimantan Timur	500	1.080	1.580	30.000 ton.	
	8	Folyethylen	Kalimantan Timur	200	40,5	240,5		

VI. POLA PROJEK BIDANG PRODUKSI PEROBATAN

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AJ. 183	1	**Assembling Obat-obatan:** Perluasan Pabrik Kina Perluasan Lembaga Pasteur I.N.H. Vitamine A Aether Obat tjatjing (piperazine, antepar, dsb.)	Djawa Barat (Bandung)	825		825	Pusat Nasional untuk pembuatan obat. Tambahan obat-obatan dan usaha permulaan membuat bahan baku.	Mulai tahun pertama dan selesai achir tahun ke-3 Rentjana I.
AJ 184	2	**Antibiotika:** Penicilin Steptomycin Tatracyalin Chloremycetin (chlorophomicol)	Djawa Barat (Bandung)	610	500	1.110	Tambahan obat-obat terbaru sebagai pilot-projek.	Berangsur-angsur tiap tahun, mulai dari tahun pertama, selesai tahun terachir Rentjana I.
AJ 185	3	Alat² pembalut Pabrik Medical Plaster Kapas Gips	Akan ditentukan kemudian				Tambahan alat pembalut dan obat-obatan.	Mulai tahun pertama. selesai achir tahun ke-2 Rentjana I.
AJ 186	4	Lembaga protein	Akan ditentukan kemudian	240		240		—
AJ 187	5	Lembaga Penjakit Mulut dan Kuku	Djawa Timur (Surabaja)					Mulai tahun pertama dan terus hingga achir Rentjana I.
AJ. 188	6	Pabrik minjak ikan	Akan ditentukan kemudian					Mulai tahun pertama selesai tahun ke-2 Rentjana I.
				1.675	500	2.175		

VII. POLA PROJEK BIDANG DISTRIBUSI KOMUNIKASI

Golongan dan No urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AK. 189	1	**A. Djalan-djalan:** Pemeliharaan berat seluruh djalan-djalan: a. pembelian mesin² giling ± 1200 buah b. pembelian truck² ± 4000 truck c. pembelian mesin² pemetjah batu ± 200 buah d. pendidikan tenaga² pelaksana	Seluruh Indonesia	100	1.350	1.450	Tetap terdjaminnja pemeliharaan djalan-djalan dalam keadaan jang sesuai dengan keperluan lalu-lintas.	Dikerdjakan mulai tahun pertama dan setjepat mungkin diselesaikan. Biaja lainnja dibebankan kepada Anggaran Belandja routine.
AK. 190	2	**B. Djalan-djalan Baru:**						
		Antara Tjililitan dan Puntjak via Bogor	Djawa Barat	540	90	630	70 km. [1]	Dimulai segera dengan persiapan dan dilaksanakan dalam Rentjana I.
AK. 191	3	Sumatra Sebelah Timur antara Palembang, Djambi-Rengat-Pakanbaru-Rantau Prapat	Sumatra Selatan Djambi, Riau, Sumatera Utara	3.554	450	4.004	1.100 km. [1]	idem
AK. 192	4	Sumatra Sebelah Barat antara Tarutung-Padangsidempuan-Bukittinggi	Sumatra Utara Sumatra Barat	1.436	180	1.616	538 km. [1]	idem
AK. 193	5	Sumatra Sebelah Tengah antara Bukittinggi-Pajakumbuh-Pakanbaru	Sumatra Barat Riau	505	45	550	220 km. [1]	idem
AK. 194	6	antara Poso-Perigi	Sulawesi Utara	480	45	525	150 km. [2]	Dimulai segera dengan persiapan dan dilaksanakan dalam Rentjana I.
AK. 195	7	antara Tomini-Marisa	Sulawesi Utara	480	45	525	150 km. [2]	[2] Dengan ini tertjapai hubungan darat langsung antara Makasar — Menado.
AK. 196	8	antara Tomini-Toli²	idem	351,25	33,75	385	110 km. [3]	[3] Menghubungkan daerah jang terletak diteluk Tomini dengan Laut Sulawesi.
AK. 197	9	P. Sumbawa	Nusa Tenggara Barat	80	—	80	40 km.	Dimulai dengan segera persiapan dan dilaksanakan dalam Rentjana I.

[1] Sebagian dari djalan-djalan ini sudah ada, hanja perlu disesuaikan dengan keperluan lalu-lintas sekarang.

Golongan dan No urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AK 198	10	1. Flores 2. P. Sumba	Nusa Tenggara Timur	80 206,25	— 33,75	80 240	40 km. 120 km.	idem idem
AK 199	11	P Halmahera	Maluku/Irian Barat	316,25	33,75	350	175 km.	idem
		Pembangunan djalan-djalan baru (persiapan dalam Rentjana fase I).						
AK 200	12	Djalan Takengon-Blangkedjeran-Kota-djanc (Atjeh)	Atjeh	—	—	—	200 km.	Persiapan dalam Rentjana fase I.
AK 201	13	Djalan Tajan-Telok Melano Djalan Siluas-Balai-Karangan-Nangah Badau-Putussibau	Kalimantan Barat	—	—	—	765 km.	idem
AK 202	14	Djalan Sintang-Nangah Serawai-Batas Kal Barat/Kal Tengah Puruktjahu-Muara Tewe-Ampah	Kalimantan Barat Kalimantan Tengah	—	—	—	650 km.	idem
AK 203	15	Gorontalo-Kotamobagu	Sulawesi Utara	—	—	—	160 km.	idem
		C. Modernisasi djalan aspal negara:						**Djumlah biaja B Rp. 8.985 djuta.**
AK 204	16	1. Atjeh	Atjeh	19	—	19	20 km.	Segera didjalankan dan dilaksanakan dalam Rentjana I.
AK 205	17	2. Sumatra Utara	Sumatra Utara	342,95	—	342,95	361 km.	
AK 206	18	3 Sumatra Tengah	Sumatra Barat Riau & Djambi	95	—	95	100 km.	
AK 207	19	4 Sumatra Selatan	Sumatra Selatan	180,5	—	180,5	190 km.	Djalan-djalan jang akan dimodernisasi ini adalah djalan-djalan aspal negara dalam masing-masing Daerah Tingkat I jang merupakan bagian jang rusak atau kurang kuat.
AK 208	20	Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	128,7	—	128,7	143 km.	
AK. 209	21	Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	18	—	18	20 km.	
AK 210	22	Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	45	—	45	30 km.	

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AK. 211	23	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	280,5	—	280,5	330 km.	
AK. 212	24	Sulawesi Utara	Sulawesi Utara					
AK. 213	25	Bali	Bali	187,5	—	187,5	250 km.	
AK. 214	26	Nusatenggara Barat	Ns. Tenggara Barat					
AK. 215	27	Nusatenggara Timur	Ns. Tenggara Timur					
AK. 216	28	Djawa Barat	Djawa Barat	229,5	—	229,5	270 km.	
AK. 217	29	Djawa Tengah	Djawa Tengah	153,85	—	153,85	181 km.	
AK. 218	30	Djawa Timur	Djawa Timur	11,05	—	11,05	13 km.	
AK. 219	31	Daerah Istimewa Jogjakarta	D.I. Jogjakarta	1,7	—	1,7	2 km.	Djumlah biaja C Rp. 1.693,25 djuta.
		D. Perkuatan djalan kerikil negara:						
AK. 220	32	1. Atjeh	Atjeh	276	—	276	470 km.	Untuk didjadikan djalan aspal.
AK. 221	33	2. Sumatra Utara	Sumatra Utara	150	—	150	250 km.	
AK. 222	34	3. Sumatra Tengah *)	Sumatra Tengah	462	—	462	780 km.	
AK. 223	35	4. Sumatra Selatan	Sumatra Selatan	426	—	426	720 km.	
AK. 224	36	5. Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	114,5	—	114,5	219 km.	
AK. 225	37	6. Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	60,5	—	60,5	110 km.	
AK. 226	38	7. Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	214	—	214	400 km.	
AK. 227	39	8. Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	27,5	—	27,5	50 km.	
AK. 228	40	9. Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan					
AK. 229	41	10. a. Sulawesi Utara	a. Sulawesi Utara	784	—	784	1.580 km.	
AK. 230	42	11. b. Sulawesi Utara	b. Sulawesi Utara					

*) Termasuk Sumatra Barat, Riau dan Djambi.

Golongan dan No urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AK. 231	43	12. Bali	Bali					
AK. 232	44	13. Nusatenggara Barat	Nusatenggara Barat	32	—	32	80 km.	
AK. 233	45	14. Nusatenggara Timur	Nusatenggara Timur					
AK. 234	46	15. Djawa Barat	Djawa Barat	5	—	5	10 km.	
AK. 235	47	16. Djawa Tengah	Djawa Tengah	10	—	10	20 km.	
AK. 236	48	17. Djawa Timur	Djawa Timur	20	—	20	40 km.	Djumlah biaja D Rp. 2.581,50 djuta.
		E. Perkuatan djalan kerikil Propinsi:						
AK. 237	49	1. Atjeh	Atjeh	582	—	582	970 km.	Supaja sesegeranja dilaksanakan dalam Rentjana I. Untuk didjadikan djalan aspal.
AK. 238	50	2. Sumatra Utara	Sumatra Utara	1.350	—	1.350	2.250 km.	
AK. 239	51	3. „ Tengah	Sumatra Barat, Riau & Djambi	1.266	—	1.266	2.110 km.	
AK. 240	52	4. „ Selatan	Sumatra Selatan	1.380	—	1.380	2.300 km.	
AK. 241	53	1. Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	137,75	—	137,75	225 km.	
AK. 242	54	2. „ Timur	Kalimantan Timur	55	—	55	100 km.	
AK. 243	55	3. „ Barat	Kalimantan Barat	368,5	—	368,5	670 km.	
AK. 244	56	Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan					
AK. 245	57	„ Tengah	Sulawesi Tengah	300	—	300	600 km.	
AK. 246	58	„ Utara	Sulawesi Utara					
AK. 247	59	Nusatenggara Barat	Nusatenggara Barat					
AK. 248	60	„ Timur	Nusatenggara Timur	756	—	756	1.890 km.	
AK. 249	61	Maluku/Irian Barat	Maluku/Irian Barat	65	—	65	130 km.	
AK. 250	62	1. Djawa Barat	Djawa Barat	465	—	465	930 km.	
AK. 251	63	2. Djawa Tengah	Djawa Tengah	505	—	505	1.010 km.	

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AK. 252	64	3. Djawa Timur	Djawa Timur	560	—	560	1.120 km.	
AK. 253	65	4. Daerah Istimewa Jogjakarta	D.I. Jogjakarta	325	—	325	650 km.	Djumlah biaja E Rp. 8.101,25 djuta.
		F. Perkuatan djalan Daswati II (andjuran P.N.M.K.B.):						
AK. 254	66	1. Atjeh	1. Atjeh	240	—	240	400 km.	Supaja sesegeranja diselesaikan dalam Rentjana I.
AK. 255	67	2. Sumatra Utara	2. Sumatra Utara	240	—	240	400 km.	
AK. 256	68	3. Sumatra Barat	3. Sumatra Barat	110	—	110	180 km.	
AK. 257	69	4. Sumatra Selatan	Sumatra Selatan	240	—	240	400 km.	
AK. 258	70	5. Djambi	Djambi	90	—	90	150 km.	
AK. 259	71	6. Riau	Riau	60	—	60	100 km.	
AK. 260	72	1. Kalimantan Selatan	Kalimantan Selatan	165	—	165	300 km.	
AK. 261	73	2. Kalimantan Timur	Kalimantan Timur	110	—	110	200 km.	
AK. 262	74	3. Kalimantan Barat	Kalimantan Barat	110	—	110	200 km.	
AK. 263	75	4. Kalimantan Tengah	Kalimantan Tengah	55	—	55	100 km.	
AK. 264	76	1. Sulawesi Selatan	Sulawesi Selatan	230	—	230	500 km.	
AK. 265	77	2. Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	219	—	219	400 km.	
AK. 266	78							
AK. 267	79	1. Nusatenggara Barat	Nusatenggara Barat	60	—	60	150 km.	
AK. 268	80	2. Nusatenggara Timur	Nusatenggara Timur	60	—	60	150 km.	
AK. 269	81	3. Bali	Bali	60	—	60	150 km.	
AK. 270	82	Maluku/Irian Barat	Maluku/Irian Barat	75	—	75	150 km.	
AK. 271	83	Djawa Barat	Djawa Barat	200	—	200	400 km.	
AK. 272	84	Djawa Tengah	Djawa Tengah	150	—	150	300 km.	
AK. 273	85	Djawa Timur	Djawa Timur	200	—	200	400. km.	Djumlah biaja F = Rp. 2.855 djuta.
		G. Djembatan-djembatan dan kapal-kapal Ferry:						Sesegeranja dilaksanakan dalam Rentjana I.
AK. 274	86	Pembangunan dan penggantian djembatan-djembatan besar (termasuk pelajaran) dan kapal-kapal Ferry	Seluruh Indonesia	600	400	1.000 *)	1.000 km.	*) Dapat djuga dipergunakan untuk djalan dimana perlu.
		Angkutan Motor.						
AK. 275	87	Penambahan truck dan Bus	Seluruh Indonesia		2.400	2.400	4.000 kendaraan/tahun.	Dimaksudkan sebagai kredit untuk keperluan pemeliharaan kendaraan selama 2 tahun; ± devisen Rp. 1.200 djuta setahun.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AK 276	88	Perbengkelan	Seluruh Indonesia	—	1.700	1.700	20 first class shop equipment. 60 second class shop equipment. 100 third class shop equipment. 700 service — station.	
AK 277	89	Assembling	Djakarta Raya Djakarta Djawa Timur Surabaja Sumatra Utara Medan Sumatra Selatan Palembang Sulawesi Selatan Makasar	40	250	290	Perlengkapan tjukup untuk assembling ± 10.000 kendaraan setahun.	Djakarta Surabaja Medan Palembang Makasar } baru tambahan perlengkapan. Djumlah biaja untuk Angkutan Motor Rp. 4.424 djuta.
AK 278	90	Pembikinan Spare-part		20	14	34	1 Pabrik body-building.	
		Perhubungan Darat Kereta Api.						
AK 279	91	Intensifikasi Kemampuan mengangkut						
AK 280	92	Intensifikasi efficiency kerdja dan mutu pegawai	Djawa Barat Djawa Tengah Djawa Timur Sumatra Selatan Sumatra Barat Sumatra Utara Atjeh	3.000	4.000	7.000	(Peninggian frekwensi lalulintas kereta api dan (lain-lain.	Segera dimulai tahun 1961, berangsur-angsur sampai achir Rentjana I Djumlah biaja untuk Kereta Api Rp. 7.000,— djuta.
		Pembangunan Dinas Pos.	Seluruh Indonesia				**Modernisasi** dan perluasan hubungan pos. (Djumlah biaja: Rp. 1.090— Dev 500. Djumlah: 1.590).	Dimulai tahun 1961 dan diharapkan selesai tahun 1968.
AK 281	93	Perluasan Gedung		560	140	700		
AK 282	94	Kendaraan bermotor		—	200	200		
AK 283	95	Alat-alat Perkakas		120	80	200		
AK 284	96	Mekanisasi/Otorisasi		—	25	25		
AK 285	97	Kantor Pos Kereta Api		—	50	50		
AK 286	98	Pos Cheque/Giro		10	5	15		
AK 287	99	Pos Desa/Ketjamatan		400	—	400		Djumlah biaja Dinas Pos Rp. 1.590 djuta.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dinas Telegrap.						
AK. 288	100	Pembangunan perluasan sentral-sentral dan djaring-djaring TELEX dalam negeri	Seluruh Indonesia	46	99	145	Penambahan hubungan telex	Segera dimulai sampai selesai tahun 1965.
AK. 289	101	Alat-alat untuk menghubungkan djaring TELEX dalam negeri dengan djaring TELEX luar negeri	Seluruh Indonesia	0,8	15,5	16,3	Djakarta main Traffic centre Untuk 5 channels keluar negeri, jaitu telexposten dengan bedieningtoestel dan Telex.	Mulai 1962 sampai 1963.
AK. 290	102	Mendirikan satu djaring TELEX-FAX	Seluruh Indonesia	5	22,5	27,5	Kota-kota Besar Antara Kantor-kantor Pos Tambahan dan Kantor-kantor Ibu kota.	Mulai 1962 sampai 1964.
AK. 291	103	Memperluas dinas Telegrap sampai di Ibu-ibu kota Ketjamatan	Seluruh Indonesia	25	15	40	Perluasan hubungan telegrap sampai Ibu kota Ketjamatan	Mulai 1962 sampai 1968.
AK. 292	104	Memperlengkapi Kantor Telegrap baru di Djakarta sebagai Main Traffic centre untuk perhubungan Telegrap dalam Negeri	Djakarta Raya	55	90	145	Perlengkapan Kantor Telegrap Djakarta.	Mulai 1964 sampai 1966.
AK. 293	105	Desentralisasi dari pada pembestelan telegram-telegram di Djakarta Raya	Djakarta Raya	24	—	24	idem	Mulai 1965 sampai 1966.
AK. 294	106	Mendirikan gedung baru untuk kantor Telegrap di Bandung jang merupakan Main Traffic Centre hubungan Telegrap luar negeri	Djawa Barat (Bandung)	133	60	193	Gedung baru.	Mulai 1962 sampai 1963.
AK. 295	107	Memperlengkapi Kantor Telegrap baru Makasar	Sulawesi (Makasar)	40	20	60	Perlengkapan Kantor Telegrap Makasar.	Mulai 1963 sampai 1964. Dimulai biaja Dinas Telegrap Rp. 650,8 djuta.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dinas Telepon.	Seluruh Indonesia					
AK. 296	108	Mengotomatisasi telepon		1.500	1.531,4	3.031,4		Segera dimulai tahun 1961 sampai selesai dalam Rentjana I.
AK. 297	109	Central telepon dengan Perluasan manual exchange		191	224	415		idem
AK. 298	110	Pemasangan minta otomat sebagai telepon umum distasiun-stasiun bus, stasiun K.A., pasar-pasar dan lain-lain		0,2	45	45,2		Mulai tahun 1961, selesai tahun 1968.
AK. 299	111	Melipatgandakan Channels dalam Perhubungan antara kota-kota dengan menempatkan hubungan sinar Radio dan open wireline carier		97	375	472	Penambahan/penjempurnaan pesawat/hubungan telepon.	idem
AK. 300	112	Menjempurnakan/memperluas lin-lin interlokal dan distrik		120,6	265	385,6		idem
AK. 301	113	Mekanisasi Administrasi Telepon		4	58	62		idem
AK. 302	114	Pembangunan bekas-bekas djaring telepon Pamongpradja		141	72	213		Mulai tahun 1961, selesai tahun 1967.
AK. 303	115	Menghubungkan Kantor-kantor Tjamat dan sebagainja dengan Kantor-kantor Telepon jang terdekat		180	100	280		Mulai tahun 1961, selesai tahun 1968. Djumlah biaja Dinas Telepon Rp. 4.904,2 djuta.
		Dinas Radio.	Seluruh Indonesia					
AK. 304	116	Instalasi Radio untuk perhubungan dengan daerah-daerah terpentjil		60	31,5	91,5	Penambahan hubungan radio.	Mulai tahun 1961, selesai tahun 1968.
AK. 305	117	Penambahan Instalasi Radio untuk dapat membuka perhubungan antara Ibu-ibu kota Propinsi dengan Djakarta selama 24 djam		5	20	25		Mulai tahun 1961, selesai tahun 1963.

Golongan dan No urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AK. 306	118	Mendirikan stasiun-stasiun pemantjar radio baru dan stasiun penerima radio baru		87,5	50	137,5		Mulai tahun 1961, selesai tahun 1964.
AK. 307	119	Perhubungan Radio photo service dalam negeri		6	13,5	19,5		Mulai tahun 1961, selesai tahun 1962.
AK. 308	120	Mendirikan Radio monitoring stasiun dipelbagai tempat di Indonesia		20	22,5	42,5		Mulai tahun 1961, selesai tahun 1968
AK. 309	121	Memperlengkapi Overseas Telephone Centre		21	50	71		Mulai tahun 1963, selesai tahun 1964.
AK. 310	122	Perluasan instalasi-instalasi radio untuk memperluas perhubungan dengan luar negeri terutama negara-negara Asia-Afrika (Bandung)		7	25	32		Mulai tahun 1963, selesai tahun 1964.
AK. 311	123	Menara-menara antena-antena dan alat-alat tambahan		67	10	77		Mulai tahun 1961, selesai tahun 1968.
AK. 312	124	Perhubungan untuk Departemen Luar Negeri		13	17	30		Mulai tahun 1961, selesai tahun 1968. Djumlah biaja Dinas Radio Rp 526 djuta.
		Perhubungan Laut, Pelajaran Niaga.	Seluruh Indonesia					
AK. 313	125	Pembangunan Armada untuk pelajaran pantai dan Samudra			5.850	5.850	260.000 D.W.T.	Diharapkan sudah dapat beroperasi mulai tahun 1963 dan tertjapai kapasitet 260.000 D.W.T. dalam Rentjana I.
AK. 314	126	Untuk 2 à 3 bulan modal kerdja bagi 260.000 dwt armada		440	—	440		Anggaran untuk keperluan charter tidak dimasukkan disini, karena pengeluaran charter lebih termasuk ongkos „routine exploitasi kapal-kapal" dan tidak termasuk instalasi.
AK. 315	127	Motorisasi kapal lajar (armada semut)		346	520	866	Menambah frekwensi lalulintas perairan.	Segera dimulai dan diharapkan selesai pertenganan Rentjana I.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Keamanan Pelajaran.	Seluruh Indonesia					
AK. 316	128	Rehabilitasi dan pembangunan dari: a. menara-menara dan mertjusuar b. 16 stasiun radio dan alat c. 4 kapal rambu d. 2 kapal hydrografic e. bengkel-bengkel kapal f. kapal-kapal tournee kapal-kapal pandu kapal-kapal patroli sekotji-sekotji dan sebagainja g. asrama-asrama pelaut		989	538	1.527	Terdjaminnja keselamatan lalu-lintas laut.	Segera dimulai dan diharapkan Keselamatan pelajaran dilautan Indonesia bertambah baik.
		Kepelabuhan.	Seluruh Indonesia					Dimulai dengan segera dan diharapkan selesai dalam Rentjana I.
AK 317	129	Pembelian: a. port-equipment b. 6 kapal keruk beserta pembangunan bengkel-bengkel-nja		750	—	750	Port-equipment 6 kapal keruk dan lain-lain	
AK. 318	130	Pembangunan Pelabuhan-pelabuhan		700	—	700	Penambahan/perbaikan pelabuhan.	
		Perhubungan Udara. Perbaikan/perpandjangan pembangunan lapangan terbang					Fasilitas-fasilitas penerbangan.	Dimulai tahun 1961 dan selesai tahun 1968 = 8 tahun.
AK. 319	131	a. Projek perbaikan dan perpandjangan dari 6 (enam) lapangan terbang guna pesawat-pesawat Convair dan Lockheed Electra: Ambon Menado Kupang Balikpapan Pakanbaru Pontianak	Maluku Sulawesi Utara Nusa Tenggara Timur Kalimantan Timur Riau Kalimantan Barat	140	—	140		

Golongan dan No urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AK. 320	132	b. Projek Waru, sebagai pengganti lapangan terbang Perak	Djawa Timur Surabaja	80	20	100		
AK. 321	133	c. Modernisasi lapangan terbang Internasional Kemajoran	Djakarta Raya Djakarta	500	100	600		
AK. 322	134	d. Pembangunan lapangan-lapangan terbang lainnja diseluruh Indonesia guna Convair/Lockheed Electra						
AK. 323	135	Pembangunan lapangan-lapangan terbang diseluruh Indonesia guna pesawat-pesawat type DC-3		150	—	150		
AK. 324	136	Perlengkapan lapangan-lapangan terbang:						
		a. Alat-alat pemadam kebakaran						
		b. Power — Suply						
		c. Alat-alat penerangan landasan dan lain-lain		255	235	490		
		d. Pembangunan penjempurnaan bangunan-bangunan unit lapangan terbang guna keperluan operasionil						
AK. 325	137	Perbengkelan pesawat-pesawat terbang		25	50	75		Dimulai dengan segera.
AK. 326	138	Pembelian pesawat-pesawat penggantí Dakota/DC-3 lengkap dengan Spareparts dan lain-lain		—	900	900		Dikerdjakan berangsur-angsur dalam Rentjana I.
AK. 327	139	Gedung-gedung untuk gudang-gudang, hanggar-hanggar, perumahan dan lain-lain jang diperlukan untuk penerbangan		500	—	500		Dikerdjakan berangsur-angsur dalam Rentjana I.

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah (djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Keamanan Penerbangan.						
AK. 328	140	a. Aeronautical Wired Telecomunication Network					Terdjaminnja keselamatan penerbangan.	
AK. 329	141	b. Bangunan-bangunan dan fasilitet-fasilitet guna alat-alat tersebut dalam a		200	200	400		
AK 330	142	c. Penjelenggaraan Navigation Guide		100	—	100		Guna penjelenggaraan projek diperlukan biaja lang lebih sedikit.
AK. 331	143	d. Fasilitet-fasilitet lembaga Meteo dan Geophysik		100	125	225		
AK. 332	144	e. Untuk keperluan "research and Resque"		100	300	400		
				—	375	375		
		DJUMLAH SELURUHNJA DISTRIBUSI KOMUNIKASI:		36.166.85	24.015,15	60.182		Djumlah biaja Perhubungan Udara: Rp. 4.485 djuta.
		TJADANGAN:						
		1. Pembuatan/penjempurnaan kurang-lebih 40 lapangan terbang guna feederlines		40	—	40		
		2. Pendidikan kader-kader penerbangan		458	307	765		
		3. Pembelian pesawat jet untuk penerbangan Internasional. termasuk keperluannja untuk itu		—	1.080	1.080		

VIII. POLA PROJEK BIDANG KEUANGAN DAN PEMBIAJAAN

Golongan dan No. urut	Nomor bidang	Nama projek	Tempat	Biaja rupiah (djutaan)	Biaja devisen rupiah-(djutaan)	Djumlah biaja rupiah (djutaan)	Hasil	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AL. 333	1	Timah		168	600	768	2.000 ton setiap tahun, dalam 6 tahun = 6 × 2.000 = 12.000 ton.	Dimulai tahun 1961 dan telah mulai menghasilkan tahun 1963. Keterangan lebih landjut dapat dilihat dalam garis besar dan pendjelasan bidang produksi-industri.
AL. 334	2	Bank Pembangunan Desa		10.000	—	10.000	a. memperbaiki perekonomian masjarakat desa b. meninggikan produksi. c. menghilangkan pengaruh idjon.	Anak Bank Pembangunan Indonesia. Dimulai tahun 1961, dan dalam empat tahun seluruh modal telah berputar.
AL. 335	3	Tourisme		350	150	500	Ditaksir $ 45 djuta selama Rentjana I.	Dimulai tahun 1961, dan selesai achir 1953. Keterangan lebih landjut dapat dilihat dalam garis besar dan pendjelasan bidang mental rochani dan kebudajaan. serta bidang distribusi.
Djumlah:				10.518	750	11.268		

ICHTISAR SUMBER PEMBIAJAAN PEMBANGUNAN SEBESAR Rp. 240 MILJAR
(PROJEK B)

Penerimaan						Pengeluaran			
No	50% berupa dollar ($ 2.700 djuta)	Kolom I $ djuta	No	50% berupa rupiah (Rp. 120 miljar)	Kolom II Rp. miljar	No.	Berupa rupiah	Kolom III Rp. djuta	Keterangan
B 1	Minjak bumi a) hasil produksi/ pengolahan b) berasal dari modal kerdja jang masuk dalam negeri	1.180.— 750.—	B 9	Hasil sanering	10.— [1]	1	Karet: Pembelian untuk di ekspor	1.500.— [2]	*) Kekurangan akan fonds rupiah pada permulaan rentjana ditutup dengan pindjaman luar negeri dan dibelikan pada barang konsumsi untuk memperoleh rupiah dari masjarakat. Sesudah tahun ketiga dan keempat produksi sudah berdjalan dan tidak perlu lagi memindjam: kekurangan rupiah dipenuhi dari returns perusahaan-perusahaan.
B 2	Kaju	52.5	B 10	Perusahaan Negara: Tiap tahun Rp. 4 miljar, selama 8 tahun = 8 × Rp. 4 miljar =	32.—	2	Kopra: Pembelian untuk di ekspor	2.000.— [3]	[1] Telah disediakan oleh pemerintah sebagai hasil tindakan moneter tanggal 25-8-1959.
B 3	Perikanan Laut	12.5	B 11	Simpanan masjarakat: (tabungan, asuransi, koperasi) tiap tahun Rp. 1 miljar selama 8 tahun = 8 × Rp. 1 miljar =	8.—	3	Pengganti modal kerdja dari usaha minjak bumi jang masuk dalam negeri	33.750.— [4]	[2] Usaha memberantas perdagangan gelap karet.
B 4	Kopra	76.—	B 12	Pendjualan saham dan obligasi: Setiap tahun Rp. 1 miljar, selama 8 tahun = 8 × Rp. 1 miljar =	8.—	4	Timah: Pembelian dan biaja 2 kapal keruk selama 8 tahun	768.— [5]	[3] Usaha memberantas perdagangan gelap kopra.
B 5	Karet	320.—	B 13	Pendjualan barang modal: Tiap tahun Rp. 2 miljar, selama 8 tahun = 8 × Rp. 2 miljar =	16.—	5	Tourisme	565.— [6]	[4] Modal kerdja usaha minjak bumi jang masuk dalam negeri sebesar $ 750 djuta.
B 6	Timah	15.—	B 14	Pendjualan barang konsumsi: Tiap tahun Rp. 5,75 miljar, selama 8 tahun = 8 × Rp. 5,75 miljar =	46.—				[5] Sebagian dari djumlah tersebut berupa devisen sebesar Rp. 600 djuta.
B 7	Alumina	11.5							[6] Sebagian dari djumlah tersebut berupa devisen.
B 8	Tourisme	45.—							
—	KEKURANGAN	237,5							
	Djumlah:	2.700.—		Djumlah:	120.—		Djumlah:	38.583.—	

KEKURANGAN: Kolom I $ 237,5 djuta
Kolom II Rp. 16 miljar + Rp. 46 miljar = Rp. 62.000 djuta
Kolom III Rp. 38.583 djuta

Djumlah *) Rp. 100.583 djuta + $ 237,5 djuta

REKAPITULASI
VOLUME PEMBANGUNAN

No.	Bidang	Biaja djuta rupiah terperinji	Djumlah biaja djuta rupiah	%	Djumlah projek	
					Projek	Tjadangan
I.	Mental + Rohani		17.815	7.42		
	1. Kebudajaan	1.554			9	5
	2. Pendidikan	16.261			43	14
II.	Penelitian		2.653	1.11	16	—
III.	Kesedjahteraan Rakjat		6.188	2.58	11	—
IV.	Pemerintahan		3.632	1.51	6	3
V.	Pembangunan Chusus		30.000	12.50	1	—
VI.	Produksi		108.262	45 11		
	1. Pangan	25.120			8	—
	2. Sandang	28.945			7	—
	3. Industri	52.022			81	8
	4. Perobatan	2.175			6	—
VII.	Distribusi (Distr. + Komunikasi)		60.182	25.07	144	3
VIII	Keuangan termasuk Tourisme		11.268	4,70	3	—
	Djumlah		240.000	100%	335	33

Selandjutnja mengenai gambaran penjebaran projek-projek utama dari Pembangunan Nasional Semesta Berentjana diseluruh Indonesia dapat dilihat dari daftar disebelah.

LOKASI PENJEBARAN PROJEK PEMBANGUNAN

	Djenis usaha	Daswati I																						
		Atjeh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Riau	Djambi	Djakarta Raya	Djawa Barat	Djawa Tengah	D.I. Jogjakarta	Djawa Timur	Kal Barat	Kal Selatan	Kal Timur	Kal Tengah	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Utara	Sulawesi Selatan	Maluku	Irian Barat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	I. Mental Rohani.																						
	Pendidikan:																						
1.	Universitas	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	—	×	—	—	×	—	—	—	×	×	—
2.	Sekolah Tehnik Menengah	×	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×	×	×	—	×	—	—	×	×	×	—
3.	Sekolah Guru Pengadjaran Tehnik (S.G.P.T.)	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4.	Kursus ahli Tehnik	—	×	—	—	—	—	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—	—
5.	Sekolah Tehnik									×		×											
6.	Akademi Pekerdjaan Umum								Seluruh Indonesia														
7.	„ Pertanian	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8.	„ Pembangunan Veteran	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	Sekolah Tekstil Tinggi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10.	Akademi Gula Negara	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11.	Sekolah Analist	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12.	Sekolah Kedjuruan Perhotelan	—	×	—	×	—	—	×	×	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13.	Sekolah Menengah Pertanian Atas	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14.	Kursus Karantina	—	×	×	×	—	—	—	×	—	×	×	—	×	—	—	—	—	—	—	×	×	—
15.	Sekolah Kehutanan Menengah Atas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—
16.	Sekolah Perikanan Menengah Atas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	Sekolah Kehewanan Menengah Atas	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18	Sekolah Guru Atas											×											
19.	Sekolah Guru Kepandaian Puteri								Seluruh Indonesia														
20	Sekolah Rakjat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	Pemberantasan Buta Huruf Kursus Kemasjarakatan dan Perpustakaan								Seluruh Indonesia														
	Kebudajaan:								Seluruh Indonesia														
22.	Penggalian kekajaan Kebudajaan	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	—	—	×	×	—
23.	Museum Nasional	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
24.	Gallery kesenian nasional	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
25.	Perpustakaan Nasional	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
26.	Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
27.	Taman Kebudajaan								Seluruh Indonesia														
28.	Terdjemahan Kitab Sutji Al Qur'an	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29.	Terdjemahan Kitab Sutji Bybel	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—
30	Terdjemahan Kitab Sutji Weda dan Wiharma	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—
	Penelitian.																						
31	Lembaga Kimia	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
32.	Lembaga Fisika	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Djenis usaha	Daswati I																					
		Atjeh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Riau	Djambi	Djakarta Raya	Djawa Barat	Djawa Tengah	D.I. Jogjakarta	Djawa Timur	Kal. Barat	Kal. Selatan	Kal. Timur	Kal. Tengah	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Utara	Sulawesi Selatan	Maluku	Irian Barat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
33.	Lembaga Geologi/Pertambangan	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
34.	„ Metalurgi	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
35.	„ Elektronika	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
36.	Penelitian dibidang Geologi/Pertambangan	Seluruh Indonesia																					
37.	Aerial Survey	Seluruh Indonesia																					
38.	Penelitian dibidang Industri	Seluruh Indonesia																					
39.	Penelitian dibidang Produksi Pangan	Seluruh Indonesia																					
40.	Penelitian dibidang Perkebunan dan Kehutanan	Seluruh Indonesia																					
41.	Penelitian dilapangan ekonom. dan kemasjarakatan	Seluruh Indonesia																					
	III. Kesedjahteraan.																						
42.	Rumah Sakit Umum ketjil	Seluruh Indonesia																					
43.	Poliklinik	Seluruh Indonesia																					
44.	Rumah Sakit Umum Pusat	—	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	—	×	—	×	×	-
45.	Perumahan	Seluruh Indonesia																					
46.	Perluasan kota	Seluruh Indonesia																					
47.	Air minum	—	—	×	—	—	×	—	—	×	—	×	×	×	—	×	—	—	—	—	×	—	-
48.	Kesedjahteraan Sosial (Rehabilitasi Penderita nafjat)	Seluruh Indonesia																					
49.	Lembaga Sosial Desa (termasuk penerangan dan lain-lain)	Seluruh Indonesia																					
50.	Kesedjahteraan Tani dan Nelajan	Seluruh Indonesia																					
	IV. Pemerintahan.																						
51.	Transmigrasi	Seluruh Indonesia																					
52.	Koperasi	Seluruh Indonesia																					
53.	Pendjara Modern	Seluruh Indonesia																					
54.	Pembangunan Masjarakat Desa	Seluruh Indonesia																					
55.	Polisi	Seluruh Indonesia																					
	V. Pembangunan chusus.																						
56.	Projek chusus	Seluruh Indonesia																					
	VI. Produksi.																						
	Industri:																						
57.	Industri Kimia Pupuk	—	—	—	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
58.	Industri Kimia lainnja	—	×	—	×	—	×	—	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
59.	Tenaga Listrik	—	—	×	×	×	—	×	×	×	×	—	—	—	×	×	—	—	×	—	—	—	—
60.	Kilang Minjak	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
61.	Batu Bara	—	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	Djenis usaha	Daswati I																						
		Atjeh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Riau	Djambi	Djakarta Raya	Djawa Barat	Djawa Tengah	D.I. Jogjakarta	Djawa Timur	Kal Barat	Kal Selatan	Kal Timur	Kal Tengah	Bal.	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Utara	Sulawesi Selatan	Maluku	Irian Barat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
62.	Aluminium	—	×	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
63.	Pengetjoran Timah	—	—	—	×	—	—	—	×	—	—	—	—	—	×	×	—	—	—	—	×	—	—
64.	Besi Badja	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65.	Aspal	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	×	×	—	—	—	—	—	—	—
66.	Barang Tambang lainnja	—	×	×	×	×	×	—	×	×	×	—	×	×	×	×	—	—	—	—	×	×	—
67	Pabrik Semen	—	—	×	—	—	—	—	—	—	×	—	—	×	—	—	—	—	—	×	×	—	—
68	Berbagai-bagai Industri Ringan							Seluruh Indonesia															
	Pangan:																						
69	Menambah padi sentra							Seluruh Indonesia															
70.	Pengairan Rehabilitasi Pelandjutan Perluasan	×	×	×	×	—	—	—	×	×	×	×	×	×	—	×	—	×	—	—	×	×	—
71	Peternakan ajam							Seluruh Indonesia															
72	Mendirikan gudang dan lumbung padi							Seluruh Indonesia															
73	Perikanan Darat	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—
74	Intensipikasi penanaman kedelai	—	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
75	Intensipikasi penanaman Djagung							Seluruh Indonesia															
76	Peternakan hewan besar (sapi)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	×	—	×	—	—	—	—
	Sandang:																						
77	Pemintalan							Seluruh Indonesia															
78.	Penjempurnaan sandang	—	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—
79	Benang Djahit							Seluruh Indonesia															
80.	Kapas	—	×	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	×	—	—
81	Rajon	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—
82.	Rami	—	×	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	×	×	×	×	—	×	—	—
83	Peradjutan (Klambu)							Seluruh Indonesia															
	Perobatan:							Seluruh Indonesia															
84.	Assembling Obat-obatan	—	×	×	—	—	—	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—
85.	Anti biotika	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	×	—
86.	Lembaga penjakit kuku dan mulut	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
87	Lembaga Protein	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
88	Pembikinan minjak ikan	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII.	**Distribusi/Komunikasi.**																						
89.	Pemeliharaan berat seluruh djalan							Seluruh Indonesia															
90.	Djalan-djalan baru	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	—	×	×	×	×	—	×	×	×	×	×	×
91	Modernisasi djalan aspal negara	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	×	—	—	×	×	—	—
92	Perkuatan djalan kerikil negara							Seluruh Indonesia															
93	Perkuatan djalan kerikil propinsi							Seluruh Indonesia															

	Djenis usaha	Daswati I																					
		Atjeh	Sumatera Utara	Sumatera Barat	Sumatera Selatan	Riau	Djambi	Djakarta Raya	Djawa Barat	Djawa Tengah	DI Jogjakarta	Djawa Timur	Kal Barat	Kal Selatan	Kal Timur	Kal Tengah	Bali	Nusa Tenggara Barat	Nusa Tenggara Timur	Sulawesi Utara	Sulawesi Selatan	Maluku	Irian Barat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
94.	Perkuatan djalan Daswati II.(andjuran P.N.M.H.B.)							Seluruh Indonesia															
95.	Diembatan-diembatan dan Kapal-kapal Ferry							Seluruh Indonesia															
96.	Angkutan Motor							Seluruh Indonesia															
97.	Perhubungan Darat/Kereta Api	×	×	×	—	—	—	×	×	×	×	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
98	Pembangunan Dinas Pos							Seluruh Indonesia															
99.	Pembangunan Dinas Telegrap							Seluruh Indonesia															
100.	Pembangunan Dinas Telepon							Seluruh Indonesia															
101	Pembangunan Dinas Radio							Seluruh Indonesia															
102.	Perhubungan Laut Pelajaran niaga							×	—	—	—	×	×	×	×	—	—	—	—	—	×	—	—
103.	Perindustrian Perkapalan	—	×	×	×	—	—	Seluruh Indonesia															
104.	Pembangunan Udara																						
	VIII. Bidang Keuangan.																						
105	Timah	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
106	Bank Pembangunan Desa							Seluruh Indonesia															
107.	Tourisme	—	—	—	—	—	—	×	×	×	×	×	—	—	—	—	×	—	—	—	—	—	—

Keterangan:
× = ada kegiatan Pembangunan.

Biaja devisen

2

1

3

24.

1.

Ichtisar daftar pembagian daerah (administrasi) seluruh Indonesia

No. urut	Daerah tingkat I	Karesidenan	Kabupaten (Daerah tingkat II.)	Kota Pradja (Daerah Tingkat II)	Kawedanaan/ daerah jang setingkat	Ketjamatan/ daerah jang setingkat	Desa/daerah jang setingkat	Penduduk	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Djawa Timur	7	29	8	141	519	8.206	19.115.120	
2.	Djawa Tengah	6	28	6	133	489	8.492	16.340.274	
3.	Djawa Barat	5	19	4	108	356	3.802	15.071.855	
4.	D.I. Jogjakarta	—	4	1	—	72	407	2.020.423	
5.	K.P. Djakarta Raya	—	—	—	7	19	140	1.871.161	
6.	Sumatera Selatan	6	14	4	43	133	575	3.243.254	
7.	Djambi	—	3	1	7	26)			
8.	Riau	—	4	1	15	57)	1.252	3.638.065	
9.	Sumatera Barat	—	8	6	—	78)	*)		
10.	Sumatera Utara	2	10	6	24	170	2.517	3.576.723	
11.	Atjeh	—	7	1	21	105	568	1.340.706	
12.	Kalimantan Barat	—	6	1	18	74	4.060	1.164.357	
13.	Kalimantan Teng.	—	5	—	12	42)	1.507	1.924.081	
14.	Kalimantan Sel.	—	6	1	20	66)	**)		
15.	Kalimantan Timur	—	4	2	14	47	915	380.236	
16.	Sulawesi Utara	2°)	8	2	18	58)	7.144	5.697.018	
17.	Sulawesi Selatan	2 °)	25	2	21	464)			
18.	Nusa Tengg. Bar.	—	6	—	—	43)	***)		
19.	Nusa Tengg. Tim.	—	12	—	—	45)	5.982	5.271.417	
20.	Bali	—	8	—	—	40)			
21.	Maluku	—	3	1	20	27	1.671	716.002	
22.	Irian Barat.	—	—	—	2	6	67	40.998	
	21	28	209	47	624	2.936	47.305	81.411.692	

KETERANGAN :

Ladjur 1 s/d 7 menurut keadaan sekarang.
Ladjur 8 s/d 9 menurut keadaan sekarang sampai achir tahun 1956.

°) Residen koordinator (Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960)
*) Keadaan pada Propinsi Sumatra Tengah dahulu
**) Keadaan pada Propinsi Kalimantan Selatan dahulu
***) Keadaan pada Propinsi Nusa Tenggara dahulu.

1. Penggalian Kebudajaan Kebudajaan
2. Museum Nasional
3. Gallery Kesenian Nasional
4. Perpustakaan Nasional
5. Lembaga Bahasa dan Kesusasteraan
6. Terdjemahan Kitab Sutji AL Qur'an
7. Terdjemahan Kitab Sutji Bybel
8. Terdjemahan Kitab Sutji Weda dan Dhamma Padda
9. Theater Nasional
10. Konservatorium Nasional } Tjadangan
11. Sirkus Nasional

Taman Kebudajaan - Tiap Daswati I

Tjagar Alam dan taman Margasatwa

Perpustakaan Desa (dikerdjakan pada Bidang Pendidikan) } Tjadangan

BIDANG MENTAL / ROHANI I

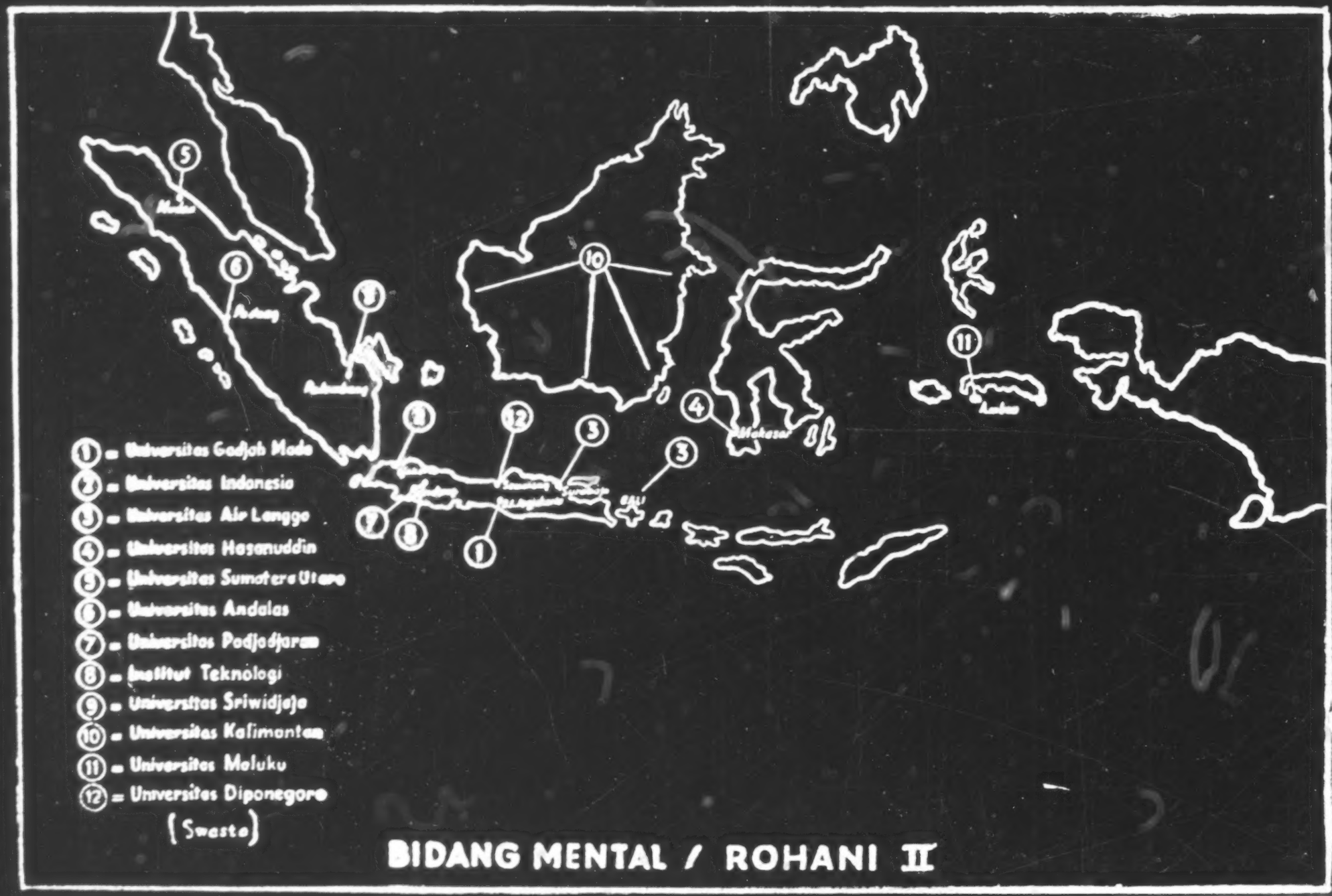

BIDANG MENTAL / ROHANI II

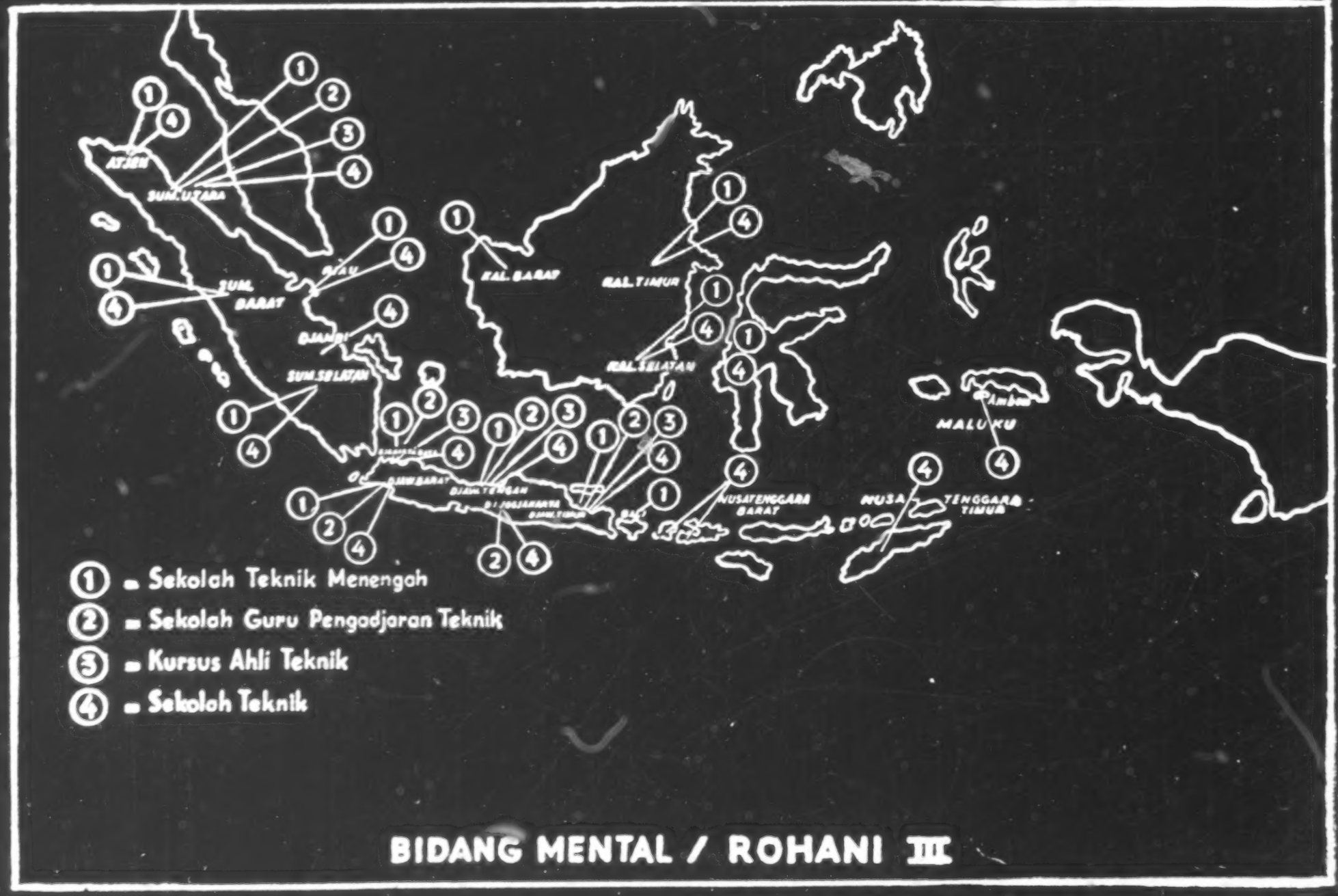

BIDANG MENTAL / ROHANI III

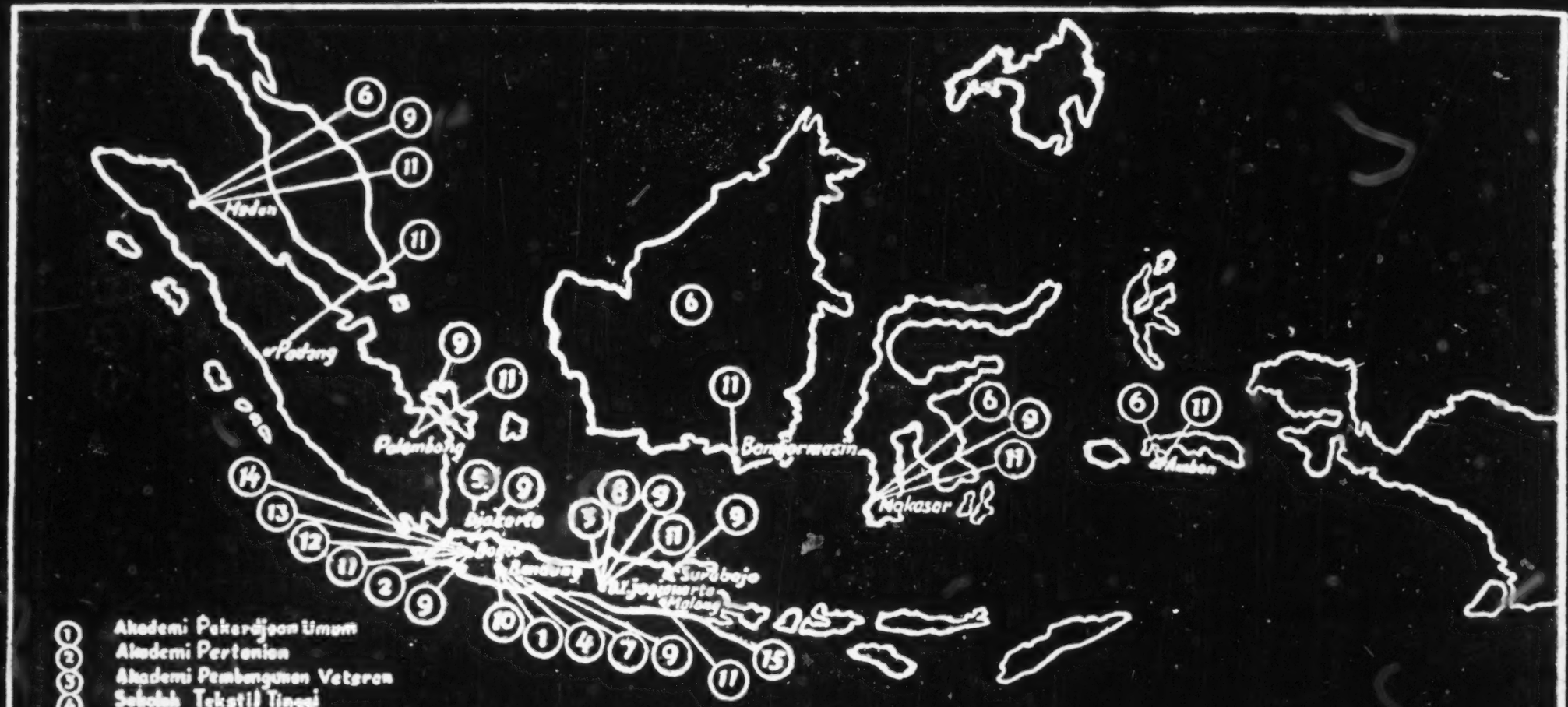

1. Akademi Pekerdjaan Umum
2. Akademi Pertanian
3. Akademi Pembangunan Veteran
4. Sekolah Tekstil Tinggi
5. Akademi Pelajaran
6. Sekolah Pelajaran dan Perkapalan Menengah
7. Pendidikan Tenaga P.T.T.
8. Akademi Gula Negara
9. Sekolah Analis/Sekolah Analis Tinggi
10. Sekolah Kedjuruan Perhotelan
11. Sekolah Menengah Pertanian Atas
12. Kursus Karantine
13. Sekolah Kehutanan Menengah Atas
14. Sekolah Perikanan Menengah Atas
15. Sekolah Kebidanan Menengah Atas

Sekolah Guru Atas — Daswati II
Sekolah Guru Kepandaian Putri — Daswati I
Sekolah Menengah Atas Bg.B - Daswati II
Sekolah Rakjat — Tiap Desa
Pemberantasan Buta Huruf — Tiap Desa
Kursus kemasjarakatan dan Perpustakaan — Tiap Desa

Akademi Cinematografi
Pendidikan keahlian djurusan ekonom pelajaran
Pendidikan perwira dek mesin markonis
} Tempat belum ditentukan

BIDANG MENTAL / ROHANI IV

MIPI (= Madjelis Ilmu pengetahuan Indonesia):

1. Lembaga Kimia
2. Lembaga Fisika
3. Lembaga Geologi / Pertambangan
4. Lembaga Metalurgi
5. Lembaga Elektronika
6. Lembaga Biologi
7. Lembaga Ekonomi dan Masyarakat
8. Penelitian dibidang geologi/pertambangan
9. Aerial Survey
10. Penelitian dibidang Industri
11. Penelitian dibidang produksi Pangan
12. Penelitian dibidang perkebunan dan Kehutanan
13. Penelitian dalam lingkungan D K A
14. Memadjukan penelitian dilembaga lain jang penting untuk pembangunan

Tjatatan: Tempat²-nja belum ditentukan

15. Laboratorium PTT – di Bandung
16. Penelitian jang berhubungan dgn. penerbangan dan produksi pesawat udara – di Bandung

BIDANG PENELITIAN

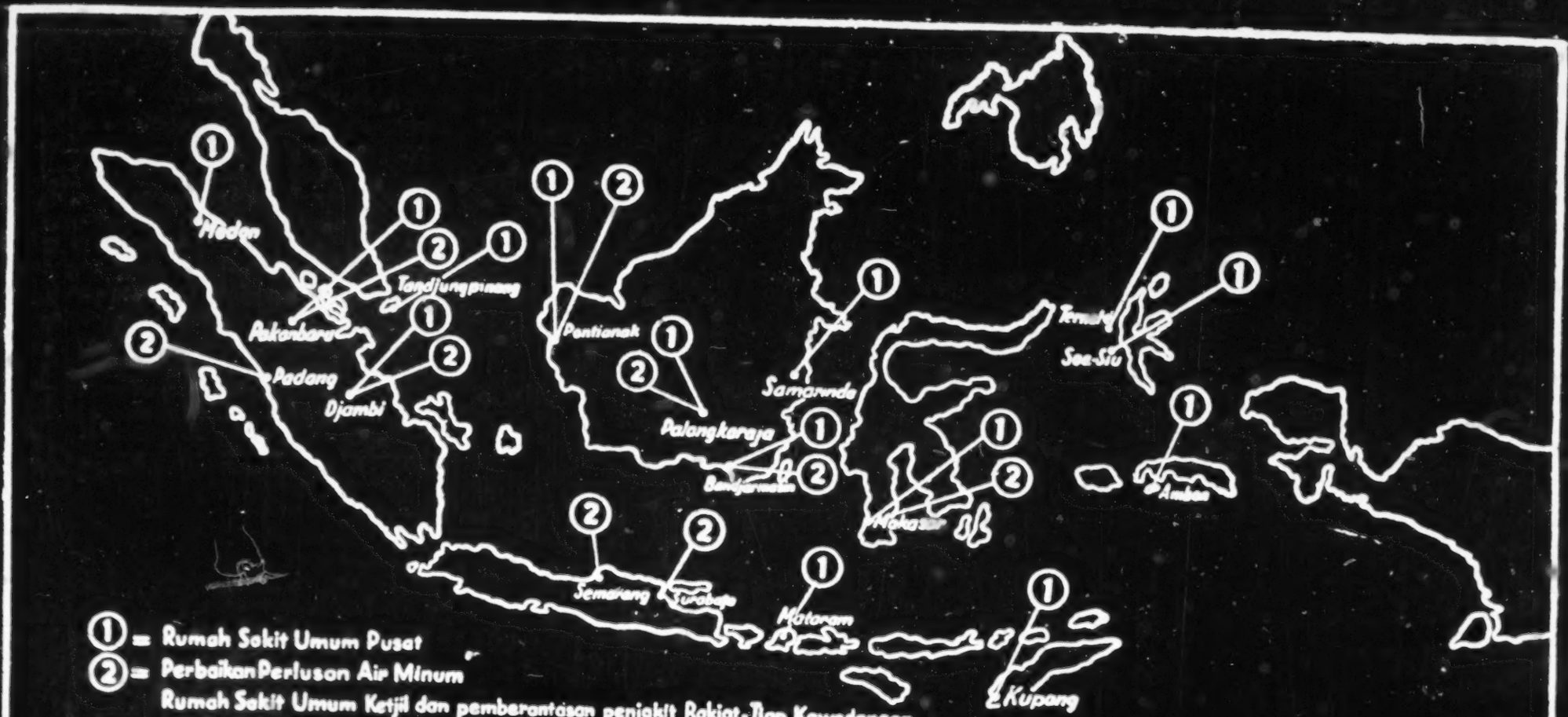

① = Rumah Sakit Umum Pusat

② = Perbaikan Perluasan Air Minum

Rumah Sakit Umum Ketjil dan pemberantasan penjakit Rakjat - Tiap Kawedanaan

Bank Perumahan

Usaha perentjanaan kota, termasuk ibu kota, kota Satelit

Usaha perentjanaan kota

Kesedjahteraan Sosial: 1. Rehabilitasi Penderita Tjatjat

2. Lembaga Sosial Desa (termasuk penerangan. dll).

Kesedjahteraan Tani dan Nelajan

Poliklinik jang berfungsi pusat Kesehatan - 2-3 poliklinik setiap Ketjamatan

BIDANG KESEDJAHTERAAN RAKJAT

BIDANG PEMERINTAHAN

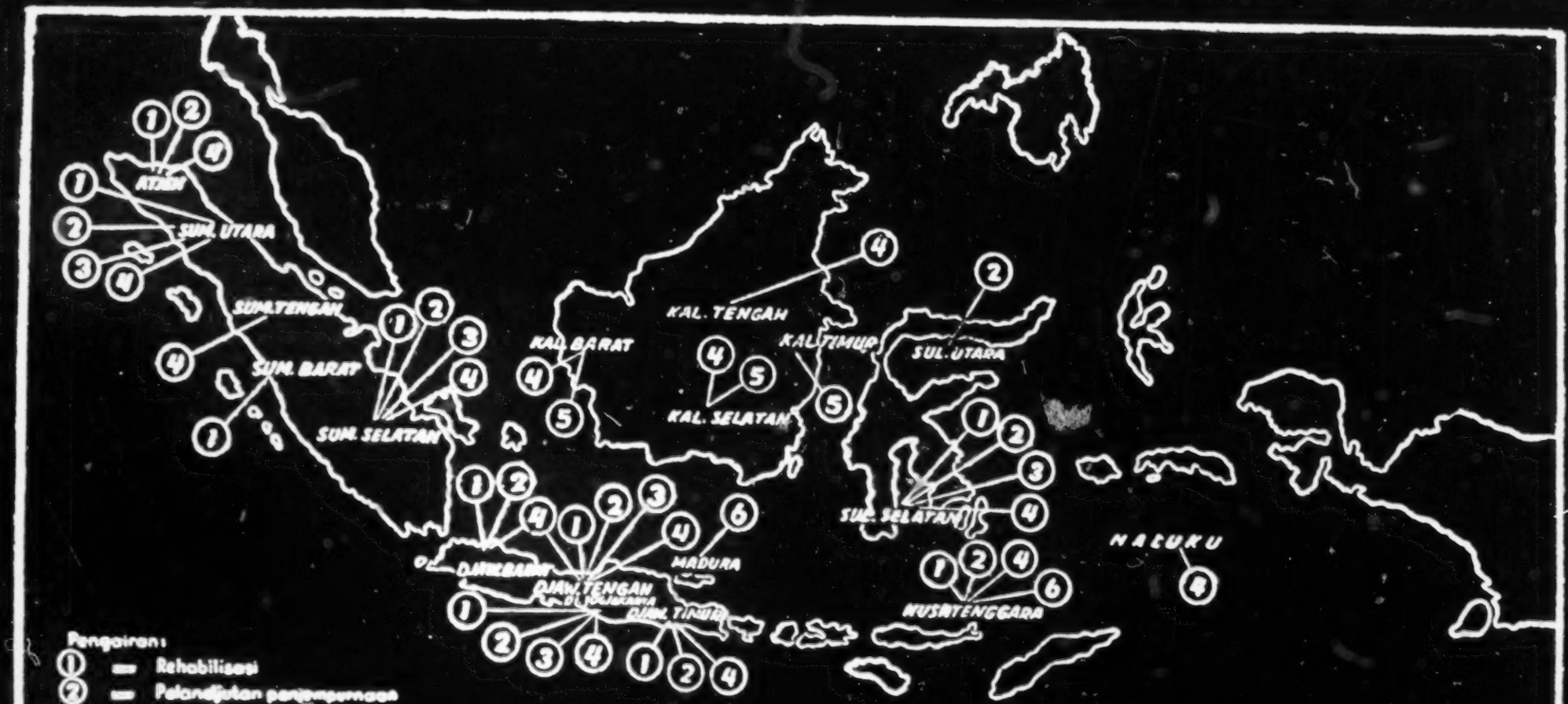

BIDANG PRODUKSI PANGAN

BIDANG PRODUKSI SANDANG

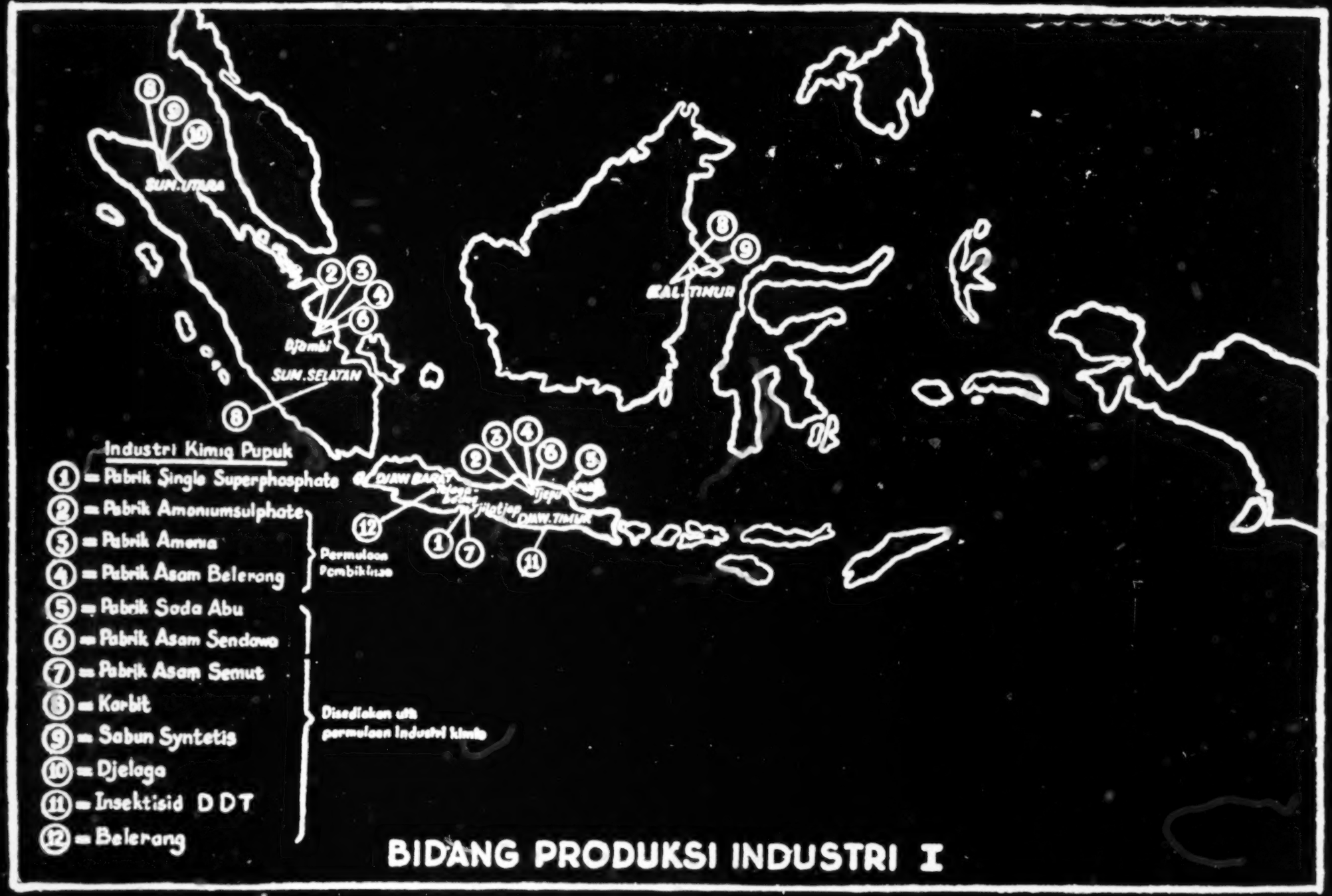

BIDANG PRODUKSI INDUSTRI I

① = Pusat tenaga Air
② = " " Uap
③ = " " Diesel
④ = " " Diesel uap
⑤ = Pusat Turbin Gas

Tjatatan:
untuk ① ditambah di
Sungai Brantas dan Sungai Konto

BIDANG PRODUKSI INDUSTRI II

Minjak Bumi

① Kilang minjak
Rehabilitasi PTMRI } tempat belum ditentukan
Eksplorasi

Batu Bara

② Rehabilitasi
③ Pertuasan-(Bukit asam).
Pembelian kapal2 utk pengangkutan batubara } tempat belum ditentukan
④ Pembikinan Cokes

Aluminium

⑤ = Pabrik Logam-(Kuala Tandjung)
⑥ Rolling mill

⑦ Pengetjoran Timah

Besi Badja

⑧ Tanur Tinggi
⑨ Pabrik Badja
⑩ Survey Pendirian Tanur Tinggi
⑪ Aspal

Pengusahaan Tambang Lainnja.

Tembaga (Sumatera, Djawa dan Kalimantan)
⑫ Belerang
⑬ Asbes
⑭ Kaoline
⑮ Kwarsa
⑯ Phosphate

BIDANG PRODUKSI INDUSTRI II

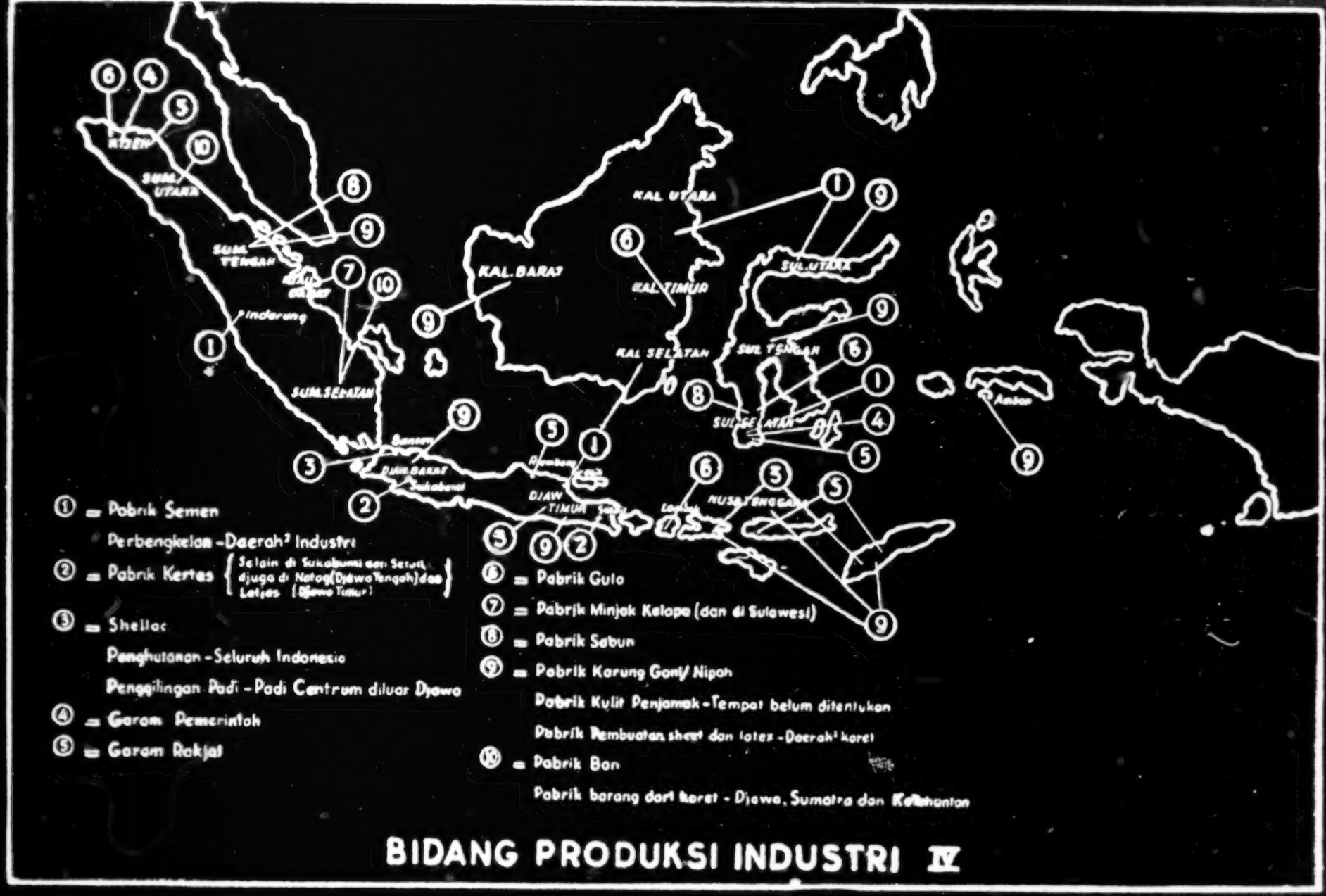

BIDANG PRODUKSI INDUSTRI IV

① = Pabrik Keramik
② = Pemurnian Kaolins
③ = Bahan tahan Api
④ = Pabrik Gelas/Botol – (dan di Kalimantan)
⑤ = Pabrik bola lampu
⑥ = Pabrik Gelas/ Katjo
⑦ = Reaktor Atom

Perindustrian Perkapalan
⑧ = Rehabilitasi dan pembangunan Dok.

BIDANG PRODUKSI INDUSTRI V

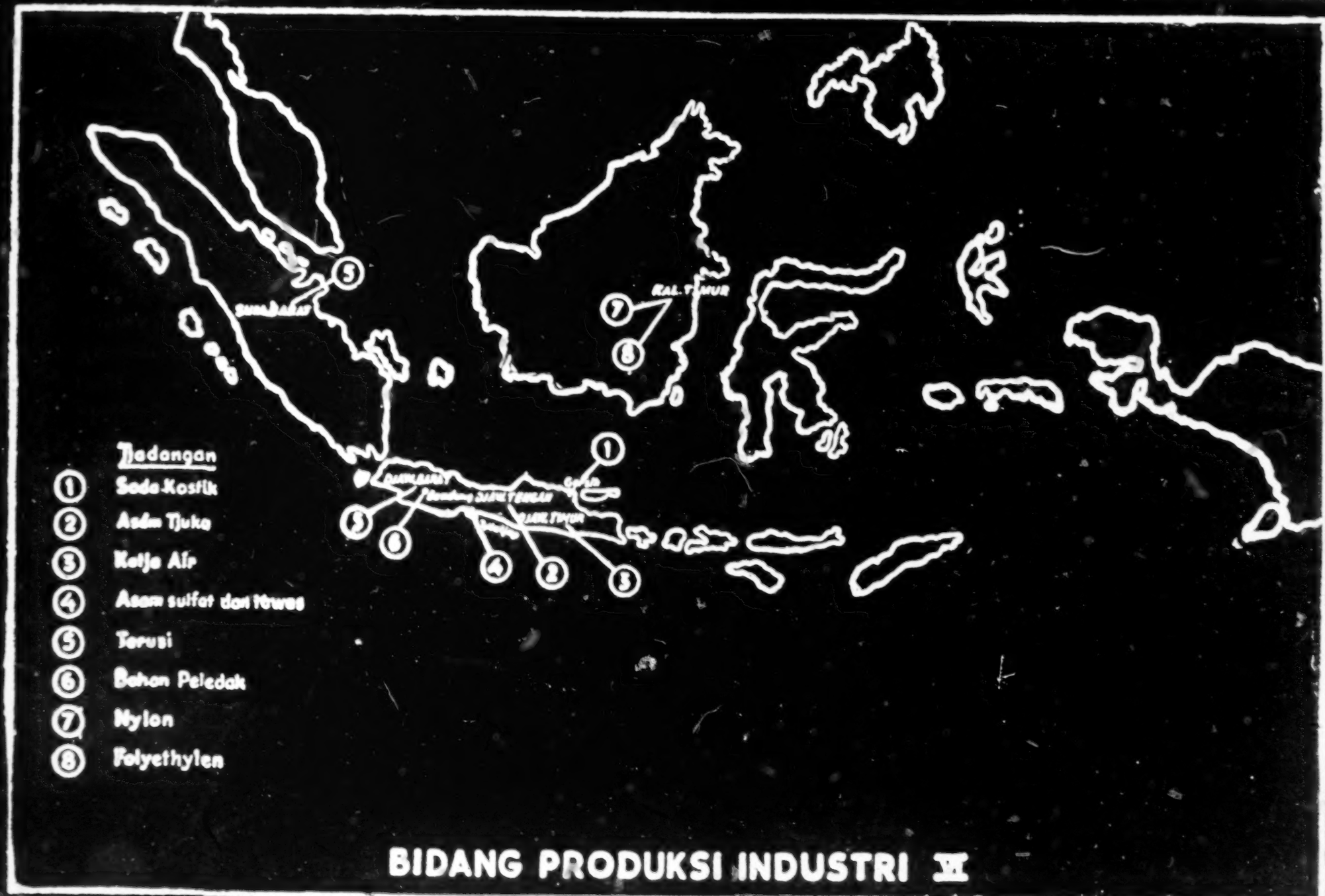

BIDANG PRODUKSI INDUSTRI VI

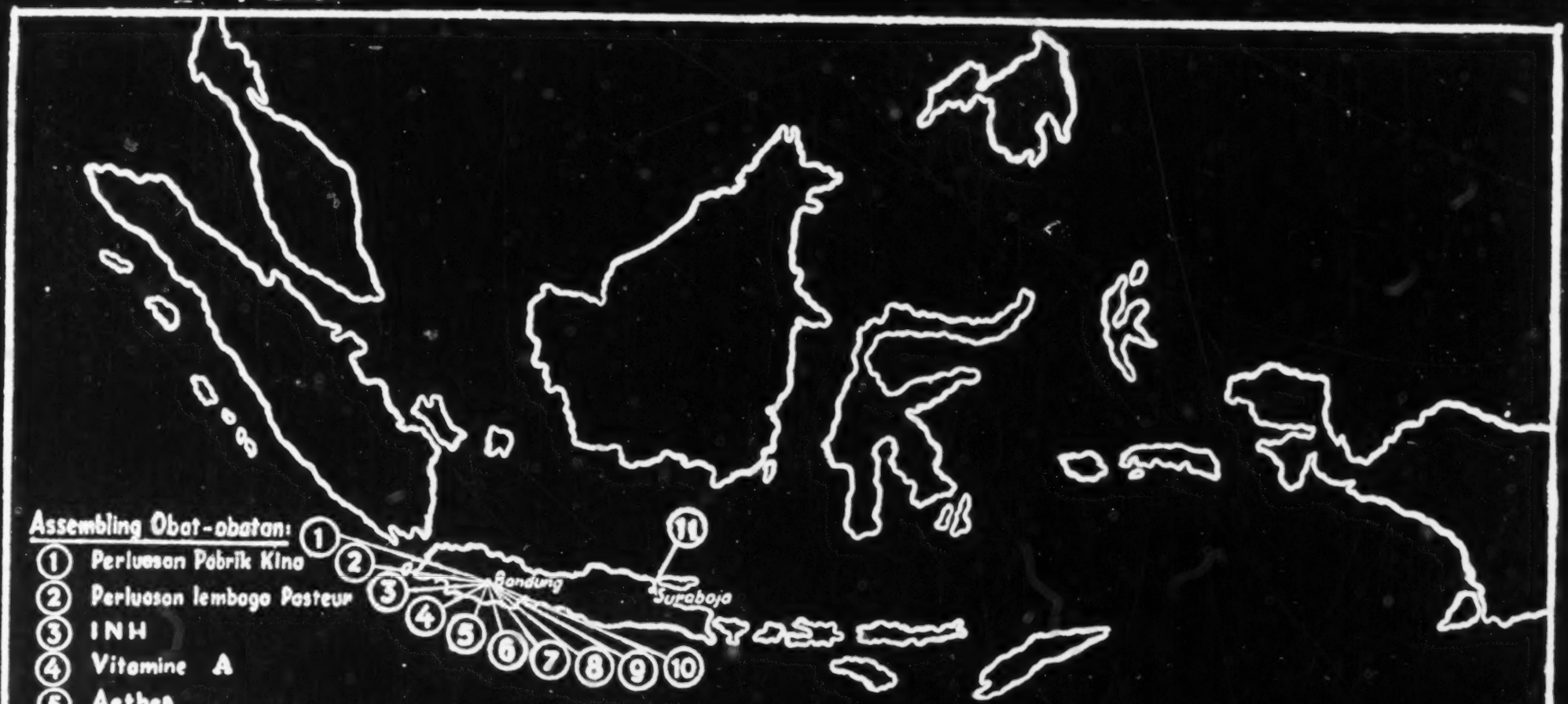

BIDANG PRODUKSI PEROBATAN

A Djalan – djalan:
Pemeliharaan berat seluruh djalan²-seluruh Indonesia
a pembelian mesin² giling ± 1200 buah
b pembelian truck² ± 4000 buah
c pembelian mesin² pemetjah batu ± 200 buah
d pendidikan tenaga² pelaksana

B Djalan-djalan Baru
Antara Tjilitan dan Puntjak via Bogor
Antara Palembang, Djambi Rengat Pakanbaru Rantauprapat
Antara Tarutung-Padangsidempuan-Bukittinggi
Antara Bukittinggi-Pajakumbuh-Pakanbaru
Antara Poso-Parigi
Antara Tomini-Marisa
Antara Tomini-Tolitoli
P. Sumbawa
P. Flores
P. Sumba
Halmahera

Pembangunan djalan² baru (persiapan dalam Rentjana fase I):
Djalan Takengon-Blangkedjeren-Katatjane (Atjeh)
Djalan Tajan – Telok Melano
Djalan Situos-Belai-Kurengan-Nangah Badau-Putusibau
Djalan Sintang-Nangah Serawai-Batas Kalimantan Barat/Kalimantan Tengah
Puruktjahu-MuaroTewe-Ampah

BIDANG DISTRIBUSI KOMUNIKASI I

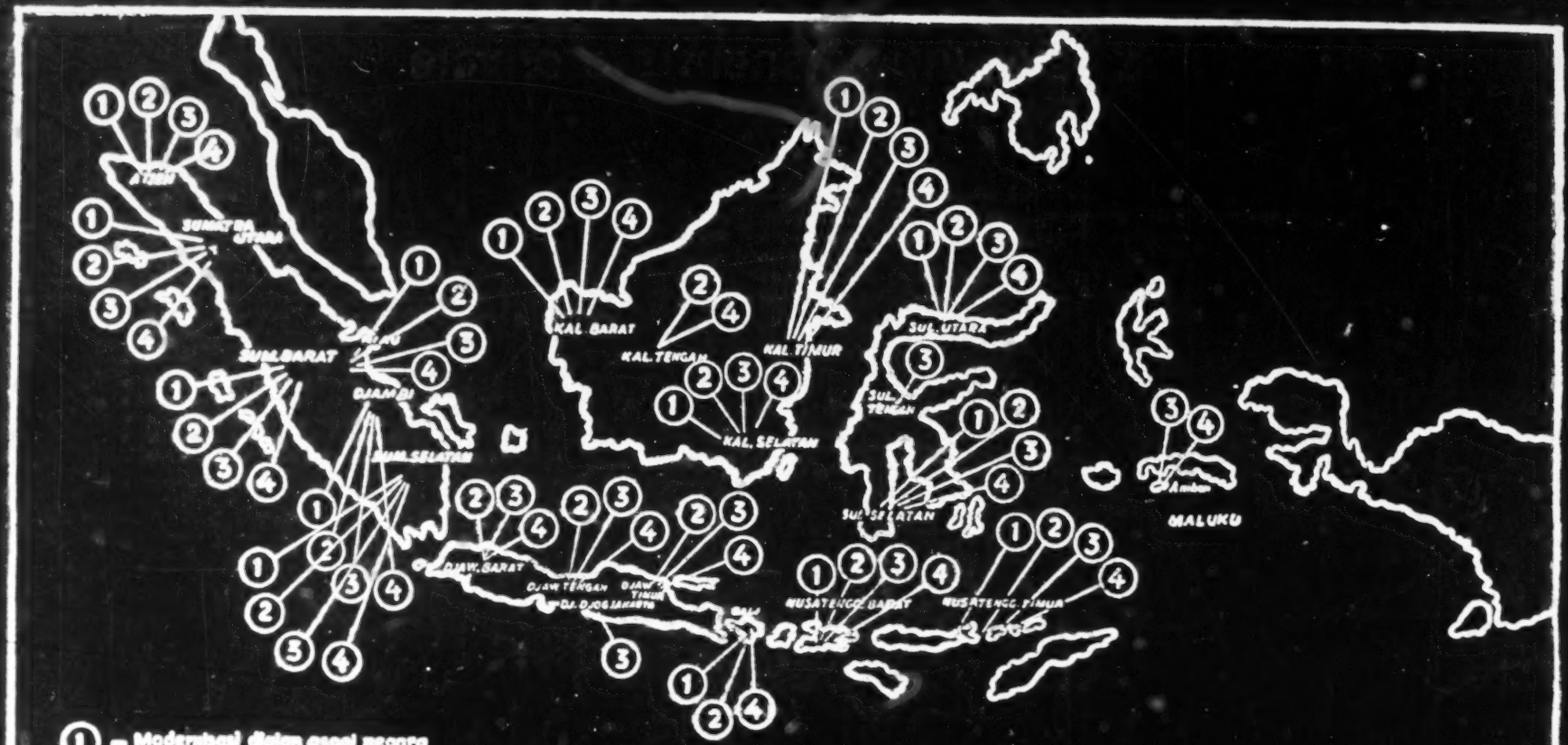

① = Modernisasi djalan aspal negara

② = Perkuatan djalan krikil negara

③ = Perkuatan djalan krikil Propinsi

④ = Perkuatan djalan Daswati II (andjuran PNMKB).

BIDANG DISTRIBUSI KOMUNIKASI II

Djembatan? dan kapal? Ferry:
Pembangunan dan penggantian djembatan? besar (termasuk pelajaran) — Seluruh Indonesia
dan kapal? Ferry

Angkutan Motor: — Seluruh Indonesia
Penambahan truck dan Bus — " —
Perbengkelan — " —

Perhubungan darat Kereta Api:

① = Assembling (Angkutan Motor)

② = Intensifikasi Kemampuan mengangkut

③ = Intensifikasi efficiency kerdja dan mutu pegawai

Pembangunan dinas Pos: — Seluruh Indonesia

Perluasan Gedung
Kendaraan bermotor
Alat? Perkakas
Mekanisasi/Otorisasi
Kantor Pos Kereta Api
Pos Cheque/Giro
Pos Desa/Ketjamatan

BIDANG DISTRIBUSI KOMUNIKASI III

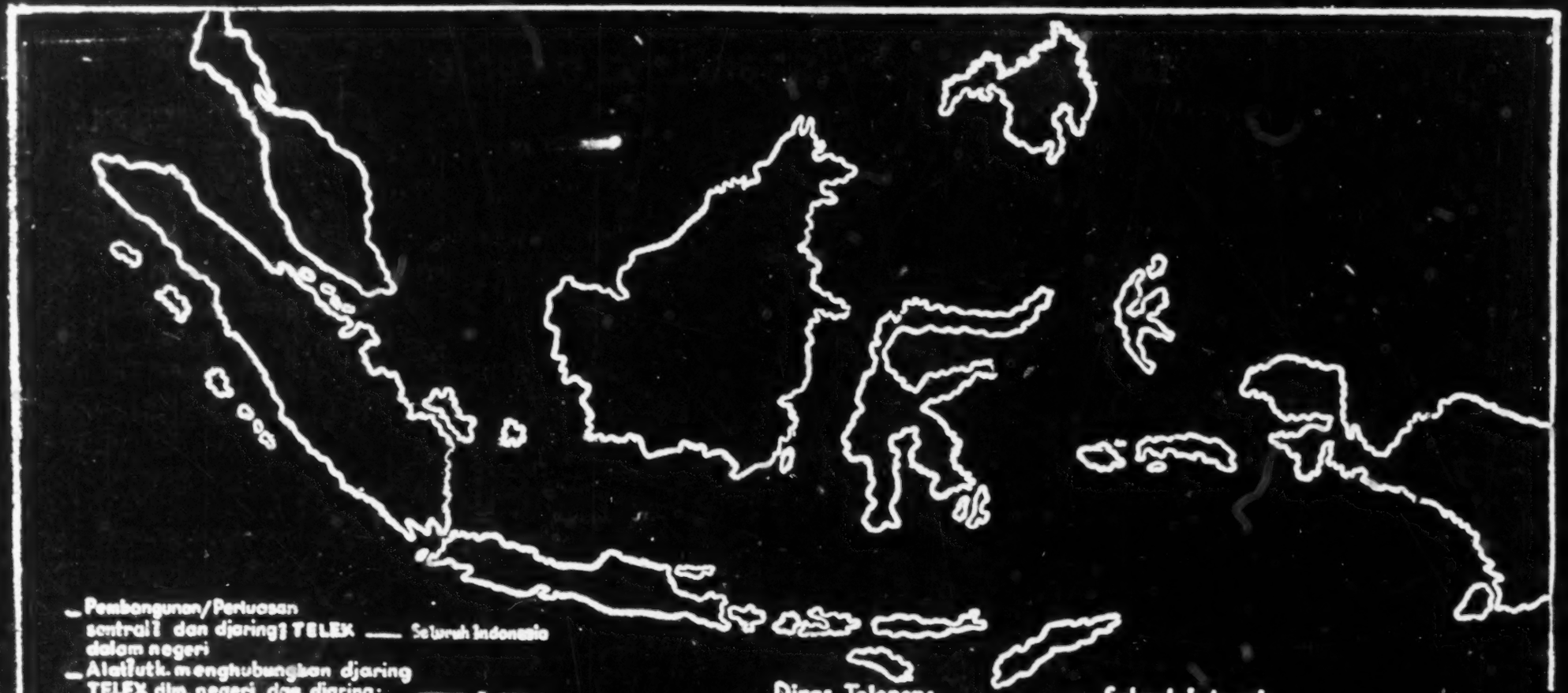

- Pembangunan/Perluasan sentral2 dan djaring2 TELEX dalam negeri — Seluruh Indonesia
- Alat2 utk. menghubungkan djaring TELEX dlm. negeri dgn. djaring TELEX luar negeri — " —
- Memberikan satu djaring TELE FAX — " —
- Memperluas dinas telegrap sampai di lbu2 kota Kedjamatan — " —
- Memperlengkapi Kantor Telegrap baru di Djakarta sebagai Main Traffic Centre utk. perhubungan Telegrap dlm Negeri — " —
- Desentralisasi ddf pd. pembezielan telegram2 di Djakarta Rayo — " —
- Memberikan gedung baru untuk Kantor Telegrap di Bandung jg merupakan Main Traffic Centre hubungan Telegrap luar negeri — Djawa Barat (Bandung)
- Memperlengkapi Kantor Telegrap baru Makasar — Sulawesi (Makasar)

Dinas Telepon: — Seluruh Indonesia

- Mengotomatisasi telepon
- Centrol telepon dgn Perluasen manuel exchange
- Pemasangan minta otomat sebagai telepon umum di Stasion2 bus stasion2 K.A. pasar2 dll.
- Memperlipatgandakan Channels dalam perhubungan antara kota2 dgn menempatkan hubungan sinar Radio dan Open wireline Carier
- Menjampurnakan/mempeluas lin2 interlokasi dan distrik
- Mekanisasi Administrasi Telepon
- Pembangunan bekas2 djaring telepon Pamong prodja
- Menghubungkan Kantor2 Djamat dsb. dgn Kantor2 Telepon jg terdekat.

BIDANG DISTRIBUSI · KOMUNIKASI . IV

Dinas Radio: — Seluruh Indonesia

- Instalasi Radio utk perhubungan dgn daerah terpentjil
- Penambahan Instalasi Radio utk dapat membuka perhubungan antara Ibu² kota Propinsi dgn Djakarta selama 24 djam
- Mendirikan Stasiun² pemantjar Radio baru dan Stasiun penerima radio baru
- Perhubungan Radio photo service dalam negeri
- Mendirikan Radio monitoring stasiun dipelbagai tempat di Indonesia
- Memperlengkapi Overseas Telephone Centre
- Perluasan instalasi² radio utk memperluas perhubungan dgn luar negeri terutama negara² Asia-Afrika (Bandung)
- Menara² antena² dan alat² tambahan
- Perhubungan utk Departemen Luar Negeri

Perhubungan Laut Pelajaran Niaga — Seluruh Indonesia

- Pembangunan Armada untuk pelajaran pantai dan samudra
- untk 2 a 3 bulan modal kerdja bagi 260.000 dwt armada Motorisasi kapal lajar (armada semut)

Keamanan Pelajaran: — Seluruh Indonesia

- Rehabilitasi dan pembangunan dari:
  a. menara² dan mertjusuar
  b. 16 stasiun radio dan alat
  c. 4 kapal rambu
  d. 2 kapal hydrografic
  e. bengkel² kapal
  f. kapal² tournee
     kapal² pandu
     kapal² patroli
     sekotji dsb.
  g. Asrama² pelaut

BIDANG DISTRIBUSI KOMUNIKASI V

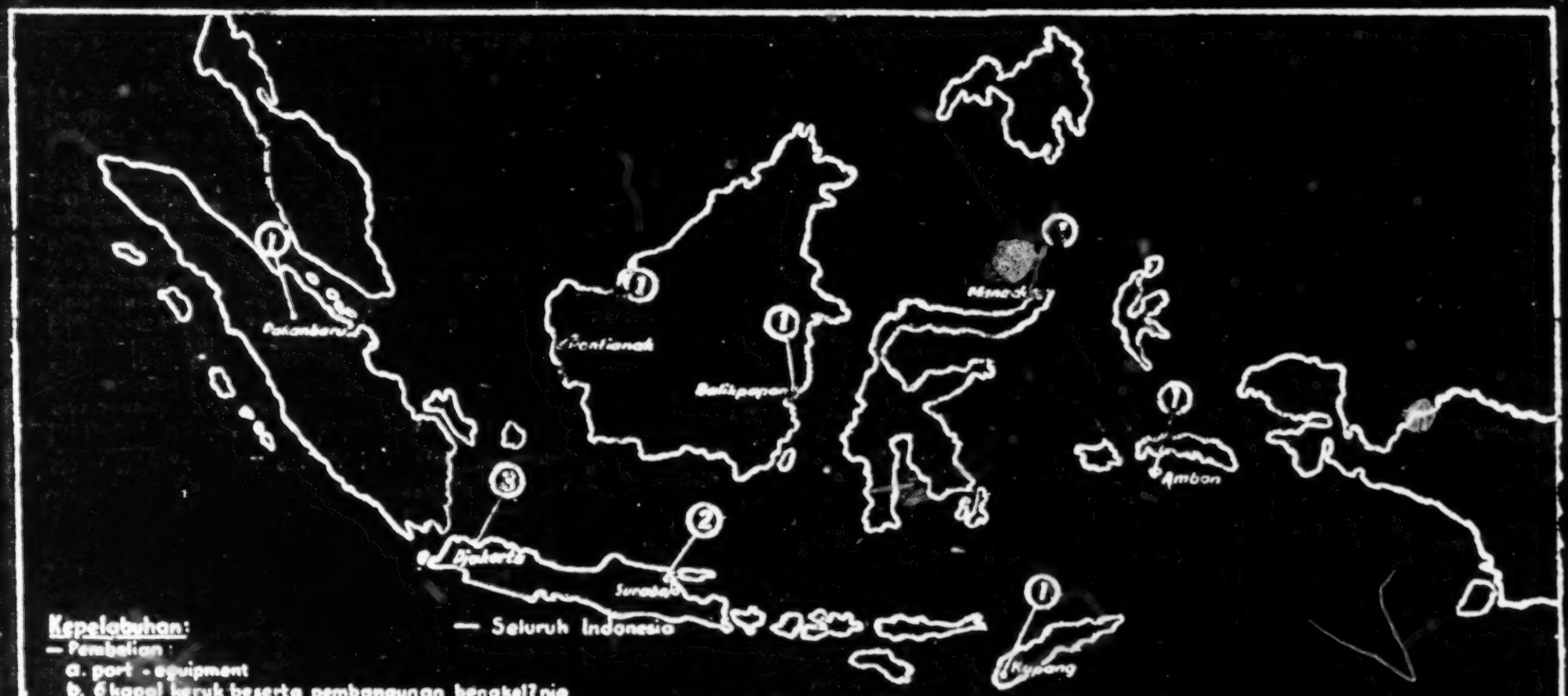

Kepelabuhan:

— Pembelian :
a. part - equipment
b. 6 kapal keruk beserta pembangunan bengkel2nja
— Pembangunan Pelabuhan2

Perhubungan Udara :

— Perbaikan / perpandjangan / pembangunan lapangan terbang
① Projek perbaikan dan perpandjangan dari 6(enam) lapangan terbang guna pesawat2 Convair dan Lockheed Electra :
② Projek Waru, sebagai pengganti lapangan terbang Perak
③ Modernisasi lapangan terbang International Kemajoran
④ Pembangunan lapangan2 terbang lainnja diseluruh Indonesia guna Convair / Lockheed Electra
— Pembangunan lapangan2 terbang diseluruh Indonesia guna pesawat2 type DC-3
— Perlengkapan lapangan2 terbang
a. Alat2 pemadam kebakaran
b. Power — Suply
c. Alat2 penerangan landasan d.l.l.
d. Pembangunan penjempurnaan bangunan2 Unit lapangan terbang guna keperluan operasional
— Perbengkelan pesawat2 terbang
— Pembelian pesawat2 pengganti Dakota / DC 3 lengkap dgn. Spareparts d.l.l.
— Gedung2 utk. gudang2 hanggar2 perumahan dan lain2 jg. diperlukan utk. penerbangan.

BIDANG DISTRIBUSI KOMUNIKASI VII

Keamanan Penerbangan:

a. Aeronautical Wired Telecomunication Network
b. Bangunan2 danfasilitet2 guna alat2 tersebut dalam a.
c. Penjelenggaraan Navigation Guide
d. Fasilitet2 lembaga Metro dan Geophysik
e. Untuk keperluan „ research and Resque"

TJADANGAN

1. Pembuatan/penjempurnaan kurang lebih 40 lapangan terbang guna feederlines.
2. Pendidikan kader2 penerbangan
3. Pembelian pesawat jet untuk penerbangan International, termasuk keperluonia untuk itu

BIDANG DISTRIBUSI KOMUNIKASI VII

(2) *POLA PENDJELASAN.*

Pola pendjelasan berisi pendjelasan dari dasar-dasar pemikiran serta susunan Pola Pembangunan Nasional-Semesta-Berentjana ini beserta bahan-bahan latar-belakang jang mendjadi landasannja.

Chusus mengenai pendjelasan projek-projek serta kegiatan, dalam Buku ke-satu Djilid III terdapat uraian mengenai Garis-garis Besar tentang projek-projek dan kegiatan-kegiatan jang diatur menurut sistematik bidang.

Dalam Buku ke-dua sampai dengan Buku ke-delapan jang terperintji mendjadi Djilid IV sampai dengan Djilid XVII terdapat uraian lengkap mengenai dasar dan landasan pemikiran serta bahan-bahan jang digunakan sebagai sumber pemikiran.

Demikianlah dalam Djilid-djilid tersebut diatas terdapat materi jang dimaksudkan oleh Pola Pendjelasan.

(3) *POLA PEMBIAJAAN.*

Djumlah investasi untuk Rentjana I ini adalah sebesar Rp. 240 miljar atau untuk tiap tahun Rp. 30 miljar.

Djumlah investasi setiap tahun seperti tersebut diatas dihitung dalam persentase dari pendapatan nasional 1960 adalah kira-kira 13%.

Persentase ini diambil atas dasar pertimbangan:

(1) Tingkat penghidupan rakjat Indonesia dewasa ini sudah sedemikian rendahnja dan rakjat tidak mungkin lagi dibebani kewadjiban memikul pembiajaan jang besar djumlahnja. Oleh karena itu maka pembiajaan pembangunan semesta sedapat-dapatnja dilakukan tanpa kenaikan padjak.

(2) Rentjana I ini harus diberi fungsi sebagai djalan untuk memperoleh pengalaman membangun dalam arti luas, waktu untuk mempersiapkan tenaga membangun setjara besar-besaran dan memberi landasan untuk Rentjana II dan Rentjana-rentjana selandjutnja.

(3) Dalam hampir semua bidang pembangunan masih harus dilakukan penelitian jang mendalam dan seksama untuk memberi djaminan sebesar-besarnja akan tindakan jang ingin dikerdjakan.

Investasi sebesar 13% dari pendapatan nasional setiap tahun bukanlah merupakan djumlah jang absolut sebab masih ada investasi jang sedang/akan dikerdjakan oleh Departemen-departemen, Pemerintah Daerah dan pihak swasta jang belum dimasukkan dalam Rentjana I ini.

Apabila investasi tersebut diatas diperhitungkan seluruhnja maka djumlah investasi dalam pembangunan semesta akan berdjumlah minimal 15% dari Pendapatan Nasional 1960.

Djumlah investasi sebesar Rp. 240 miljar disebarkan diantara bidang Pembangunan seperti dibawah ini:

No.	Bidang	Djumlah %	Djumlah	
			Projek	Projek Tjadangan
I.	Mental dan Rochani	7,42		
	1. Kebudajaan		9	5
	2. Pendidikan		43	14
II.	Penelitian	1,11	16	—
III.	Kesedjahteraan Rakjat	2,58	11	—
IV.	Pemerintahan	1,51	6	3
V.	Pembangunan chusus	12,50	1	—
VI.	Produksi	45,11		
	1. Pangan		8	—
	2. Sandang		7	—
	3. Industri		81	8
	4. Perobatan		6	—
VII.	Distribusi (Distribusi dan Komunikasi)	25,07	144	3
VIII.	Keuangan (Termasuk tourisme)	4,70	3	—
	Djumlah:	100	335	33

A. Dasar-dasar pikiran tambahan:

(1) Indonesia membangun atas pokok-pokok pikiran :

a. Sedapat-dapatnja tidak diadakan deficit spending;

b. Sedapat-dapatnja tidak diadakan kenaikan padjak;

c. Sedapat-dapatnja tidak mengganggu anggaran belandja tahunan negara.

(2) Sumber-sumber pokok jang dipergunakan untuk pembiajaan pembangunan ialah kekajaan alam.

(3) Tjara mengusahakan sumber-sumber tersebut dipedomani oleh pasal 33 Undang-Undang Dasar dan Amanat Pembangunan Presiden dengan djalan kerdja-sama ekonomi dan teknik dengan pihak asing dalam waktu sesingkat-mungkin.

(4) Kerdja-sama ekonomi dan teknik itu didasarkan pada pikiran :

a. Indonesia membutuhkan luar negeri dan luar negeri membutuhkan Indonesia.

b. Jang dibantu harus mendjadi lebih kuat untuk dapat membantu dirinja sendiri dan dikemudian hari sanggup pula membantu pihak lain.

(5) Projek-projek pembangunan dibagi 2 jaitu:

a. Projek jang dibangun untuk menambah kesedjahteraan rakjat dan jang disebut Projek A.

b. Projek jang dibangun atau diperkembangkan untuk mentjari biaja mendjalankan Projek A dan jang disebut Projek B.

(6) Hubungan antara anggaran belandja tahunan dan anggaran belandja pembangunan harus dilihat dalam rangka pikiran dibawah ini:

a. Tekanan pada anggaran belandja tahunan akan berkurang banjak karena sebagian besar belandja modal dipindahkan pada anggaran belandja pembangunan.

b. Penetapan anggaran belandja tahunan bertambah dalam bentuk bea dan tjukai, puim dan puex serta padjak karena kegiatan pembangunan.

c. Dengan mengadakan penghematan dilapangan anggaran belandja tahunan setjara sungguh-sungguh, maka pada anggaran belandja tahunan dapat diberi tugas memperbaiki nilai rupiah kita jang diharap akan tertjapai dalam tiga á empat tahun.

(7) Penilaian pembangunan untuk rentjana pertama ini sebaiknja didasarkan pada fakta-fakta jang njata dan tidak pada kenaikan pendapatan nasional.

B. Selandjutnja dapatlah diterangkan bahwa tugas Depernas tidak berachir dengan pembuatan Rentjana tersebut. Menjatakan keperluan dan keinginan rakjat tidaklah tjukup. Dewan Perantjang Nasional harus sanggup membantu mewudjudkan keinginan rakjat itu.

D. *PENGESAHANNJA.*

Sesuai dengan ketentuan dalam Amanat Pembangunan Presiden tertanggal 28 Agustus 1959, bahwa Rantjangan Pola Pembangunan itu akan dibawa ke MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT SEMENTARA untuk disahkan, maka dengan terselenggaranja Sidang Pertama M.P.R.S. pada 10 Nopember — 7 Desember 1960 dikota Bandung, maka Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional-Semesta-Berentjana delapan tahun: 1961 — 1969 karya Depernas itu telah dipeladjari dan dikadji oleh Madjelis Tertinggi Republik Indonesia.

M.P.R.S. dalam menelaah dan meneliti naskah tersebut, membagi dirinja kedalam 6 (enam) Komisi, jaitu:

Komisi A (= Bidang Mental/Agama/Kerochanian/Penelitian).
" B (= Bidang Kesedjahteraan).
" C (= Bidang Pemerintahan dan Keamanan/Pertahanan).
" D (= Bidang P r o d u k s i).
" E (= Bidang Distribusi dan Perhubungan).
" F (= Bidang Keuangan dan Pembiajaan).

Setelah bekerdja siang-malam, Rapat-pleno ke-5 M.P.R.S. pada tanggal *3 Desember 1960* menjatakan bahwa Garis-garis Besar Pola Pembangunan termasuk Pola Projek jang termuat dalam Buku ke-satu Djilid I, II dan III dari Rantjangan Dasar Undang-Undang Pembangunan Nasional-Semesta-Berentjana delapan tahun : 1961 — 1969 itu pada umumnja sesuai dengan Amanat Pembangunan Presiden tertanggal 28 Agustus 1959 jang diutjapkan maupun jang tertulis dan pada umumnja sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia.

Oleh sebab itu, M.P.R.S. menerimanja sebagai „GARIS-GARIS BESAR POLA PEMBANGUNAN NASIONAL-SEMESTA-BEREN-

TJANA TAHAPAN PERTAMA : 1961 — 1969" dengan ketentuan-ketentuan seperti termuat dalam Pasal 2 sampai dengan 9 dari Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 beserta lampirannja A — B — C, diantara mana ketentuan-ketentuan dalam Lampiran A mempunjai kekuatan *amandemen*, sedang ketentuan-ketentuan termuat dalam lampiran B — C perlu diperhatikan dalam pelaksanaannja.

PIMPINAN M.P.R.S. WAKTU PENJERAHAN KETETAPAN M.P.R.S. KEPADA P.J.M. PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI A.P./PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA.

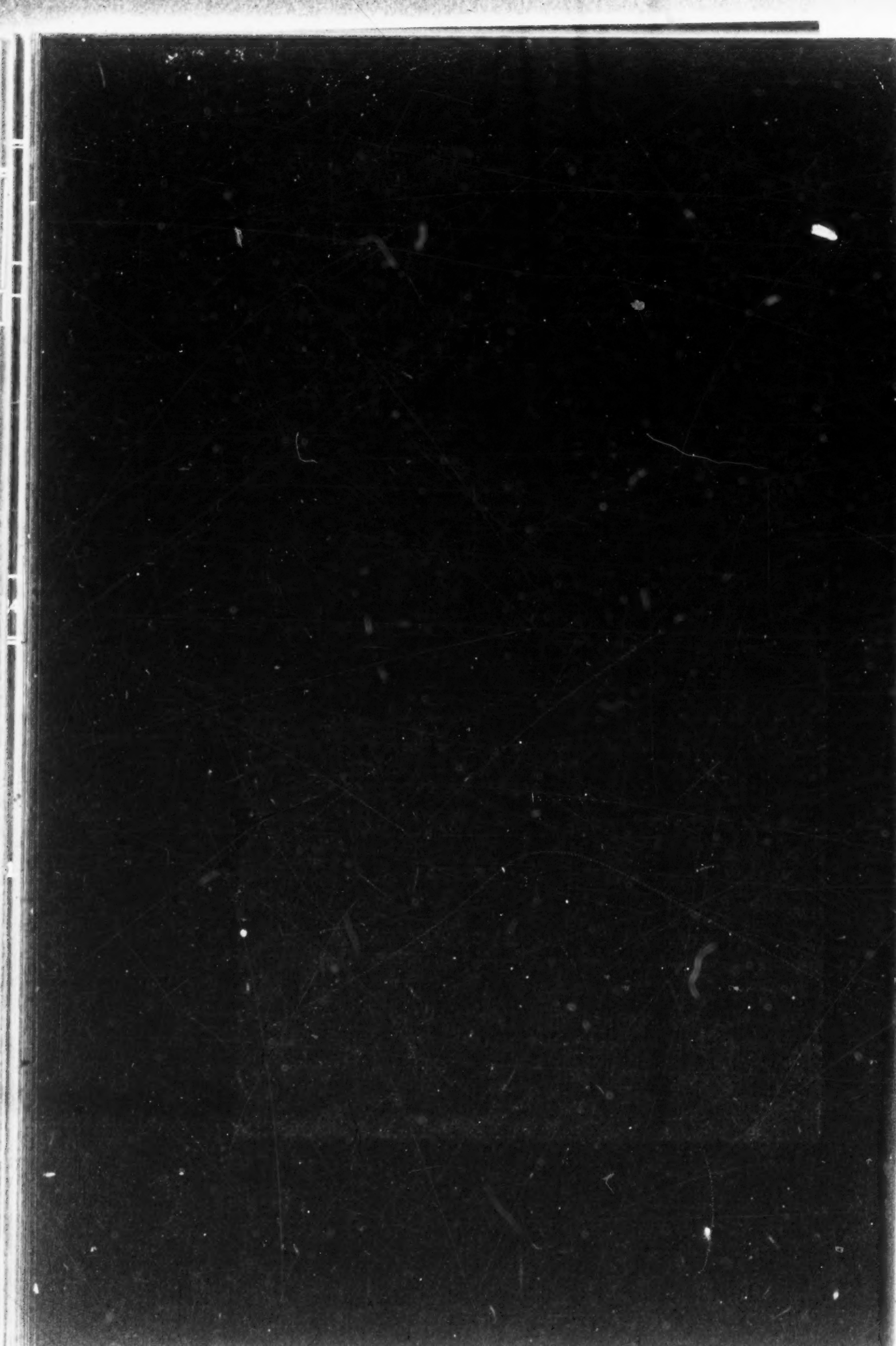

VI

AMANAT SAMBUTAN PRESIDEN SUKARNO
7 Desember 1960

Saudara-saudara sekalian,

Sungguh amat berbahagialah saja, bahwa pada saat sekarang ini hendak dilakukan upatjara *penutupan sidang pertama* daripada Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia sesudah Madjelis itu dalam waktu jang amat singkat, jaitu 27 hari, dapat menjelesaikan tugasnja dengan tjara jang amat mengagumkan.

Terlebih-lebih lagi kegembiraan saja, oleh karena sebagai tadi dikatakan oleh Pd. Ketua Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara, upatjara pada ini malam disaksikan oleh Tamu Agung kita P.J.M. Presiden Pakistan. Kehadiran beliau itu menambah sifat meriahnja upatjara ini dan menambah sifat kesedjarahan daripada penutupan sidang ini. Laksana penutupan sidang M.P.R.S., *Madjelis tertinggi didalam Republik Indonesia,* disaksikan oleh mata dunia luar, bahwa sidang itu telah menjelesaikan pekerdjaannja dengan tjara jang tidak bertélé-télé, dengan tjara jang gesit sekali, sebagai jang saja harapkan didalam amanat saja pada tanggal 10 Nopember jang lalu.

Dari Saudara Pd. Ketua saja telah mendapat laporan bahwa pekerdjaan Saudara-saudara sebagai sidang pertama ini telah selesai. Dan sebagai tadi dikatakan oleh Saudara Pd. Ketua, maka dengan selesainja pekerdjaan Saudara-saudara itu, sekarang Republik Indonesia telah mempunjai pegangan jang tegas dan djelas. *Pegangan ideologis* tegas dan djelas, *pegangan konsepsionil* tegas dan djelas, jang berupa Manipol Usdek, garis-garis besar daripada Amanat Pembangunan, garis-garis besar daripada Pola Pembangunan jang

telah dikaryakan oleh Dewan Perantjang Nasional. Maka saja mengutjap sjukur kehadirat Allah S.w.t., bahwa dengan ini terbukti dengan djelas dan tegas, bahwa *tjara bermusjawarah dan bermufakat* dapat didjalankan dengan sebaik-baiknja.

Saudara sekalian, tatkala kita membuka M.P.R.S. jang pertama, sidangnja jang pertama pada tanggal 10 Nopember jang lalu, sebagai jang saja katakan, sebenarnja kita telah mempunjai dugaan besar bahwa Manipol Usdek, garis besar daripada Pola Depernas, garis besar daripada Amanat Presiden jang telah diberikan kepada Depernas, akan dibenarkan oleh M.P.R.S.

Kita sekarang berdiri dihadapan *pintu gerbang daripada pelaksanaan* apa jang telah diputuskan oleh M.P.R.S. itu, dan pada saat kita menghadapi pintu gerbang jang telah kita lalui itu, Saudara-saudara telah melimpahkan satu kehormatan jang amat besar sekali kepada diri saja, oleh karena Saudara-saudaralah jang mengatakan bahwa saja ini bukan sadja Presiden Republik Indonesia, bukan sadja Panglima Tertinggi Angkatan Perang Republik Indonesia, tetapi Saudara-saudara menamakan saja djuga **PEMIMPIN BESAR DARIPADA REVOLUSI INDONESIA.**

Tatkala ketetapan jang pertama disampaikan kepada saja di Istana Bogor, telah saja sambut istilah Pemimpin Besar Revolusi Indonesia jang diberikan oleh Saudara-saudara kepada saja itu dengan rasa bukan sadja terima kasih, bukan sadja rasa terharu, tetapi djuga dengan rasa pertanggungan-djawab jang amat besar sekali.

Saja katakan, bahwa saja punja ambisi jang terbesar ialah sekedar untuk mendjadi *penjambung lidah* daripada Rakjat Indonesia. Penjambung lidah daripada rakjat jang menderita, penjambung-lidah daripada rakjat jang ingin mentjapai satu penghidupan jang lajak dan makmur, penjambung lidah daripada rakjat jang telah mendjalankan korbanan-korbanan jang amat pedih sekali untuk mentjapai apa jang saja katakan Amanat Penderitaan Rakjat. Maka sekarang, Saudara-saudara bukan sadja rupa-rupanja Saudara-saudara membenarkan ambisi saja itu, jaitu mendjadi penjambung lidah daripada Rakjat Indonesia, tetapi Saudara-saudarapun menamakan saja Pemimpin Besar daripada Revolusi.

Tanggung-djawab jang amat besar diletakkan oleh Saudara-saudara diatas pundak saja, dan tanggung-djawab itu saja rasakan sedalam-dalamnja, tetapi sebagai tadi saja katakan di Bogor pula, saja mengharap agar supaja saja, djikalau benar *diangkat oleh seluruh rakjat Indonesia* sebagai Pemimpin Besar Revolusi, supaja *rakjat itu mengikuti pimpinan* daripada Pemimpin Besar itu. Sebab hanja dengan rakjat jang bergerak setjara massal dengan satu pimpinan jang revolusioner, maka revolusi Indonesia akan mentjapai tudjuannja.

Saudara-saudara, Republik Indonesia telah berdjalan limabelas tahun lebih, dan dalam 15 tahun itu kita telah mengalami pasang-naik dan pasang-turun. Anggapan manusia diluar pagar kitapun mengalami pasang-naik dan pasang-surut. Adakalanja kita diagung-agungkan oleh dunia luar. Adakalanja kita ditjertja oleh dunia luar. Antara lain dikatakan bahwa kita sekarang ini telah meninggalkan alam demokrasi. Tetapi pada kenjataannja tidak benar demikian, Saudara-saudara. Bahkan harus saja katakan disini, bahwa sebenarnja Republik Indonesia ini adalah salah satu Republik jang *paling demokratis* diseluruh dunia. Tjoba pikirkan Saudara-saudara, lembaga demokrasi jang kita punjai, bukan satu bukan dua, bukan tiga, tetapi empat atau lima. Kita mempunjai D.P.R., jang saja namakan D.P.R.-G.R., satu lembaga demokrasi. Kita mempunjai Dewan Pertimbangan Agung, D.P.A., djuga satu lembaga demokrasi jang memberi pertimbangan-pertimbangan kepada Presiden. Kita mempunjai Depernas, Dewan Perantjang Nasional, satu lembaga demokrasi pula untuk menjusun pola. Kita mempunjai M.P.R., atau sekarang M.P.R.S., satu lembaga demokrasi jang tertinggi didalam Republik Indonesia. Kita mempunjai Kabinet, jang terdiri daripada Presiden dan pembantu-pembantunja jang tiap-tiap keputusan penting didalam Kabinet itu diambil pula dengan tjara musjawarah dan mufakat.

Maka dengan lembaga-lembaga ini ternjatalah bahwa Republik Indonesia berdiri diatas dasar demokrasi.

Ternjatalah salah sangkaan orang bahwa Republik Indonesia ini terutama sekali sesudah kita memasuki Manipol, Usdek, Demokrasi

Terpimpin dan lain-lain sebagainja, telah meninggalkan alam demokrasi itu. Hanjalah benar djikalau orang mengatakan bahwa kita tidak memakai sistim jang lazim dipakai oleh orang didunia luaran. Didunia luaran orang mengambil sesuatu keputusan majority diatas minority. Bahwa majority, lima puluh prosen, lebih satu, selalu benar dan lima puluh prosen kurang satu selalu salah.

Kita tidak membenarkan sistim jang demikian itu. Kita mengambil keputusan-keputusan dengan tjara musjawarah dan mufakat. Maka dengan demikian, meskipun berlainan sistimnja, tetapi tetap kita mendjundjung tinggi kepada alam demokrasi, mendjundjung tinggi kepada sebagai apa jang saja katakan, salah satu sumber daripada kekuatan kita sekalian.

Dengan mendjalankan sistim kita ini, jaitu sistim musjawarah dan mufakat, Saudara-saudara anggota daripada M.P.R.S., dibawah pimpinan Pd. Ketua dan Wakil-wakil Ketuanja, telah dengan gesit bekerdja. Dan disini saja mengutjapkan banjak terimakasih dan penghargaan kepada Saudara-saudara sekalian. Manakala saja tempo hari membuka saja punja topi, memberi salut kehormatan kepada Depernas, sekarang saja membuka topi, memberi salut kehormatan kepada M.P.R.S. Moga-moga tjaranja bersidang M.P.R.S., mendjadi tjontoh bagi lembaga-lembaga demokrasi kita seterusnja.

Saudara-saudara, didalam ketetapan-ketetapan Saudara-saudara *garis-garis besar* telah diletakkan. Diletakkan oleh Saudara-saudara dengan tjara jang gesit kataku. Diletakkan oleh Saudara-saudara dengan tjara mengingat benar-benar apa jang mendjadi harapan daripada Rakjat. Ditetapkan oleh Saudara-saudara dengan mengingat benar-benar apakah jang dituntut oleh revolusi. Revolusi berdjalan dengan tjepat, Saudara-saudara bekerdja dengan tjepat. Revolusi adalah kata orang satu „vazende inspiratie van de geschiedenis", satu inspirasi jang laksana taufan daripada sedjarah. Revolusi berdjalan dengan tjara jang demikian, Saudara-saudara pun bekerdja dengan tjara jang demikian. Revolusi mempunjai tudjuan dan harapan-harapan. Tiada sesuatu revolusi jang tidak mempunjai tudjuan dan harapan. Tiada sesuatu revolusi jang tidak mempunjai tudjuan dan harapan, dan Saudara-saudara tetap mengedjar tudjuan dan harapan itu.

Manakala tempo hari saja berkata, dengan M.P.R.S. atau tanpa M.P.R.S., revolusi akan berdjalan terus, malahan saja berkata, djanganlah revolusi berdjalan terus „over Uw Hoofden heen", djanganlah revolusi berdjalan terus dengan meliwati Saudara-saudara punja kepala, ternjatalah, bahwa M.P.R.S. telah bekerdja demikian rupa, sehingga harus dikatakan bukan revolusi itu berdjalan „over Uw Hoofden heen", tetapi revolusi berdjalan dengan Saudara-saudara sekalian.

Saudara-saudara ternjata mengerti benar-benar akan kehendak daripada revolusi. Revolusi kita adalah satu revolusi Rakjat, maka oleh karena itu M.P.R.S. adalah satu „*gempungan*" daripada Rakjat Depernas adalah satu „gempungan" daripada Rakjat. Lihat perbedaan Depernas kita ini dengan Dewan-dewan Perantjang diluar negeri.

Manakala diluar negeri Dewan-dewan Perantjangan terdiri daripada hanja orang-orang ahli sadja, hanja terdiri daripada expert-expert sadja, maka Depernas tersusun daripada wakil-wakil Rakjat jang sedjati. Putera-putera rakjat jang sedjati.

Didalam Depernas bukan sekedar expert jang berfikir, bukan sekedar expert-expert jang menentukan pola, tetapi pada hakekatnja rakjat menentukan pola, dan saja, bergembira sekali bahwa pola jang disusun oleh rakjat itu *dalam garis besarnja dibenarkan* pula oleh M.P.R.S. djuga. Satu gempungan daripada rakjat sebagai tadi saja katakan. Maka, sekarang kita telah sampai saat pelaksanaan. Dan tempo hari saja mengeluarkan harapan bahwa pada tanggal 1 Djanuari jang akan datang, Insja Allah S.w.t., kita mengajunkan tjangkul pembangunan jang pertama, dan bukan sadja sekedar mengajunkan tjangkul pembangunan jang pertama, tetapi disebutkan pula tempatnja, Pegangsaan Timur 56, tempat dimana Proklamasi Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dibatjakan.

Pernah sesudah saja mengutjapkan utjapan itu, saja memfikir-fikirkan. Djikalau M.P.R.S. selesai dengan pekerdjaannja didalam bulan Desember ini, sekarang adalah bulan Desember, sekarang adalah tanggal 7 Desember, tinggal 24 hari lagi, kita sampai pada tanggal 1 Djanuari 1961, tjangkul pertama itu kita ajunkan untuk

apa?. Telah dikatakan untuk *pembangunan*, tetapi pembangunan apa?. Dan tempatnja sudah ditentukan, di Pegangsaan Timur 56, dikota Djakarta. Saja berfikir beberapa malam lamanja, dan achirnja saja sampai kepada satu kesimpulan. Kesimpulan itu ialah, Pembangunan Semesta, apalagi Pembangunan Semesta Berentjana, sebagai jang ditentukan didalam Pola Depernas, dan jang garis-garis besarnja dibenarkan oleh M.P.R.S., Pembangunan Semesta Berentjana sematjam ini tidak bisa kita laksanakan tanpa *rakjat djelata*.

Tanpa seluruh rakjat Indonesia, tanpa ikut sertanja seluruh rakjat. Dan agar supaja seluruh rakjat kita ikut serta dengan tjara jang bersemangat, dengan tjara jang berkejakinan, dengan tjara mentjurahkan tenaganja berlimpah-limpah, maka *rakjat harus mengetahui apa jang akan kita bangun*. Rakjat harus mengerti dan mengetahui apa isinja Pola Pembangunan jang ditentukan oleh Depernas dan jang garis besarnja dibenarkan oleh M.P.R.S. Oleh karena itu beberapa hari jang lalu saja telah memberi perintah kepada ahli-ahli bangunan kita untuk membuatkan satu projek daripada satu gedung, jang saja namakan *Gedung Pola*.

Dan didalam Gedung Pola itu rakjat bisa melihat, visuil, apa jang akan dibangun. Didalam Gedung Pola itu kita akan melihat blueprint-blueprint, misalnja daripada Djatiluhur. Dan bukan sadja blueprint, tetapi maquete-maquete daripada Djatiluhur. Sehingga orang, rakjat Indonesia dari jang terpeladjar sampai jang paling rendah pengetahuannja, bisa melihat dengan tjara visuil apa jang sedang kita kerdjakan di Djatiluhur. Disitu pula akan kita lihat blueprint dan maquette dari pembangunan pabrik besi dan badja, jang akan kita dirikan disitu, agar disitu rakjat bisa melihat blueprint-blueprint dan maquet-maquet daripada tanur besar jang akan kita dirikan di Kalimantan dan lain-lain sebagainja.

Maka saja anggap inilah tempat jang sebaiknja untuk mengajunkan tjangkul kita jang pertama pada tanggal 1 Djanuari jang akan datang. Pembangunan daripada satu Gedung Pola di Pegangsaan Timur, agar supaja sebagai tadi saja katakan sebagai azas pembangunan kita ini dimengerti oleh rakjat, diketahui oleh rakjat dan oleh karenanja dapat mampu menggerakkan seluruh rakjat Indone-

sia ini agar mentjurahkan segenap tenaganja ikut membangun, agar supaja kita dengan segera sebagai tahapan jang pertama dan kemudian disusul oleh tahapan jang kedua menudju kepada pembangunan **MASJARAKAT SOSIALIS INDONESIA** jang adil dan makmur pula.

Saudara-saudara, maka dengan utjapan jang demikian ini dan dengan do'a kehadirat Allah S.w.t. agar supaja Allah S.w.t. selalu memberi taufik dan hidajah kepada kita umumnja, chususnja kepada saja, jang oleh Saudara-saudara diangkat mendjadi *pelaksana jang berkuasa penuh* daripada segenap ketetapan-ketetapan daripada M.P.R.S., maka saja hendak menutup atau memberi amanat sambutan kepada upatjara penutupan sidang pertama daripada M.P.R.S. ini.

Saudara-saudara, satu hal jang saja beritahukan kepada Saudara-saudara ialah, bahwa M.P.R.S., atau M.P.R., adalah satu Madjelis jang dituntut adanja oleh U.U.D. '45. Itu berarti bahwa bersidang atau tidak bersidang, M.P.R.S. *harus ada.* Bersidang atau tidak bersidang, M.P.R.S. atau M.P.R. harus ada. Itu berarti bahwa Saudara-saudara sesudah sidang pertama ini, sebagai M.P.R.S, tidak akan saja bubarkan. M.P.R.S. *berdjalan terus,* hanja sidangnja jang pertama pada saat sekarang ini hendak ditutup dan Saudara-saudara menunggu panggilan untuk hadir pada sidang jang kedua jang akan diadakan.

Demikian pula mengenai Depernas. Meskipun Depernas ini bukan suatu lembaga jang dikehendaki oleh U.U.D. '45, tetapi didalam Undang-undang Depernas itu disebut bahwa Depernas menilai dan mengawasi pelaksanaan daripada polanja, maka sebagai tempo hari saja katakan, Depernas selalu stand by. Saja minta agar supaja Depernas membentuk — ini saja utjapkan disini, supaja didengar oleh anggota-anggota Depernas, — Depernas saja harap supaja membentuk satu badan, satu *panitia pekerdja.* Djangan terlalu banjak anggotanja, panitia pekerdja ini jang selalu dekat kepada saja, harus selalu dekat kepada saja, untuk menilai, mengawasi pelaksanaan daripada pola Depernas jang garis besarnja telah dibenarkan oleh M.P.R.S. dan jang pelaksanaannja diserahkan

mutlak kepada Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang/ Pemimpin Besar Revolusi.

Sekian, Saudara Pd. Ketua, saja punja kata sambutan. Sekali lagi saja katakan, moga-moga Tuhan memberkati kepada kita sekalian.

Terima kasih.

Sesuai dengan tjatatan stenografis.

Sekertaris M.P.R.S.,

(Mr. Munadjat Danusaputro).

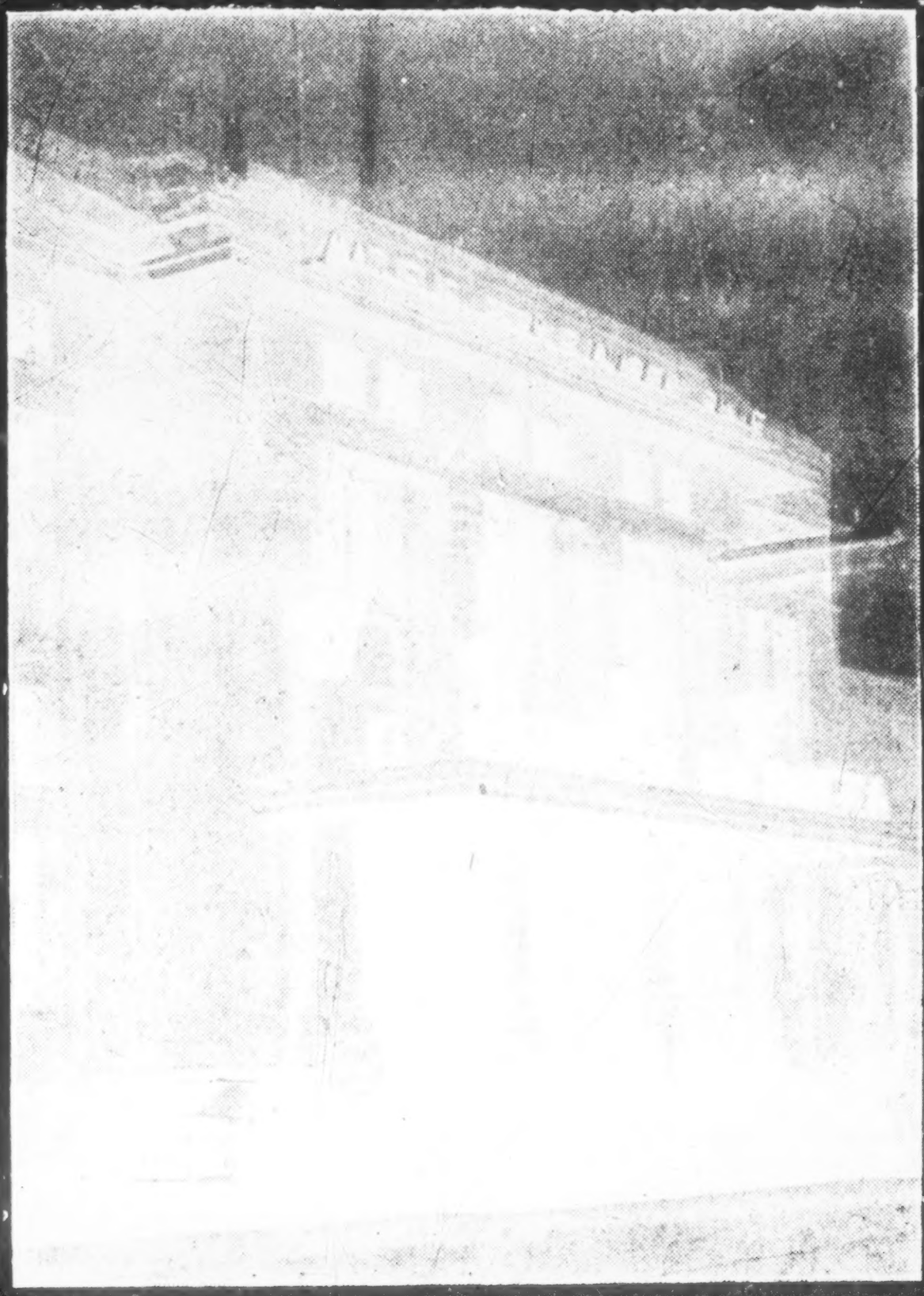

Gedung:

MADJELIS PERMUSJAWARATAN RAKJAT
Dj. Asia-Afrika 67, Bandung.

VII.

KATA PENUTUP.

Demikianlah telah diuraikan POKOK-POKOK AZASI dari Ketetapan M.P.R.S. No. I dan II/MPRS/1960, jang setelah U.U.D.-1945 merupakan PEGANGAN-DAN LANDASAN-HUKUM TER-POKOK dalam penjelenggaraan negara dan pembangunan negara Republik Indonesia.

Untuk pelaksanaannja, kedua Ketetapan itu oleh M.P.R.S. diserahkan kepada MANDATARIS, jaitu: Presiden, pada tanggal 21 Nopember 1960 di Istana Bogor dan pada tanggal 13 Desember 1960 di Istana Merdeka Djakarta.

Agar seluruh rakjat Indonesia dan djuga dunia luar mengetahui dan dapat mengikuti tanggapan Presiden/Mandataris terhadap penugasan M.P.R.S. itu, sebagai penutup RINGKASAN KETETAPAN M.P.R.S. No. I dan II/M.P.R.S./1960 ini, disertakan KEDUA pidato penjambutan Presiden Sukarno pada upatjara penjerahan kedua Ketetapan M.P.R.S. itu sebagai berikut:

PIDATO PENJAMBUTAN PRESIDEN SUKARNO
pada Upatjara Penjerahan Ketetapan M.P.R.S. No. I
di Istana Bogor, 21 Nopember 1960

Saudara Jang Mulia Pedjabat Ketua M.P.R.S.,

Saja amat bergembira sekali dan mengutjapkan terima kasih jang setinggi-tingginja kepada M.P.R.S. seluruhnja, bahwa dengan pimpinan saudara-saudara itu M.P.R.S. dengan amat tjepat sekali dapat mentjapai ketetapan jang amat penting. Ketetapan jang oleh M.P.R.S. sendiri, dinamakan ketetapan ke-I Rumawi dan jang sebagai saudara Pd. Ketua katakan berisikan pada pokoknja dua fungsi: pertama, ketetapan memperkuat garis besar haluan negara sebagai

jang terletak didalam Manifesto Politik. Kedua ketetapan pengakuan sebagai garis besar, garis haluan pembangunan apa jang saja amanatkan kepada Depernas pada tanggal 28 Agustus 1959. Ditambah dengan ketetapan, bahwa kepada saja dikuasakan penuh untuk melaksanakan apa jang ditetapkan dalam punt ke-I dan ke-II itu.

Pertama-tama saja mengutjapkan banjak terima kasih atas kelantjaran djalannja M.P.R.S. dibawah pimpinan saudara-saudara, sebab demikianlah memang saja pesankan kepada saudara-saudara pada saat saja membuka sidang pertama M.P.R.S. itu pada tanggal 10 Nopember jang lalu.

Kedua, saja mengutjap banjak terima kasih kepada seluruh M.P.R.S., bahwa dengan ini, dengan ketetapan Rumawi I itu, haluan negara jang tadinja oleh Pemerintah, oleh D.P.A., oleh Depernas telah dinjatakan sebagai garis besar haluan negara, sekarang diperkuat pula oleh M.P.R.S., sehingga telah terpenuhilah apa jang dituntut oleh U.U.D. '45 bahwa, garis besar daripada haluan negara ditentukan oleh Madjelis Permusjawaratan Rakjat. Demikian pula garis besar pembangunan negara jang saja amanatkan kepada Depernas pada tanggal 28 Agustus tahun jang lalu.

Maka sebagai kelandjutan daripada ketetapan-ketetapan ini kepada saja diberi *kekuasaan penuh* untuk melaksanakannja. Dalam memberi kekuasaan penuh kepada saja itu, saja merasa amat terharu sekali oleh ketetapan daripada M.P.R.S., bahwa saja ini dinamakan bukan sadja Presiden, bukan sadja Panglima Tertinggi Angkatan Perang, tetapi djuga **Pemimpin Besar Revolusi.** Saudara-saudara mengetahui, bahwa ambisi saja sebagai jang sudah saja utjapkan berkali-kali bukanlah untuk mendjadi Presiden, bukanlah untuk mendjadi Panglima. Tertinggi Angkatan Perang, tetapi sekedar untuk mendjadi Penjambung Lidah daripada rakjat. Ambisi saja jalah mengabdi kepada rakjat demikian rupa, sehingga segala apa jang dikenang-kenangkan oleh rakjat, jang dikandung oleh rakjat didalam kalbunja, saja bisa mendjadi penjambung lidah daripada rakjat itu. Karena saudara-saudara telah mengetahui hati dari utjapan-utjapan saja, bahwa apa jang dikandung didalam hati rakjat, apa jang diingini oleh rakjat, tetapi jang rakjat sebagai tiap-tiap rakjat didunia ini tidak tjukup mempunjai kemampuan

untuk mengutarakannja, jalah apa jang saja namakan Amanat Penderitaan Rakjat. Amanat Penderitaan Rakjat itulah apa jang mendjadi idam-idaman rakjat, keinginan rakjat jang didalam kalbunja rakjat. Maka ambisi saja jalah terutama sekali untuk mendjadi Penjambung Lidah daripada rakjat dalam mengutarakan apa jang terkandung didalam hatinja, jaitu Amanat Penderitaan Rakjat.

Sekarang M.P.R.S. sebagai **PERWAKILAN RAKJAT JANG TERTINGGI** didalam Republik Indonesia menjatakan dengan tegas dan djelas, bahwa saja dinamakan Pemimpin Besar Revolusi, artinja Pemimpin Besar Revolusi Rakjat Indonesia. Maka sebutan jang demikian ini, sebagai tadi saja katakan amat mengharukan sekali kepada saja. Dus sekarang saja bukan sadja diterima sebagai Penjambung Lidah daripada rakjat, tetapi M.P.R.S. sebagai Wakil Rakjat jang Tertinggi didalam perikehidupan ketata-negaraan kita ini mengangkat saja djuga sebagai Pemimpin Besar Revolusi, sehingga fungsi saja sekarang ini menurut kehendak M.P.R.S. bukan sekedar mengutarakan apa jang terkandung didalam kalbu rakjat, tetapi djuga dipersilakan memimpin rakjat agar supaja apa jang ditjita-tjitakan oleh rakjat itu, jaitu Amanat Penderitaan Rakjat, terlaksana. Hal ini bagi saja membawa konsekwensi jang amat berat, oleh karena sebagai saudara-saudara ketahui pimpinan membawa tugas-tugas, kewadjiban-kewadjiban jang berat, pertanggungan-djawab jang amat berat sekali. Memimpin adalah lebih berat daripada sekedar mengutarakan, apa jang diingini atau dikehendaki oleh rakjat. Saja sedar sekarang lebih daripada jang sudah-sudah sesudah M.P.R.S. mengangkat saja mendjadi Pemimpin Besar Revolusi, saja sedar sekarang, bahwa kewadjiban saja adalah amat berat sekali, tanggung-djawab saja adalah amat berat sekali, tetapi insja Allah S.w.t. saja terima pengangkatan sebagai Pemimpin Besar Revolusi itu dengan rasa tanggung-djawab jang setinggi-tinginja. Saja Insja Allah akan beri pimpinan kepada Indonesia ini setjara maksimal dibidang pertanggungan-djawab dan kemampuan saja, moga-moga Tuhan memberi bantuan kepada saja setjukup-tjukupnja.

Sebaliknja kepada rakjat hal inipun membawa konsekwensi. Djikalau benar dan demikianlah keputusan M.P.R.S. saja diangkat mendjadi Pemimpin Besar Revolusi, Revolusi Rakjat, maka saja mengharap daripada seluruh rakjat untuk mengikuti, melaksanakan memfi'ilkan segala apa jang saja berikan dalam pimpinan itu. Ibaratnja djikalau saja sekarang didjadikan djendral pada tentara, maka saja menuntut agar supaja seluruh tentara itu mengikuti pimpinan djendral itu.

Demikianlah saudara Pd. Ketua M.P.R.S. dengan gembira, dengan rasa terima kasih, dengan amat terharu, dengan resmi sekarang saja terima ketetapan M.P.R.S. kesatu huruf Rumawi sebagai jang terletak didalam naskah jang tadi saudara serahkan kepada saja.

Moga-moga Tuhan memberi pimpinan selandjutnja, chususnja kepada M.P.R.S., chususnja pula kepada saja, umumnja kepada seluruh rakjat Indonesia, jang hendak melaksanakan segala apa jang terkandung didalam hatinja dalam revolusi ini.

Sekian.

PIDATO PENJAMBUTAN PRESIDEN SUKARNO
pada Upatjara Penjerahan Ketetapan M.P.R.S. No. II di Istana Merdeka, 13 Desember 1960.

Jang Mulia Pd. Ketua M.P.R.S. serta para Jang Mulia Wakil-wakil Ketua M.P.R.S.

Beberapa saat jang lalu saudara telah menjerahkan kepada saja Ketetapan Rumawi II daripada M.P.R.S. Beberapa pekan jang lalu saudara-saudara telah menjampaikan kepada saja Ketetapan Rumawi I. Maka beberapa hari jang lalu sesudah saja mendapat laporan dari saudara Pd. Ketua bahwa karya M.P.R.S., tahapan pertama ini telah selesai, maka telah saja perlukan datang ke Sidang Pleno tahapan pertama jang achir daripada M.P.R.S. untuk mengutjapkan sambutan saja berhubung dengan selesainja karya M.P.R.S. tahapan pertama ini.

Segala sesuatu jang terkandung didalam hati saja telah saja utjapkan pada saat itu, jang pokoknja jalah bahwa dengan selesainja

karya M.P.R.S. tahapan pertama, maka kita bangsa Indonesia, Negara Republik Indonesia telah mempunjai dengan *resmi* dan *sah* satu **ideologi revolusi** dan **konsepsi revolusi.** Dan diatas dasar ideologi revolusi dan melalui djalan konsepsi revolusi itu kita meneruskan perdjalanan kita menudju kepada pemenuhan daripada Amanat Penderitaan Rakjat.

Kemarin saja telah tanda-tangani pula keputusan, bahwa *gedung Merdeka di Bandung tetap saja sediakan untuk M.P.R.S.* Sidang-sidangnja mungkin beberapa bulan lamanja tidak akan terdjadi, tetapi sebagai jang sudah saja katakan didalam amanat pada saat saja menjambut penutupan Sidang pertama, tahapan pertama M.P.R.S. itu, saja telah katakan bahwa M.P.R.S. sebagai satu **Lembaga Konstitusionil** tidak dibubarkan. Disamping itu kata saja, saja minta kepada Depernas untuk membentuk satu Panitia Kerdja atau Badan Kerdja jang sebagai ditentukan dalam Undang-undang Depernas akan mendjalankan penilaian dan pengawasan daripada pelaksanaan daripada blueprint jang telah — garis besarnja — diterima baik oleh M.P.R.S. itu.

Maka dengan ini Saudara-saudara, atas nama rakjat dan negara Republik Indonesia sekali lagi saja mengutjap penghargaan saja terhadap kepada M.P.R.S. jang telah berkarya dengan tjara jang demikian effektif serta gesitnja.

Sebagai saja katakan djuga didalam pidato beberapa hari jang lalu itu, maka telah saja perintahkan untuk membuat rantjangan daripada gedung pola jang ajunan tjangkul pertamanja untuk pembangunannja akan Insja Allah S.w.t. saja lakukan pada tanggal 1 Djanuari jang akan datang di Pegangsaan Timur 56. Maka saja perintahkan kepada semua instansi jang harus berusaha, harus bekerdja, harus membanting tulang dalam pembangunan jang polanja, garis besarnja telah ditentukan oleh M.P.R.S. itu, agar supaja nanti kira-kira pada tanggal 17 Agustus 1961, djikalau gedung pola ini mungkin satu bagian telah selesai, agar supaja telah bisa diisi gedung pola itu dengan blauwdruk-blauwdruk, maquet-maquet dan lain-lain sebagainja. Agar supaja pada tanggal 17 jang akan datang rakjat setjara visueel telah mulai bisa melihat apa jang hendak

kita bangun. Agar supaja sebagai sudah saja katakan didalam amanat saja beberapa hari jang lalu digedung M.P.R.S. itu, rakjat dapat dengan setjara gembira mentjurahkan segenap tenaganja membantu pelaksanaan daripada segala sesuatu jang telah dipolakan oleh Depernas, jang garis besarnja telah dibenarkan oleh M.P.R.S.

Sekali lagi, maka saja katakan sekarang, bahwa pertanggungan-djawab jang M.P.R.S. sebagai **LEMBAGA TERTINGGI DARIPADA REPUBLIK INDONESIA,** letakkan diatas pundak saja adalah satu pertanggungan-djawab jang amat berat sekali, tetapi pertama dengan ridho dan bantuan Allah S.w.t., kedua dengan bantuan seluruh rakjat Indonesia jang memang seluruh rakjat itulah sebenarnja jang mempunjai pola dan harus melaksanakan pola itu, ketiga dengan bantuan pembantu-pembantu saja jang duduk didalam Kabinet Kerdja, keempat dengan bantuan D.P.R.D.-G.R. jang dengan-nja saja akan mendjalankan pelaksanaan pembangunan itu, dengan tjara jang bantu-membantu serapat-rapatnja, saja pertjaja bahwa Insja Allah S.w.t. apa jang direntjanakan oleh pola pembangunan itu dalam 8 tahun telah terlaksana.

Kita sekarang telah mempunjai tempat mendjedjakkan kaki dengan setjara njata, jaitu pola ini, dan pola ini didasarkan atas satu ideologi revolusi jang sudah tegas dan njata pula, jaitu Manipol Usdek jang sebagai satu; dilihat daripada Manipol/Usdek itu amanat jang saja berikan pada Depernas tertulis dan tidak tertulis adalah satu garis pula.

Nah, sekarang segala sesuatu itu sudah djelas terang; bumi sudah terbentang dihadapan kita untuk mendjedjakkan kaki kita diatasnja. Marilah kita mengindjak bumi itu, berdjalan diatas bumi itu sampai kita mentjapai apa jang ditangiskan oleh rakjat kepada kita semua, jaitu pemenuhan daripada Amanat Penderitaan Rakjat itu adanja.

Sekali lagi Saudara Pd. Ketua, Saudara-saudara Wakil-wakil Ketua M.P.R.S., saja mengutjap banjak terima kasih atas pekerdjaan Saudara-saudara jang amat gesit dan effektif itu. Utjapan saja ini keluar dari lubuk hati saja jang sedalam dalamnja dan atas nama segenap bangsa Indonesia, jang memang mengawasi pekerdjaan

M.P.R.S. itu dari luar dan dari dalam dengan tjara jang seseksama-seksamanja, dengan menaruh harapan agar supaja M.P.R.S. benar-benar satu *Madjelis dari rakjat dan untuk rakjat*

Sekian.

Kedua pidato P.J.M. Presiden sesuai dengan rekaman Departemen Penerangan.

Sekertaris M.P.R.S.

(Mr. Munadjat Danusaputro).